



**GELIAT EKONOMI
ANAK BANGSA**

**MERETAS ASA
MENGGAJAI MIMPI**

Penulis :

Ririn Safitri - Fakhri Zakiy AW - Abdul Rahim Fikri - Mawaddah Sri. K
Rona Maratus S - Iqbal Tawakal - Leyly Gusmia - Firza Ramadhani
Annisa Tul Hasanah - Nanda Kevin Erlangga - Idul Saputra - Hanifa Humaira
Niko Hendrawan - Devita Sari S - Nur Suhaimi

Editor :

Dr. Aidil Alfin, M.Ag.

Prodi Ekonomi Islam

LP2M IAIN Bukittinggi

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA:

MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI

Penulis:

Ririn Safitri – Fakhri Zakiy AW – Abdul Rahim Fikri – Mawaddah Sri K
Rona Marastus S. – Iqbal Tawakal – Leyly Gusmia – Firza Ramadhani
Annisa Tul Hasanah – Nanda Kevin Erlangga – Idul Saputra – Hanifa Humaira
Niko Hendrawan – Devita Sari S – Nur Suhaimi

Editor:

Dr. Aidil Alfin, M.Ag.

**GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA:
MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI**

Penulis:

Ririn Safitri, Abdul Rahim Fikri, Mawaddah Sri Kharisma, dkk

Desain Cover:

Fakhri Zakiy A.W

Tata Letak:

Iqbal Tawakal

Tata Bahasa:

Iqbal Tawakal

ISBN: 978-602-6377-90-6

Cetakan Pertama:

Agustus 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by LP2M IAIN BUKITTINGGI

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

LP2M IAIN BUKITTINGGI

Kampus 2 IAIN BUKITTINGGI – Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kab. Agam Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia Tuhan yang melimpah kami dapat menyusun buku yang berjudul “GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA: Meretas Asa Menggapai Mimpi“ ini dengan baik, walaupun masih banyak kekurangan didalamnya.

Buku ini difokuskan pada penggerakan perekonomian daerah dan memberikan solusi yang difokuskan pada pendekatan Partisipasi Masyarakat, Pertanian, dan ancaman pembangunan daerah. Krisis ekonomi global akibat Pandemi covid-19, membuat kondisi perekonomian negara menjadi terganggu. Berangkat dari itu kami para penulis buku menggeliatkan ekonomi melalui program pengabdian masyarakat. Anak Bangsa tidak hanya mencari solusi kreatif saja, namun juga menjadi *Agent Of Change* bagi Bangsa dan Negaranya agar dapat keluar dari krisis ini. Berbagai upaya dilakukan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan konsumsi melalui APBN. Berbagai kebijakan dilakukan diantaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Dana Desa sejatinya arah kebijakan tersebut lebih kepada bagaimana masyarakat diberdayakan. Disatu sisi pemerintah melakukan inisiatif untuk mensosialisasikan dan disisi lain masyarakat harus pandai untuk menjemput berbagai program yang telah disalurkan pemerintah. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi pemerintah pusat untuk memberikan edukasi pemerintah daerah, bagaimana dapat memberdayakan masyarakat dengan mengatur dan mengelola dana desa atau dana lainnya yang telah disalurkan sehingga dapat efektif untuk perekonomian masyarakat. Peran Perguruan Tinggi dan Mahasiswa dalam pemulihan ekonomi bangsa yakni bertindak sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan teori dan ilmu yang dimiliki, seperti meningkatkan daya beli atau laju ekonomi terutama pada UMKM di desa atau nagari yang sedang mengalami kelesuan.

Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan Terima Kasih kepada Ketua LP2M IAIN Bukittinggi Bapak Dr. Afrinaldi, MA. yang telah memberikan

kesempatan berupa fasilitas dalam program Pengabdian Keilmuan KKN-DR 2021. Selanjutnya kepada Badan Pelaksana (BP) program ini yaitu Bapak Tafkir, M.Ag dan Ibu Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si, Ph.D yang telah memberikan arahan dalam penulisan buku ini. Dan kepada Bapak Dosen Dr. Aidil Alfin, M.Ag selaku Pembimbing Lapangan (DPL) kami, Terima Kasih kami ucapkan berkat bimbingan dan masukan yang telah bapak berikan sehingga penulisan buku ini selesai dengan baik.

Tak ada gading yang tak retak karenanya kami sebagai tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari sisi materi maupun penulisannya. Kami dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima berbagai masukan maupun saran yang bersifat membangun yang diharapkan berguna dan dapat menjadi referensi bagi seluruh pembaca.

Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya.

Bukittinggi, 30 Juli 2021

Tim Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
Abdul Rahim Fikri: <i>Penerapan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kecamatan Malalak.....</i>	2
Annisa Tul Hasanah: <i>Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nagari Manggopoh (Jorong Anak Air Dadok) dengan Model Agribisnis pada Kebun Kelapa Sawit.....</i>	19
Devita Sari Siregar: <i>Peluang Bisnis Catering di Masa Pandemi dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam).....</i>	36
Fakhri Zakiy AW: <i>Problematika Pengusaha Heler di Nagari Cupak pada Masa Pandemi Covid-19.....</i>	55
Firza Ramadhani: <i>Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin di Masa Pandemi Covid-19 ..</i>	64
Hanifa Humaira: <i>Standarisasi Penerima BLT Dana Desa pada Masa Covid-19 di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang.....</i>	81
Idul Saputra: <i>Upaya Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Nagari Panti.....</i>	100
Iqbal Tawakal: <i>Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Nagari Pasie Laweh.....</i>	118
Leyly Gusmia: <i>Trand Menanam Kelapa Sawit untuk Menambah Pemasukan Masyarakat Dusun Pasar Baru.....</i>	135
Mawaddah Sri Kharisma: <i>Peran Media Sosial dalam Menggerakkan Usaha Rumah Tangga di Komplek Villa Anggrek Air Dingin Dalam Menghadapi Pandemi.....</i>	153

Nanda Kevin Erlangga: <i>Animo Peran Pemuda dalam Penggerak UMKM terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Genteng</i>	171
Niko Hendrawan: <i>Urgensi Akses Jalan dalam Peningkatan Pendapatan Petani Karet di Jorong Rurapatontang Nagari Parik</i>	190
Nur Suhaimi: <i>Dendeng Daun Singkong Ikon Ekonomi Kelompok UPPKA di Jorong Koto Bakti.....</i>	212
Ririn Safitri: <i>Analisis Dampak Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) terhadap Pengentasan Kemiskinan pada Nagari Ujunggading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.....</i>	231
Rona Maratus Salimah: <i>Peran Kelompok Tani Boncah Saiyo dalam Meningkatkan Perekonomian Anggotanya di Jorong Pulutan</i>	255
BIODATA PENULIS.....	273



01



ABDUL RAHIM FIKRI

*Penerapan Kebijakan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
Bagi Masyarakat Terdampak
Covid-19 Di Kecamatan Malalak*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



PENERAPAN KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 DI KECAMATAN MALALAK

Abdul Rahim Fikri

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan respon pemerintah dalam meminimalisir dampak Covid-19 bagi masyarakat yang ada di desa, dalam tahap awal pelaksanaannya ditemukan masalah adanya protes masyarakat terhadap aparat desa yang dianggap tidak mampu melaksanakan kebijakan BLT Dana Desa dengan baik, bahkan di beberapa desa berujung kepada perusakan kantor desa. Atas dasar tersebut artikel ini ditujukan untuk menganalisis masalah yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa guna mengenali isu dan tantangan agar menjadi bahan perbaikan. Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa setidaknya terdiri dari 3 (tiga) faktor yang terdiri dari kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan Covid-19, manfaat dari pemberian BLT Dana Desa serta sistem tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan BLT Dana Desa.

Kata kunci: *BLT, Desa, Covid 19*

Abstract

The Village Fund Direct Cash Assistance is the government's response in minimizing the impact of COVID-19 for communities in the village. In the initial stages of its implementation, there were problems such as community protests against village officials deemed unable to implement the village fund-cash transfer policy properly, even in some villages, community attitudes led to the destruction of village offices. On this basis, this article is intended to analyze problems in implementing the village fund-cash transfer to identify issues and challenges so that the policy can be improved. The writing method in this article uses a qualitative approach with descriptive analysis methods. The results revealed that the issue in the implementation of the village fund-cash transfer policy consisted of at least 3 (three) factors, namely government capacity, target communities and the mechanism of the implementation process. The challenges in implementing the village fund-cash transfer policy are the proportionality of the village budget in tackling COVID-19, the benefits of

the village fund-cash transfer and the community's responsibility system in utilizing the village fund-cash transfer policy.

Key word: BLT, Village, Covid-19

A. PENDAHULUAN

Wabah COVID-19 telah menginfeksi lebih dari 1.5 (satu setengah) juta jiwa yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, hal ini tidak hanya memberikan dampak kepada kondisi kesehatan masyarakat, tetapi juga telah memberi dampak kepada aspek lainnya khususnya bagi penyelenggaraan kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan masyarakat secara umum yaitu adanya batasan aktivitas sosial sebagai bagian dari upaya penerapan kebijakan penanggulangan wabah COVID-19. Masyarakat dalam melakukan aktivitas di ruang publik seperti kegiatan sosial dan perdagangan diharuskan tunduk kepada protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 seperti menjaga jarak fisik dan menggunakan masker. Dampak dari adanya COVID-19 yang jauh lebih besar dirasakan di daerah-daerah yang diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana pemerintah membatasi akses masyarakat mulai dari mobilitas penduduk sampai dengan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti di Provinsi Jakarta dan Provinsi Jawa Barat yang mana setiap jenis usaha yang tidak menunjang keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok dan kesehatan masyarakat dilarang beraktivitas.

Penerapan kebijakan PSBB tersebut mengakibatkan masyarakat tidak banyak memiliki pilihan terkecuali untuk tetap tinggal didalam rumah sebagaimana telah diinstruksikan oleh pemerintah. Masalah dampak COVID-19 tersebut apabila dilihat dari perspektif mobilitas antara kota dengan desa maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang ada di perkotaan jauh lebih terdampak dibandingkan dengan masyarakat yang ada di perdesaan, hal ini didasarkan kepada realitas bahwa selama ini mobilitas penduduk yang ada atau tinggal di perkotaan jauh lebih tinggi dibanding dengan mobilitas penduduk yang ada di perdesaan, sehingga penerapan kebijakan PSBB jauh lebih terdampak kepada masyarakat yang ada di perkotaan. Kondisi ini sejalan dengan data tentang penyebaran COVID-19 yang mana masyarakat yang terinfeksi COVID-19 lebih banyak berada di wilayah perkotaan dibandingkan dengan yang ada di wilayah perdesaan, khususnya di wilayah Pulau Jawa.

Dampak COVID-19 yang dirasakan lebih banyak bagi masyarakat yang ada di perkotaan apabila dibandingkan dengan di perdesaan tersebut tidak menjadikan masyarakat yang ada di

perdesaan tidak terdampak sama sekali, hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa alasan yang antara lain, yaitu: Pertama, banyak penduduk yang ada di desa memiliki pekerjaan di kota baik pekerjaan sektor formal maupun pekerjaan sektor informal, sehingga adanya batasan aktivitas yang ada di kota akan berdampak kepada aktivitas masyarakat desa yang bekerja di kota. Kedua, desa selama ini dijadikan sektor pendorong perekonomian yang ada di kota, seperti penyediaan kebutuhan pokok (pertanian, perkebunan, perikanan) dan jasa. Adanya penurunan terhadap kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh desa berdampak kepada penurunan penghasilan masyarakat desa, khususnya yang bergerak di bidang penyediaan barang/produk bagi penduduk di kota. Ketiga, masyarakat desa dalam memenuhi mata pencaharian lebih banyak menggantungkan kepada sektor informal, tidak sedikit dari masyarakat desa tersebut bermata pencaharian sebagai buruh serabutan di desa, sehingga penurunan aktivitas perekonomian di desa akan mengakibatkan penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di desa. Uraian mengenai dampak COVID-19 apabila dibandingkan antara desa dengan kota memiliki kesamaan yang mana baik masyarakat yang tinggal di kota maupun masyarakat yang tinggal di desa sama-sama terdampak COVID-19 dan mengalami kerugian selama pandemi COVID-19. Dampak dari wabah COVID-19 yang ada mendorong adanya perhatian dari pemerintah bagi masyarakat baik yang ada di kota maupun yang ada di desa, pemerintah menyelenggarakan berbagai bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 baik berupa pemenuhan bahan kebutuhan pokok maupun berupa pemberian uang tunai. Kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat agar tetap dapat menjalankan keberlangsungan hidupnya di masa pandemi COVID-19.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan dampak COVID-19 di desa yaitu dengan dilaksanakannya kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana dananya berasal dari dana desa atau disebut dengan BLT Dana Desa. Kebijakan BLT Dana Desa tersebut di satu sisi diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19, akan tetapi disisi lain tidak bisa dipungkiri adanya peluang penyalahgunaan dana desa yang akan terjadi baik secara disengaja maupun secara tidak disengaja oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan BLT Dana Desa, baik itu dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa maupun dari unsur masyarakat itu sendiri. Pernyataan tersebut diatas didasarkan kepada kebijakan bantuan sosial yang telah dilaksanakan selama ini seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai masalah mulai dari kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan,

permasalahan dalam proses penyaluran bantuan BLT kepada masyarakat, sampai dengan dampak dari pemberian BLT yang kurang sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dalam beberapa kasus program bantuan sosial dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu.

Permasalahan kebijakan BLT yang terjadi sebelumnya menunjukkan kesesuaian dengan masalah yang muncul dari pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama yang telah dilaksanakan di beberapa wilayah, berbagai permasalahan yang telah muncul antara lain, yaitu: Pertama, adanya keterlambatan pencairan BLT Dana Desa tahap pertama yang terjadi di Malalak utara Kecamatan Malalak, sehingga masyarakat melakukan protes dengan cara mendatangi kantor Wali Nagari untuk menanyakan kepastian mengenai proses pencairan dana BLT Dana Desa. Permasalahan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa tersebut tidak bisa dipahami sebagai masalah sektoral yang secara aksidental terjadi di daerah tertentu saja, tetapi perlu dikaji lebih lanjut dalam konteks yang lebih luas yaitu suatu proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa secara menyeluruh dalam lingkup nasional, sehingga permasalahan serupa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa mampu diminimalisir oleh pemerintah melalui perbaikan instrumen kebijakan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa di tahap-tahap berikutnya. Upaya untuk mengkaji BLT Dana Desa yang dilakukan di berbagai daerah akan mampu mengkonstruksikan pemahaman mengenai isu dan kendala dalam pelaksanaan BLT Dana Desa. Permasalahan BLT Dana Desa apabila dikaji dalam perspektif kebijakan publik maka menunjukkan adanya implementasi kebijakan yang tidak berjalan sebagaimana tujuan awal yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan adanya isu yang muncul menjadi indikator dari permasalahan dalam proses implementasi kebijakan yang harus direspon oleh pemerintah.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang mana analisis terhadap permasalahan kebijakan BLT Dana Desa dilakukan dengan cara penguraian kata-kata secara deskriptif yang terdiri dari uraian mengenai isu permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama di Kecamatan Malalak dan tantangan seperti apa yang muncul guna mewujudkan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yang sesuai dengan tujuan penyusunan kebijakan yaitu untuk mengurangi beban masyarakat terdampak COVID-19 yang ada di tingkat desa, agar dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya

di tengah wabah COVID-19. Sumber data terdiri dari 2 (dua) yaitu: Pertama, sumber data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama di Kecamatan Malalak. Kedua, data sekunder yang mana digunakan berbagai sumber referensi yang relevan seperti dari buku, jurnal peraturan perundang-undangan dan lainnya yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu BLT Dana Desa yang tengah dilaksanakan saat ini.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan yang mana keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara keseluruhan untuk kemudian dipilah menjadi bagian-bagian data yang disesuaikan dengan penyajian analisis, bagian data dari tiap bagian-bagian analisis diuraikan dan diinterpretasikan untuk kemudian diambil intisari dari tiap bagian analisis tersebut yang membentuk kesimpulan yang menyeluruh. Data yang didapat dari sumber sekunder tersebut kemudian dilakukan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi yang mana data akan di check, antara satu dengan yang lainnya sehingga menghasilkan kebenaran.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia telah menyebar ke desa-desa dan memberikan dampak negatif khususnya bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di lingkungan perdesaan. Baik pemerintah desa maupun masyarakat desa menghadapi masalah akan dampak COVID-19 yang secara langsung berpengaruh secara buruk terhadap kegiatan dari masing-masing pihak, sehingga aktivitas yang dilaksanakan menjadi terbatas apabila dibandingkan dengan sebelum adanya penyebaran COVID-19.

Fungsi dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang lainnya mengalami hal yang sama sebagai dampak dari adanya penyebaran COVID-19. Meskipun demikian bagi desa-desa yang belum atau tidak terinfeksi COVID-19 di Kecamatan Malalak tetap menyelenggarakan fungsi pemerintahan seperti biasanya dengan menekankan kepada pelaksanaan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19. Kedua, aspek pembangunan desa. Pembangunan desa menjadi salah satu aspek yang terdampak COVID-19 yang mana berbagai program pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi di masa COVID-19, pemerintah desa yang ada di Kecamatan Malalak harus meninjau ulang dan menyusun kembali program pembangunan desa baik yang bersifat pembangunan fisik maupun pembangunan non-fisik yang telah direncanakan dalam tahun anggaran

sebelumnya untuk kemudian mengakomodasi adanya program penanggulangan COVID-19. Proses perubahan program pembangunan tersebut menjadi tidak mudah mengingat proses penyusunan pembangunan merupakan proses panjang yang dimulai dari tahap musyawarah dusun hingga kepada tahap musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang menghadirkan para pemangku kepentingan di tingkat desa.

Penyusunan ulang program pembangunan dimungkinkan untuk tidak dapat berjalan dengan optimal, terlebih lagi melaksanakan program pembangunan infrastruktur desa apabila dihadapkan kepada kondisi pandemi COVID-19, khususnya bagi desa-desa yang warga masyarakatnya terinfeksi COVID-19. Ketiga, aspek pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilaksanakan di desa yang ada di Kecamatan Malalak lebih kepada proses pemberdayaan secara langsung yang menghadirkan masyarakat dalam jumlah yang besar, kondisi adanya penyebaran COVID-19 yang melarang masyarakat untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak menyulitkan terselenggaranya proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa mengupayakan proses pemberdayaan masyarakat dalam kelompok yang lebih kecil, maupun secara virtual dengan segala keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang ada di desa. Keempat, aspek pembinaan masyarakat. Sama halnya dengan aspek pemberdayaan masyarakat yang mana sulit terselenggara secara fisik di masa pandemi COVID-19, maka proses pembinaan masyarakatpun mengalami hambatan.

Pemerintah desa akan memiliki masalah dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat secara langsung mengingat kondisi yang ada di masyarakat sedang dalam keadaan tidak normal yang mengharuskan menjaga jarak antara satu warga dengan warga lainnya, serta adanya ketakutan warga masyarakat apabila berkumpul dalam jumlah yang banyak maka akan dapat menimbulkan penyebaran COVID-19 selama berlangsungnya kegiatan pembinaan. Bidang kedua yang terdampak COVID-19 ditingkat desa yaitu bidang kemasyarakatan yang menyangkut pola hidup dan pola komunikasi masyarakat. Dampak yang bisa dirasakan terhadap bidang kemasyarakatan setidaknya terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek kesehatan masyarakat, aspek aktivitas (perekonomian) masyarakat dan aspek hubungan sosial masyarakat. Penjelasan mengenai ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, aspek kesehatan masyarakat. COVID-19 merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh adanya virus. Penyebaran COVID-19 yang mana telah menginfeksi warga masyarakat dibanyak daerah, termasuk didalamnya ditingkat desa telah memberikan

keresahan kepada masyarakat yang mana masyarakat memiliki kekhawatiran akan dapat terinfeksi COVID-19.

Adanya penyebaran COVID-19 yang sudah ketingkat desa disatu sisi tidak hanya memberikan dampak buruk kepada kesehatan masyarakat, dalam beberapa hal telah memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang antara lain masyarakat desa saat ini jauh lebih memiliki kesadaran dan memperhatikan masalah kesehatan terutama pola hidup sehat seperti rajin mencuci tangan. Kedua, aspek aktivitas (perekonomian) masyarakat. Adanya batasan sosial (*social distancing*) sebagai upaya penanggulangan COVID-19 memberi dampak langsung kepada aktivitas masyarakat desa yang ada di Kecamatan Malalak yang mana masyarakat tidak memiliki kebebasan secara normal untuk melakukan kegiatannya seperti berkebun dan bercocok tanam, warga masyarakat diharuskan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dalam melakukan aktivitasnya. Adanya batasan aktivitas masyarakat yang ada di desa secara langsung berdampak kepada penurunan aktivitas perekonomian seperti adanya penurunan permintaan produk pertanian mengakibatkan warga masyarakat yang ada di desa menghentikan atau mengurangi aktivitas mereka yang pada akhirnya mengurangi pendapatan atau penghasilan masyarakat. Kondisi menurunnya permintaan produk pertanian juga dialami oleh beberapa petani di daerah lainnya yang mana dikarenakan sepiya permintaan terhadap sayuran maka para petani membagikan sayuran kepada masyarakat atau bahkan membuangnya ke sungai. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa COVID-19 berdampak kepada kehidupan perekonomian masyarakat yang ada di desa mengingat selama ini masyarakat desa menjadi penghasil produk-produk pertanian, perkebunan dan perikanan untuk meyokong kebutuhan masyarakat yang ada di kota. Ketiga, aspek hubungan sosial masyarakat. Masyarakat desa sebagaimana dapat dilihat melalui berbagai penelitian seperti hasil penelitian dari Angkasawati (2015) menunjukkan adanya ikatan sosial yang erat, sistem sosial masyarakat desa dibangun atas dasar kekerabatan yang erat sehingga interaksi diantara sesama warga masyarakat terjalin dengan baik dan intens.

Adanya penyebaran COVID-19 yang mengharuskan masyarakat untuk menjaga jarak antar satu orang dengan orang yang lainnya mengakibatkan proses komunikasi dan interaksi antara sesama warga masyarakat di perdesaan menjadi berkurang, sehingga berdampak langsung kepada penurunan interaksi sosial (secara fisik) yang selama ini sudah terbangun dengan baik. Meskipun demikian adanya penyebaran COVID-19 belum diketemukan pemberitaan maupun hasil penelitian yang menyatakan penurunan interaksi sosial di desa-desa yang berada di Kecamatan Malalak

mengakibatkan kepada penurunan rasa kekerabatan diantara sesama warga masyarakat, justru kondisi adanya masyarakat yang terdampak COVID-19 menumbuhkan sikap tolong menolong diantara sesama warga masyarakat untuk membantu warga yang kurang mampu atau membutuhkan. Di sisi lain adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga memberikan dampak kepada peralihan media komunikasi masyarakat yang selama ini dilakukan secara tatap muka beralih menggunakan media sosial secara virtual.

Isu dalam Implementasi Kebijakan BLT Dana Desa

Isu dalam konteks kebijakan publik tidak memiliki artian sebagai “kabar burung” yang selama ini dikenal secara luas, melainkan kepada sebagai masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat, sehingga isu dalam konteks ini dapat dipersamakan sebagai masalah kebijakan atau *policy problem*, masalah kebijakan muncul dari adanya kesenjangan suatu kebijakan yang harus dicarikan solusinya. Isu publik dikaitkan dengan BLT Dana Desa diartikan sebagai kesenjangan antara substansi kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan realita yang ada di masyarakat, dengan begitu maka isu BLT Dana Desa menyangkut bagaimana proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa direspon oleh masyarakat atau dalam konteks kebijakan publik disebut sebagai implementasi kebijakan yang mana dalam realitasnya berupa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa.

Pemahaman tersebut mengemukakan bahwa implementasi kebijakan publik pada dasarnya akan selalu dihadapkan kepada 2 (dua) faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat yang mana pada akhirnya kedua faktor tersebut akan menentukan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan. Lebih lanjut mengemukakan bahwa setidaknya terdapat dua faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu faktor substansi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan. Didasarkan kepada permasalahan tersebut maka implementasi kebijakan BLT Dana Desa akan terkait langsung dengan faktor substansi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan yang akan menentukan bagaimana kebijakan BLT Dana Desa dilaksanakan. BLT Dana Desa sebagaimana kebijakan pemerintah yang telah dilaksanakan dihadapkan kepada permasalahan selama pelaksanaannya, meskipun kebijakan BLT Dana Desa baru memasuki tahap awal atau tahap pertama akan tetapi telah direspon secara beragam oleh masyarakat.

Kedepannya pelaksanaan BLT Dana Desa dimungkinkan akan dihadapkan kepada berbagai masalah yang akan menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut, berikut adalah beberapa

isu yang muncul dari pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yang tengah dilaksanakan di Kecamatan Malalak baik yang berasal dari faktor substansi kebijakan dan faktor lingkungan kebijakan: Pertama, menyangkut kapasitas pemerintah desa. Desa sebagai institusi pemerintah terbawah yang langsung berhadapan dengan masyarakat harus menjalankan keempat fungsi secara bersinergis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu fungsi pemerintahan, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan dan fungsi pembinaan. Pelaksanaan keempat fungsi tersebut dalam praktiknya dihadapkan kepada adanya keterbatasan dari aparatur pemerintah desa baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Adanya penyebaran COVID-19 ketingkat desa berimplikasi kepada bertambahnya agenda dan program pemerintah desa. Kebijakan BLT Dana Desa menjadikan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Malalak memiliki agenda lebih yang harus dilaksanakan dalam kaitannya dengan penanggulangan COVID-19, belum lagi kebijakan serupa yang datang dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Pra Kerja dan program-program lainnya yang secara langsung berhubungan dengan kebijakan penanggulangan COVID-19. Menjadi permasalahan kemudian yaitu adanya keterbatasan kapasitas pemerintah desa yang ada di Kecamatan Malalak dalam melaksanakan berbagai kebijakan tersebut dalam kurun waktu yang relatif bersamaan. Kedua, masyarakat sasaran. Menentukan masyarakat sasaran yang berhak menerima bantuan BLT Dana Desa bukan merupakan hal yang mudah dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Malalak, mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan tidak hanya dari aspek ketidakmampuan ekonomi tetapi juga dari aspek dampak COVID-19 terhadap kehidupan masyarakat.

Pengukuran dampak COVID-19 bagi masyarakat harus benar-benar dilakukan sehingga akan menghasilkan kriteria masyarakat sasaran yang layak menerima bantuan BLT Dana Desa. Proses seleksi masyarakat yang didasarkan kepada kriteria yang telah disusun oleh pemerintah desa yang ada di Kecamatan Malalak dilakukan secara transparan sehingga masyarakat dapat memahami dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa bahwasanya proses seleksi atau penetapan masyarakat sasaran telah dan akan terus dilakukan secara profesional dan tanpa adanya unsur nepotisme atau keberpihakan kepada sekelompok tertentu.

Sikap yang ditunjukkan oleh pemerintah desa tersebut disikapi dengan berbeda oleh sebagian masyarakat yang mana adanya masyarakat yang merasa dirinya layak untuk mendapatkan bantuan

sosial akan tetapi tidak terdata sebagai masyarakat yang menerima bantuan sosial dana desa. Hal ini menjadi masalah yang terus berulang berdasar kepada pelaksanaan kebijakan serupa sebelumnya, pemerintah desa yang ada di Kecamatan Malalak dihadapkan oleh keluhan dan protes dari masyarakat mengenai dirinya yang tidak masuk kedalam masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Permasalahan tersebut di desa-desa yang ada di Kecamatan Malalak dapat diselesaikan dengan cara berdialog antara aparat pemerintah desa dengan masyarakat, meskipun demikian di daerah lain berujung kepada sikap yang melanggar aturan yang mana ditemukan warga yang merusak kantor desa sehingga penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa terganggu, juga ditemukan adanya kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak menerima bantuan kepada masyarakat yang menerima bantuan yang berakibat kepada munculnya kerenggangan sosial.

Berdasarkan kepada uraian permasalahan tersebut di atas, maka isu penyusunan kriteria masyarakat penerima bantuan menjadi isu yang ada di desa-desa Kecamatan Malalak yang mana berujung kepada sikap protes masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa, sehingga dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa tahap selanjutnya harus benar-benar memperhatikan kesesuaian antara data penerima bantuan BLT Dana Desa dengan kondisi sebenarnya yang ada di masyarakat. Proses penyusunan dan penentuan masyarakat sasaran penerima BLT Dana Desa yang ada di Kecamatan Malalak kedepannya juga harus dibarengi dengan sistem pengawasan secara terpadu dan dilakukan disetiap jenjang atau level pemerintahan, mulai dari level pendataan di tingkat Jorong sampai dengan nantinya menjadi data di tingkat Kecamatan.

Pengawasan terhadap proses pendataan masyarakat yang berhak menerima bantuan ini menjadi penting guna meminimalisir kesalahan dalam penetapan masyarakat sasaran sehingga bantuan BLT Dana Desa dapat diberikan kepada masyarakat yang dalam kehidupan kesehariannya berhak dan tepat membutuhkan bantuan BLT Dana Desa dari pemerintah. Ketiga, mekanisme proses pelaksanaan. Beberapa kebijakan serupa dengan BLT Dana Desa telah dilakukan oleh pemerintah yang mana dalam proses pelaksanaannya memunculkan berbagai permasalahan selama pelaksanaan program dan sesudah pelaksanaan program, permasalahan ini terjadi kembali dalam proses pelaksanaan BLT Dana Desa yang tengah dilaksanakan di desa-desa yang ada di Kecamatan Malalak, seperti mengenai kejelasan administrasi kependudukan warga masyarakat yang menerima bantuan, lamanya proses pencairan dana BLT Dana Desa serta berbelitnya prosedur pencairan dana desa. Permasalahan yang ada di Kecamatan Malalak tersebut sejalan dengan pernyataan Wali Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengungkapkan bahwa beberapa

isu yang muncul dalam pelaksanaan BLT Dana Desa seperti adanya pergantian kepala desa yang kemudian menghambat pencairan BLT Dana Desa kepada masyarakat sasaran, kemudian banyaknya program dari pemerintah pusat yang masuk ke desa seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja, kesemua program tersebut harus diselenggarakan oleh pemerintah desa sehingga beberapa pemerintah desa lebih mendahulukan melaksanakan berbagai program dari pemerintah pusat terlebih dahulu. Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi diperkuat oleh Kepala Perwakilan Ombudsman yang menyatakan bahwa pelaksanaan yang muncul yaitu seperti bagaimana bagi masyarakat sasaran yang tidak memiliki rekening di bank, seperti apa mekanisme pencairannya dan memastikan bahwa BLT Dana Desa diterima oleh warga masyarakat yang bersangkutan, kemudian bagaimana dengan beberapa kepala keluarga yang masih terdata dalam satu kartu keluarga yang sama mengingat di tingkat desa masih ditemukan administrasi kependudukan yang belum diperbaharui.

Protes masyarakat mengenai pelaksanaan BLT Dana Desa juga salah satunya dikarenakan tidak adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang mana masyarakat selama ini akan langsung mendatangi Kepala Desa atau aparatur desa, sedangkan dalam aturan pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa belum diatur bagaimana prosedur pengaduan masyarakat dan kepada siapa saja masyarakat dapat mengadukan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan BLT Dana Desa sehingga pengaduan tersebut dapat diproses sebagaimana mestinya. Atas dasar tersebut, sekalipun permasalahan tersebut tidak terjadi di desa-desa yang ada di Kecamatan Malalak, akan tetapi sikap antisipatif harus terus diupayakan baik itu oleh pemerintah daerah Kecamatan Malalak maupun oleh pemerintah desa yang menyelenggarakan kebijakan BLT Dana Desa.

Berdasarkan kepada isu yang muncul dalam implementasi kebijakan sebagaimana dijelaskan tersebut di atas, maka implementasi kebijakan BLT Dana Desa di Kecamatan Malalak dipengaruhi dua faktor, yaitu: Pertama, secara substansi kebijakan yang mana substansi mengenai penetapan kriteria masyarakat penerima bantuan dan mekanisme proses pelaksanaan penyaluran bantuan dana desa perlu diatur lebih lanjut secara komprehensif, rinci dan operasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi pemerintah desa dan dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat, sehingga akan menghindari sikap curiga masyarakat kepada pemerintah desa. Kedua, faktor lingkungan kebijakan dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa perlu adanya keterbukaan/transparansi mengenai implementasi kebijakan BLT Dana Desa sehingga pihak-pihak yang terlibat baik

pemerintah desa maupun masyarakat mengetahui keseluruhan proses implementasi kebijakan BLT Dana Desa.

Tantangan Kebijakan BLT Dana Desa dalam Penanggulangan COVID-19

Masalah COVID-19 secara empiris bukan satu-satunya masalah yang ada di tingkat desa, mengingat setiap desa memiliki masalah dan tantangannya masing-masing. Wabah COVID-19 tidak menyebar diseluruh wilayah perdesaan yang ada di Indonesia, termasuk dengan yang ada di Kecamatan Malalak yang mana apabila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk maka kasus warga masyarakat yang terinfeksi COVID-19 sampai dengan pertengahan bulan Juli 2020 jumlahnya sebanyak 17 kasus terkonfirmasi. Sampai saat ini penyebaran COVID-19 masih terjadi, dampak dari COVID-19 telah dan akan dirasakan di seluruh desa yang ada di Kecamatan Malalak baik oleh pemerintah desa maupun oleh masyarakat dengan tingkat yang berbeda-beda.

Tantangan pertama yang muncul dari kebijakan BLT Dana Desa yaitu bagaimana menentukan kelayakan desa yang berhak menyelenggarakan kebijakan tersebut, semisal di satu desa yang tidak memiliki kasus infeksi COVID-19, akan tetapi memiliki warga yang terdampak seperti buruh tani yang terpaksa harus berhenti bekerja dikarenakan lahan pertanian yang menjadi sumber usahanya menunda bercocok tanam dikarenakan permintaan produk pertanian dari wilayah perkotaan menurun. Kasus lainnya seperti buruh bangunan yang bekerja di kota harus kembali ke desa dikarenakan pekerjaannya diberhentikan sementara. Uraian kasus tersebut diatas menjadi salah satu dari banyak kompleksitas masalah yang ada di desa terkait dengan COVID-19, meskipun secara empiris desa tersebut tidak terinfeksi COVID-19. Implikasi dari permasalahan tersebut yaitu dalam proses penyelenggaraan kebijakan BLT Dana Desa, pemerintah Kecamatan Malalak dan pemerintah desa harus benar-benar memastikan bahwa kebijakan BLT Dana Desa yang menjadi kebijakan pemerintah merupakan benar-benar kasus yang berkaitan langsung dengan dampak wabah COVID-19 yang mana warga masyarakat yang menerima bantuan BLT Dana Desa merupakan warga yang paling terdampak adanya COVID-19, sehingga alokasi penganggaran dana desa dapat digunakan secara tepat dan dapat memberi manfaat kepada keberlanjutan hidup masyarakat yang terdampak COVID-19.

Tantangan kedua yang muncul dari kebijakan BLT Dana Desa yaitu proporsionalitas pembagian peruntukan dana desa baik untuk penyelenggaraan penanggulangan COVID-19 maupun untuk anggaran pembangunan lainnya yang ada di desa-desa, mengingat program pembangunan

desa yang menggunakan dana desa secara langsung banyak dan beragam serta sama-sama memiliki tujuannya masing-masing. Wabah COVID-19 menjadi pandemi di Indonesia pada bulan April 2020 dan menjadi perhatian pemerintah desa setelah proses perencanaan dan penganggaran pembangunan desa untuk tahun anggaran 2020 selesai diselenggarakan. Hal ini mengandung artian bahwa biaya penanggulangan COVID-19 tidak termasuk kedalam agenda pembangunan desa untuk tahun pembangunan 2020, sehingga upaya penanggulangan COVID-19 yang saat ini diselenggarakan oleh pemerintah desa termasuk didalamnya pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa menggunakan alokasi anggaran program pembangunan lainnya yang terlebih dahulu telah disusun dan dianggarkan dalam Dana Desa tahun 2020. Pengalokasian dana desa untuk penanggulangan COVID-19 harus dilakukan secara proporsional tanpa mengeliminasi program pembangunan lainnya yang dianggap penting di tingkat desa, bahkan jangan sampai kebijakan BLT Dana Desa justru mendistorsi program pemberdayaan masyarakat dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat desa.

Pengalokasian dana desa dalam kebijakan BLT Dana Desa harus sejalan sinergis dengan program lainnya yang ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Dengan begitu menjadi tantangan bagi pemerintah desa untuk memilih dan menentukan kebijakan pembangunan desa yang termasuk didalamnya penanggulangan COVID-19 secara proporsional. Tantangan ketiga yang muncul dari kebijakan BLT Dana Desa yaitu sejauhmana manfaat yang akan diperoleh dari adanya kebijakan BLT Dana Desa. Beberapa penelitian yang mengkaji mengenai pembagian BLT sebagai dampak kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa kebijakan BLT tidak berdampak signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan masyarakat. Penelitian lainnya seperti dari Selviana (2016) mengungkapkan bahwa BLT belum berjalan efektif, bahkan memiliki dampak buruk yaitu masyarakat memiliki ketergantungan terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Hasil penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk menjadikan dana desa mampu memberikan dampak bagi penurunan angka kemiskinan dan tidak memunculkan rasa ketergantungan masyarakat akan bantuan sosial dari pemerintah.

Upaya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai tujuan BLT Dana Desa perlu dilakukan agar masyarakat memiliki pemahaman mengenai BLT Dana Desa sehingga bantuan sosial tersebut dapat dipergunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pemerintah harus menyusun formulasi pelaksanaan BLT Dana Desa agar sesuai dengan harapan dan tujuan awal. Tantangan keempat yang

muncul dari kebijakan BLT Dana Desa yaitu BLT Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh warga masyarakat penerima manfaat, hal ini sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan BLT Dana Desa yang diperuntukan bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehingga masyarakat tidak boleh menggunakan dana BLT Dana Desa untuk kepentingan lainnya diluar pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Tuntutan pertanggungjawaban masyarakat penerima bantuan didasarkan kepada beberapa hal yang antara lain, yaitu: Pertama, bantuan sosial yang diberikan sebagai dampak COVID-19 di beberapa daerah digunakan untuk keperluan diluar pemenuhan kebutuhan pokok, seperti adanya masyarakat yang menggunakan dana bantuan sosial untuk membeli baju hari raya/lebaran. Perilaku masyarakat ini tentu saja tidak mencerminkan sikap tanggung jawab masyarakat penerima bantuan terhadap dana bantuan sosial yang telah diberikan. Kedua, setiap pelaksanaan kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terlebih lagi adanya penggunaan dana APBN/APBD dalam jumlah banyak yang dalam kasus BLT Dana Desa, tanggung jawab tersebut tidak hanya berhenti kepada laporan penyaluran BLT Dana Desa kepada masyarakat sasaran, tetapi harus pula diikuti dengan laporan dari masyarakat mengenai penggunaan BLT Dana Desa sehingga akan memastikan bahwa dana tersebut memiliki manfaat sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan di awal. Ketiga, bantuan sosial dalam bentuk uang kepada masyarakat bukan hal pertama dilakukan oleh pemerintah, begitu juga memiliki kemungkinan untuk dilakukan kembali di kemudian hari.

Pemerintah membutuhkan data mengenai seperti apa masyarakat memanfaatkan atau membelanjakan dana bantuan sosial. Laporan pertanggungjawaban masyarakat mengenai penggunaan BLT Dana Desa akan menjadi masukan yang dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam menetapkan kebijakan serupa oleh pemerintah di masa yang akan datang. Urgensi membangun sistem pertanggungjawaban pemanfaatan BLT Dana Desa sebagaimana dijelaskan diatas menunjukkan bahwa kedepannya program bantuan sosial yang memberikan uang tunai kepada masyarakat selain harus benar-benar tepat sasaran juga harus benar-benar tepat penggunaan yang mana masyarakat akan memanfaatkan/ menggunakan uang bantuan sosial tersebut sebagaimana yang telah ditentukan, sehingga kedepannya akan dirasakan manfaat secara optimal oleh masyarakat.

Tantangan kelima yang muncul dari kebijakan BLT Dana Desa yaitu BLT Dana Desa bukan ditujukan secara langsung sebagai upaya dalam penanggulangan COVID-19 (seperti pengadaan alat

disinfektan, pembelian masker dan yang lainnya) melainkan sebagai upaya mengurangi dampak COVID-19 bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat kurang mampu agar dapat tetap menyelenggarakan keberlangsungan hidupnya. Tantangan pemerintah yaitu bagaimana BLT Dana Desa itu dapat dibarengi dengan upaya dalam menanggulangi COVID-19 di tingkat desa, upaya tersebut semisal bisa dilakukan pemerintah dengan mensinergikan pemberian BLT Dana Desa dengan gerakan kesadaran masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat (PHBS) yang antara lain dengan menerapkan protokol kesehatan penanggulangan COVID-19, atau gerakahan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun) yang sangat relevan dengan upaya penanggulangan COVID-19, sehingga dengan adanya upaya tersebut akan menciptakan keterjalinan berbagai program pembangunan desa secara sinergis. Berbagai upaya lainnya dalam bentuk program kesehatan masyarakat desa yang ditujukan dalam penanggulangan COVID-19 di tingkat desa perlu dilakukan, sehingga kebijakan BLT Dana Desa akan secara optimal memberikan dampak yang besar terhadap penanggulangan COVID-19 di tingkat desa secara bersinergi disandingkan dengan program kesehatan yang telah menjadi program pemerintah desa.

D. PENUTUP

Kebijakan BLT Dana Desa yang diselenggarakan di desa-desa yang ada di Kecamatan Malalak merupakan kebijakan sosial untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 bagi masyarakat yang ada di desa, implementasi kebijakan BLT Dana Desa tahap pertama secara umum dapat dikatakan berjalan dengan baik yang mana masyarakat penerima bantuan sudah mendapatkan BLT Dana Desa, meskipun demikian implementasi kebijakan BLT Dana Desa masih memunculkan masalah selama proses pelaksanaannya. Permasalahan yang berkembang dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa antara lain, yaitu: Pertama, menyangkut kapasitas pemerintah desa yang mana memiliki keterbatasan aparatur desa dan harus dihadapkan kepada banyaknya program penanggulangan COVID-19 yang datang ke desa baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pemerintah daerah. Kedua, isu penyusunan dan penetapan data masyarakat sasaran yang berhak dan layak menerima bantuan sosial yang mana secara empiris masih ditemukan kesalahan penentuan masyarakat sasaran penerima bantuan. Ketiga, mekanisme dalam proses pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa. Tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa yaitu kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan COVID-19, manfaat dari pemberian BLT Dana Desa serta sistem tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan BLT Dana Desa. Saran yang dapat diajukan dalam artikel ini yaitu sebagai berikut: Pertama, dibutuhkan adanya konsistensi

kebijakan dalam menyusun dan menetapkan masyarakat sasaran penerima BLT Dana Desa, sehingga penerima bantuan tidak akan salah sasaran. Kedua, perlu adanya upaya untuk membangun tanggung jawab masyarakat terhadap penggunaan BLT Dana Desa sebagaimana peruntukannya yang tidak hanya akan menumbuhkan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap bantuan sosial yang telah diberikan, tetapi juga dapat menjadi input bagi perbaikan kebijakan serupa di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Akib, H. (2010) 'Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana', *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), pp. 1–11.



02

ANNISA TUL HASANAH

*Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Nagari Manggopoh (jorong anak air
dadok) Dengan Model Agribisnis Pada
Kebun Kelapa Sawit*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NAGARI MANGGOPOH (JORONG ANAK AIR DADOK) DENGAN MODEL AGRIBISNIS PADA KEBUN KELAPA SAWIT

Annisa Tul Hasanah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Pembangunan pada perkebunan terkhusus kelapa sawit di daerah Nagari Manggopoh Jorong Anak Air Dadok telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat, baik masyarakat yang terlibat dengan aktivitas perkebunan maupun terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu pesatnya perkembangan lahan area perkebunan masyarakat secara murni, maka perlu direncanakan suatu bentuk untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani. Model yang dirancang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan petani di Nagari ialah dalam bentuk agribisnis terhadap kebun kelapa sawit. Melalui program ini petani bisa memperoleh kesempatan untuk membeli atau memiliki saham di pabrik kelapa sawit perusahaan pengembang. Dalam model ini juga terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang pertama, kegiatan membangun kebun dan pabrik industry, serta jika diperlukan pemukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang; kedua, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasil dari kebun kelapa sawit, yang dilakukan oleh suatu badan usaha yaitu seperti pengelola kelompok tani yang dibentuk langsung oleh para petani yang ada. Hal ini merupakan salah satu bentuk konsep pembangun perkebunan di Nagari untuk masa yang akan datang. Konsep ini berbentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang.

Kata kunci: *Agrobisnis, Kelapa sawit*

Abstract

The development of oil palm plantations, specifically in the Nagari Manggopoh area, Jorong Anak Air Dadok, has had an economic impact on the community, both the community involved in plantation activities and the surrounding community. For the rapid development of community plantation areas, it is necessary to plan a form to avoid income inequality between farmers. The model designed to improve the welfare of farmers in Nagari is in the form of agribusiness in oil palm plantations. Through this program, farmers can get the opportunity to buy or own shares in the palm oil mill of the developer company. In this model there are also two main business activities, namely the first, activities to build plantations and industrial factories, as well as if necessary settlements of participating farmers which will be carried out by the developer; second, is the business of managing gardens and factories owned by participating farmers and marketing their

products, which is carried out by business entities, namely farmer group managers which are formed directly by existing farmers. This model is a concept for developing plantations in Nagari for the future. This concept is in the form of collaboration with development companies.

Keywords: Agribusiness, Palm oil

A. PENDAHULUAN

Saat ini sektor agribisnis Indonesia sudah memungkinkan untuk mampu bersaing dan merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas ini. Diluar sector agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. Pemilihan pengembangan pada sektor agribisni yang disertai dengan upaya agar pembangunannya dapat dinikmati oleh masyarakat. Kontribusi yang besar pada sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pada pembangunan sektor agribisnis secara nasional perlu disertai dengan suatu hal yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Kelapa sawit merupakan pengembangan subsektor perkebunan yang berbasis agribisnis. Aktifitas perkebunan kelapa sawit dan produk turunannya memberikan nilai tambah yang tinggi disektor perekonomian. Menurut pendapat Gumbira-Sa'id, E. dan L. Febrianti (2005), sektor agribisnis merupakan lapangan kerja yang berperan besar dalam penurunan tingkat pengangguran. Oleh karena itu pengembangan pertanian sudah seharusnya dipusatkan kepada pengembangan produktivitas atau bagaimana baiknya hasil pertanian kebun kelapa sawit ini diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal yang dapat dicapai melalui manajemen agribisnis yang ditata dan diatur dengan baik.

Agribisnis ini mampu mencakup keseluruhan perusahaan atau PT yang terkait dengan kegiatan usaha tani dan pemasarannya. Agribisnis meliputi segala sektor bahan masukan usaha tani, terlibat dalam proses produksi, dan pada akhirnya menangani atau mengerjakan pemrosesan, penyebaran, dan penjualan secara borongan atau eceran produk kepada konsumen terakhir. Agribisnis merupakan sektor perekonomian yang menghasilkan dan mendistribusikan bagi pengusaha tani, memasarkan dan memproses serta mendistribusikan produk usaha tani.

Saragit (2001) berpendapat dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*nessessary condition*). Industrialisasi menjamin iklim makro yang

sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut atau menggunakan nilai tambah yang ada dan tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industri pertanian.

Disamping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit ini juga mampu merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kebun kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit sebenarnya sangat berdampak terhadap ekonomi yang ada di nagari, terutama sekali dalam hal menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat Anak Air Dadok dan sekitarnya. Karena semakin berkembangnya perkebunan dari kelapa sawit maka akan semakin terasa juga dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor turunannya. Dampaknya tersebut dapat dilihat dari meningkatnya daya beli masyarakat karena meningkatnya pendapatan masyarakat yang mempunyai kebun kelapa sawit.

Berdasarkan peran kelapa sawit terhadap perekonomian Anak Air Dadok dan perkembangan luas area perkebunan kelapa sawit di daerah Manggopoh Kecamatan Lubuk Basung maka karena itu saya mengangkat judul **PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NAGARI MANGGOPOH (JORONG ANAK AIR DADOK) DENGAN MODEL AGRIBISNIS PADA KEBUN KELAPA SAWIT.**

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode yang bersifat deskriptif dengan menerapkan teknik survey. Tujuan penelitian ini dengan metode deskriptif adalah untuk membuat proses secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dari para petani kebun kelapa sawit di Anak Air dadok dalam melakukan aktivitas berkebun sehari-harinya.

C. PEMBAHASAN

Agribisnis kelapa sawit adalah ilmu tentang seluk beluk usaha atau bisnis yang memanfaatkan pertanian kelapa sawit. Mulai dari pemeliharaan produksi pertanian, sampai pengelolaan hasil pertanian itu sendiri. Kegiatan agribisnis sudah cukup lama berkembang di Indonesia, namun yang pada awalnya terfokus pada kegiatan produksi, sehingga banyak orang mengenal dengan istilah usaha tani atau pertanian. Seiring perkembangan pembangunan pertanian

yang lebih mengarah kepada pertanian komersil maka kata agribisnis ini makin populer dalam masyarakat. Hal ini tidak hanya menjadi bahan diskusi dikalangan masyarakat yang berkecimpung dibidang pertanian tetapi juga masyarakat yang berkecimpung diluar pertanian. Selain itu, dalam pengembangan sector pertanian, agribisnis juga menjadi bahan diskusi diberbagai forum pertanian baik yang bersifat local, nasional maupun internasional.

Menurut asal muasalnya kata agribisnis berangkat dari kata *Agribusiness* dimana Agri = *Agriculture* artinya pertanian dan *Business* berarti usaha atau kegiatan yang berorientasi profit. Jadi secara sederhana Agribisnis (*Agribusiness*) adalah usaha atau kegiatan pertanian serta apapun yang terkait dengan pertanian berorientasi profit. Atau dapat saya simpulkan, Agribisnis adalah suatu usaha atau kegiatan dari petani dalam suatu pertanian atau dalam hal yang berkaitan dengan pertanian yang bertujuan untuk mencapai suatu laba yang diinginkan.

Awalnya definisi agribisnis hanya menyinggung sector masukan, agribisnis diartikan secara sempit atau tradisional yaitu hanya merujuk pada produsen dan pembuatan bahan masukan untuk hasil pertanian. Agribisnis pada pengertian ini mencakup beberapa bahan usaha seperti, penyalur bahan kimia, pupuk buatan pertanian dan lembaga keuangan lainnya yang melayanan sector pertanian kebun kelapa sawit. Selanjutnya agribisnis didefinisikan semakin luas yaitu dari hulu ke hilir.

Sebagian besar rakyat hidup pada sector pertanian dan sector ini masih memberikan kontribusi bagi Negara terutama dalam bidang ekonomi. Karena itu pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Perkembangan teknologi produksi dan pertumbuhan tingkat pendapatan telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan dari tenaga kerja tidak terampil kepada tenaga kerja yang terampil. Begitu pula pada pertanian hal ini juga akan terjadi. Karena kebutuhan tenaga kerja yang terampil yang mengalami peningkatan sejalan dengan berubahnya orientasi sector pertanian ini.

Pembangunan perkebunan khususya kelapa sawit di Anak Air Dadok telah membawa dampak ekonomi terhadap masyarakat sekitar, baik dari masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebun kelapa sawit (pemilik kebun atau pekerja di kebun, dll) maupun masyarakat sekitar Kampung Anak Air Dadok. Pada dasarnya pembangunan perkebunan kelapa sawit di Anak Air Dadok dapat mengurangi ketimpangan pendapatan disetiap golongan masyarakat dan juga mengurangi ketimpangan ekonomi dalam golongan Kenagarian Manggopoh. Pembangunan perkebunan kelapa

sawit ini dilakukan masyarakat dalam bentuk berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Sangking pesatnya perkembangan kebun kelapa sawit di Anak Air Dadok dan sekitarnya telah banyak masyarakat yang juga membuka usaha peron sawit atau tempat penjual sawit sebelum di distribusikan ke PT atau suatu perusahaan. Selain itu banyak juga masyarakat yang awalnya cuman menganggur berakhir dengan menjadi pekerja kebun kelapa sawit seperti sebagai orang tukang panen buah kelapa sawit, tukang beri pupuk, tukang bersihkan kebun walaupun tidak semua masyarakat yang menggunakan jasanya. Serta juga ada satu PT yang berdiri di Anak Air Dadok khusus untuk pengolahan kelapa sawit.

Pengembangan agribisnis dalam kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam rangka penyegaran, peremajaan (*revitalisasi*) sector pertanian. Perkembangan pada berbagai sistem-sistem yang sangat pesat pada agribisnis kebun kelapa sawit ini sudah terjadi sejak menjelang akhir tahun 1970-an menjadi bukti bahwa pesatnya pengembangan agribisnis kelapa sawit. Secara umum indikasi pengembangan agribisnis kelapa sawit masih mempunyai prospek ditinjau dari prospek harga, ekspor dan pengembangan produk. Secara lokal, pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung potensi kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkatkan dan semakin berkembangnya industri hilir.

Tujuan pertama dari pembangunan pertanian atau pengembangan agribisnis perkebunan kelapa sawit adalah:

1. Menumbuhkembangkan usaha kelapa sawit di Kenagarian yang akan memacu pada aktivitas ekonomi dari masyarakat setempat dan sekitar,
2. Menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
3. Melahirkan industry pengolahan CPO atau yang sering disebut dengan minak sawit mentah dan produk setelahnya serta industry pendukung seperti (pupuk, obat-obatan alat dan mesin pertanian)
4. Serta meningkatkan hasil panen dari pada kebun kelapa sawit masyarakat.

Arah kebijakan jangka panjang adalah pengembangan sistem dan usaha agribisnis kelapa sawit yang berdaya saing, berkerakyataan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Dalam jangka menengah kebijakan pengembangan agribisnis kelapa sawit meliputi peningkatan produktivitas dan

mutu, pengembangan industry hilir dan penngkatan nilai tambah, serta penyediaan dukungan dana pengembangan.

Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit diantaranya adalah integrasi vertical dan hirisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat, pengembangan usaha pengolahan kelapa sawit di kampung Anak Air Dadok, menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan, dan pengembangan pasar. Tentunya staregi ini didukung dengan penyediaan infrastruktur (sarana dan prasarana) dan kebijakan pemerintah yang kondusif untuk peningkatan kapasitas agribisnis kebun kelapa sawit atau kapasitas dari pertanian kelapa sawit. Dalam pelaksanaannya, strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung dengan program-program yang menyeluruh dari berbagai aspek manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan seperti (perbenihan, budidaya dan pemeliharaan, pengolahan hasil, pengembangan usaha, dan pemberdayaan masyarakat) hingga evaluasi.

Dalam menjalankan pelaksanaannya, pengembangan agribisnis yang dilakukan pada kebun kelapa sawit baik melalui perluasan maupun peremajaan yang menerapkan metode pengembangan inti-plasma dengan penguatan kelembagaan melalui pemberian kesempatan kepada petanian plasma sebagai pemilik saham perusahaan. Kepemilikan suatu saham ini dilakukan melalui cicilan pembelian terhadap saham dari hasil potongan penjualan hasil panen kelapa sawit. Dengan kondisi perekonomian pada saat pandemi ini, pemerintah harus berusaha mengatasi masalah pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan dapat untuk mengurangi kemiskinan, serta mengatasi pengangguran, dan peningkatan pendapatan, lalu terjadinya stabilisasi terhadap ekonomi, serta adanya pemerataan pada pembangunan. Salah satu solusi dalam pemecahan masalah ini yang dapat dilakukan adalah pengembangan agribisnis kelapa sawit. Karena industri kelapa sawit ini memiliki peranan yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi bangsa, dan menjadi sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar. Yang jika dibawa ke dalam keadaan Kenagarian, agribisnis perkebunan kelapa sawit ini diharapkan mampu dan bisa membantu keuangan Nagari yang gunanya untuk pertumbuhan dan perkembangan dari Nagari itu sendiri.

Sebagai salah satu produk pertanian yang berpertindak secara penting dalam perekonomian negara atau bahkan perekonomian dari suatu Nagari, perkebunan kelapa sawit juga memberikan manfaat seperti membuka kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat di Nagari yang hal ini

tentunya diharapkan dapat mampu berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain petani sawit, banyak sektor yang terkait dengan industri kelapa sawit seperti industri pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan, dan alat angkut hasil dari perkebunan kelapa sawit. Peningkatan dan perkembangan dari industri kelapa sawit ini secara tidak langsung akan dapat meningkatkan sektor-sektor yang juga terkait dengan industri tersebut yaitu industry kebun kelapa sawit. Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus dapat diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian, pada dasarnya agribisnis dan agroindustry ini dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku-pelaku agribisnis dan agroindustri di daerah nagari. Konsep model Agroestate Berbasis Kelapa Sawit (ABK) yang akan mengikut sertakan masyarakat nagari (bagi anggota tani yang belum memiliki lahan perkebunan).

1. Perusahaan pengembang atau developer akan membangun kebun atau usahatani dan pabrik pengolahan hasil kebun atau agribisnis sampai pada kebun memang sudah mencapai keadaan dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap beroperasi. Sumber dana untuk membangun kebun dan pabrik kelapa sawit dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.
2. Kebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang sudah dibangun oleh pengembang yang dijual dalam bentuk unit kaveling atau perkebunan kelapa sawit yang telah dipetak-petakkan atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat Nagari. Atau pada Kenagarian Manggopoh PT atau perusahaan yang bisa menyewa atau membeli lahan perkebunan kelapa sawit yang memang dari awal telah dikelola duluan oleh masyarakat sekitar atau yang memang lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun kebun kelapa sawit, yang msyarakat tinggal diberi hasil sesuai dengan kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan atau PT tersebut. Sebagai pemilik kebun, peserta tani akan mendapat sertifikat kepemilikan tanah dan menjadi bukti kepemilikan pabrik, petani yang ikut serta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.
3. Para petani yang menjadi peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh kelompok tani yang ada. Para petani yang menjadi peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee)

yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen berdasarkan perjanjian. Perusahaan di bidang manajemen pabrik akan mengelola atau mengatur kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang baik dan juga profesional.

4. Kepemilikan modal PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40% dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bermaksud dan bertujuan untuk menjaga profesionalitas penggarapan PKS.
5. Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan atau KPH dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.
6. Penghasilan petani yang diharapkan cukup besar, karena itu dapat di hasilkan dari multi sumber. Bagi petani yang ikut aktif, penghasilannya bisa berasal dari hasil panen kebun kelapa sawit yang di miliknya, seperti upah dalam bekerja, dan pembagian keuntungan dari saham perusahaan. Keuntungan lainnya adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.
7. Perusahaan pengembang atau developer akan mengembalikan modal yang dipakai atau dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan lain serta akan menerima keuntungan dari hasil perkebunan dan saham pabrik industri yang telah didirikan tersebut.

Pengembangan model ABK yang digunakan berdampak bagi petani di Kenagarian yang telah memiliki lahan untuk dikembangkan menjadi perkebunan kelapa sawit, namun para petani tidak mempunyai modal usaha yang memadai untuk pengembangan perkebunan, maka hal itu dapat dikembangkan melalui model ABK pola kemitraan. Bentuk kegiatannya adalah seperti pengembangan perkebunan melalui pemanfaatan fasilitas kredit dari lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Tujuannya adalah membangun dan membina perkebunan masyarakat di daerah baru atau daerah yang sudah ada perkebunan kelapa sawitnya dengan teknologi yang maju agar petani mampu memperoleh pendapatan yang semestinya. Juga dapat mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang bersifat agribisnis dengan memasukkan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil secara analitis. Pelaksanaan pembangunan dari perkebunan berbentuk ABK pada pola kemitraan nya dilakukan oleh perusahaan dibidang perkebunan yang ditunjuk sebagai perusahaan inti atau mitra dengan pembinaan dan dukungan dari instansi-instansi pemerintah Nagari yang fungsinya tentu saja terkait dan berkaitan dengan pengembangan

perkebunan. Hubungan kerja yang diterapkan dan dipakai dalam proses pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan fasilitas kredit atau angsuran adalah bentuk hubungan kerja inti dengan plasma atau anggota tani yang ikut serta dalam perkebunan kelapa sawit tersebut. Dalam hubungan kemitraan ini petani diwakili oleh suatu badan usaha yang dibentuk langsung oleh petani yaitu koperasi atau mungkin kelompok tani. Koordinasi pembinaan proyek perkebunan model ABK pola kemitraan ini dilaksanakan oleh Tim Pembina Proyek Perkebunan Kecamatan dan Kabupaten yang dibentuk oleh Camat dan Bupati. Dengan demikian kemitraan antara perusahaan perkebunan dengan koperasi atau kelompok tani berlangsung secara utuh dan berkesinambungan dalam Program ABK Pola Kemitraan memberikan peluang kepada petani peserta atau petani yang ambil andil di dalamnya untuk memiliki saham pada PKS. Tatacara pemilikan saham ini dapat diatur berdasarkan kesepakatan antara petani yang dalam hal ini dapat diwakili oleh koperasi atau kelompok tani dengan perusahaan inti dan pemerintah melalui instansi yang terhubung. Melalui program ini disarankan kepemilikan saham pada PKS sebaiknya melibatkan tiga komponen, yaitu: petani melalui koperasi atau kelompok tani; perusahaan inti; dan pemerintah nagari. Sementara itu struktur dari kepemilikan saham yang diatur melalui kesepakatan dari tiga komponen diatas. Rancangan kepemilikan modal PKS melalui Program ABK Pola Kemitraan juga sama dengan model kepemilikan modal pada ABK.

Pemberdayaan ekonomi kanagarian dengan model ABK Pola Kemitraan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Petani peserta ABK Pola Kemitraan adalah penduduk setempat yang memiliki lahan termasuk para petani yang lahannya terkena pembangunan kebun kelapa sawit KKPA dan sudah menjadi anggota koperasi.
- b. Persiapan dan penetapan calon petani peserta yang akan ikut dilakukan oleh pengurus koperasi atau kelompok tani yang diketahui oleh Wali Jorong sebagai dasar pengesahan oleh Wali Nagari atau Bupati.
- c. Para calon petani peserta yang diberikan kesempatan untuk ikut berperan serta dalam pembangunan kebun sebagai tenaga kerja.
- d. Para petani peserta mendapat hak seperti kebun kelapa sawit yang luasnya disesuaikan dengan apa yang dijanjikan pada kerja sama yang telah ditetapkan antara petani dengan koperasi atau kelompok tani dan perusahaan plasma.
- e. Petani peserta menerima hasil penjualan TBS setelah dipotong cicilan kredit dan kewajiban terhadap koperasi atau kelompok tani.

- f. Petani peserta menerima sertifikat hak milik atas kebun kelapa sawit setelah dilakukan perlunasan pada kredit.
- g. Petani berhak meminta pertanggung jawaban dari pelaksanaan pembangunan kebun kelapa sawit kepada pengurus koperasi atau kelompok tani melalui rapat anggota.
- h. Para petani peserta harus patuh dan taat terhadap semua ketentuan dan ketetapan yang telah diterapkan dalam pembangunan kebun ABK Pola Kemitraan.
- i. Petani memiliki hak untuk memperoleh kesempatan dalam membeli saham di PKS yang dibangun oleh perusahaan inti.

Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Nagari Manggopoh mengutamakan kelapa sawit sebagai komoditas utama, antara lain: Pertama, dari segi keadaan dan lingkungan yang ada, Nagari Manggopoh berkemungkinan dalam proses pengembangan perkebunan kelapa sawit ini. Kondisi Nagari Manggopoh yang relatif datar memudahkan dalam pengelolaan dan dapat menekan biaya produksi; Kedua, kondisi tanah yang juga memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit dan menghasilkan produksi yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan lain yang pastinya berbahan baku dari kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini mempunyai dampak ganda atau dampak lebih terhadap ekonomi Nagari, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang dalam kerja. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga yang mengakibatkan meningkatnya daya beli masyarakat Nagari atau jorong, baik untuk memenuhi kebutuhan primer maupun kebutuhan pendukung atau sekunder.

Pengembangan perkebunan di Kanagarian dan jorong telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk mempergunakan peluang tersebut. Dengan terdapatnya perusahaan dalam perkebunan, profesi dari masyarakat setempat tidak lagi menjadi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka, tetapi telah bisa memperluas cakupan dari usahanya pada sektor tertier. Berbagai macam sumber penghasilan yang ikut serta ambil andil yaitu seperti pedagang (dagang barang-barang harian, sarapan pagi, makanan, dll). pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga seperti pembuatan (kerupuk, kue-kue) buruh kasar dan mungkin pekerja kebun kelapa sawit. Selain itu jumlah besaran penghasilan pada masing-masing rumah tangga dari petani kelapa sawit, ada bagian yang perlu dipahami dalam mengamati dampak pelaksanaan investasi perkebunan kelapa sawit adalah timbulnya usaha-usaha baru yang dikelola

oleh masyarakat. Kegiatan usaha tersebut pada dasarnya merupakan upaya pemanfaatan dari peluang usaha yang tercipta sebagai akibat adanya mobilitas penduduk, baik yang terpengaruh secara langsung dan menjadi akibat usaha yang tercipta oleh adanya pengaruh yang tidak langsung dari pembangunan perkebunan yang memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan lain. Suatu peluang usaha akan bisa menjadi sumber pendapatan atau peluang usaha yang memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat jika mampu menggunakan peluang usaha yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi suatu kegiatan usaha yang nyata. Dengan demikian kemampuan masyarakat dan memanfaatkan peluang yang ada akan dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam menjalankan peluang itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan menggunakan sumber daya yang ada dan dimiliki sedemikian rupa sehingga peluang yang berpotensi menjadi usaha yang secara aktual dapat dioperasikan atau dikerjakan. Meskipun tidak seluruh kegiatan perkebunan yang memberikan ataupun menyebabkan timbulnya sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat, tapi tergantung kepada jenis investasi perkebunan atau inti dari plasma dan sektor ekonomi yang akan dilakukan. Investasi tersebut pada akhirnya akan dapat berpengaruh kepada kemampuan dalam memanfaatkan kegiatan perkebunan yang memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Kebijakan pemerintah Nagari dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh manfaat dari adanya pembangunan perkebunan kelapa sawit yang sangat berpengaruh. Hal ini akan menentukan macam macam sumber-sumber pendapatan yang muncul dikemudian. Secara umum dapat dijelaskan bahwa dengan adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang beragam. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di Nagari, sampel mengungkapkan sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, yaitu memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi. Atau pada keadaan Nagari Manggopoh, sebelum adanya PT para masyarakat atau petani kebun kelapa sawit swadaya atau mandiri, menjual hasil panen mereka langsung kepada pekerja peron dan peron menjualnya kembali ketempat yang jauh yaitu keluar provinsi Sumatera Barat, yang hal ini tentunya menyebabkan biaya distribusi yang besar dan dapat mengurangi laba. Kondisi sebelum adanya pembangunan perkebunan dengan setelah adanya kegiatan dari perkebunan pendapatan masyarakat menjadi semakin beragam. Keberagaman ini semakin memperkuat stabilitas struktur penghasilan rumah tangga karena dapat memberikan alternatif pemasukan bagi keluarga disaat sumber penghasilan lain mengalami kegagalan usaha. Pekerjaan yang dihasilkan dari pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan kelapa sawit muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di

Kanagarian. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat nagari, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit. Semua bentuk pengeluaran oleh petani apakah itu pengeluaran rutin atau maupun pengeluaran untuk kebutuhan pemeliharaan kebun, pada umumnya dapat diperoleh di Nagari, antara lain; pasar kecamatan (Pasar Lubuk asung, Manggopoh), kedai-kedai, kelompok tani, atau pada pedagang keliling.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh besar yang bersifat positif atau bermanfaat bagi Nagari dan sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi nagari, antara lain:

1) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Jika dilihat pada sisi ekonomi di nagari manggopoh bahwa pada saat sekarang sangat susah untuk mencari lowongan pekerjaan , maka perkebunan kelapa sawit ini sangat efektif untuk menciptakan lapangan pekerjaan dikarenakan bentuk pekerjaan yang sudah biasa bagi masyarakat disekitar. Sehingga anak anak yang putus sekolah pun bisa menghasilkan uang dari adanya perkebunan kelapa sawit ini.

2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari dan sekitar.

Dengan memperluas perkebunan kelapa sawit, maka kita harusnya bisa mampu memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan dari masyarakat. Apa lagi pada masa pandemic covid-19 menjadikan masyarakat susah dalam meningkatkan penghasilan dan hal ini menjadikan hilangnya kesejahteraan maka dengan adanya perkebunan kelapa sawit ini diharapkan bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tentunya hal ini memerlukan adanya dorongan agar perkebunan kelapa sawit ini mempunyai daya saing yang kuat, membuka lapangan pekerjaan yang seluas luasnya, termaksud bagaimana cara dari mengelola kelapa sawit yang ada di Nagari agar bisa menjadi kekuatan bagi ekonomi dan berkelanjutan.

3) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan Nagari.

Jika semakin banyak atau luasnya area perkebunan kelapa sawit maka akan banyak dari masyarakat yang memiliki pekerjaan dan penghasilan sehingga dapat juga menjadikan pesatnya kemajuan perkebunan dan secara tidak langsung akan menambah kontribusi terhadap pembangunan nagari. Karena pada dasarnya kebun kelapa sawit memang memiliki

kontribusi besar untuk Devisa Nagari, jumlah tenaga kerjanya juga besar dan lebih manfaat lagi Masyarakat bisa terlibat langsung dengan usaha perkebunan kelapa sawit.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi Nagari dan budaya masyarakat sekitar, antara lain:

1) Kegiatan pembangunan sumber daya masyarakat Nagari.

Pembangunan pada dasarnya menjadi salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam usaha memajukan kehidupan masyarakat. Pembangunan ini secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat.

2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, seperti sarana jalan darat.

Dalam memenuhi produktivitas kegiatan tentu masyarakat memerlukan sarana dan prasarana dalam kegiataannya, terutama jalan. Karena dengan adanya jalan itu bisa membuka pintu gerbang dari dan ke daerah lain atau ke tempat lain, dan tentunya bisa memudahkan pergerakan dan menghemat waktu serta biaya.

3) Penyerapan tenaga kerja local atau dari masyarakat sekitar.

Tenaga kerja local memang harus diprioritaskan untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat di Kanagarian Manggopoh yang tentu saja tujuannya adalah untuk menekan angka pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan.

Adanya kantor pertanian atau kantor Wali Nagari dan kantor Camat diharapkan mampu memberikan penyuluhan dan pencerahan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa memiliki wawasan dan pengetahuan mengenai agribisnis perkebunan.

5) Pembayaran kewajiban perusahaan seperti membayar pajak-pajak dan biaya kompensasi lainnya.

Pajak merupakan salah satu sumber dari keuangan Negara dan kewajiban perusahaan terhadap Negara memiliki fungsi timbal balik terhadap kemajuan perekonomian. Begitu juga dalam Kenagarian, dengan adanya PT-PT di Nagari Manggopoh diharapkan bisa menambah devisa dari Nagari.

Kegiatan perusahaan perkebunan kelapa sawit baik perusahaan inti maupun plasma membutuhkan tenaga kerja langsung yang tidak termasuk kepada skilled-labour dan tenaga kerja di bidang teknisi perkebunan dalam mengelolanya. Secara ideal tenaga kerja direkrut atau diambil dari masyarakat sekitar perkebunan, terutama untuk tenaga kerja teknis perkebunan yang diambil dari masyarakat Nagari dan sekitarnya. Kegiatan perkebunan kelapa sawit itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak, disamping itu kegiatannya juga bersifat manual.

Ada perbedaan pendapatan antara petani kelapa sawit plasma dengan petani swadaya. Perbedaan ini disebabkan, antara lain:

- 1) Distorsi harga antara petani plasma dengan petani swadaya sebesar.
- 2) Kemampuan petani swadaya atau petani di kebun mereka sendiri terhadap pengelolaan kebun masih rendah.
- 3) Pendapatan petani swadaya sangat dipengaruhi oleh harga TBS yang mereka terima karena pasar TBS lebih cenderung monopsonistik.
- 4) Pengetahuan yang terbatas dari petani swadaya terhadap usaha kebun kelapa sawit.

Pengembangan sektor pertanian ke depannya harus diarahkan dan mengarah kepada sistem agribisnis, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah bagi sektor pertanian, pada dasarnya hal ini dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku pelaku agribisnis di daerah Nagari. Menurut Bungaran Saragih (2001b), sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas. Tentunya untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi masyarakat nagari Manggopoh, terutama di sektor pertanian maka perlu adanya ipersiapan dari kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan dari masyarakat. Cara yang mampu mencapai tujuan tersebut ialah dengan melakukan pengembangan kebun kelapa sawit berbasis kepada agribisnis, yang terencana dengan baik dan dari sector pertanian lainnya serta dengan pembangunan sektor ekonomi ekonomi lainnya diluar dari sector tani.

D. KESIMPULAN

Agribisnis kelapa sawit adalah ilmu tentang seluk beluk usaha atau bisnis yang memanfaatkan pertanian kelapa sawit. Jadi saa simpulkan agribisnis kelapa sawit adalah bagian ilmu yang membahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelapa sawit, mulai dari hal kecil sampai pada pemanfaatan dari pertanian kelapa sawit.

Mulai dari pengusahaan produksi pertanian, sampai pengelolaan hasil pertanian itu pula. Sebagian besar rakyat hidup pada sector pertanian dan sector ini masih memberikan kontribusi bagi Negara terutama dalam bidang ekonomi. Karna itu pemberdayaan ekonomi rakyat juga juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Perembangan teknologi produksi dan pertumbuhan tingkat pendapatan telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi.

Strategi pengembangan agribisnis kelapa sawit diantaranya adalah integrasi vertical dan hirisontal perkebunan kelapa sawit dalam rangka peningkatan ketahanan pangan masyarakat, pengembangan usaha pengolahan kelapa sawit di kampung Anak Air Dadok, menerapkan inovasi teknologi dan kelembagaan dalam rangka pemanfaatan sumber daya perkebunan kelapa sawit, dan sampai pada pengembangan pasar.

Sebagian besar raykat hidup pada sector pertanian dan sector ini masih memberikan kontribusi bagi Negara terutama dalam bidang ekonomi. Karna itu pemberdayaan ekonomi rakyat juga juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Perembangan teknologi produksi dan pertumbuhan tingkat pendapatan telah menyebabkan terjadinya perubahan struktur ekonomi. Kebutuhan tenaga kerja yang mengalami perubahan dari tenaga kerja tidak terampil kepada tenaga kerja yang terampil. Begitu pula pada pertanian hal ini juga akan terjadi. Karena kebutuhan tenaga kerja yang terampil yang kmengalami peningkatan sejalan dengan berubahnya orientasi sector pertanian ini. Pengembangan agribisnis dalam kelapa sawit merupakan salah satu langkah yang diperlukan sebagai kegiatan pembangunan subsektor perkebunan dalam rangka penyegaran, peremajaan (revitalisasi) sector pertanian. Perkembangan pada berbagai subsistem yang sangat pesat pada agribisnis kelapa sawit ini sudah terjadi sejak menjelang akhir tahun 1970-an menjadi bukti bahwa pesatnya pengembangan agribisnis kelapa sawit. Secara umum indikasi pengembangan agribisnis kelapa sawit masih mempunyai prospek, ditinjau dari prospek harga, ekspor dan pengembangan produk. Secara lokal, pengembangan agribisnis kelapa sawit didukung potensi

kesesuaian dan ketersediaan lahan, produktivitas yang masih dapat meningkatkan dan semakin berkembangnya industry.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Nagari telah memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi di daerah Jorong jorong di Nagari. Hasil penelitian yang dilakukan di daerah Nagari menyimpulkan bahwa pembangunan perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan perekonomian Nagari. Secara ekonomi akan menciptakan daya beli di daerah Nagari, yang pada akhirnya meningkatkan permintaan terhadap barang kebutuhan masyarakat. Perkebunan kelapa sawit yang diusahakan secara swadaya atau mandiri sepertinya jalan sendiri tanpa bergantung kepada inti atau plasma. Untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit ke depannya perlu rancangan dari bentuk kelembagaan kelapa sawit di kenagarian yang melibatkan perusahaan, pemerintah nagari dan para petani. Konsep ini menegaskan kepada asas kepemilikan bersama oleh petani baik dari usahatani maupun pabrik pengolahannya, yang mana pengelolaannya dilakukan oleh kelompok tani.

Bagi masyarakat di daerah Nagari, sampai saat ini usaha perkebunan merupakan alternatif untuk merubah perekonomian keluarga, karena itu pandangan masyarakat terhadap pembangunan perkebunan kelapa sawit masih tinggi. Dari sisi lain pembukaan perkebunan akan membutuhkan lahan, apabila hal ini tidak dikendalikan oleh pembuat kebijakan, maka akan terjadi alih fungsi lahan di daerah kenagarian.

DAFTAR PUSTAKA

- Saragih, Bungaran. 2001a. *Suara dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*. Bogor: Yayasan USESE.
- Jaraemi. 2003. *Hubungan Antara Keragaman Sistem Agribisnis dengan Tingkat Pendapatan Petani Kelapa Sawit*. Disertasi Universitas Padjajaran Bandung.



03

DEVITA SARI SIREGAR

*Peluang Bisnis Catering Di Masa
Pandemi Dilihat Dari Perspektif Ekonomi
Islam (studi kasus: Kelurahan Tano Bato
Kec. Padang Sidimpuan Utara, Kota
Padang Sidimpuan*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



**PELUANG BISNIS CATERING DI MASA PANDEMI DILIHAT DARI PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS: KELURAHAN TANO BATO KEC. PADANG
SIDIMPUAN UTARA, KOTA PADANGSIDIMPUAN)**

Devita Sari Siregar

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Catering adalah salah satu solusi bagi setiap konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa harus membuang waktu dan tenaga. Hal ini juga merupakan Peluang bagi para pebisnis catering untuk dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas mutu pelayanannya dari waktu ke waktu sehingga dapat terus memuaskan konsumennya. Usaha Catering ternyata masih sangat berpotensi dilakukan di masa pandemi ini. Dikarenakan, makanan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok. Tidak heran jika usaha makanan termasuk catering, masih terbelang menjanjikan. Sebab, meski orang-orang terpaksa harus berdiam diri di rumah, mereka pun tidak sempat berbelanja dan memasak sendiri. Alhasil membeli makanan dari rumah atau memesan catering pun jadi solusi. Penerapan dari unsur halal bahannya yang digunakan serta halal cara memperolehnya agar kemashlahatan boleh dilakukan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Didalam proses makanan dari bahan mentah menjadi hidangan makanan yang siap dikonsumsi diperhatikan sesuai perspektif ekonomi islam.

Kata Kunci: Catering, Pandemi, Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahunnya terus meningkat, menyebabkan memerlukan kebutuhan terhadap masyarakat Indonesia. Kebutuhan juga dapat diartikan sebagai aspek dasar untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. Selama keberlangsungan hidupan, setiap manusia tentu perlu memenuhi kebutuhannya akan makanan dan minuman yang diperoleh. Peralihan tersebut merupakan kebutuhan manusia yang sangat pokok dan jika tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tersebut justru akan terganggu. Tingginya tingkat kebutuhan tersebut, mendatangkan peluang-peluang bisnis yang dapat ditangkap oleh masyarakat Indonesia, salah satunya adalah industri makanan seperti bisnis catering. Usaha ini menjadi bisnis yang cukup menjanjikan, karena dengan perpaduan menjalankan hobi sekaligus mendapatkan keuntungan.

Industri makanan adalah industri yang paling prospektif di Indonesia maupun di dunia, karena sifatnya berkaitan dengan kebutuhan, maka industri makanan adalah salah satu sektor yang

diperlukan oleh manusia. Pesatnya industry tersebut, belakangan ini terus menggairahkan tingkat pengusaha untuk menggarap bisnis makanan. Bukan hanya restoran dan cafe yang banyak bermunculan, namun bisnis rumahan seperti bisnis catering yang saat ini banyak bermunculan pun makin gencar bersaing di pasaran.

Usaha catering naduma yang terletak di desa Tano Bato Kota Padang Sidempuan ini adalah salah satu jenis usaha yang menjalankan berdasarkan pesanan dari pelanggan. Bisnis catering juga menghasilkan keuntungan yang tinggi, makanan juga menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang.

Perkembangan ekonomi ini berjalan seiring dengan perkembangan manusia dan pengetahuan teknologi yang dimiliki. Ilmu ekonomi adalah sebagai studi tentang alokasi sumber daya yang terbatas, atau tidak tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memuaskan seluruh keinginan manusia. Sedangkan ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Manusia Pada dasarnya dalam kehidupannya dituntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya kemudian perkembangan peluang bisnis catering naduma ini tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas layanan yang ditawarkan saja tetapi ada beberapa hal selain yang dapat mempengaruhi catering naduma untuk keperluan pesta tersebut agar dapat digemari oleh konsumennya. (Prabowo, 2013: 2)

Ada beberapa jenis transaksi jual beli dalam Islam, salah satunya yaitu transaksi jual beli istishna. Yang dimana Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Pembeli menerima pesanan dari pembuat barang. Pembuat barang lalu berusaha membuat barang pesanan yang dipesan oleh pembeli berdasarkan spesifikasi yang telah disepakati. Harga serta sistem pembayaran kedua belah pihak bersepakat, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu yang ditentukan. Landasan syari'ah mengenai transaksi istishna' terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة: 282-282]

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*” (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Usaha adalah salah satu kegiatan ekonomi bertujuan untuk mencapai keberhasilan guna memenuhi kebutuhan finansial yang dikembangkan oleh pemilik. Sedangkan kebutuhan menurut Imam Al-Ghazali adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya. Kebutuhan manusia banyak dan beragam, tetapi yang terpenting adalah kebutuhan dasar manusia, baik sebagai individu

maupun sebagai kelompok yang meliputi: sandang, pangan, papan, pendidikan, dan lainnya. Makanan bukan saja kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun makanan merupakan masukan yang sangat penting untuk membangun manusia agar mempunyai fisik yang sehat, mempunyai nalar yang tinggi, karena makanan merupakan kebutuhan utama manusia, maka setiap individu dari semua kelompok umur baik itu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua merupakan konsumen yang terbesar dari makanan. pertimbangan yang utama dalam menekuni bisnis ini adalah cita rasa. Salah satu bidang yang bisa digeluti dari bisnis makanan adalah usaha catering. Di dalam islam, bekerja dan berusaha adalah suatu kewajiban manusia. Allah Swt telah menjanjikan rezeki bagi makhluk-Nya yang ada dipermukaan bumi, namun untuk mendapatkannya manusia dituntut untuk melakukan suatu usaha yang dapat mendatangkan hasil guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Salah satu usaha yang sedang berkembang di kelurahan Tano bato adalah usaha penyediaan jasa catering. Istilah catering merupakan istilah khusus yang digunakan untuk bisnis yang menawarkan jasa dan penyedia makanan dan minuman dalam jumlah yang banyak. Jasa catering ini sering digunakan dalam acara: pernikahan, arisan keluarga, sunatan, syukuran, acara instansi pendidikan, ulang tahun, acara halal bil halal dan lain-lain kemudian pada kamus bahasa inggris dapat didefenisikan bahwa catering adalah sebagai penyedia makanan dan jasa untuk suatu acara atau pesta. (Rohmalia,dkk: 182)

B. Metode Penelitian

Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu usaha untuk:

- Memberikan pendampingan untuk memajukan usaha kewirausahaan dibidang kuliner catering naduma dikelurahan tanobato
- Memberdayakan masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan catering naduma untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat kelurahan tanobato
- Mendampingi masyarakat kelurahan tanobato dalam penciptaan sumber ekonomi dalam bidang kuliner dan kesehatan dikelurahan tanobato.
- Memberikan ide-ide baru terhadap usaha catering naduma agar usaha tersebut semakin berkembang dan dikenal masyarakat.
- Memeberikan arahan kepada usaha Naduma Catering mengenai cara-cara atau kiat-kiat berwiausaha yang baik di masa pandemik

C. PEMBAHASAN

Catering adalah suatu usaha jasa yang memberikan pelayanan dalam penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan. Penyediaan jasa catering ini banyak ditemui di kota besar maupun kecil. Penyedia jasa catering ini semakin bertambah dari waktu ke waktu, menandakan bahwa bisnis di bidang jasa tata boga ini sangat menjanjikan bagi kehidupan masyarakat. Peningkatan usaha catering ini memang sangat beralasan selain meningkatnya jumlah penduduknya yang juga meningkatkan orang yang membutuhkan pelayanan jasa ini di masa pandemi covid 19.

Seperti diketahui juga, tidak sedikit rumah makan yang tutup diakibatkan wabah ini. Karena itu, kita sebagai umat Islam harus dapat mengambil peluang dari situasi dan kondisi ini, hal ini bukan saja menunggu hingga wabah ini berakhir. Tetapi Berbagai hal banyak yang dilakukan umat Islam dalam mengambil peluang dalam situasi dan kondisi ini. Tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah umat Islam harus lebih berpikir kreatif dalam melakukan bisnis di masa pandemi ini yang belum di ketahui kapan berakhirnya.

Apa sajakah yang perlu dilakukan dalam melakukan bisnis pada kondisi seperti ini? Banyak hal yang masih dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan fokus terhadap wilayah dan model pemasaran apa yang akan dilakukannya.

Beberapa hal yang harus dapat dilakukan adalah pertama layanan *delivery order*, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan ojek *online* sehingga memudahkan pembeli untuk mendapatkan produk. Memanfaatkan ojek online, kita akan lebih mudah dalam melakukan usaha. Biaya pengiriman dapat ditanggung oleh pembeli dan selain itu kitapun dapat berbagi rezeki dengan para pengemudi ojek online. Kedua, adalah model promosi yang dilakukan seperti dengan digitalisasi, apakah melalui *whatsapp* ataupun *sosial media lainnya*. ketiga, jangan lupa diberi pengemasan yang menarik. Khususnya dalam promosi perlu ditekankan makanan *halalan thoyiban* yang dikaitkan dengan kebersihan dalam proses pembuatannya

Artikel ini yang menjadi subjek penelitian adalah pemilik dari catering Naduma beserta karyawan dan pengguna jasa dari masing-masing catering. Penulis memilih lokasi di Catering naduma sebagai subjek dalam Artikel dikarenakan Catering Naduma telah memenuhi kriteria.

Kriteria- kriterianya sesuai ekonomi islam ialah:

1. Beragama Islam.
2. Usaha yang dijalani milik sendiri.
3. Dapat diteliti atau dilakukan observasi.

4. Melayani pesanan acara pesta

Umat Islam sebagai umat yang telah diperintahkan oleh Allah swt untuk memakan makanan halal dan *thoyib* dapat menggunakan peluang yang ada pada masa pandemi ini, tidak hanya sebagai penonton dan konsumen. Pangsa pasar makanan terbuka luas bagi khalayak orang banyak, karena manusia memerlukan makanan. Toko makanan banyak yang tutup dimasa pandemi ini karena belum dapat memanfaatkan teknologi digit. Masyarakat banyak yang hulang pekerjaan akibat pandemi yang belum kapan berakhirnya, Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang sulit untuk mendapatkan makanan, baik karena tidak ada uang ataupun penjualnya yang tidak jualan lagi karena bangkrut atau dengan kata lainnya tidak memiliki modal lagi.

Catering naduma ini adalah makanan sehat yang menjadi solusi bagi mereka yang ingin menjaga pola makan tanpa harus repot menyiapkannya. Sejak pandemi Covid-19 melanda tren atau gaya hidup sehat terlihat di masyarakat. Penulis juga mewawancarai tentang bahan-bahan yang digunakan oleh pemilik catering naduma, dan hasil yang penulis dapatkan, pemilik catering naduma lebih memilih memakai bahan bahan yang berkualitas karena kesehatan pelanggan adalah prioritas yang utama bagi pemilik catering naduma. Menurut pemilik catering naduma, ketika pelanggan suka tentunya konsumen akan menjadi pelanggan tetap catering naduma. Sedikit keuntungan tetapi ada keberkahan didalamnya ungkap naduma selaku pemilik usaha “catering naduma”.

Adanya pandemi ini diakui naduma sempat menurunkan permintaan catering makanan sehat di awal covid 19. Awal pandemi datang mengalami penurunan penjualan hingga 50%, seiring berjalannya waktu naduma catering sudah merasakan ritme penjualan cateringnya mulai meningkat. Catering naduma menargetkan kedepannya penjualan dari cateringnya dapat kembali 100% seperti semula atau bahkan lebih. Guna kembali dongkrak penjualan, strategi sudah disusun diantaranya, membuat paket bundling makanan dan minuman sehat serta promo menarik lainnya.

Menurut penulis, ke depan usaha catering khususnya makanan sehat akan bisa bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Hal tersebut tak lain lantaran, makanan sehat menjadi fokus target market tertentu. Apalagi diwaktu pandemi ini menjaga kesehatan sangat dibutuhkan salah satunya dengan menjaga nutrisi yang dimakan. Dan tren usaha catering makanan sehat akan menjadi prospek cukup bagus kedepannya. Orang yang ingin terhindar dari covid 19 akan membeli produk tanpa pertimbangan harga, Ini yang menyebabkan catering sehat terus berkembang untuk segment market, ujar naduma selaku pemilik catering. Menurut penulis, pelaku usaha harus tahu cara menpromosikan produknya agar tetap bertahan dikala pandemi. Pelaku usaha harus dapat

menonjolkan semua kelebihan agar calon pembeli merasa puas jika beli membeli produk dari catering naduma. (Ningtyas, dkk: 29)

Hal ini dapat dilihat pada Alquran di Surah Al Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk memakan makanan yang bukan saja halal, tetapi juga *baik* (thoyib). Hal ini agar tidak membahayakan tubuh bagi yang memakan suatu makanan tersebut. Pada ayat tersebut juga dapat dilihat bahwa perintah memakan-makanan yang halal dan thayib ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah swt. Sehingga dalam Islam, pembagian makanan itu sudah jelas, ada yang haram, halal, makruh, mubah dan juga syubhat. Masing-masing ini memiliki karakteristik tersendiri dan ini sudah jelas rambu-rambunya dalam Al-quran dan hadits.

Semakin besar untungnya maka resiko di dalam bisnis pun semakin besar, yang terpenting adalah berani mencoba dan memulai. Lebih baik mencoba tetapi gagal daripada gagal mencoba. Adapun beberapa aspek yang harus diperhatikan.

- Aspek Manajemen

Bisnis ini dimiliki oleh catering naduma yang dibantu oleh karyawan-karyawannya sistem ini juga dikelola oleh naduma bersama sama dengan karyawannya dan setiap karyawannya mempunyai tugas masing-masing.

- Aspek Pemasaran

Kemudian kita lihat dari pemasaran catering naduma tersebut, yang dimana pemasaran yang merupakan salah satu kunci terpenting yang harus diperhatikan, catering naduma ini berjalan hanya ketika ada pemesanan saja. kemudian kegiatan produksi ini dimulai apabila pesanan telah diterima oleh pihak catering naduma, jadi kegiatan produksi dari usaha catering naduma ini tidak akan berkerja apa lagi selama masa pandemi ini melanda pemesanan pun tidak seperti hari biasa lagi karena orang jarang pesta atau acara penting karena semua telah dilakukan dalam keadaan virtual namun dalam keadaan ini pun catering naduma tetap bersemangat dalam menjalankan usaha mereka tanpa mengurangi semangat mereka, catering naduma tetap memasarkan cateringnya

walaupun masa pandemi karena pendapatan dari yang sebelumnya itu jauh berubah namun usaha catering naduma ini mampu menstabilkan pendapatan mereka dimasa pandemi ini. (Mahardika, dkk, 2019: 16)

Dapat diketahui bahwa bisnis kuliner yang saat ini menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan untuk dijalankan, dalam prospek usaha catering ini akan terus bergemilang ketika mengingat kuliner atau makanan yang merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi semua kalangan manusia. Kemudian bisnis dibidang kuliner ini yang dapat dijalankan ialah bisnis catering,

a) Target Pasar

Sudah menjadi salah satu kelaziman bahwa usaha catering naduma bekerja berdasarkan pesanan. Kegiatan produksi ini dimulai apabila telah pesanan telah diterima oleh pihak catering naduma. Maka tanpa pesanan, kegiatan produksi perusahaan catering naduma ini tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasarannya, keuangan dan administrasi. Target pasar iyalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisiensi tentang waktu dan tenaga mereka. Pesaing yang datang dari perusahaan catering lainnya.

b) Konsep pemasaran

Konsep pemasaran ini terdiri dari tiga elemen yaitu (Price+Place+Promotion). untuk produk, sebelum menjalankan bisnis hal yang harus diperhatikan yaitu mensurvei para pesaing-pesaing pebisnis yang sama, mensurvey keinginan masyarakat. Langkah berikutnya iyalah melakukan inovasi baru dengan cara membuat makanan yang berbeda dari pesaing yang lainnya dan tentunya yang sangat diminati oleh masyarakat. Contohnya saja bagaimana caranya membuat menu catering kita ini berbeda dan terlihat lebih unik serta kalau bisa catering murah. pemasaran ini tentunya tidak hanya berlaku pada pemasaran saja tujuannya agar dapat membangun suatu hubungan yang menguntungkan antara brend dan pelanggan yang ditargetkan.

c) Produk dan penetapan Harga

Untuk menetapkan suatu harga kita perlu melakukan riset dan membandingkannya dengan strategi harga. Tidak jarang kalau harga kita terlalu mahal karena sistem produksi yang salah dan tidak efektif. Mencari suplier yang harus mampu mensuplai bahan baku dengan harga yang benar-benar murah, sehingga bisa menghasilkan catering murah. (Khairunnisa, dkk, 2018: 66)

d) Sreategi pengembangan bisnis dalam islam

Pengembangan suatu bisnis itu sangat diperlukan gunanya untuk mencapai tujuan bisnis yang salah satunya iyalah keberlangsungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah sebuah proses cara perbuatan yang dapat mengembangkan suatu usaha catering naduma yang terletak dikeluarahan tanobato. Dan bisnis-bisnis yaitu suatu kegiatan usaha yang dapat mengorganisasikan untuk menghasilkan suatu laba atau menjual barang dan jasa gunanya untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Strategi bisnis ini sangat berkaitan dengan cara-cara yang digunakan oleh usaha catering untuk mendapatkan keunggulan persaingan di dalam setiap bisnisnya. Sebuah strategi bisnis ini dapat memberikan stabilitas arahan dan orientasi yang konsisten untuk beradaptasi dengan lingkungannya apa lagi catering naduma ini yang berada di keluharahan tanobato tersebut yang cukup mampu bersaing dalam aspek perdagangan atau bisnis secara islami.

Islam ini juga mempunyai prinsip-prinsip tentang suatu pengembangan sistem bisnis terutama dibidang bisnis catering naduma yang sesuai dengat syariat islam, yaitu harus terbebas dari unsur-unsur dharar (bahaya), jahalah (ketidakjelasan), dan zhulm (merugikan atau tidak adil). Bisnis ini juga harus terbebas dari yang namanya unsur maghrib, yaitu singkatan dari lima unsur, antara lain sebagai berikut:

1) Maysir (judi)

Maysir berasal dari kata al-yurs yang artinya mudah, suatu bentuk kegiatan yang mengandung unsur taruhan atau perjudian. Secara etimologis berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa harus bekerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa kerja. Sedangkan menurut termologis maysir ini merupakan segala sesuatu yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang sangat tinggi. Jadi dalam menjalankan suatu bisnis catering naduma juga harus menghindari yang namanya perjudian karena dalam bisnis hal ini sering mempengaruhi dalam jiwa dagang sehingga timbul yang namanya perjudian misalnya seseorang yang memesan catering namun pembayarannya dengan system taruhan nah hal inilah yang tidak diperbolehkan didalam islam. Maysir ini sangat dilarang dalam pengembangan peluang bisnis yang mana telah dijelaskan didalam al-quran yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan

Dari ayat diatas sangat jelas bahwa segala bentuk perjudian itu sangat di haramkan dan hal itu dianggap dzolim dan sangat di benci allah swt.

2) Aniaya (zhulm)

Secara termologis, kata Zhulm ini mempunyai arti yang mengurangi, menyimpang, menindas, bertindak sewenang-wenang, dan berlaku tidak adil. Sedangkan secara termonologis, artinya transaksi yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelanggan catering naduma apa lagi saat ini masa pandemi tentu banyak politiknya. jadi Pebisnis islam seharusnya tidak saling menyakiti pelanggan catering atau bisnisnya. Dalam dunia bisnis, konsep zhulm ini berkaitan erat dengan *bat il* seperti tertera dalam QS. An-Nisa 29, yang menyatakan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah suatu kezaliman, dan menzalimi orang lain dalam ekonomi berarti merusak dan membunuh kehidupannya. Oleh karena itu Allah melarang perdagangan dengan cara yang batil.

3) Gharar (penipuan)

Kata gharar ini mengandung arti penipuan atau penyesatan. Sedangkan menurut termologi, gharar iyalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Dengan kata lain gharar ini juga dapat dikatan ketidak pastian dalam bertransaksi yang mengakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam bertransaksi tersebut, dampak dari bertransaksi ini yang mengandung gharar iyalah adalanya penzhaliman atas pihak yang berstransaksi sehingga hal ini dilarang dalam islam.

Larangan gharar ini disamping itu mengandung pertaruhan atau ketidak pastian darimana hasilnya, jadi maksudnya untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menjaga terjadinya sikap permusuhan sebagai akibat terjadinya bisnis yang tidak jelas agar orang yang memesan atau membeli tidak tertipu sebab itu sama saja merugikan kedua belah pihak, contohnya saja jika seorang pelanggan dari naduma catering ini memesan cateringannya untuk acara syukuran namun pihak catering membuat menunya ala kadarnya dan bahannya juga asal buat dan tidak enak dari sini sudah terjadi penipuan karena pesanan tak sesuai ekspetasi namun harga tetap sama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW melarang jual beli gharar yang belum jelas harga, barang, waktu, dan tempatnya. (HR. Muslim).

Hadist diatas sudah sangat jelas bahwa praktik gharar tidak dibenarkan karena tidak ada kejelasan pada kualitas bahannya, dan kuantitas harga dan waktu.

4) Haram

Haram adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesuatu yang haram untuk dilakukan. Secara garis besar sesuatu yang diharamkan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu haram secara zatnya dan haram karena cara memperolehnya. Barang yang diharamkan dilarang diperjual belikan, seperti babi, berhalal, bangkai, dan khamar. minuman memabukkan. Oleh karena itu catering naduma harus memerhatikan bahan bahan yang hendak mereka gunakan jika ingin memuaskan pelanggannya dengan menikmati hidangan yang mereka buat, walaupun di masa covid 19 ini pihak catering naduma harus tetap jujur dalam memperdagangkan catering mereka ,karena sudah banyak ditemui diluar sana apa lagi di masa pandemi ini semua orang ingin mengambil cepat nya saja ditambah tidak boleh keluar rumah sehingga mereka membuat atau menggunakan bahan bahan yang sudah lama disimpan.

Coba kita berpikir apa sulitnya untuk memasak? Kenapa harus membutuhkan catering? Semua orangpun juga bisa memasak, yawalaupun bukan masakan yang sangat rumit, tetapi semua orang pasti bisa mengelolah makanannya sendiri. Disini dapat kita jelaskan bagi yang belum mengerti tentang pentingnya catering,terkhususnya untuk orang-orang yang sibuk, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa catering itu penting kemudian alasan mengapa kita harus menggunakan jasa catering untuk acara pesta,syukuran dan lain-lain. (Laeliah,2017:50-54)

a) Hemat pengeluaran

Pada umumnya membeli makanan yang mentah dengan yang sudah jadi itu lebih terjangkau makanan mentahnya, lantas mengapa dapat dikatakan bahwa membeli makanan catering bisa menghemat pengeluaran? Karena catering ini berbeda dengan restoran, jadi untuk dalam satu menu kita sudah harus membayar dengan biaya hidup sementara pada paket catering itu sendiri langsung dapat beberapa menu yang membedakannya hanya porsi saja walaupun begitu itu tetap dijamin bisa membuat kenyang.

b) Hemat waktu

Pekerjaan yang dapat dilakukan di catering naduma hanya 1-5 jam itupun belum lagi waktu yang digunakan untuk membeli bahan-bahannya dipasar dan waktu, tenaga yang kita keluarkan juga, jadi belum tentu rasanya akan enak. Beda halnya jika kita menyerahkan pekerjaan atau tugas tersebut kepada catering, jadi setiap masakan yang diolah oleh orang-orang yang sudah profesional dibidang catering naduma ini, bahan masakannyapun yang kualitasnya baik dan sebagai pelanggan juga cukup menunggu makanan pesanan sampai dirumah pelanggan.

c) Bisa diantarkan langsung ketempat tujuan

Salah satu keunggulan dari catering naduma adalah makanannya juga bisa diantar ketempat biaya pengantarannya juga tidak terlalu mahal. Dari sini dapat kita bayangkan bahwasanya kita gak perlu lagi memasak dirumah, gak perlu juga mengeluarkan banyak uang, gak perlu mengotori tangan juga dan gak perlu mengambil makanan tersebut karena semua sudah siap saji tinggal makan.

d) Makanan catering naduma dijamin bergizi

Hal ini tergantung jasa yang kita pilih juga. Kalau jasa cateringnya bagus, pasti sangat sering sajunjung tinggi banyak orang. Beberapa contoh dari makanan yang bergizi adalah sedikitnya penggunaan MSG, makanan ini dimasak dengan baik, kolaborasi menyenyapun seimbang, serat terpenuhi, ada sayuran, sumber protein, dan karbohidratnya dan lain-lain. Apa lagi dimasa pandemi ini kita harus mengkonsumsi makan makanan yang sehat agar imun tubuh kita kuat.

e) Membuat acara lebih terkesan

Kapan saja kita ingin melangsungkan suatu acara, jasa catering naduma ini siap melayani kita kapan pun itu. Makanan-makanan yang diolah catering naduma selalu segar, enak, dan jenis makanannyapun macam-macam serta bervariasi. jasa catering ibu naduma ini biasanya juga menyediakan layanan yang lebih dari hanya menyajikan penyajian makanannya. Mereka juga dapat mengatur peletakan meja untuk para tamu, menyediakan peralatan makan super lengkap dan enak, menata dekorasi, melayani tamu dan, membuat acara kita menjadi lebih berkesan dan bermanfaat untuk orang banyak.

Beberapa harga untuk memesan catering naduma ini , Jadi kalau masalah harga itu tergantung kepada Menu Apa yang kita Pesan. Menu juga dapat memengaruhi harganya. Bahan yang digunakan untuk membuat suatu masakan dari masing-masing masakan tersebut memiliki harganya sendiri-sendiri. Contohnya saja seperti harga daging, ayam dan tempe yang jelas itu tidak sama. Kemudian menu untuk mengolah Menu tersebut Ketika makanan itu sulit dimasak, maka ada banyak tenaga yang harus di keluarkan oleh catering naduma. Tenaga dari para staf catering naduma itu tidak gratis, selalu ada harganya. Untuk itu lah harga catering bisa dipengaruhi oleh kesulitan menu yang dimasak. Kemudian Porsi yang dibutuhkan dari pelanggan catering naduma tetapi biasanya jika pesanan kita banyak, kita akan memperoleh banyak potongan harga dibandingkan hanya membeli 10 atau hanya 5 porsi saja. Hal ini layaknya grosir, semakin banyak membeli, maka semakin memperoleh banyak potongan harganya.

Berikut ini iyalah harga untuk tiap-tiap satu porsi makanan catering naduma:

- a. Harga Nasi Kotak : Rp 10.000 – Rp 34.000 (isinya terdiri dari nasi, menu utama, lauk tambahan seperti sayur sayurannya, dan pelengkap)
- b. Harga Catering sancak box Rp 10.000 – Rp. 20.000 (isinya hanya ada snack-snack, tidak ada lauk pauk dia hanya diisi jajanan saja).
- c. Harga catering harian : Rp. 17.000-30.000 layanan catering hariannya yang berisi paket seperti nasi box dan siap dikirim setiap hari ketempat yang memesan atau ke pelanggan naduma catering.

Dari beberapa harga diatas dapat kita telusuri bahwa catering naduma yang berada di kelurahan tanobato ini memberikan harga sesuai dengan kualitasnya. Sehingga tidak mengecewakan pelanggan nya apa lagi saat sekrang ini masa pandemi tentu naduma catering terus berusaha mencari pelanggan agar pendapatan yang memeperoleh setara dengan sebelum covid 19 ini melanda.

Kunci kesuksesan dalam berbisnis yaitu terletak pada etika dan moral yang diterapkan didalam bisnis tersebut. Dalam hal ini mengelola bisnisnya, Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat yang menjadi suri tauladan bagi para pebisnis agar bisnis yang dijalankannya tidak menyimpang dari aturan Islam. Sifat-sifat ini juga telah diterapkan oleh pihak Catering Naduma.

1. Jujur (siddiq)

Dunia bisnis, kejujuran bisa ditampilkan dalam bentuk kesungguhan dan ketetapan, baik ketetapan waktu, janji, pelayanan, pelaporan mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak ditutup-tutupi yang kemudian diperbaiki secara terus-menerus, serta menjauhkan diri dari berbuat bohong dan menipu. Sikap jujur yang telah diterapkan oleh Catering naduma dalam menjalankan bisnisnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Tidak melipat gandakan harga

Harga merupakan jumlah dari biaya ditambah dengan keuntungan. Penetapan harga dari suatu produk akan sangat mempengaruhi keberhasilan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Catering naduma yang memiliki kisaran harga yang bervariasi untuk berbagai menu makanan, minuman, maupun snack. Setiap menu memiliki kisaran harga yang berbeda-beda. Meski kisaran harganya untu kalangan menengah keatas, namun catering ini tidak pernah sepi oleh para konsumen walaupun covid 19 karena Naduma catering mampu mempertahankan pelanggannya.

Banyaknya pilihan paket hemat untuk aneka menu makanan, minuman, dan snack yang ditawarkan. Kejujuran yang diterapkan oleh Naduma Catering adalah bahwa menu-menu tersebut sudah sesuai dengan harga masing-masing paket, tanpa ada pengurangan mutu dan kualitas dari

menu tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW yang selalu menghimbau agar dalam menetapkan harga sebuah barang harus disesuaikan dengan nilai yang terkandung didalamnya. Selain itu, penetapan harga juga harus disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

- Mengakui kelebihan dan kelemahan produk

Didalam aspek ini, Naduma Catering selalu mengatakan apa adanya, tidak menutupi-nutupi mengenai produk yang ditawarkannya. Naduma Catering akan mengedepankan kualitas dan kebenaran dari produk tersebut. Apabila produk itu baik, maka pihak Naduma Catering akan mengatakan baik. Namun sebaliknya, apabila produk itu buruk, maka pihak Naduma Catering akan mengatakan buruk hal ini harus diterapkan dalam berbisnis.

- Jujur dalam takaran

Didalam hal ini, seorang pebisnis dilarang mengurangi timbangan ketika menakar. Mengenai aspek ini, bahwa kejujuran dalam hal takaran maupun ukuran mutlak harus ada. Naduma Catering sudah menerapkan aspek ini, yaitu tidak mengurangi ukuran untuk semua menu yang ditawarkan, dalam arti lain memenuhi semua menu yang telah dipesan oleh konsumen sesuai dengan ukuran yang ada.

2. Tanggung jawab (amanah)

Sikap bertanggung jawab dan dapat dipercaya yang diterapkan oleh Naduma Catering, antara lain sebagai berikut :

- Menepati janji

Sebagai seorang pebisniskita harus selalu menepati janjinya, baik kepada para pembeli maupun diantara sesama pebisnis lainnya. Janji yang dimaksudkan dalam hal ini adalah janji dimana seorang pebisnis melakukan transaksi bisnisnya kepada para pembeli maupun rekan bisnisnya Berdasarkan hasil wawancara , dapat diketahui bahwa Naduma Catering menepati janji. Hal ini terlihat dari adanya potongan harga (diskon) Naduma catering juga melakukan potongan harga hal inilah salah satu trik naduma catering memepertahankan pelanggannya dimasa pandemi ini, apabila pembayaran didalam proses pemesanan dilakukan didepan secara cash. Selain itu, jika memesan dengan jumlah yang banyak akan mendapatkan bonus, seperti mendapat souvenir gratis. Tidak hanya mendapat bonus berupa souvenir gratis, Naduma Catering juga akan memberi bonus dari catering yang mereka pesan. Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa konsumen dengan sendirinya akan menaruh kepercayaan kepada pihak Naduma Catering dan tidak akan ragu untuk

melakukan perjanjian perjanjian berikutnya. Selain itu, konsumen tentunya akan merasa puas atas layanan yang diberikan oleh Naduma catering.

- **Pencatatan Keuangan**

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Naduma Catering memiliki catatan atas transaksi keuangannya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengetahui keuntungan maupun kerugian dalam jangka waktu tertentu. Akuntansi ini merupakan suatu proses pengidentifikasian, pencatatan, dan pengkomunikasikan informasi-informasi keuangan kepada beberapa pengambil keputusan, seperti kreditur, investor, dan manajer Akuntabilitas merupakan perwujudan dari sifat amanah dari manager administrasi dan keuangan kepada pemilik Naduma Catering Laporan keuangan ini menjadi pertanggungjawaban dan tolak ukur bagi Naduma Catering, apakah bisnis tersebut mengalami kemajuan atau kemunduran. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa sifat ini sangat penting untuk diterapkan dalam suatu bisnis.

3. Fathanah (cerdas)

Didalam aspek ini, Naduma Catering memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi. Hal ini terlihat dari berbagai macam inovasi yang telah dilakukan oleh Naduma Catering dimasa pandemic dengan memperbanyak peluang bisnis kemudian dengan memperbanyak variasi pada setiap menunya, memodifikasi produk lama dan menciptakan produk baru yang masih berhubungan dengan cateringannya. Dalam melakukan inovasi terhadap produk barunya tersebut tidak tergolong produk yang dilarang oleh aturan Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inovasi produk yang dilakukan oleh Naduma Catering tidak bertentangan dengan syarat Islam, sebab produk yang dihasilkan dari inovasi tersebut merupakan produk yang memiliki manfaat dan tidak termasuk dalam produk yang diharamkan dalam aturan Islam.

4. Tabligh (komunikatif)

Sikap tabligh yang diterapkan usaha Naduma catering diantaranya sebagai berikut:

- **Komunikasi dalam bisnis**

Pada dasarnya komunikasi adalah penyampaian dan penerimaan suatu pesan. Dalam hal berkomunikasi dengan konsumen maupun dengan mitra bisnisnya, Naduma Catering menggunakan bahasa yang sopan, halus, dan mengedepankan sopan santun. Dalam hal ini juga bahwa komunikasi yang diterapkan oleh Naduma Catering sudah tepat yakni sudah menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyakiti hati para konsumen. Selain itu, hal yang perlu diperhatikan bagi para pebisnis dalam

berkomunikasi adalah berbicara dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh akal.

5. Murah hati

Dalam hal ini, Naduma Catering akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumennya, sebab konsumen menjadi prioritas dalam terciptanya kebutuhan bisnis kulinernya. Naduma Catering memberikan pelayanan yang tepat, cepat, murah hati dan pelayan yang ramah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan para pebisnis untuk bermurah hati dalam setiap transaksi, murah senyum dan ramah tamah. Apapun dan bagaimanapun bentuk dari pelayanan yang diberikan kepada konsumen, semua hal itu dilakukan untuk menarik minat dan membuat konsumen merasa nyaman. Sebagaimana Naduma Catering memberikan sebagaimana Pelayanan Sepenuh Hati, Naduma Catering akan selalu memberikan pelayanan yang maksimal dengan cara memberikan arahan kepada karyawannya untuk selalu ramah, sopan, dan murah senyum kepada konsumen.

6. Niat suci dan ibadah

Bagi seorang Muslim menjalankan usaha (bisnis) merupakan ibadah sehingga usaha itu harus dimulai dengan niat yang suci dari hati, cara yang benar, tujuan yang benar, serta pemanfaatan hasil usaha secara benar pula. Dalam aspek ini, terlihat jelas dari tujuan bisnis Naduma Catering yaitu dapat memperbaiki perekonomian keluarga dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitarnya dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam menjalankan bisnis kulinernya, Naduma Catering tidak hanya menguntungkan secara finansial bagi pemilik usaha saja, tetapi juga menguntungkan secara sosial bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga terlihat dari kualifikasi karyawannya yang direkrut dengan melihat kondisi sosialnya. Hal ini sebagai wujud rasa syukur nya kepada Allah SWT akan bisnisnya yang dapat berjalan dengan baik. Selain itu, untuk memotivasi para karyawannya agar lebih giat lagi dalam bekerja. Dari pemaparan diatas, strategi-strategi yang diterapkan oleh Naduma Catering secara umum sudah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai dengan syariat islam. Namun, jika dilihat dengan potensinya Naduma Catering cukup baik, dan memiliki pangsa pasar yang cukup luas, seharusnya Naduma Catering mampu berkembang lebih pesat ditambah masa pandemi ini. Akan tetapi, dalam pelaksanaan strategi peluang bisnisnya, Naduma Catering yang berada di kelurahan tanobato masih kurang efektif. Hal ini terlihat dari penurunan jumlah penjualan yang dialami oleh Naduma Catering. Karena sudah banyaknya bisnis-bisnis kuliner terutama catering yang bermunculan atau meniru namun hal itu tidak akan mengurangi semangat bagi pihak naduma catering mereka tetap semangat dalam menjalankan

peluang bisnis catering ini supaya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ekonomi islam dan tidak melenceng dari ajaran ajarannya.

Adapun pandangan mazhab syafii tentang hukum akad salam pesanan catering

- Akad salam

Akad salam adalah sebuah akad pesanan makanan yang dilakukan oleh pemesan kepada pembuat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok guna yang terselenggaranya sebuah hajat atau pesta dan lain-lain. Dengan kata lain akad salam ini juga dapat disebut sebagai akad salaf namun secara bahasa keduanya memiliki makna yang serupa. Sementara ulama syafiiyah dan hanabilah mengatakan bahwa salam ialah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi yang tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu yang tertentu dengan pembayaran yang dilakukan secara tunai di majlis akad

- Catering

Catering merupakan sebuah hidangan untuk pesta hajatan, pertemuan dan acara acara besar sebagainya yang dibuat berdasarkan keinginan pemesan. Adapun menurut para ahli catering merupakan suatu usaha dibidang jasa yang menyediakan atau melayani permintaan makanan dalam berbagai macam aneka ragam, menurut purwati Tj, dkk.

- Mazhab syafii

Mazhab Syafi'i ialah suatu haluan atau aliran suatu hukum fikih yang menjadi panutan umat muslim dalam beribadah. Di dalam pembahasan kali ini, penulis memilih tiga dari banyaknya ulama

Syafi'iyah. Diantaranya ialah Imam Abu Zakariya Muhyiddin Ibn Syaraf an-Nawawi, Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Qasim al-Gazzy, serta Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husni al-Husaini ad-Damasyqy, selain itu tentunya penjelasan syarah lebih lengkap dan jelas dari pada penjelasan matannya saja. Penulis memilih beberapa ulama tersebut dikarenakan dari ketiga ulama tersebut telah jelas berbeda-beda masa dan jamannya, model penulisa yang berbeda di mana ada yang menuliskan matanya saja dan kitab yang lain menggunakan syarahnya. (Hastuti,2019: 36)

D. KESIMPULAN

Catering salah satu solusi bagi konsumen yang ingin memenuhi kebutuhan dan keinginannya tanpa harus membuang waktu dan tenaga. Hal ini juga merupakan Peluang bagi para pebisnis

catering untuk dapat menjaga dan terus meningkatkan kualitas mutu pelayanannya dari waktu ke waktu sehingga dapat terus memuaskan konsumennya. Usaha catering ternyata masih berpotensi dilakukan di masa pandemi ini.

Dari artikel ini disimpulkan bahwa dengan wabah covid 19 yang belum di ketahui kapan berakhir. Hadirnya Pengembangan usaha catering Naduma yang terletak di Kelurahan Tanobato sangat berpeluang di pandemi covid 19, karena ikut berperan dalam memutus tali rantai penyebaran virus covid 19 dikelurahan Tanobato. Catering Naduma bisa antar pesanan melalui online atau rumah ke rumah dan pesanan konsumen lebih meningkat. Catering Naduma dimasa pandemi covid 19 juga ada kelemahan dan peluang. Kekurangan yang di rasakan Catering Naduma adalah tidak bisa antar pesanan pesta karena dalam Pandemi Covid 19 di larang adanya pesta. Peluang yang di dapat Catering Naduma Di masa pandemi covid 19 adalah dengan di batasinya keluar rumah maka meningkatnya pesanan konsumen terhadap Catering Naduma.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2020. Pengerian Karakteristik Katering. <https://cateringmami.com/pengertian-catering/>. Diakses pada tanggal 09 Juli 2021.
- Hastuti, Y. T. 2019. Hukum Akad Salam dalam Katering Perspektif Mazhab Syafi'i. IAIN Purwokerto.
- Khairunnisa., dan F. Damayanti. 2018. Pengolahan Bisnis Catering Ummi Nisa Medan Berbasis Web. Jurnal Sistem Informasi. Vol. 2 : (1). Hal. 2579-5341.
- Laelihah. S. 2017. Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Kuliner Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mahardhika, W. B., dan N. N. Sunariani. 2019. Strategi Pemasaran Produk Makanan Catering Melalui Media Sosial Instagram. Jurnal manajemen dan bisnis. Vol. 16 : (1). Hal. 1829-8486.
- Ningtyas, D. P., H. Ramdani, dan D. F. Risina. Pengembangan Usaha Katering "Real Food" Khusus balita berbasis Online di Posdaya Mandiri Bekasi. Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Keguruan dan Pendudukan.
- Prabowo, P. A. 2013. Analisis Perilaku Konsumen Jasa catering Untuk Keperluan Pesta di Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 2 : (1).

Rohmalia, P. A., dan Y. M. Djajalaksana. Pengelolaan Bisnis *catering* dengan Memanfaatkan Sistem Informasi Berbasis Web (Studi Kasus pada Anggun Catering).

<https://cateringmami.com/pengertian-catering/>. Diakses pada tanggal 09 Juli 2021.

<https://www.bankmuamalat.co.id/artikel/pengertian-maysir-gharar-dan-riba>. Diakses pada tanggal 09 Juli 2021.



04

FAKHRI ZAKIY A.W

*Problematika Pengusaha Heler
Di Nagari Cupak Pada Masa
Pandemi Covid-19*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



Problematika Pengusaha Heler Di Nagari Cupak Pada Masa Pandemi COVID19

Fakhri Zakiy Aurakhmah Witra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Artikel ini membahas tentang problematika/permasalahan yang dialami oleh pengusaha giling padi/heler di Nagari Cupak selama wabah pandemi COVID-19. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh pemilik usaha giling padi/heler ialah pendapatan yang pada tahun sebelumnya berjalan lancar sekarang menurun drastis. Hal ini disebabkan karena adanya wabah virus COVID-19. Virus ini telah memberikan dampak dan perubahan bagi sektor-sektor kehidupan manusia. Baik dari segi kesehatan, transportasi, pola perilaku masyarakat, dan yang lebih utama ialah perekonomian. Sektor perekonomian sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, jika perekonomian seseorang mengalami masalah, maka kelangsungan hidup seseorang akan mengalami kesulitan.

Kata Kunci : *COVID-19, Pengusaha Heler, Sektor-sektor*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau yang terbesar di seluruh bagian Negara Republik Indonesia. Diantaranya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, Pulau Papua dan pulau-pulau lainnya. Indonesia memiliki SDA yang sangat mumpuni diantaranya tanah yang subur dan kaya akan rempah-rempahnya. Negara Indonesia mempunyai penduduk terbanyak dengan urutan ke empat di dunia dengan jumlah penduduk 270,6 juta jiwa. Pekerjaan penduduk Indonesia mayoritas bertani atau berkebun karena karakteristik sebagian wilayah negara Indonesia berupa desa salah satunya ialah daerah Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, kabupaten Solok, Sumatera Barat. Adapun hasil yang diperoleh adalah berupa beras dan sayur-sayuran.

Beras merupakan suatu bahan makanan pokok yang dibutuhkan manusia yang mengandung banyak sekali kandungan gizi, dan karbohidrat yang dapat membentuk stamina manusia. Beras merupakan makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat tinggi namun proteinnya rendah. Kandungan gizi beras per 100 gr bahan adalah 360 kkal energy, 6,6 gr protein, 0,58 gr

lemak, dan 79,34 gr karbohidrat (*Suliantini et al., 2011*). Beras berasal dari sebuah tanaman yang dinamakan dengan padi yang dikenal dengan istilah ilmiah “*Oryza Sativa*”. Ada beberapa jenis beras yakni beras merah, beras putih, dan beras basmati. Masing -masing beras memiliki beragam manfaat misalnya beras merah, Beras merah mengandung gen yang memproduksi antosianin, antosianin yang dihasilkan merupakan sumber warna merah yang terdapat pada kondisi fisik beras. Senyawa yang terdapat pada lapisan warna merah beras bermanfaat sebagai antioksidan, anti kanker, anti glikemik tinggi (*Sumartini, 2018*). Beras dapat diolah menjadi nasi dan dapat juga dioalah sebagai tepung. Beberapa negara mengkonsumsi beras diantaranya Jepang, China, India, Thailand, Bangladesh, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Dan lain-lain.

Solok, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah penghasil beras yang terenak dan premium karena beras solok memiliki tekstur yang pulen namun tidak lengket. Berbeda dengan beras lainnya, beras solok termasuk ke dalam jenis beras long grain dengan bulir yang lonjong memanjang. Setelah dimasak, mempunyai aroma yang harum dan wangi. Tekstur yang pulen tetapi tidak cepat lembek ketika terkena masakan berkuah.

Adapun proses pengolahan beras dimulai dari pemanenan beras yang sudah matang, kemudian di jemurkan, dan setelah dijemur di bawa ke tempat penggilingan beras guna memisahkan kulit beras dengan isi beras tersebut. Nama dari tempat penggilingan beras disebut dengan Heler. Heler merupakan tempat penggilingan beras/padi dengan menggunakan mesin penggiling guna memisahkan sekam padi (kulit beras) dengan beras serta membersihkan beras dari sisa kulit sekam padi. Istilah heler diambil dari kata Huller yang dimana nama dari mesin penggiling padi tersebut. Heler banyak ditemukan disekitar daerah, terutama di daerah Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. Mayoritas warga Nagari Cupak menggiling padi menggunakan mesin guna kepraktisan dalam menggiling beras.

Pada tahun 2020, terjadi bencana wabah penyakit virus yang menyebar di seluruh dunia dikenal dengan nama Virus COVID-19. Virus ini merupakan virus yang dapat mengganggu sistem pernafasan dan menyerang sistem imun manusia. Dampaknya ialah munculnya berbagai penyakit pernapasan berupa Pneumonia, Sesak Nafas, dan lain-lain. Selain dari kesehatan, dampak pandemi COVID-19 ini juga mempengaruhi aktifitas perekonomian masyarakat. Wabah ini mengganggu tatanan perekonomian masyarakat. Pada tahun 2020, wabah COVID-19 mulai mempengaruhi sektor perekomian Indonesia. Adanya kebijakan pembatasan kegiatan sosial atau dikenal dengan istilah

PSBB yang terjadi setelah peningkatan korban wabah COVID-19 dalam kurun waktu cepat yang dapat melemahkan perekonomian masyarakat Indonesia. Terjadinya penutupan industri secara massal, pemberlakuan “Work From Home (WFH)”, dan PHK terhadap karyawan perusahaan secara masal (*Fakhrul Rozi et al, 2020*). Terutama pada para petani dan pengusaha giling padi atau heler yang menyebabkan berkurangnya permintaan supply giling padi. Rata-rata mayoritas tenaga kerja petani berusia 50 tahun keatas, otomatis akan lebih rentan terinfeksi virus COVID-19 yang berpotensi pada bertambahnya pengangguran yang berasal dari kalangan petani.

Dalam artikel ini penulis mengangkat tema tentang problematika/permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha Heler di nagari cupak. Disana akan disampaikan apa-apa saja dampak yang dirasakan oleh para pengusaha heler serta perbandingan pasokan dan persentase pendapatan sebelum dan saat pandemi COVID-19.

B. Metode

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam artikel ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran bagaimana permasalahan dalam mengelola usaha gilingan padi/heler di nagari cupak pada masa pandemi COVID-19. Data tersebut dikumpul melalui hasil wawancara dengan pemilik usaha heler dan penjual beras. Dan juga mencari informasi seputar Heler/penggilingan padi

C. Pembahasan

Nagari Cupak merupakan suatu desa yang Indah dan Asri terletak di kaki Gunung Talang yang bertempat di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok. Daerah Nagari Cupak di apit oleh beberapa Nagari diantaranya Nagari Talang, Nagari Jawi-Jawi, Nagari Koto Baru, Nagari Gantuang Ciri, Nagari Koto Anau, dan Nagari Muaro Paneh. Dikutip dari Website Arsip-Smart Nagari Cupak, jumlah penduduk Nagari Cupak sebesar 16497 dengan populasi laki-laki sebesar 8302 dan populasi perempuan sebesar 8195. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak ini, mayoritas pekerjaan masyarakat Nagari Cupak bekerja sebagai Petani beras, karena terdapatnya sslahan yang sangat luas di Nagari Cupak yang memungkinkan masyarakatnya untuk menanam tumbuhan seperti padi dan sayuran dan Nagari Cupak menjadi penghasil utama beras solok.

Dengan bertani akan menjadi suatu kekuatan perekonomian di Nagari Cupak. Kurang lebih ada 18 Heler yang terdapat di berbagai Jorong Nagari Cupak. Pada tahun 2019 keadaan

perekonomian pengusaha heler mengalami kemajuan dikarenakan tingkat kebutuhan pokok beras yang naik. Berbeda dengan tahun 2020 sampai dengan sekarang mengalami penurunan yang sangat signifikan disebabkan adanya wabah penyakit Virus COVID-19. Wabah virus ini membuat perekonomian di seluruh dunia menjadi lumpuh terutama pada para pengusaha heler.

Oleh sebab itu, penulis akan menyampaikan kondisi perekonomian para pengusaha heler di nagari cupak, baik dari segi jumlah beras yang di giling, pendapatan yang diperoleh oleh para usaha heler, dan lain-lainnya dari sebelum pandemi sampai saat pandemi COVID-19. Serta menyampaikan dampak apa yang dirasakan oleh para usaha heler nagari cupak saat ini.

1. Kondisi Perekonomian Pengusaha Heler di Nagari Cupak Sebelum pandemi COVID-19

Sebelum tahun 2020, perekonomian pengusaha heler di nagari cupak dalam keadaan stabil. Hal ini dikarenakan bahwa banyaknya permintaan akan beras dari usaha rumah makan. Salah satunya ialah heler milik kepunyaan bapak Buya yang berlokasi di Dusun Padang Dama, Jorong Balai Pandan, Nagari Cupak. Heler beliau ini berdiri sejak tahun 2009 hingga sekarang yang berusia 12 tahun. Adapun jumlah beras yang di giling oleh heler beliau dengan kisaran 9 ton, dibandingkan dengan heler-heler lain yang memperoleh beras hasil gilingan dengan kisaran antara 6 sampai 7/5 ton. Untuk pendapatan sendiri, heler beliau memperoleh pendapatan dengan kisaran Rp. 540.000.000,00-. Jika dibandingkan dengan heler-heler lain, pendapatan yang di peroleh dengan kisaran antara Rp. 80.000.000,00- sampai dengan Rp. 300.000.000,00-.

Hal ini menjadi selisih yang sedikit antara heler yang dimiliki oleh Bapak Buya dengan Heler-heler lainnya. Selain itu penulis juga berkesempatan mewawancarai pemilik usaha Penjual beras atas nama Bapak Adler. Beliau membuka usahanya secara sendiri sejak tahun 2017 dan masih beroperasi sampai sekarang. Beliau menjual beras dengan jumlah 4 ton dengan pendapatan kira-kira Rp. 40.000.000,00-.

2. Kondisi Perekonomian Pengusaha Heler di Nagari Cupak Setelah pandemi COVID-19

Pada saat pandemi COVID-19 melanda diseluruh dunia, seluruh aspek perekonomian terkena dampak dari pandemi COVID-19 khususnya bagi para pengusaha heler. Pada heler bapak Buya, jumlah beras yang di giling dengan kisaran 3 ton. Artinya terjadi penurunan yang sangat signifikan dengan persentase sekitar 75%. Hal ini juga dirasakan pada heler-heler lainnya yang mengalami penurunan yang signifikan yang sebelumnya antara 6 sampai 8 ton, sekarang

menjadi 0.5 sampai 3 ton. Begitu juga pendapatan yang mengalami penurunan, yang semula pendapatan heler Bapak Buya berkisar Rp. 540.000.000,00- sekarang menjadi Rp. 24.000.000,00-.

Tidak hanya pada heler beliau, heler lainnya juga mengalami penurunan pendapatan. Selain usaha heler, usaha penjualan beras pun terkena imbas dari pandemi COVID-19. Jumlah beras yang dijual dengan kisaran 2 ton dan pendapatan yang diperoleh sekitar Rp. 20.000.000,00-. Hal ini bermakna terjadinya penurunan sekitar 10% dari usaha yang dijalani oleh Bapak Adler pada saat pandemi COVID-19.

3. Problematika dan Dampak Wabah COVID-19 Bagi Para Pengusaha dan Pelaku Ekonomi

Wabah COVID-19 memberikan dampak buruk yang sangat besar bagi perekonomian dunia. Sama-sama kita ketahui bahwa banyaknya problematika yang dialami oleh perekonomian diantaranya terjadinya krisis moneter, harga akan suatu barang melambung tinggi, terjadi kelangkaan barang, inflasi, PHK massal bagi karyawan, dan lain-lain. Contohnya saja yang baru-baru ini terjadi pada produk minuman yang mengalami kelangkaan akibat dari Panic Buying oleh masyarakat. Hal tersebut memunculkan problematika pada produk minuman yang membuat harga dari produk tersebut melambung naik.

Pada pengusaha heler, wabah ini memunculkan dilema dan problematika yang membuat perekonomian para pengusaha heler melemah. Adapun problematika yang dihadapi oleh pengusaha heler saat ini ialah sebagai berikut:

1. sulitnya penjualan akan beras yang di giling akibat dari sedikitnya permintaan dari konsumen seperti rumah makan. Sebelumnya permintaan beras ke pengusaha heler sangat banyak. Akan tetapi pada saat pandemi, sedikit permintaan beras kepada pengusaha heler.
2. Sedikitnya pasokan hasil panen yang diperoleh oleh petani. Akibatnya sedikit padi atau beras yang akan digiling ke tempat heler.
3. Pendapatan yang di hasilkan oleh para pengusaha heler menurun drastis yang disebabkan karena permintaan akan beras yang sedikit

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa betapa besarnya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap perekonomian para pengusaha heler yang dapat memicu problematika/permasalahan. Sehingga akan berdampak pada perekonomian pemilik heler yang menurun dan kerugian yang dialami oleh pemilik heler.

Tak hanya para pemilik heler yang mengalami problematika dan dampak dari wabah COVID-19, tetapi para petani pun terkena dampaknya juga yang juga mempengaruhi para pengusaha heler. Adapun dampak yang dirasakan oleh para petani adalah:

1. Penurunan Daya beli

Pengaruh dari wabah pandemi COVID-19 terhadap daya beli petani tercermin dari penurunan nilai tukar petani. Di kutip dari Artikel website Lombok Post, Jawa Post, nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang akan diterima oleh petani dari penjualan komoditashasil pertanian dengan indeks harga yang dibayar demi memenuhi kebutuhan hidup. Jika nilai tukar petani menurun maka akan berdampak pada daya beli petani yang mengakibatkan penurunan pendapatan para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Meningkatnya kemiskinan yang berasal dari kalangan petani.

Seperti yang kita lihat saat ini tingkat kemiskinan tertinggi berasal dari kalangan rumah tangga para petani dimana pendapatan yang mereka dapatkan itu sedikit. Dampak yang diakibatkan oleh COVID-19 ini mempengaruhi pendapatan para petani. Jika pendapatan para petani sangat rendah disebabkan oleh wabah pandemi COVID-19, maka angka kemiskinan akan melambung naik.

3. Kesehatan para petani

Rata-rata tenaga kerja para petani berusia 50 tahu keatas. Jika wabah pandemi COVID-19 ini tidak terbandungi atau tidak terkendali hingga tembus ke ranah pertanian, maka akan muncul kepanikan terhadap masyarakat bawah akan menambah keterpurukan produksi pangan.

4. Tenaga kerja pertanian

Jika wabah pandemi COVID-19 ini tak terkendali, besar kemungkinan para petani rentan terinfeksi virus COVID-19 yang berdampak pada pengurangan tenaga kerja para petani.

D. Kesimpulan

Dengan paparan diatas dapat dikatakan bahwa wabah COVID-19 ini tidak bisa dianggap sepele dan harus ada upaya atau tindakan dalam mencegah wabah ini. Wabah ini sangat mempengaruhi berbagai sektor di seluruh dunia diantaranya sektor kesehatan, transportasi, pola perilaku masyarakat, pendidikan, dan yang paling mempengaruhi ialah sektor perekonomian. Telah banyak sektor perekonomian yang terganggu akibat dari pandemi ini baik itu perdagangan, transaksi, kegiatan ekspor impor, dan lain sebagainya. Terjadinya PHK secara massal dan berskala besar yang disebabkan karena perusahaan tidak mampu membiayai gaji karyawannya akibat dari wabah pandemi COVID-19 ini

Ditambah dengan adanya pembatasan kegiatan sosial yang disebabkan dari virus COVID-19 ini, dapat melemahkan UMKM masyarakat. Sulitnya masyarakat dalam memperoleh pendapatan dari hasil usaha UMKM di masa pandemi COVID-19. Jika UMKM suatu masyarakat tidak bisa menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini, otomatis UMKM masyarakat tersebut akan cepat Gugur atau menutup usahanya akibat dari ketidakmampuan untuk memenuhi UMKM tersebut.

Seperti yang dipaparkan dalam pembahasan kita, Pengusaha Heler di Nagari Cupak terkena dampak dari wabah virus COVID-19 ini. Hal ini memicu problematika yang harus dihadapi oleh setiap pemilik usaha heler di nagari cupak. Mereka dituntut untuk menyesuaikan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Adapun problematika yang mereka hadapi ialah persoalan pendapatan, stok pasokan beras, dan penjualan. Banyak yang terjadi perubahan yang tidak diinginkan oleh para pengusaha heler. Pendapatan yang menurun drastis dari tahun sebelumnya membuat pengusaha heler mengalami kesulitan dalam mendapatkan modal untuk mengelola helernya. Pada tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19 belum terjadi, pendapatan yang diperoleh oleh pemilik heler sekitar Rp. 540.000.000,00-. Jumlah stok beras yang di giling dan akan di produksi sekitar 9 ton. Kemudian, pada saat pandemi COVID-19 telah melanda di seluruh dunia, pendapatan yang semula sekita Rp.540.000.000,00- sekarang menjadi Rp.24.000.000. dan jumlah stok yang semula 9 ton sekarang menjadi 2 ton.

Sulitnya penjualan yang diakibatkan dari wabah pandemi COVID-19 ini membuat kurs perekonomian pemilik heler turun yang disebabkan oleh pendapatan yang diterima oleh pemilik heler dari konsumen sedikit. Rata-rata konsumen dari pengusaha heler berasal dari usaha rumah

makan. Sedikitnya hasil pasokan panen padi yang membuat jumlah beras/padi yang akan di giling ke heler menurun dari yang semula yang stabil.

Maka, dibutuhkan kesiapan dari para pengusaha untuk bisa bertahan dalam situasi dan kondisi yang dialami. Jika para pengusaha heler tersebut tidak bisa menyesuaikan situasi dan kondisi maka perlahan-lahan perekonomian dalam usahanya akan menurun.

Daftar Pustaka

Sumartini. Hasnelly. & Sarah. (2018). Kajian Peningkatan Kualitas Beras Merah (*Oryza Nivara*) dengan Cara Fisik. *Pasundan Food Technology Journal*, 3(1), 85

Yamali, R.F, & Putri, N.R. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal Of Economics and Business*, 4(2), 386

<https://cupak-slk.desa.id/first/wilayah>. Diakses 28 Juni 2021.

<https://lombokpost.jawapos.com/opini/15/04/2021/nasib-petani-di-tengah-gempuran-pandemi-covid-19/>. Diakses 4 Juli 2021.

Buya. *Wawancara Pribadi*. Dampak dan permasalahan yang dihadapi pada masa pandemi COVID-19. Jum'at 9 Juli 2021

Adler Ahmad. *Wawancara Pribadi*. Problematika dang pengaruh penjualan beras pada masa pandemi COVID-19. Sabtu 10 Juli 2021



05

FIRZA RAMADHANI

*Kontribusi UMKM Terhadap
Pendapatan Masyarakat Jorong Tigo
Kenagarian Tanjung Beringin Di
Masa Pandemi Covid-19*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT JORONG TIGO KENAGARIAN TANJUNG BERINGIN DI MASA PANDEMI COVID-19

Firza Ramadhani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh UMKM terhadap pendapatan masyarakat dalam perspektif Islam, dan bagaimana strategi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat bertahan dari pandemik Covid 19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, UMKM di Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin tersebut mampu memberikan kontribusi terhadap warga sekitarnya, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat. Hal tersebut tentu saja memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat pada umumnya dan khususnya pada pemilik. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang strategis dan melibatkan mata pencaharian orang banyak, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Ekonomi Islam memandang bahwa tidak ada larangan terhadap UMKM selama usaha yang dijalankan itu tidak melenceng dari ajaran agama Islam. Selain itu, pada masa pandemi seperti yang terjadi saat ini para pemilik usaha harus mempunyai strategi agar bisnisnya tetap berjalan lancar dan tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Tak terkecuali pemilik bisnis syariah juga harus memiliki strategi agar Usaha Mikro Kecil Menengah mampu memulihkan guncangan ekonomi di masa pandemi covid-19.

Kata kunci: *UMKM, Pendapatan, Jorong Tigo*

Abstract

The purpose of this study is to determine the influence of MSMEs on people's income from an Islamic perspective, and how the strategies of micro, small and medium enterprises (MSMEs) can survive the Covid 19 pandemic. This study uses a qualitative method. Based on the results of the research, UMKM in Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin are able to contribute to the surrounding residents, namely by providing convenience to the local community. This clearly provides welfare to the community in general and especially to the owner. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) are a strategic economic sector and involve the livelihoods of many people, thus affecting the national economy. Islamic economics views that there is no prohibition against MSMEs as long as the business being carried out does not deviate from the Islamic religion. In addition, during a pandemic like the current one, business owners must have a strategy so that their business continues to run smoothly and does not experience too big a loss. Sharia business

owners must also have a strategy so that Micro, Small and Medium Enterprises are able to recover from economic shocks during the COVID 19 pandemic.

Key word : UMKM, Income, Jorong Tigo

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi nasional yang paling efektif dan efisien serta menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional. UMKM di Indonesia memiliki peran yang sangat penting terutama dalam hal peningkatan perekonomian. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia sangat banyak berdasarkan jumlah penduduk yang besar sehingga Usaha Besar (UB) tidak sanggup menyerap pada pencari kerja dan ketidaksanggupan usaha besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang besar disebabkan karena memang pada umumnya kelompok usaha tersebut relatif padat modal, sedangkan UMKM relatif padat karya. Lalu dengan UMKM ini masyarakat bisa mendirikan usahanya sendiri dan bisa mengurangi jumlah pengangguran serta kemiskinan.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian di Indonesia dan telah terbukti menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi serta menjadi penengah pertumbuhan ekonomi pasca krisis. Kegiatan usaha merupakan usaha yang keras untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, kebutuhan masyarakat sangat beragam, oleh karena itu dengan adanya kegiatan usaha diharapkan mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka lapangan pekerjaan yang bisa menyerap tenaga kerja sangat dibutuhkan. Indonesia identik dengan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, walaupun demikian dalam pengembangan sumber daya alam tersebut masih belum maksimal. Sehingga masyarakat dituntut untuk mengembangkannya di setiap daerah agar bisa memenuhi kebutuhannya. Untuk mata pencaharian ekonomi, masyarakat perlu menggali potensi dan peluang yang ada pada lingkungan sekitar yang akan dijadikan sebagai peluang usaha. Dengan harapan dapat dijadikan peluang untuk menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Peluang usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan dan melimpahkan sumber daya manusia yang belum mampu dikelola pemerintah melalui pendirian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Keripik ubi Dalam Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, Jurnal Sosio Humaniora. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM) merupakan komponen penting dalam ekonomi negara dan regional. Pengembangan UMKM dilakukan menggunakan cara membangkitkan dan memperbanyak pengusaha. Sehingga masyarakat desa pun diberi keterampilan dengan harapan untuk memenuhi perekonomian keluarga dan masyarakat setempat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jumlah organisasi terbesar dan juga terbukti mampu bertahan dalam keadaan krisis ekonomi. UMKM sangat berperan terhadap mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar agar dapat memenuhi kehidupan sehari-hari. (Ayu Lestari: 2012) Strategi pengembangan UKM di industri manufaktur dapat digunakan untuk mengubah UKM menjadi kegiatan ekonomi yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Masyarakat saat ini tidak bisa menghilangkan atau menghindari keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena keberadaannya sangat bermanfaat dan mendistribusikan pendapatan masyarakat. Selain itu, mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga dapat menyerap tenaga kerja secara besar besaran, yang dapat menurunkan angka pengangguran. Selama ini UMKM terbukti mampu menjadi penopang di masa krisis, dengan mekanisme dan peluang kerja serta memiliki nilai tambah. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama periode tertentu. Artinya, UMKM di suatu daerah tertentu akan mempengaruhi perekonomian masyarakatnya. Selain itu, Pengaruh UMKM sangat kuat dalam pembangunan perekonomian. Salah satu peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi adalah mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). keberadaan UMKM dalam pembangunan ekonomi sangat penting. Kondisinya sangat memberikan efek dominan terhadap perekonomian Indonesia. Alasannya, banyaknya industri di setiap bidang ekonomi yang berpotensi besar menyerap tenaga kerja. Alasan lainnya adalah UMKM memiliki keunggulan di bidang pertanian, perdagangan, dll. Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu proses perubahan bagi kemakmuran bangsa. Ini karena lapangan kerja semakin berkembang, dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia yang baik juga akan membawa pertumbuhan ekonomi yang baik. Sesuai instruksi Presiden untuk mendukung perkembangan ekonomi kreatif pada 6 Juni 2009. Dukungan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terjamin. Upaya peningkatan ekonomi rakyat merupakan manifestasi dari pembangunan dengan manusia sebagai objek pembangunan tersebut serta berlandaskan pada nilai-nilai yang menyeluruh. Di negara sedang berkembang seperti Indonesia masalah yang biasa dihadapi adalah bagaimana mengelola banyaknya sumber daya manusia yang kebanyakan tidak terlatih (unskilled) serta produktivitas kerja yang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja di negara-negara maju. Terlebih negara

Indonesia mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang pertanian. Penggunaan teknologi dibidang tersebut juga masih tergolong tradisional. Permasalahan lainnya yaitu persaingan pasar. Peserta UMKM kurang memiliki pengetahuan tentang strategi pemasaran dan strategi pasar menyebabkan produk-produk lokal belum bisa bersaing dengan produk impor. Permasalahan lainnya timbul akibat adanya pandemi covid-19 yang menggencarkan seluruh dunia termasuk Indonesia. Pandemi Covid akan memberikan dampak yang besar terhadap berbagai bidang perekonomian, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Apalagi saat ini akses UMKM masih rentan dan terbatas. Dan ditambah adanya kebijakan pembatasan sosial karena pandemi covid 19. Hal ini menyebabkan tidak sedikit UMKM yang juga terdampak dan mengalami penurunan produktivitas. Pada saat yang sama, usaha mikro, kecil, dan menengah telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap lapangan kerja. Terutama di masa krisis seperti ini banyak yang membutuhkan pekerjaan. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, haruslah mencari solusi seperti menerapkan sesuai dengan ekonomi Islam. Karena di Indonesia merupakan negara mayoritas pemeluk agama Islam. Di yakini bahwa ekonomi Islam dapat menjadikan masyarakat sejajar dengan negara lain dalam perkembangan ekonominya. Sehingga perlu adanya kajian yang mendalam dan praktik didunia usaha agar terwujudnya keinginan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan prinsip syariat Islam. Pengaruh teknologi saat ini menjadi penting terhadap keberlangsungan UMKM, mulai dari pemasaran sampai proses produksi membutuhkan teknologi yang memadai. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pemasaran berbasis online menjadi jalan pintas yang sangat tepat. Adanya pandemi covid 19 ternyata memberikan dampak terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah agar eksistensi UMKM tetap terjaga. Tantangan artinya pemerintah memberikan solusi jangka pendek. Sedangkan peluang artinya pemerintah memberikan solusi jangka pendek dan dilanjutkan dengan solusi jangka panjang. Lalu bagaimana strategi UMKM agar mampu mempertahankan usahanya? Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar yang akan berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga dimasa yang akan datang. Selain itu, juga ingin mengetahui dampak pandemi Covid 19 terhadap UMKM dan bagaimana strategi survival UMKM.

B. Metode Yang Digunakan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan telaah literature. Jenis data menggunakan data sekunder berupa data-data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kajian pustaka. Objek penelitian ini adalah UMKM. Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Proses telaah data dimulai dengan identifikasi perkembangan UMKM dan permasalahannya, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran data dan menyajikannya secara naratif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

C. Pembahasan

Menurut Prof. Ina Primiana, seorang ekonom senior, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Sedangkan menurut, M. Kwartono Adi menjelaskan pengertian UMKM secara lebih detail, yakni sebagai badan usaha yang memiliki *profit* atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan.

Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika telah memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut peraturan perundang-undangan Nomor 20 tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah.

Majunya UMKM di suatu negara merupakan salah satu cara bagi negara tersebut agar bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata dan jauh dari kesenjangan sosial, misalnya kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, melalui UMKM ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut berkembang dan bertumbuh.

Masyarakat juga mampu menemukan beragam barang dan jasa yang sangat beragam secara mudah di area sekitar tempat tinggal, tanpa harus menuju ke pusat kota. Bisa kita bayangkan jika tidak ada UMKM yang berkembang, masyarakat pedesaan setiap harinya harus menuju ke pusat perbelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja dan hal itu akan memakan waktu, tenaga dan materi yang lebih banyak lagi.

Usaha di bidang kuliner tradisional dan kedai sederhana seperti kedai sembako, kedai miso dan kedai yang menjual sarapan pagi akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Hal ini ditandai oleh beberapa faktor yaitu, kebiasaan hidup, kesejahteraan masyarakat, letak demografis dan lain sebagainya. Ada berbagai macam kedai sederhana dan usaha kuliner tradisional di Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin, disesuaikan dengan beberapa kondisi geografis, pendapatan rumah tangga dan kebutuhan konsumen. sebagai contoh kedai/warung makan yang terletak di dekat kawasan sekolah akan menyediakan makanan sesuai kebutuhan siswa dan dengan harga yang sesuai dengan kantong pelajar. Sedangkan untuk usaha kuliner tradisional itu bersifat usaha rumahan atau biasanya disebut *Home Made* biasanya terdiri dari makanan ringan seperti akwan, tahu isi, risoles,

tape dan masih banyak lainnya yang disesuaikan dengan selera, kantong dan kebutuhan masyarakat setempat.

UMKM yang ada di Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin ini sangat diapresiasi oleh tokoh-tokoh penting daerah. Karena diharapkan mampu berkembang ke arah yang lebih baik dan menjadi lapangan pekerjaan agar dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada sehingga angka kemiskinanpun juga akan berkurang. Terlebih lagi banyak UMKM yang ada saat ini mampu menembus pasar modern. Dengan adanya usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu mensejahterakan masyarakat sekitar. Masyarakat yang biasanya tidak bekerja atau menganggur bisa membuka usaha kecil-kecilan disekitar rumah atau bahkan di rumah mereka masing-masing dengan adanya usaha mikro kecil menengah ini akan mengurangi jumlah pengangguran dan bisa meretas kemiskinan.

Peranan UMKM terhadap pendapatan sudah banyak dirasakan oleh masyarakat sekitar. Ditandai dengan semakin banyak orang yang memiliki pekerjaan atau bahkan yang memiliki usaha tersebut. Tidak hanya bagi pemilik usaha, dengan adanya UMKM ini masyarakat setempat juga merasakan dampak positifnya yaitu masyarakat setempat lebih mudah mendapatkan barang-barang dan jasa yang dicarinya karena tidak harus ke pusat kota untuk mendapatkannya.

Virus Corona (Covid 19) telah menyebar luas dan menyerang ke seluruh penjuru dunia sejak akhir tahun 2019, tidak terkecuali di negara kita tercinta Indonesia. Dampak dari penyebaran Covid 19 ini terhadap perekonomian secara keseluruhan mulai dirasakan baik oleh penduduk maupun pemerintah. Dari penurunan harga barang sampai dengan industri pariwisata. Menurut data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan industri pariwisata terhadap UMKM yang bergerak di usaha mikro makanan dan minuman mencapai 27%. Sementara itu, dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah sebesar 0,07%. Dampak virus Covid 19 pada kerajinan kayu dan rotan, usaha mikro akan mencapai 17,03%. Untuk perusahaan kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan sebesar 1,77%, dan untuk perusahaan menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan disesuaikan antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020).

Pengaruh pandemi Covid 19 pada UMKM diprediksi akan lebih besar. Hal tersebut dikarenakan UMKM yang masih rentan dan terbatasnya akses. Selain itu adanya kebijakan pembatasan sosial sehingga harus mengurangi aktivitas proses produksi. Sedangkan dari sisi permintaan juga berkurang. Akibatnya banyak UMKM yang kurang memaksimalkan keuntungan,

sehingga likuiditasnya menurun. Adapun faktor yang menyebabkan UMKM mampu bertahan di masa pandemi covid 19, yaitu:

- a. Produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yaitu produk kebutuhan masyarakat. Dengan begitu penurunan pendapatan rumah tangga tidak terlalu berpengaruh terhadap usaha ini.
- b. Pengusaha UMKM biasanya memakai produk lokal baik tenaga kerja, bahan baku, maupun kebutuhan lainnya sehingga tidak mengandalkan barang impor.
- c. Umumnya usaha mikro, kecil dan menengah, menggunakan modal dana pribadi bukan dari pinjaman bank.

Pada masa krisis pandemi covid 19 ini memiliki dampak yang signifikan pada usaha mikro, kecil dan menengah. Terutama usaha kedai yang berada disekitar sekolahan dengan target pasarnya itu para siswa dan guru. Dengan keadaan sekarang sekolah tidak dibuka, maka secara tidak langsung berdampak pada usaha kecil menengah tersebut. Usaha warung makan yang biasanya digunakan untuk tongkrongan anak muda dan lain-lain menjadi tidak efektif dan efisien selama pandemi covid 19 ini. Namun untuk usaha seperti ini harus mampu bertahan dalam keadaan apapun karena selain menjadi sumber pendapatan untuk pemilik usaha juga karyawannya. Masa pandemi covid-19 tidak sedikit usaha warung makan yang memilih untuk tutup. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri terhadap kebijakan pemerintah. Sehingga saat ini banyak UMKM yang mendapat subsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dikhususkan. Tujuannya agar usaha tersebut tidak semakin mengalami keterpurukan.

Masa pandemi Covid 19 ini memiliki dampak sangat luar biasa bagi masyarakat. Yaitu dengan adanya pandemi Covid 19 juga terjadi pada sektor UMKM, melemahnya sektor UMKM di masa pandemi Covid 19 ini tentu disebabkan oleh berbagai kebijakan tentang pembatasan berskala besar (PSBB), gerakan di rumah aja, dan dirumahnya semua kegiatan. Sehingga kondisi tersebut membuat terbenturnya semua bentuk ekonomi dan para pelaku UMKM. Belum lagi baru-baru ini ada kebijakan baru oleh pemerintah yaitu PPKM yang membuat masyarakat tidak diperbolehkan untuk keluar rumah jika tidak ada hal penting dan penyekatan lalu lintas di perbatasan di kota-kota yang ikut melaksanakan PPKM ini.

Dengan keadaan sekarang ini yang membuat masyarakat tidak dianjurkan untuk keluar rumah jika tidak ada keadaan yang mendesak. Para pelaku UMKM juga harus memutar otak agar usahanya tidak mengalami kebangkrutan yaitu contohnya dengan membuka pesanan secara online

seperti pada aplikasi *Delifoody* karena di Lubuk Sikaping belum ada yang namanya *Gojek* atau *Grab* atau bisa saja menggunakan jasa kurir dengan begitu, masyarakat tidak harus keluar rumah untuk membeli sesuatu.

Upaya peningkatan perekonomian masyarakat dapat dilakukan dengan cara mengembangkan sector UMKM sebagai salah satu pilihan. Seperti kegiatan dagang yaitu menjual kebutuhan sehari-hari, bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, pakaian, sandal, warung, jasa parut kelapa, kue-kue dan barang-barang lainnya. Dengan adanya usaha yang demikian diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik dari sebelumnya. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Agar pencapaian ini dapat dilakukan secara maksimal maka dianggap perlu menggali potensi yang ada untuk dikembangkan lebih jauh.

Pemerintah juga tidak tinggal diam dengan keadaan ini. Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan UMKM di seluruh Indonesia adalah mengeluarkan bantuan BLT UMKM yaitu berupa uang tunai yang diberikan kepada pelaku UMKM diseluruh Indonesia dengan harapan dapat membantu pelaku UMKM agar tidak bangkrut dan bantuan BLT tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Keberhasilan ekonomi masyarakat adalah berkembang dan meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat penduduk miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, meningkatnya kemandirian masyarakat yang ditandai dengan adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya, terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemajuan perekonomian serta mengatasi berbagai masalah-masalah perekonomian khususnya kemiskinan dan pengangguran. Ada suatu hal penting yang belum menjadi perhatian secara khusus dalam persoalan UMKM yaitu perihal peranan dari perempuan dalam keluarga. Peranan perempuan dan pembangunan beranjak dari satu asumsi dasar bahwa peran atau sumbangan perempuan Indonesia dalam pembangunan negara Indonesia masih belum memadai. Dari konsep ini muncullah konsep peranan ganda dari perempuan Indonesia, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan anggota masyarakat yang harus mampu dan mau

menyumbangkan tenaga dan pikirannya masing-masing. Dengan memaksimalkan keterlibatan ibu rumah tangga didalam *home industry* diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dalam keluarga tersebut. Pemberdayaan wanita dan ibu rumah tangga dapat dilakukan dengan pemberian penyuluhan, pelatihan, program pendampingan dan bantuan pemasaran. Apabila peranan wanita ini diberdayakan untuk meningkatkan pendapatan melalui usaha rumah tangga, tentu penciptaan kesejahteraan bangsa akan lebih cepat tercapai.

Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang berbunyi, kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Taraf hidup yang lebih baik ini bukan hanya diukur dengan ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spiritual.

Perubahan perilaku masyarakat Indonesia juga ditunjukkan melalui survey yang dilakukan oleh shopback Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan gambaran dari tren bisnis online sepanjang tahun 2018 tersebut. Hasil survey diprediksikan bahwa akan terdapat perubahan seperti,

- 1) pola perilaku belanja bergeser ke online.
- 2) jasa pengiriman di hari yang sama jadi pilihan utama.
- 3) installer pindah ke lapak.
- 4) belanja online lebih diminati karena banyak promo yang ditawarkan.
- 5) pertumbuhan mobile wallet kian pesat.
- 6) penjualan tiket online meningkat.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat serta perilaku masyarakat yang ingin praktis dan cepat pada akhirnya membuka peluang bagi UMKM untuk tumbuh dengan memanfaatkan teknologi. Tentunya dengan memanfaatkan digital teknologi, UMKM masih memiliki peluang untuk menjadi pilar ekonomi kerakyatan. UMKM sejak tahun 2016-2019 tumbuh sebesar 4,2% setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia adalah sebesar 50% sejak 3 tahun terakhir (Soetjipto, 2020). Akan tetapi menurut data center di Kementerian Koperasi dan UKM sejak mewabahnya pandemic Covid-19 menyebabkan penurunan

penjualan produk UMKM sebesar 57% (www.merdeka.com). Meskipun terdapat penurunan pendapatan, UMKM masih menjadi alternative bergeraknya perekonomian kerakyatan. Hal ini disebabkan pada sifat UMKM itu sendiri yang fleksibel dan mudah berinovasi baik dalam usaha maupun menerapkan teknologi tepat guna, dan birokrasi sederhana. Alasan lainnya yang menyebabkan UMKM mampu bertahan adalah karena UMKM menghasilkan produk/jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, memanfaatkan sumber daya lokal (pekerja lokal dan bahan baku lokal). Merujuk pada penjelasan diatas maka penelitian ini akan membahas mengenai potensi UMKM menjadi ekonomi kerakyatan dimasa pandemi Covid 19.

Dalam perekonomian Islam, UMKM adalah suatu usaha manusia yang menopang kehidupan dan ibadah serta bergerak menuju kesejahteraan masyarakat. Perintah tersebut berlaku untuk semua orang, dan tidak ada diskriminasi. Artinya dalam ekonomi islam, kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang dihalkan oleh Allah SWT. Mengingat pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW juga melakukan berdagang dan menjadi pengusaha sukses. (Medriansyah. M, 2017) menyebutkan beberapa karakteristik Usaha Mikro antara lain:

- a. Usaha Mikro memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan/ilahiah (Nizhamun rabbaniyun), karena dasar pengaturannya pada ketetapan Allah SWT.
- b. Usaha mikro berbentuk akidah (iqtishadun aqdiyyun), karena perekonomian Islam lahir dari akidah islamiyah yang semua halnya harus dipertanggungjawabkan.
- c. Berkarakter ta'abudi, UMKM memiliki tatanan berdasarkan ketuhanan.
- d. Tidak terkait erat dengan akhlak (murtabthub bil-akhlaqi), di dalam ekonomi islam tidak ada prediksi maupun pemetakan antara akhlak dan ekonomi.
- e. Elastic (al-murunah), Sumber asasi Ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- f. Objektif (al-Maudhu-iyah), maksudnya objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi, yaitu tidak membeda-bedakan pada setiap pelaku ekonomi.
- g. Realistis (al-waqi'iyah), harus disesuaikan juga dengan praktik ekonomi.
- h. Harta pada hakikatnya adalah Allah SWT, dari prinsip ini berarti kekayaan yang dimiliki seseorang tidak mutlak.
- i. Kemampuan mengelola aset (tarsyid istikhdam al-mal).

Berdasarkan Qs. At-Taubah [14]: 105 dapat diketahui bahwa derajat tertinggi bukanlah seorang bangsawan melainkan orang yang mau berusaha dan bekerja. Dihadapan Allah orang yang bekerja dipandang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Allah akan memberi pahala berdasarkan

pekerjaan yang dilakukan, dan dinilai sebagai amalan yang akan dipertanggungjawabkan kelak. Cara-cara menjalankan bisnis menurut Syariah antara lain:

a. Niat baik

Dalam bermuamalah atau berwirausaha dituntut agar selalu berpedoman pada tujuan mencari ridho Allah.

b. Berinteraksi dengan akhlak

Dalam ekonomi Islam akhlak menempati posisi yang paling tinggi. Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan muslim adalah toleran, menepati janji, jujur, dan amanah.

c. Mempercayai takdir dan ridha Allah

Pengusaha harus mempercayai takdir dan ridha Allah, agar nantinya ketika mendapatkan keuntungan selalu bersyukur dan tidak gembira secara berlebihan.

d. Kerja sebagai ibadah

Di Islam bekerja memiliki posisi nomor dua setelah shalat.

e. Menjaga aturan syaria"ah Allah membebaskan umat islam dalam berwirausaha, perdagangan atau bisnis apapun selama tidak ada larangan. Islam memandang kesejahteraan tidak hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani saja melainkan terpenuhinya kebutuhan rohani, kesejahteraan dalam islam sangat lah penting karena merupakan tujuan hidup dari manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dunia akhirat.

Pengertian Kesejahteraan Menurut Islam

Menurut Fatorucman Kesejahteraan adalah perasaan aman, sentosa, makmur, damai, selamat dari segala macam ancaman kemungkaran, dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai Falah yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup kehidupan mulia dan kesejahteraan dunia dan akhirat, dapat diwujudkan dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan seimbang yang memberikan dampak yang disebut masalah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia.

Mannan berpendapat bahwa kesejahteraan berkaitan dengan proses produksi. Menurut Mannan prinsip fundamental yang selalu di perhatikan dalam proses produksi adalah kesejahteraan ekonomi, konsep kesejahteraan ekonomi dalam islam terdiri dari bertambahnya pendapatan, terpenuhinya kebutuhan yang maksimal dengan usaha minimal dalam hal konsumsi tetapi tetap berpedoman dalam nilai-nilai keislaman.

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-quran Surat Tha-ha ayat 117-119 yang Artinya: Maka kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya Ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". Sesungguhnya kamu tidak akan merasa lapar dan telanjang didalamnya dan didalam surga itu pula kamu tidak merasa haus dan tidak akan perna merasakan teriknya matahari seperti yang dirasakan orang yang berusaha keras diluar surga.

Maksud ayat di atas kesejahteraan juga dapat di artikan seperti ayat di atas yakni jika seorang masyarakat yang hidupnya merasa kebutuhannya terpenuhi atau merasa senang dapat diartikan hidupnya merasa bahagia dan tidak dalam keadaan bahaya. Dalam islam kesejahteraan juga di sebut masalah, terdapat masalah yang bertujuan untuk menentukan perbuatan suatu perbuatan. Adapun beberapa sifat masalah antara lain:

- 1) Masalah bersifat subjektif, dalam arti setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan masalah atau bukan bagi dirinya. Kreteria masalah ini di tetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu.
- 2) Masalah orang perorangan akan konsisten dengan masalah orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep parato optimum, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat tingkat kepuasan atau kesejahteraan orang lain. Dalam konteks ini sangat tepat di terapkan bagi pemenuhan kesejahteraan manusia yang mencakup kebutuhan dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat:

a) Dharuriyat, adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia, artinya ketika dharuriyat itu hilang maka kemaslahatan dunia dan akhirat juga akan hilang, dan yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. Dharuriyat menunjukkan kebutuhan dasar ataupun primer yang harus selalu ada dalam kebutuhan manusia. Selanjutnya, dharuriyat terbagi menjadi lima poin yang bisa di kenal agama dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan cara memenuhi kebutuhan lima hal diatas yang apabila tidak terkecukupi akan membawa kerusakan bagi kehidupan manusia.

b) Hajiyat, hal-hal yang dibutuhkan mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman jika sesuatu yang mestinya ada menjadi tidak ada. Hal yang juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi maka akan bisa menambah volume atau nilai kehidupan manusia.

c) Tahsiniyat, adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Tahsiniyat juga dapat dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan. berdasarkan pandangan hidup islam yang melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu:

(1) Keadilan dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran. Sesuai dengan firman allah swt Qs Al-maidah ayat 8 sebagai berikut Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

(2) Pertanggung jawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seiring khalifah setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang sebenarnya, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan secara umum bukan kesejahteraan secara pribadi.

d) Takaful (jaminan sosial) adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antar individu dan masyarakat, karena islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertical, namun juga menempatkan hubungan horizontal secara seimbang.

Kesejahteraan dapat terwujud, pemerintah ikut berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder maupun tersier serta kebutuhan pelengkap lainnya. Pemerintah dilarang berhenti pada pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat saja, namun harus berusaha mencakup seluruh kebutuhan komplementer lainnya, selain itu juga pemerintah harus memastikan bahwa upaya yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran syariat islam sehingga kehidupan masyarakat menjadi sejahtera.

Ada tiga alasan negara untuk mendorong usaha kecil untuk terus berkembang. Alasan pertama adalah bahwa usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang baik dalam hal yang menghasilkan tenaga kerjayang produktif. Kemudian alasan kedua, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan ketiga, usaha kecil memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar. Usaha

mikro berperan penting dalam pembangunan perekonomian negara khususnya terhadap ekonomi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih pada masa yang akan datang.

Dalam hal ini peranan usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut peranan usaha mikro menurut departemen koperasi:

1. Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
2. Penyedia lapangan pekerjaan terbesar
3. Pemain penting dalam kegiatan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat
4. Pencipta pasar baru dan sumber ekonomi
5. Kontribusinya terhadap negara pembayaran

Tidak dapat dipungkiri Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai peranan penting bagi negara untuk memajukan perekonomian suatu negara. demikian, Indonesia sejak di terpa badai krisis finansial pada 1996 silam, masih banyak usaha kecil menengah saat ini yang masih mampu bertahan. Meskipun mereka goyang dari dampak yang ditimbulkan namun dengan semangat dan jiwa yang kuat maka mereka secara berlahan-lahan mampu bangkit dari keterpurukan dan bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

D. Penutup

Berdasarkan analisis ini, potensi UMKM di Jorong Tigo Kenagarian Tanjung Beringin dalam banyaknya sektor UMKM juga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan perekonomian. Dengan menerapkan prinsip ketenagakerjaan dalam ekonomi islam UMKM dapat diandalkan untuk menopang perekonomian dalam negeri. Strategi yang digunakan yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman, menggunakan media sosial dan teknologi lainnya yang semakin hari semakin canggih.

Sebuah usaha atau bisnis dapat disebut sebagai UMKM jika telah memenuhi kriteria usaha mikro. Menurut peraturan undang-undang Nomor 20 tahun 2008, UMKM dibedakan berdasarkan masing-masing jenis usaha, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah.

Majunya UMKM di suatu negara merupakan salah satu cara bagi negara tersebut agar bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata dan jauh dari kesenjangan sosial, misalnya

kemiskinan dan pengangguran. Bahkan, melalui UMKM ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut berkembang dan bertumbuh.

Masyarakat juga mampu menemukan beragam barang dan jasa yang sangat beragam secara mudah di area sekitar tempat tinggal, tanpa harus menuju ke pusat kota. Bisa kita bayangkan jika tidak ada UMKM yang berkembang, masyarakat pedesaan setiap harinya harus menuju ke pusat perbelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja dan hal itu akan memakan waktu, tenaga dan materi yang lebih banyak lagi.

Dalam analisis ini juga ditemukan masih kurangnya kemampuan masyarakat dalam pengembangan UMKM. Sehingga menjadi tanggung jawab tersendiri untuk pemerintah dalam meningkatkan kualitas UMKM di Indonesia sehingga dapat menopang perekonomian baik di desa maupun diperkotaan. Karena memang sudah terbukti bahwa UMKM memiliki kemampuan merekrut karyawan lokal sehingga dapat memperkecil angka pengangguran dan kemiskinan.

UMKM tidak akan mampu bertahan apalagi untuk tumbuh dan berkembang jika tidak membenahi sumber daya manusia dan melek teknologi yang semakin canggih. Beberapa penelitian telah menemukan hasil bahwa teknologi akan sangat membantu kinerja UMKM. Alasan utama mengapa UMKM harus menguasai teknologi adalah untuk memperluas wilayah bisnis dan menjangkau konsumen yang jauh dan tidak dapat datang langsung ke toko, disamping itu aplikasi online yang sedang marak saat ini menjadi sebuah media untuk pemasaran produk serta sebuah cara untuk meningkatkan omzet jual beli, untuk memanfaatkan teknologi e-commerce memenuhi strategi pemasaran produk yang dapat berdampak kepada peningkatan penjualan.

UMKM sangat berpotensi dalam menyangga perekonomian dimasa pandemi Covid 19 ini. Potensi ini terlihat pada peran UMKM sebagai sumber pendapatan masyarakat, mengatasi pengangguran, berkontribusi pada PDB, Devisa Negara serta investasi. Peluang tersebut sesuai dengan amanah UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dimasa pandemi bisa bertahan dan tumbuh ketika memiliki sumber daya manusia yang menguasai teknologi digital. Penelitian lebih lanjut dapat menggali secara kuantitatif potensi yang dimiliki UMKM sehingga dapat dilihat besaran potensi yang dimiliki oleh UMKM sebagai penopang perekonomian kerakyatan.

Dalam keadaan ini pemerintah juga tidak tinggal diam. Salah satu upaya pemerintah dalam mempertahankan UMKM di seluruh Indonesia adalah mengeluarkan bantuan BLT UMKM yaitu berupa uang tunai yang diberikan kepada pelaku UMKM diseluruh Indonesia dengan harapan dapat membantu pelaku UMKM agar tidak bangkrut dan bantuan BLT tersebut bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Agustien, Lies Maria Hamzah dan Devi, „Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia“, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No 2 (2019), 224

Amri, Andi, „Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia“, *Universitas Hasanuddin, Jurnal Brand*, Vol. 2 No. (2020), 126



06

HANIFA HUMAIRA

*Standarisasi Penerima BLT
Dana Desa Pada Masa Covid-19
Di Jorong 100 Janjang
Kecamatan Canduang*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



STANDARISASI PENERIMA BLT DANA DESA PADA MASA COVID-19 DI JORONG 100 JANJANG KECAMATAN CANDUANG

Hanifa Humaira

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Pada awal tahun 2020, dunia digegarkan oleh virus yang bernama pandemi Covid-19. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19 ini tidak hanya berdampak terhadap kondisi kesehatan masyarakat saja tetapi juga berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perekonomian masyarakat menjadi menurun dan banyak orang yang kehilangan pekerjaan sehingga dapat meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Untuk mengatasi dampak tersebut maka pemerintah membuat kebijakan atau program-program untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum suatu masyarakat pada masa pandemi covid-19 adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat yang bersumber dari desa atau disebut dengan BLT-Dana Desa. BLT-Dana Desa merupakan suatu program bantuan pemerintah berupa uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk meminimalisir dampak dari pandemi Covid-19. Di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang sasaran penerima BLT Dana Desa tidak semuanya terdata dengan baik dan terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat dengan pemerintah. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan di Jorong 100 Janjang agar dapat menjadi perbaikan ke depannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan dalam pemberian bantuan oleh pemerintah khususnya bagi masyarakat miskin dan kurang mampu sangat bermanfaat bagi mereka, dan sebagian besar dari masyarakat mendukung program yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

Kata kunci: *BLT Dana Desa, Pandemi covid-19, Kemiskinan*

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020, dunia digegarkan oleh virus yang bernama pandemi covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak yang sangat besar bagi seluruh negara di dunia. Dampak yang ditimbulkan dari pandemi Covid-19 ini tidak hanya berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat saja, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu dampak pandemi covid-19 dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat adalah kemiskinan. Hal ini disebabkan karena adanya pembatasan kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan menurunnya perekonomian masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19 ini

berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah, banyak para pedagang kecil atau pedagang kaki lima yang gulung tikar, banyak para pekerja yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK dan lain sebagainya sehingga bisa meningkatnya jumlah masyarakat miskin.

Kemiskinan adalah suatu permasalahan struktural dan bersifat multidimensi, sehingga secara umum masyarakat miskin merupakan suatu kondisi atau keadaan masyarakat yang berada dalam situasi termarginalkan karena terjadi kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak (Utaminingsih, dkk, 2020, hal. 1). Kemiskinan yaitu pada dasarnya merupakan salah satu bentuk Problema yang muncul dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Masalah kemiskinan ini menuntut adanya upaya dalam pemecahan masalah secara berencana, terintegrasi dan menyeluruh dalam waktu yang singkat. Upaya pemecahan masalah kemiskinan tersebut digunakan sebagai upaya untuk mempercepat proses pembangunan suatu negara yang selama ini sedang dilaksanakan (Hartono dan Aziz, 2008, hal. 1).

Kemiskinan hadir dalam kehidupan manusia dengan kondisi yang memprihatinkan karena kemiskinan tersebut masih belum bisa terselesaikan begitu saja termasuk negara Indonesia yang merupakan negara berkembang. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang kemiskinan tersebut maka pemerintah membuat kebijakan atau program-program untuk memberantas kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat pada masa pandemi covid-19 ini adalah dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai bagi masyarakat miskin atau kurang mampu yang bersumber dari desa atau disebut dengan BLT Dana Desa.

Menurut pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) merupakan suatu pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau keluarga kurang mampu yang ada di desa guna untuk meringankan beban perekonomian masyarakat sebagai dampak adanya pandemi Covid-19. Desa memiliki sumber daya sosial dan ekonomi yang dapat berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Dana Desa. Dana Desa yaitu suatu alokasi anggaran *On Budget* yang dapat digunakan langsung untuk mengurangi dampak dari adanya pandemi Covid-19 di tingkat rumah tangga dan desa (Jannah, dkk, 2021, hal. 81-82).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, (Zaman, dkk, 2021, hal. 27) kesejahteraan sosial yaitu suatu kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup secara layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan pokok setiap warga negara yang meliputi jaminan sosial, rehabilitas sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang merupakan salah satu desa yang ada di Indonesia yang masyarakatnya terkena dampak pandemi Covid-19. Mata pencaharian atau pekerjaan masyarakat Jorong 100 Janjang adalah mayoritas sebagai petani/pekebun. Dalam kondisi Pandemi covid-19 menyebabkan sebagian masyarakat Jorong 100 Janjang tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. Hasil panen di pasaran tidak dapat terserap secara maksimal. Banyak para petani/pekebun mengeluh karena harga jual dari hasil panen dipasaran rendah. Dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah ini maka dapat membantu perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari.

Penyaluran BLT-Dana Desa di Jorong 100 Janjang sudah berjalan 5 bulan, masyarakat yang menerima bantuan tersebut sudah merasakan efek dari bantuan yang diterimanya. Namun, terdapat kecemburuan sosial antara masyarakat dengan pemerintah karena pembagian bantuan yang diberikan pemerintah tidak adil dan terkesan tebang pilih, bahkan orang yang dianggap mampu mendapatkan bantuan sedangkan orang yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan.

Berdasarkan permasalahan dalam pemberian BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19 di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang BLT Dana Desa selama pandemi Covid-19 ini khususnya di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang. Dalam hal ini, Penulis mengangkat judul yaitu “Standarisasi Penerima BLT-Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang”.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang mana analisis terhadap permasalahan dalam pembagian BLT Dana Desa yang dilakukan dengan cara penguraian kata-kata secara deskriptif

yang diuraikan dari permasalahan selama pandemi covid-19 di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang serta tantangan yang muncul guna mewujudkan Kebijakan BLT-Dana Desa yang sesuai tujuan dan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari adanya pandemi covid-19 yang ada di tingkat desa serta dapat melanjutkan keberlangsungan hidupnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 (dua) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Data sekunder yang digunakan berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai BLT Dana Desa.

Guna mendapatkan data yang sesungguhnya, maka diperlukan metode pengumpulan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara yang digunakan untuk memecah masalah penelitian untuk mencapai data yang akurat. Sedangkan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses menghimpun data yang relevan mengenai gambaran data yang sedang diteliti. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti adalah metode wawancara dan observasi.

C. Pembahasan

1. Tinjauan Tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu keadaan atau kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, pendidikan, peluang berusaha dan fasilitas hidup lainnya. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi dengan upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemi covid-19 yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin (Paat, dkk, 2021, hal. 3-4). Tujuan BLT adalah:

1. Membantu masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu agar tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Mencegah terjadinya penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Dana Desa

Dana Desa merupakan suatu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk desa, bantuan keuangan dari APBN diharapkan akan menjadi sumber pendapatan desa guna untuk menunjang pembangunan yang ada di desa. Dana Desa digunakan sepenuhnya untuk memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, peningkatan kualitas hidup serta penanggulangan kemiskinan. Penetapan penggunaan dana desa sesuai dengan yang telah diprioritaskan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Rahayu dan Gufon, 2020, hal. 158).

Menurut pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016, Dana Desa yaitu dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi masyarakat di desa yang ditransfer melalui APBD kota/kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat (Mukmin dan Maemunah, 2018, hal. 75). Pada masa pandemi Covid-19 ini, Dana Desa digunakan untuk hal-hal yang mendesak bagi desa seperti mencegah penyebaran pandemi Covid-19 serta mengatasi dampak dari melambatnya perekonomian yang terjadi akibat adanya pandemi Covid-19.

Menurut PMK Nomor 40/PMK.O7/2020 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud termasuk kegiatan dalam rangka menaggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19, antara lain berupa: (a). Kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disase 2019 (Covid-19); dan/atau (b). Jaring pengaman sosial di Desa (Shandi dan Iskandar, 2020, hal. 175-176).

Penggunaan Dana Desa berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Menurut Permandesa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, prioritas Penggunaan Dana Desa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 antara lain berupa kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk Desa terdampak, pengadaan bahan-bahan alat kesehatan, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah desa juga wajib mengadakan jaring pengaman sosial di Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin atau keluarga tidak mampu di desa. Menurut realokasi penggunaan Dana Desa, Kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai perubahan APBDDesa. Dalam hal perubahan APBDDesa belum dapat ditetapkan, Pemerintah Desa dapat terlebih dahulu melakukan perubahan penjabaran APBDDesa (Shandi dan Iskandar, 2020, hal 175-176).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan bantuan uang yang diberikan pemerintah kepada keluarga miskin yang ada di desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19. Adapun nilai penerimaan BLT Dana Desa adalah sebesar Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 untuk tiap bulan berikutnya. BLT Dana Desa bebas dari pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan mengenai penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) (Novianty, dkk, 2020, hal. 1586).

Menurut PMK Nomor 40/PMK.07/2020, jaring pengaman sosial di desa untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19, berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa paling sedikit memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Pra Kerja dan kartu sembako. Menurut Permandesa Nomor 6 Tahun 2020, Penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan,

belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis (Sandhi dan Iskandar, 2020, hal. 176-177).

Tujuan dari pelaksanaan BLT Dana Desa yaitu untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup di era pandemi Covid-19 ini yang mana masyarakat yang terdampak tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan juga diharapkan mampu memberikan layanan sosial kepada seluruh masyarakat desa yang membutuhkan (Wibawani, dkk, 2021, hal. 1210).

2. Sasaran Penerima BLT Dana Desa dan Kriteria Calon Penerima BLT Dana Desa

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin atau keluarga kurang mampu di desa yang terkena dampak Covid-19. BLT Dana Desa diberikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin yang rentan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama dengan adanya wabah Covid-19. BLT Dana Desa bebas pajak sehingga penerima BLT Dana Desa dapat menerima bantuan tanpa adanya potongan pajaknya. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu keluarga miskin atau keluarga kurang mampu nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai yang mengalami mata pencaharian, belum terdata (exclusion error) dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Dalam hal ditemukan keluarga miskin tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial, tetap menerima BLT Dana Desa (Marpaung, 2020, hal. 50-51).

Menurut Kementerian Keuangan Negara (Kemenkui) Republik Indonesia (Suhu, dkk, 2021, hal 23), yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, terkait Kebijakan Dana Desa dalam rangka penanganan Covid-19 hanya sebagian Dana Desa digunakan untuk BLT Desa. Oleh karena itu, target sasaran penerima BLT Desa diprioritaskan untuk:

1. Keluarga miskin atau kurang mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan,
2. Penerima BLT Desa tidak termasuk sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima bantuan Kartu Sembako, Program Keuangan Harapan (PHK) dan Kartu Prakerja).

Jadi menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/ 2020 di atas, maka sasaran penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga miskin atau kurang mampu yang berdomisili di desa yang bersangkutan. Sasaran penerima BLT Dana desa yang dilakukan oleh pemerintah yaitu diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak adanya pandemi Covid-19, sehingga uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan adanya wabah covid-19 ini. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Program BLT Dana Desa perlu dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga dapat merasakan manfaatnya untuk membeli kebutuhan bahan pokok (untuk membeli sembako).

Dalam proses pendataan di lapangan sasaran calon penerima BLT Dana Desa seringkali ditemukan kurang tepat. Sering terjadi kesalahan data jumlah masyarakat miskin atau kurang mampu di suatu daerah, sehingga pada saat proses pemberian program BLT Dana Desa sering terjadi salah sasaran.

Sasaran penerima BLT Dana Desa yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Di Jorong 100 Janjang sesungguhnya sasaran penerima BLT Dana Desa tidak semuanya terdata dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena pembagian BLT Dana Desa tidak seluruh rumah tangga miskin menerima BLT Dana Desa. Dilihat di lapangan, masyarakat Jorong 100 Janjang masih banyak rumah tangga miskin yang belum terdata yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut, sedangkan yang mendapatkan bantuan tersebut hanya berjumlah sedikit yaitu 5 orang.

Kriteria yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan ini (Jannah, dkk, 2021, hal. 86), sesuai dengan kebijakan yang ada peraturan yang tertuang didalam buku panduan pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020 yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata.
2. Tidak mendapat bantuan PKH/ BPNT/ Pemilik kartu prakerja.
3. Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan kedepan).
4. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.
5. Memiliki kartu identitas atau KTP.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu dari pihak Wali Nagari Canduang Koto Laweh kriteria Penerima BLT Dana Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Orang miskin/ orang yang kurang mampu
2. Pekerjaan yang tidak tetap
3. Penyakit menahun
4. Kronis

Kriteria penerima BLT Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, yaitu pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No 1036).

(Novianty, dkk, 2020, hal. 1586-1587) Lebih rinci lagi, kriteria BLT Dana Desa sendiri yang diprioritaskan sebagai penerima manfaat, antara lain:

1. Rumah tangga yang harus diisolasi karena terjangkit Covid-19.
2. Warga lanjut usia (lansia) miskin dan rumah tangga rentan yang terkena dampak Covid-19.
3. Rumah tangga miskin yang anggota keluarga sakit dan harus menanggung biaya medis.
4. Rumah tangga yang terdaftar sebagai penerima bantuan ditingkat desa yang belum terjangkau oleh program nasional/daerah, seperti rumah tangga penerima zakat.
5. Rumah tangga dengan pencari nafkah utama (kepala keluarga) yang tidak dapat bekerja atau penghasilannya sangat terpengaruh wabah Covid-19.
6. Rumah tangga yang tidak dapat membeli atau mengakses kebutuhan dasar, terutama makanan, karena terdampak wabah Covid-19.
7. Rumah tangga yang menurut komunitas setempat direkomendasikan untuk menerima manfaat program bantuan sesuai dengan kesepakatan dan kearifan lokal.
8. Penduduk yang rentan sakit, seperti lansia, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.

3. Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa

Mekanisme pendataan calon penerima BLT Dana Desa (Marpaung, 2020, hal 51-52), berdasarkan buku saku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020 adalah sebagai berikut:

a. Proses Pendataan

1. Perangkat desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan stabilitas. Data desa yang dimaksud berasal dari hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan.
2. Kepala desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada relawan desa/atau Gugus Tugas Covid-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa.
3. Jumlah pendata minimal 3 (tiga) orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil.
4. Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tertangga (RT) atau Rukun Warga (RW) dengan menggunakan formulir pendataan (Data Keluarga Miskin Calon Penerima Manfaat BLT Dana Desa) atau di tingkat dusun dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan Covid-19. Seluruh kegiatan pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan.

b. Proses Konsolidasi dan verifikasi

1. Relawan desa dan/atau Gugus tugas Covid-19 menghimpun hasil pendataan dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT Dana Desa, hal yang dilakukan adalah:
 - a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari pendamping PKH.
 - b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
 - c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT Dana Desa berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) kabupaten/kota.
2. Relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
3. Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 perlu mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan digital (*share location*) jika memungkinkan.

4. Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT Dana Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk.
5. Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh relawan desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 kepada kepala desa.

c. Proses validitas dan Penetapan Hasil Pendataan

1. Kepala desa memfasilitasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT Dana Desa.
2. Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, kepala desa dan BPD menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa. Merujuk kepada daftar tersebut, desa menyalurkan BLT Dana Desa bulan pertama.
3. Kepala desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT Dana Desa yang sudah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun dan/ atau di tempat-tempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi publik.
4. Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT Dana Desa, maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan tersebut dan menyepakati solusinya.

Selanjutnya, daftar calon penerima BLT Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh bupati/wali kota, atau dapat diwakilkan ke camat. Untuk penyaluran bulan kedua, desa harus memastikan bahwa data bagi penerima BLT Dana Desa harus sudah disahkan.

4. Kewenangan dalam Pembinaan dan Pengawasan Pendataan Calon Penerima BLT Dana Desa

Dalam penyaluran BLT Dana Desa (Paat, dkk, 2021, hal 7-9), pemerintah pusat telah mengeluarkan mekanisme serta tugas dari masing-masing tingkatan pemerintah mulai dari

pemerintah pusat sampai yang ada di daerah. Untuk menjalankan proses penyaluran BLT Dana Desa ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. Koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

1. Melaksanakan koordinasi dan memberikan arahan kebijakan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa.
2. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa.

b. Pemerintah Daerah Provinsi

1. Melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan terkait pendataan BLT Dana Desa melalui:
 - Peningkatan kapasitas dan bimbingan teknis kepada Dinas PMD kabupaten/kota, kecamatan (Camat, Pembina Teknis Pemerintah Desa atau PTPD dan Pendamping Desa) serta pemerintah desa/ BPD; dan
 - Pemantauan, pembinaan dan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa.
2. Memetakan ketersediaan bantuan sosial dan jaring pengaman baik yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta mengatur jumlah target sasaran serta waktu penyalurannya. Dengan membaca hasil pendataan desa yang diverifikasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dapat menentukan jumlah sasaran bantuan sosial provinsi yang belum dapat dipenuhi oleh BLT Dana Desa, bantuan sosial kabupaten/kota dan pemerintah pusat.

c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Bupati/Wali Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMD, Camat, dan Kepala Desa dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Bupati/Kota mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Dukcapil dalam proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial.
3. Bupati/Wali Kota bersama dengan Bappeda, Dinas Sosial dan instansi terkait berkoordinasi dengan provinsi terkait jumlah target sasaran dan waktu penyaluran berbagai bantuan sosial

yang ada di daerahnya (memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT Dana Desa dan bantuan sosial lainnya).

4. Bupati/wali kota menyebarluaskan informasi pendataan penerima BLT Dana Desa dan melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT Dana Desa.
5. Bupati/Wali Kota melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/ atau mengawasi pelaksanaan BLT Dana Desa.
6. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) dan pemerintah desa/BPD terkait pendataan calon penerima BLT Dana Desa.
7. Jika memungkinkan, Dinas Sosial bekerja sama dengan desa melakukan verifikasi dan validasi secara cepat dengan melibatkan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial di kecamatan. Proses pendataan DTKS di kabupaten/kota mengikuti Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
8. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan data penduduk berdasarkan NIK kepada Bappeda dan desa untuk dibandingkan dengan DTKS.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan Covid-19 melalui APB Desa (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT Dana Desa dilakukan secara efektif, efisien, transparan serta akuntabel.

d. Kecamatan

1. Membantu Bupati/Wali Kota melakukan verifikasi daftar usulan kepala keluarga miskin dan rentan calon penerima BLT Dana Desa yang diusulkan Kepala Desa.
2. Camat memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pendataan calon penerima BLT Dana Desa.
3. Tim kecamatan (camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah desa dan atau Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas Covid-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa.

5. Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa Pada Masa COVID-19 Di Jorong 100 Janjang

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di suatu daerah terutama dengan adanya pandemi covid-19 ini khususnya di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang. Untuk meringankan beban masyarakat akibat adanya dampak pandemi

Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Jorong 100 Janjang telah membuat kebijakan atau program-program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan dengan mengalokasikan dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

Penyaluran BLT Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Aturan lainnya adalah Permandesa PDTT 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Besar penerimaan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat, pasal 39 terkait besaran BLT Dana Desa (Paat, dkk, 2021, hal. 6).

Dengan adanya BLT Dana Desa pada masa pandemi covid-19, Masyarakat Jorong 100 Janjang yang mendapat bantuan merasa sangat terbantu. Tetapi permasalahan yang muncul sekarang ini adalah terjadinya kecemburuan sosial antara masyarakat dengan pemerintah karena pemberian bantuan tersebut kurang efektif atau dianggap tidak adil. Masyarakat yang menerima bantuan ini sangat sedikit, padahal masih banyak lagi masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan.

Pada umumnya mata pencarian masyarakat di Jorong 100 Janjang adalah sebagai petani/pekebun. Munculnya pandemi Covid-19 ini menyebabkan masyarakat Jorong 100 Janjang banyak yang mengalami kerugian akibat harga jual dari hasil panen menurun. Hasil panen di pasaran tidak dapat terserap secara maksimal karena adanya wabah ini. Dengan adanya Bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Mereka dapat membeli kebutuhan pokok seperti beras, lauk dan segala kebutuhan rumah tangga dengan menggunakan uang dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan pemerintah. Bagi keluarga miskin di Jorong 100 Janjang, bantuan ini sangat bermanfaat sekali karena dapat membantu perekonomian mereka pada masa pademi Covid-19 ini yang tidak kunjung hilang sampai saat ini.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan Informan yang berkompeten didapati jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Jorong 100 Janjang berjumlah 5 kepala keluarga. Berikut adalah data masyarakat desa Jorong 100 janjang yang menerima BLT Dana Desa:

Tabel 1: Data Penerima BLT Dana Desa Akibat Pandemi Covid-19

No	Nama	NIK	Gender	Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan
1	Marniati	1306140000000000	P	11/07/1985	Rawang, 100 Janjang	Petani/pekebun
2	Salmi	1306140000000000	P	04/01/1976	Kubang, 100 Janjang	Rumah Tangga
3	Harmita	1306140000000000	P	02/02/1986	Kampung Tengah, 100 Janjang	Rumah Tangga
4	Rahma Yulissha caniago	1306140000000000	P	03/12/1989	Kubang, 100 Janjang	Rumah Tangga
5	Fittori Haminol	1306070000000000	L	11/11/1958	Kubang, 100 Janjang	Petani/Pek ebun

Berdasarkan dari data di atas dan observasi yang peneliti lakukan, masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan kriteria yaitu orang miskin atau orang kurang mampu. Ke 5 orang penerima BLT-Dana Desa tersebut masih sanggup atau kuat untuk bekerja tetapi tidak mencukupi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari akibat adanya wabah pandemi Covid-19. Untuk tempat tinggal sendiri mereka tidak memiliki rumah sendiri, melainkan menghuni rumah milik orang lain yang sudah lama ditinggal. Selain ke 5 orang penerima BLT Dana Desa tersebut masih banyak lagi masyarakat Jorong 100 Janjang yang benar-benar miskin yang belum terdata dalam mendapatkan bantuan. Contohnya saja seperti lansia yang sering sakit-sakitan yang tidak mampu berobat ke rumah sakit dan tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan.

Jumlah masyarakat yang menerima BLT Dana Desa di Kanagarian Canduang Koto Laweh yaitu sebanyak 79 orang/ KPM. Jumlah Jorong yang ada di kenagarian Canduang Koto Laweh yaitu 11 jorong. Untuk Jorong 100 Janjang Penerima BLT Dana Desa hanya terdiri dari 5 orang. Pembagian BLT Dana Desa dilaksanakan selama 12 bulan, yang di mulai dari bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas. Dalam penerimaannya tiap bulan yaitu Rp 300.000/per bulan/KPM.

Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di kenagarian Canduang Koto Laweh Khususnya di Jorong 100 Janjang baru berjalan 5 kali penerimaan. Pada penerimaan bulan pertama pihak dari wali nagari Canduang Koto Laweh datang langsung kerumah warga yang menerima Bantuan tersebut untuk melihat langsung kondisi ekonominya. Untuk bulan selanjutnya warga yang mendapat bantuan tersebut datang langsung ke kantor Wali Nagari Canduang Koto Laweh untuk menjemput uangnya. Jika ada dari warga yang menerima bantuan tersebut sakit-sakitan menahun atau kronis dan tidak sanggup untuk datang ke kantor wali nagari untuk menjemput bantuan tersebut maka boleh anggota keluarga yang satu KK (Kartu Keluarga) untuk menjemputnya ke kantor Wali Nagari. Bantuan yang didapatkan oleh masyarakat miskin atau kurang mampu ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari dan tidak boleh digunakan untuk keperluan lain selain dari kebutuhan pokok.

D. Kesimpulan

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan kemiskinan di suatu daerah terutama dengan adanya pandemi covid-19 ini khususnya di Jorong 100 Janjang Kecamatan Canduang. Pemerintah Indonesia khususnya pemerintah Jorong 100 Janjang telah membuat kebijakan atau program-program untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengalokasikan dana desa berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) bagi masyarakat miskin atau kurang mampu.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) merupakan suatu bantuan uang kepada keluarga miskin atau kurang mampu di desa untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19. Nilai BLT Dana Desa adalah sebesar Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp 300.000 untuk tiap bulan berikutnya. BLT Dana Desa bebas pajak. Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Menurut Permandesa Nomor 6 Tahun 2020, Penanganan dampak pandemi Covid-19 dapat berupa BLT Dana Desa kepada keluarga miskin di desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima bantuan Program Keluarga

Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kartu pra kerja, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Tujuan dari pelaksanaan BLT Dana Desa yaitu untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup di era pandemi Covid-19 ini yang dimana masyarakat yang terdampak tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan juga diharapkan mampu memberikan layanan sosial kepada semua masyarakat desa yang membutuhkan.

Dari aspek penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa sasaran penerima BLT Dana Desa ditujukan kepada masyarakat miskin. Di Jorong 100 Janjang sesungguhnya sasaran penerima BLT Dana Desa tidak semuanya terdata dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena pembagian BLT Dana Desa tidak tidak secara keseluruhan masyarakat yang benar-benar miskin menerima BLT-Dana desa, sedangkan yang mendapatkan bantuan tersebut hanya berjumlah sedikit yaitu 5 orang. Masyarakat miskin yang belum terdata tersebut juga belum pernah menerima bantuan seperti, menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Contohnya saja seperti lansia yang sering sakit-sakitan yang tidak mampu berobat ke rumah sakit dan tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan. Bagi masyarakat yang sudah menerima bantuan BLT Dana Desa sudah merasakan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (sembako). Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut malah terjadinya kecemburuan sosial antar masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah karena pemerintah dianggap tebang pilih dan dan tidak adil dalam memberikan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Hartono dan Aziz, A. 2008. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Bumi Aksara.

Utaminingsih, A, dkk. 2020. *Feminisasi Kemiskinan dan Pemberdayaan Perempuan Berperspektif Sosiopsikologis*. Malang: UB Press.

Zaman, N, dkk. 2021. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Yayasan Kita Menulis.

Jurnal Ilmiah

- Jannah, M, dkk. 2021. *Penerapan Metode Analytic Network Process (ANP) Dalam Menentukan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT)*. SATIN-Sain dan Teknologi Informasi 7 (1), 80-90.
- Marpaung, H.C. 2020. *Aspek Hukum Bantuan Langsung Tunai Dana Desa TA 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19*. Warta Pemeriksa, Edisi 11 Vol. III.
- Mukmin, M.N dan Maemunah, S. 2018. *Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian PadaKecamatan Babakan Madang, Sukarja dan Ciawi*. Jurnal Akunida 4 (2), 73-85.
- Novianty, A, dkk. 2020. *Praktik Penganggaran dan Penyaluran Bantuan Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Desa Sariwangi Kabupaten Bandung Barat)*. PROSIDING SENANTIAS: Seminar Nasional Hail Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat vol. 1 No. 1, 1583-1592.
- Paat, R, dkk. 2021. *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Eksekutif, Volume 1 No. 1.
- Rahayu, T.I dan Gufron, A. 2020. *Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam Pencegahan Covid-19 Di Desa Turitempel Kecamatan Guntur Kabupaten Demak Tahun 2020*. MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang 17 (2), 144-166.
- Sandhi, H.K, dan Iskandar. 2020. *Praktik Pengelolaan Dana Desa untuk Penanganan Covid-19 (Studi pada Desa Bendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*. Jurnal Bisnis Net Volume : 3 No. 2, 174-184.
- Suhu, B.L, dkk. 2021. *Benang Kusut BLT Dana Desa Tahun 2020 Di Pulau Gamumu Kecamatan Obi Selatan (Studi Tentang Implementasi Pembagian BLT-DD Di Desa Mano)*. JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA Volume II Nomor 1, 19-28.
- Wibawani, S, dkk. 2021. *Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial Di Desa Kemilagi, Kabupaten Mojokerto*. Syntax Idea Vol. 3 No. 5.

Wawancara

- Fikri, *Wawancara Pribadi*. Penerima BLT Dana Desa Di Jorong 100 Janjang. Kamis 1 Juli 2021.



07



IDUL SAPUTRA

*Upaya Pemerintah Nagari
Dalam Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat
Petani Di Nagari Panti*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI DI NAGARI PANTI

Idul Saputra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Pemerintah nagari merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu tugas pokok dari pemerintah nagari yaitu memberdayakan masyarakat nagari termasuk pada sektor pertanian yang menjadi sektor basis. Sektor ini sangat penting kontribusinya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sungguhpun demikian ternyata masyarakat petani yang berada di wilayah nagari Panti masih menghadapi tantangan, kendala yang mesti diberikan solusi penyelesaian demi meningkatkan kesejahteraan para petani. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan pemerintahan nagari, selaku pemegang kuasa dan kebijakan strategis dalam merespon keluhan serta kesusahan yang dihadapi masyarakat petani sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani khususnya di nagari Panti, kabupaten Pasaman

Kata Kunci: Pemerintah nagari, kesejahteraan, petani

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris yakni sebuah negara yang sebagian besar masyarakatnya bekerja disektor pertanian. Peranan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan. Sektor pertanian juga menyediakan bahan mentah bagi industri yang menghasilkan devisa negara dengan ekspor non migas. Selain itu, sektor ekonomi menyumbang tambahan PDB yang cukup besar. Dilansir dari kompas.com (2019) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 20% dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja di pedesaan. Bahkan sektor pertanian

mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi krisis ekonomi yang melanda Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir ini (Sadono, 2008).

Nagari Panti sebagai salah satu nagari di Sumatera Barat tepatnya di kecamatan Panti juga mengandalkan sektor pertanian. Sebagian besar masyarakatnya bergelut di sektor ini. Daerah dengan luas sekitar 50,18 kilometer persegi atau 26 persen dari luas wilayah kecamatan Panti mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dengan jenis tanaman yang bermacam-macam seperti padi, jagung, kelapa sawit, coklat dan tanaman yang lainnya. Sungguhpun demikian pentingnya peran sektor pertanian ini, ternyata masih banyak masyarakat petani yang mengeluh dengan kondisi pertanian mereka. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan petani, mereka mengeluhkan banyak hal seperti kurangnya modal yang dimiliki sehingga mereka tidak bisa maksimal dalam bertani, buruknya akses jalan pada lokasi tertentu, jembatan yang tidak ada membuat mereka harus jauh berjalan sehingga biaya angkut atau biaya transportasi lebih mahal. Selain itu, irigasi yang macet tidak bisa memenuhi kebutuhan air untuk perkembangan padi, apalagi sudah sejak bulan April irigasi proyek sumber utama pengairan sawah mati total dikarenakan adanya pengerukan yang diperkirakan hingga bulan Desember. Dampak dari pengerukan ini para petani di sebagian lahan tidak bisa menggarap sawahnya, ada pula yang menggantikan tanaman dari padi menjadi jagung atau kacang dan sayur-sayuran.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan administrasi sejatinya mempunyai 3 fungsi hakiki yakni fungsi pelayanan (service), fungsi pembangunan (development), dan fungsi pemberdayaan (empowerment). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat, dan pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat (Sarjono, 2014). Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan para petani. Pemerintah Nagari selaku pemangku kebijakan punya peran yang sentral untuk mengupayakan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat petani di Nagari Panti.

Berangkat dari permasalahan di atas penulis ingin mengeksplorasi bagaimana pemerintah selaku pengayom masyarakat berperan dan berupaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani serta bagaimana pemerintah nagari menanggapi keluhan kesah masyarakat petani di Nagari Panti yang dituangkan dalam sebuah artikel ilmiah yang berjudul “Upaya Pemerintah Nagari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani di Nagari Panti.”

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini dilakukan di nagari Panti dengan informan pejabat nagari dan masyarakat petani.

C. PEMBAHASAN

1. Pemerintahan Nagari

Pemerintah merupakan sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Sedangkan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinatahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. sebagai kesatuan masyarakat hukum, nagari perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi nagarinya dimasa yang akan datang, sehingga nagari tersebut bertambah maju. Nagari menjadi sebutan khusus di Sumatera Barat untuk menunjukkan kedudukan wilayah setingkat desa di provinsi lain. Jadi Pemerintah nagari merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu tugas pokok dari pemerintah nagari yaitu memberdayakan masyarakat nagari termasuk pada sektor pertanian yang menjadi sektor basis (Milakarma & Montessori, 2018).

Hak dan Kewajiban Pemerintah Nagari dan Masyarakat Nagari

1. Pemerintah Nagari berhak:
 - a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat nagari;
 - b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
 - c. Mendapatkan sumber pendapatan.

2. Pemerintah Nagari berkewajiban:
 - a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat nagari;
 - c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat nagari; dan
 - e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari.
3. Masyarakat nagari berhak:
 - a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari;
 - b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
 - c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari
 - d. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di nagari
4. Masyarakat nagari berkewajiban:
 - a. Membangun diri dan memelihara lingkungan nagari agar tetap terjaga dan memberikan kenyamanan dalam keberlangsungan hidup;
 - b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari yang baik;
 - c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di nagari;
 - d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di nagari; dan
 - e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di nagari.

Desa atau nagari secara eksplisit memberikan tugas pada pemerintah desa yaitu penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun

2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya (Sugiman, 2018).

Tugas dan fungsi sekretaris nagari

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat nagari. Sekretaris nagari bertugas membantu wali nagari dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris nagari mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat nagari, penyediaan prasarana perangkat nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan wali nagari, perangkat nagari, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pemerintah nagari Panti saat ini dipimpin oleh Yefri Aldi selaku wali nagari yang memegang kepemimpinan. Beliau sudah beberapa priode menjabat di pemerintahan nagari Panti. Kantor pemerintahan nagari Panti terletak di Maninjau dekat dengan SD IT dan lapangan bola. Pemerintahan nagari Panti memiliki visi dan misi sebagai berikut,

Visi

Mewujudkan nagari panti yang mandiri dan berkeadilan menuju kesejahteraan masyarakat

Misi

1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal.
3. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian.
4. Meningkatkan usaha pertanian.
5. Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli nagari.
6. Menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di nagari panti

2. Masalah dan Keluhan sektor Pertanian di Nagari Panti

Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai kegiatan bercocok tanam (Purba, 2020) Pertanian juga diartikan sebagai suatu jenis kegiatan produksi yang berlandaskan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dapat diartikan secara terbatas dan secara luas. Pertanian secara terbatas merupakan pengelolaan tanaman dan lingkungannya agar memberikan suatu produk. Sedangkan dalam arti luas pertanian ialah pengelolaan tanaman, ternak dan ikan

agar memberi produk (Soetriono & Wulandari, 2016). Sektor pertanian menempati kedudukan yang vital dalam perekonomian di negara berkembang, termasuk Indonesia. Ada beberapa peran sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi antara lain 1) sebagai penyedia pangan, 2) sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor perekonomian lain, 3) sebagai sumber kapital bagi pertumbuhan ekonomi modern khususnya dalam tahap awal pembangunan, 4) sebagai sumber devisa dan 5) masyarakat pedesaan merupakan pasar bagi produk yang dihasilkan dari sektor industry di perkotaan (Setyowati, 2012).

Sektor pertanian sangat penting peran dan keberadaannya. Sebab sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk yang ada di pedesaan. Banyak tenaga kerja yang bergelut di sektor pertanian ini seperti menjadi buruh tani yakni mereka yang bekerja membajak, menanam, menyiangi, menyabit, memanen tanaman tani. Dari bekerja di lahan orang lain mereka mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sektor pertanian juga menyediakan bahan pangan. Para petanilah yang menanam bahan pangan seperti padi yang menjadi bahan pangan pokok di berbagai negara, jagung, buah, sayuran dan yang lain. Kalau petani tidak mau menanam bahan pangan apa yang akan dimakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, sektor pertanian juga menyediakan bahan mentah bagi industri. Bahan mentah yang diolah menjadi banyak variasi barang dan produk seperti karet yang diolah menjadi ban, kelapa sawit yang diolah menjadi minyak goreng. Bahan mentah ini tidak hanya diolah di dalam negeri saja namun juga diekspor ke luar negeri. Kegiatan ekspor ini kemudian akan menyumbang devisa bagi negara. Dengan kata lain sektor pertanian menyumbang tambahan PDB yang cukup besar bagi negara. Pertanian yang menjadi sektor basis kemudian perlu untuk lebih diperhatikan, baik dari segi teknis dan produksinya maupun proses pemasaran dan penjualan hasil pertanian itu sendiri. Segala yang terkait dengan modal pengelolaan mulai dari bibit, pupuk, pestisida hingga ke alat dan teknologi pertanian menjadi faktor penunjang peningkatan sektor pertanian.

Kendatipun sektor pertanian ini teramat penting keberadaannya, ternyata para petani khususnya di wilayah Nagari Panti masih banyak mengeluh. Nagari dengan luas sekitar 192 KM² sebelum pemekaran mempunyai luas persawahan sekitar 825 Ha. Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa orang petani masih banyak hal yang mereka keluhkan dengan kondisi pertanian. Kemudian penulis coba mengemas keluhan masyarakat petani menjadi poin-poin penting yang perlu dibenahi seperti berikut ini,

1. Kekurangan modal

Modal merupakan salah satu hal yang pokok dalam segala bidang termasuk pertanian. Modal menjadi barang mutlak yang harus ada sebelum memulai usaha. Besar kecilnya modal akan mempengaruhi perkembangan usaha dalam pencapaian pendapatan dan hasil (Abbas, 2018). Modal utama yang biasa harus dimiliki petani seperti bibit, pestisida untuk perawatan dari hama serta pupuk sebagai suplemen perkembangan tanaman tani. Maka banyak diantara petani di daerah nagari Panti yang mengeluh kekurangan modal, mereka tidak punya cukup uang untuk membeli dan mengadakan faktor-faktor produksi pertanian seperti harga bibit yang mahal, menjadikan petani enggan untuk membeli bibit unggul, mereka lebih memilih bibit sesuai kemampuan keuangan mereka.. Selain itu, harga pupuk yang tergolong mahal, yakni Rp. 130.000/karung untuk pupuk Urea sebagai pupuk utama pertanian, pupuk Poska Rp. 150.000/ karung, pupuk Kcl Rp. 165.000/ karung, pupuk SP 36 seharga Rp.150.000/ karung dan pupuk MPK seharga Rp. 380.000/ karung. Ditambah lagi dengan pestisida dengan berbagai jenisnya. Penggunaan pestisida tidak hanya sekali saja, melainkan berkali-kali sesuai kondisi lahan dan tanaman padinya, apalagi petani dengan lahan yang luas akan membutuhkan buruh tani untuk membantu pekerjaan pertaniannya. Pengupahan buruh tani akan membutuhkan modal keuangan.

Sebenarnya bisa saja dengan modal sedikit atau seadanya, memakai pupuk sedikit saja, pestisida atau dengan bibit yang murah, namun kembali lagi, pendapatan berbanding lurus dengan modal yang kita keluarkan. Sawah dengan bibit berkualitas tinggi, pupuk yang cukup serta pestisida untuk menjaga dari hama, dirawat dengan baik tentu akan berbeda pendapatannya dengan sawah yang diolah dengan seadanya. Maka penting bagi petani untuk memiliki modal keuangan dan faktor produksi pertanian.

2. Buruknya akses jalan dan jembatan ke lahan pertanian

Petani di daerah nagari Panti juga mengeluh dengan akses jalan dan jembatan yang buruk dan kurang memadai di bagian lahan tertentu. Sebagai sarana menuju lahan, jalan yang buruk akan mempengaruhi biaya angkut hasil pertanian. Mana kala musim hujan, jalan akan becek dan sulit untuk dilalui bahkan tidak bisa dimasuki kendaraan roda dua. Lahan yang jauh ditambah akses jalan yang buruk menyebabkan petani harus merogoh saku dengan nominal yang besar untuk mengangkut hasil panen, seperti jagung, padi atau sawit terutama mereka yang lahan pertaniannya agak jauh dari jalan utama.

Pun demikian dengan jembatan, petani yang memiliki lahan dekat dengan sungai akan kesulitan untuk pergi ke lahan seberang jika tidak ada jembatan yang memadai, dampaknya petani harus lewat jalan yang lebih jauh, padahal jika ada jembatan jalur yang dilalui akan lebih dekat, hal ini tentu juga akan berpengaruh dengan biaya angkut. Contoh sederhananya petani A membayar biaya angkut (mengangkut dengan badan) panen padinya Rp. 10.000/karung dengan jarak sekitar 200 m ke jalan utama. Padahal jika ada jembatan untuk melewati sungai jarak lahannya ke jalan utama hanya 120 m dengan biaya angkut sekitar Rp.6000/karung. Maka dia bisa menghemat Rp.4000/karungnya jika jembatan itu ada. Buruknya akses jalan dan jembatan pada lahan tertentu menjadi masalah yang mesti diupayakan solusinya oleh seluruh masyarakat, terutama pemerintah nagari selaku garda terdepan kebijakan strategis di nagari Panti.

3. Permasalahan irigasi

Irigasi merupakan komponen yang urgen dalam sektor pertanian. Irigasi menjadi sarana pembagi air ke sawah dan ladang para petani. Setiap sawah membutuhkan pengairan yang cukup. Namun di nagari Panti irigasi dan jaringannya mengalami permasalahan yang cukup kompleks yakni mulai dari kualitas irigasi menurun, kemampuan irigasi dan jaringannya menurun akibat mendangkalnya saluran irigasi, hal ini dipicu oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran irigasi. Selain itu, ada pula oknum petani yang tidak bertanggung jawab membuang rumput dan lumpur kasar pada saluran agar air berlimpah di sawahnya. Perilaku rakus terhadap pengairan membuat beberapa petani melakukan cara-cara yang salah seperti menutup membuka saluran irigasi sesukanya, padahal berakibat buruk pada petani lain.

Akibat dangkalnya saluran irigasi dan jaringannya, pada musim kemarau jaringan saluran irigasi tidak bisa memenuhi kebutuhan pengairan sawah, tidak bisa membagi air ke lahan-lahan tertentu yang jauh dari sumber air. begitupun sebaliknya pada musim hujan, bisa terjadi banjir pada lahan persawahan petani sehingga merusak tanaman petani. Permasalahan ini jika dibiarkan akan menyebabkan dampak yang besar seperti gagal panen dan penurunan pendapatan hasil panen.

4. Rendahnya minat generasi muda untuk menjadi petani

Pertanian dalam pandangan generasi muda yang sudah mengenal perkembangan teknologi adalah level bawah dari pekerjaan. Mereka tidak berminat dan tidak ada keinginan untuk menjadi aktor dunia pertanian. Permasalahan ini jelas akan mempengaruhi kualitas pertanian di masa depan. Padahal sejatinya sektor pertanian butuh petani muda yang kreatif, inovatif serta punya semangat tinggi. Petani dengan pengetahuan yang luas akan memberikan kontribusi peningkatan kesejahteraan petani.

3. Upaya Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Petani

Melihat pertanian sebagai sektor basis di Nagari Panti, maka menjadi penting peran pemerintah nagari selaku pemegang kebijakan berwenang dalam mengatur dan mengelola pola kehidupan masyarakat. Nagari memiliki peranan yang cukup penting dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. karena pemerintahan nagari secara umum memiliki wewenang yang strategis untuk mengendalikan kehidupan masyarakat atau dengan kata lain pemerintah nagari memiliki seperangkat aturan baku yang tertulis yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pusat yang termuat dalam undang-undang perdesaan yang harus di taati oleh masyarakat yang hidup dan tinggal di desa tersebut, disamping adanya peraturan lain yang tumbuh dan berkembang dari hasil prakarsa masyarakat setempat yang membedakan dengan masyarakat lainnya seperti adat istiadat atau kearifan lokal yang berkembang di dalam masyarakat setempat (Karbulah, Yaya, & Aliyudin, 2018).

Dalam pengembangan ekonomi lokal ini tidak lepas dari peran pemerintah. Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam terutama di sektor pertanian (Susanti, Hanafi, & Adiono, 2009)

Pemerintah nagari Panti mengusung dua poin misi yang berkaitan erat dengan sektor pertanian yakni pada urutan misi ketiga bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk

meningkatkan hasil pertanian dan urutan misi ke empat meningkatkan usaha pertanian. Pemerintah nagari kemudian merespon serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani melalui program sebagai berikut,

1. Memaksimalkan program PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri merupakan salah satu program pembangunan untuk melaksanakan proses pembangunan desa atau nagari yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri ini juga menjadi ruang belajar (*lesson learned*) dalam pengambilan keputusan secara demokratis pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dalam setiap proses pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif. Pelaksanaan PNPM Mandiri dirancang untuk memberdayakan masyarakat, dimana masyarakat diajarkan untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui organisasi (Ermayanti, Hendrawati, & Lucky, 2018). Secara umum Tujuan dari program PNPM ini adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Pemerintah berharap para pelaku PNPM-Mandiri dapat menjalankan tugas dengan baik sehingga program ini benar-benar dapat menanggulangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kinerja para pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang mana keberhasilan suatu program pemerintah diukur dari kinerja pemerintahannya itu sendiri. Sehubungan dengan ini dana PNPM-Mandiri dari pusat telah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah yang kemudian dikelola oleh pemerintah desa yang diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk turut mensejahterakan masyarakatnya (Mardani & Rodiyah, 2016).

Pemerintah nagari berperan sebagai pembina sekaligus pengontrol program PNPM mandiri. Untuk lebih memaksimalkan pembinaan dan pengontrolan itu, pemerintah di bagi dalam sebuah struktur organisasi dari tingkat daerah. Pemerintah juga berperan sebagai sebagai perumus kebijakan PNPM mandiri bertanggung jawab pada masyarakat atas keberhasilan program yang dilakukan. Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri Pedesaan) menjadi program pemberdayaan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahwa masyarakat sadar akan pentingnya program PNPM mandiri sebagai program pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sehingga perlu dukungan secara fisik dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat pada umumnya sangat

setuju dengan program PNPM mandiri sebagai salah satu program pengentasan kemiskinan. Manfaat pembangunan sarana dan prasarana dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) sebagai salah satu pondasi peningkatan kesejahteraan ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat

Pemerintah nagari Panti merespon baik pengalokasian program PNPM Mandiri Pedesaan pada sektor yang diprioritaskan yakni kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Pembangunan infrastruktur desa atau nagari menjadi kegiatan yang diutamakan mengingat betapa pentingnya pembangunan di sebuah wilayah. Pemerintah nagari Panti menjawab keluhan para petani dengan pengalokasian dana PNPM pada pembangunan jalan, jembatan dan perbaikan irigasi akses jalan yang baik akan memberikan kemudahan dan berkurangnya biaya angkut atau transportasi hasil panen. Pun demikian pula dengan jembatan yang menghubungkan dua sisi atau bidang lahan yang dipisahkan oleh sungai. Jembatan akan memangkas jarak perjalanan jika dibandingkan dengan kondisi tanpa jembatan yang kemudian memaksa harus lewat jalur lain dengan rute yang lebih jauh. Selain itu, PNPM Mandiri Pedesaan juga ditujukan untuk pembangunan, perawatan dan perbaikan irigasi, mengingat irigasi menjadi sebuah komponen yang tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Irigasi yang baik akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan pertanian demi membantu mengupayakan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di sektor pertanian selaku sektor basis mata pencarian utama masyarakat di nagari Panti.

2. Penguatan kelompok tani

Penguatan kelompok tani dan Gapoktan merupakan hal yang mendasar dalam memberdayakan masyarakat petani. Dimana Kelompok tani dan Gapoktan merupakan pintu masuk bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan dan pembinaan. Kelompok tani dan Gapoktan juga menjadi wadah komunikasi antar petani, wadah dalam belajar guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga meningkatnya produktifitas, bertambahnya pendapatan, serta kehidupan yang lebih sejahtera.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.273./Kpts/OT.160/4/2007, kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban

untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Menurut Purwanto (Kiswanto S.P, 2018), kelompok tani adalah kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam meningkatkan hasil panen tentu memiliki hubungan yang erat dengan sarana prasarana dan lahan yang dimiliki oleh petani. Dengan adanya kelompok tani ini diharapkan dapat membantu dan mendukung masyarakat dalam mengolah lahan pertanian yang ada serta dapat membantu para petani untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik.

Kelompok tani saat ini tidak lagi dibentuk atas inisiatif petani dalam memperkuat diri, malainkan kebanyakan merupakan respon terhadap program-program pemerintah yang mengharuskan petani berkelompok. Hal ini dimaksudkan selain tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman sesama anggota juga untuk mempermudah pendataan dan penyaluran program-program bantuan dari pemerintah. Menurut (Hamid, 2018) pentingnya kelompok tani adalah sebagai pengantar antara masyarakat desa dengan masyarakat luar desa karena sebagai wadah membangun diri dan komunitasnya, sebagai wadah untuk proses belajar mengajar, wadah menyelesaikan permasalahan, wadah mengelola inovasi, dan sebagai wadah menuju perubahan yang lebih baik. Pemerintah nagari mengupayakan kesejahteraan masyarakat petani dengan memberikan bantuan modal dan bahan pertanian seperti,

1. Penyauran pupuk bersubsidi, penyaluran ini disesuaikan dengan kondisi dan luas lahan anggotanya. Semakin luas lahan yang terdata maka kesempatan untuk mendapatkan pupuk lebih banyak sesuai kebutuhan.
2. Penyuluhan program pertanian, penyuluhan dilakukan dalam rangka memberikan pemantauan dan pengevaluasian keadaan pertanian di lapangan guna memberikan peningkatan
3. Kredit usaha tani bersubsidi, di kelompok tani juga ada kesempatan mendapatkan kredit bersubsidi yang memberikan kemudahan bagi anggota petani yang kekurangan modal. Modal ini kemudian akan dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha tani. Kredit ini tergolong ringan mengingat kredit di luar kelompok tani ketat dengan syarat dan ketentuan.
4. Bantuan bibit, pemerintah nagari melalui kelompok tani juga memberikan bantuan bibit. Masing-masing anggota mendapatkan bibit sesuai jenis pertanian yang mereka geluti, ada yang mendapatkan bibit padi, jagung ada pula bibit

tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, mangga, jambu dan jenis bibit yang lainnya. Pemberian bibit ini dimaksudkan agar petani terbantu serta mengupayakan pemerataan.

5. Dan bantuan yang lain

3. Pemberian pelatihan dan pembekalan bagi petani terutama petani muda

Pemerintah nagri yang bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan juga mengadakan program semacam pelatihan dan pembinaan kepada para petani dengan mentor atau pengajar yang berkompeten di bidangnya guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan bertani masyarakat. Pelatihan meliputi pemberian pemahaman yang benar mengenai cara mengelola lahan pertanian, cara menyemai benih, mengatur penggunaan kadar dan kuantitas air pada sawah, penggunaan pestisida yang tepat, pencampuran pupuk yang benar sesuai kondisi lahan serta cara meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Petugas penyuluh lapangan juga mengontrol dan memonitoring pekerjaan dan cara bertani masyarakat di lapangan guna mendapatkan bahan untuk evaluasi.

Selain itu, memingat semakin sedikitnya generasi muda peminat pertanian dikarenakan cara pandang yang negatif yakni Pertanian digambarkan sebagai pekerjaan yang kotor karena lumpur sawah, kerja mencangkul yang berat, harga produk/panen yang rendah, upah yang kecil, hasil panen yang dijual menghasilkan uang yang dirasa relatif kecil dan jenis pekerjaan yang dipilih sebagai alternatif terakhir. Image lain adalah jaminan untuk sukses bekerja di sektor pertanian lebih rendah dibanding daripada sektor nonpertanian, baik dari besaran upah yang diberikan maupun prospek jenjang status pekerjaan. Untuk membantah pandangan negatif terhadap pertanian tersebut dan meningkatkan minat generasi muda pada sektor pertanian maka diperlukan suatu desain kebijakan secara intensif dan terstruktur dalam rangka pemberdayaan tenaga kerja sehingga akan berpengaruh pada kepada peningkatan produksi/produktivitas pertanian, pendapatan petani dan pertumbuhan ekonom (Nugroho, Waliyati, & Jamhari, 2018). Dengan ini diharapkan terbentuknya petani muda yang berilmu. Petani yang paham akan cara bertani yang kreatif dan inovatif serta mampu melihat peluang. Petani dengan jiwa yang membara dan dibekali pengetahuan dan pengalaman akan mampu memberikan ide dan terobosan yang bisa meningkatkan kesejahteraan di sektor pertanian.

D. KESIMPULAN

Keberadaan sektor pertanian dalam perekonomian nasional sangat penting dan strategis. Hal ini terutama karena sektor pertanian masih memberikan lapangan pekerjaan bagi sebagian penduduk yang ada di pedesaan dan menyediakan bahan pangan. Sektor pertanian juga menyediakan bahan mentah bagi industri yang menghasilkan devisa negara dengan ekspor non migas. Selain itu, sektor ekonomi menyumbang tambahan PDB yang cukup besar. Dilansir dari *kompas.com* (2019) kontribusi sektor pertanian terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sekitar 20% dan menyerap lebih dari 50% tenaga kerja di pedesaan.

Kendatipun sektor pertanian ini teramat penting keberadaannya, ternyata para petani khususnya di wilayah Nagari Panti masih banyak mengeluh dengan kondisi pertanian. Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada petani, mereka mengeluhkan kurangnya modal untuk mengelola seperti mahalnya harga pupuk, harga bibit, pestisida dan obat pertanian lainnya. Akses jalan dan jembatan yang masih kurang memadai pada lahan tertentu juga ikut dikeluhkan. Sebagai sarana vital transportasi, jalan dan jembatan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani. Selain itu, pengairan dan irigasi yang macet turut mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Irigasi yang tidak memadai menyebabkan petani sulit untuk mengelola lahan pertaniannya.

Pemerintah nagari Panti selaku pemegang kebijakan strategis merespon baik keluhan petani. Hal ini dapat dilihat dari dua poin misi pemerintahan nagari di bidang sektor pertanian yakni pada urutan misi ketiga bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk meningkatkan hasil pertanian dan urutan misi ke empat meningkatkan usaha pertanian. Misi ini kemudian direalisasikan melalui beberapa program dan kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di nagari Panti. Diantara program dan kebijakannya 1. Memaksimalkan program PNPM Mandiri Pedesaan untuk pembangunan akses jalan, jembatan dan perbaikan irigasi, 2. Penguatan kelompok tani guna mempermudah penyaluran bantuan pertanian dari pemerintah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, 3. Pemberian pelatihan dan pembekalan bagi petani terutama petani muda untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat petani untuk mengelola lahan pertanian serta melahirkan petani yang berimbu, kreatif serta mampu membaca peluang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, D. (2018). PENGARUH MODAL USAHA, ORIENTASI PASAR, DAN ORIENTASI KEWIRAUSAHAAN TERHADAP KINERJA UKM KOTA MAKASSAR. *Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (MINDS)* , 95-111.
- Ermayanti, Hendrawati, & L. Z. (2018). STUDI PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PNPM MANDIRI DI SUMATERA BARAT. *JURNAL ANTROPOLOGI* , 33-43.
- Hamid, H. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. *Khazanah Ilmu Berazam* , 32-48.
- Karbulah, Yaya, & Aliyudin. (2018). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* , 90-113.
- Mardani, Y., & Rodiyah, I. (2016). IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERKOTAAN (PNPM-MP) DI DESA GISIK CEMANDI KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO. *JKMP* , 89-100.
- Milakarma, P., & Montessori, M. (2018). Pemerintah Nagari dan Upaya Memberdayakan Masyarakat (Studi di Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam). *Journal of Civic Education* , 158-166.
- Nugroho, A. D., Waliyati, L. R., & Jamhari. (2018). Upaya Memikat Generasi Muda Bekerja pada Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* , 76-95.
- Purba, D. W. (2020). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sadono, D. (2008). PEMBERDAYAAN PETANI: PARADIGMA BARU PENYULUHAN PERTANIAN DI INDONESIA. *JURNAL PENYULUHAN* , 66-74.
- Sarjono. (2014). Peranan Pemerintah dalam Pemberdayaan Kaki Lima di Kecamatan Pontianak Timur. *urnal Tesis PMIS. UNTAS PSS. Universitas Tanjung Pura, Pontianak* .

- Setyowati, N. (2012). ANALISIS PERAN SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SUKOHARJO . *SEPA* , 174-179.
- Soetriono, & Wulandari, A. (2016). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Malang: Intimedia.
- Sugiman. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum* , 82-94.
- Susanti, E. A., Hanafi, I., & Adiono, R. (2009). PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DALAM SEKTOR PERTANIAN. *Jurnal Administrasi Publik* , 31-40.



08



IQBAL TAWAKAL

*Eksistensi Badan Usaha Milik
Nagari (BUMNag) Dalam
Meningkatkan Perekonomian
Masyarakat Di Nagari Pasie Laweh*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI NAGARI PASIE LAWEH

Iqbal Tawakal

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

ABSTRAK

BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung didirikan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan pokok. BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung juga menjadi wadah untuk memenuhi potensi lokal masyarakat Kenagarian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keberadaan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sekaligus melihat tantangan yang dihadapinya. Teknologi analisis data yang digunakan adalah teknologi analisis data model Miles and Habermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dan potensi lokal masyarakat itu sendiri. Keberadaan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam meningkatkan pendapatan masyarakat. Melalui program simpan pinjam pada BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung berhasil menyelamatkan usaha home industri masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 yang melemahkan kegiatan UMKM masyarakat nagari. Sementara itu, tantangan yang dihadapi BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung terkait dengan akuntabilitas, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Kata Kunci: Eksistensi, BUMNag, Ekonomi Masyarakat

Abstract

BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung was established to meet the economic needs of the community related to meeting basic needs. BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung is also a forum to fulfill the local potential of the Kenagarian community. The purpose of this study is to identify and analyze the existence of BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung in improving the community's economy, as well as to see the challenges it faces. The data analysis technology used is the Miles and Habermans model data analysis technology. The results showed that BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung used the concept of community empowerment and the local potential of the community itself. The existence of BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung is very helpful to improve the welfare of the community, especially in increasing people's income. Through the savings and loan program at BUMNag Tanamo Pasie Laweh, Lubuk Alung managed to save the community's home industry business due to the impact of the COVID-19 pandemic which weakened MSME activities for the nagari community. Meanwhile, the challenges faced by

BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung are related to accountability, infrastructure and human resources.

Keywords: *Existence, BUMNag, Community Economy*

A. Pendahuluan

Sejak diundang-undangkannya UU No. 6 tentang desa pada tahun 2014, desa atau selanjutnya disebut Nagari, telah memperoleh kekuatan luar biasa untuk mengatur dan mengelola urusan wilayahnya sendiri. Dua asas utama yang terkandung dalam hukum desa/nagari, yaitu asas pengakuan dan asas subsidi, memungkinkan adanya kekuasaan tersebut. Asas pengakuan adalah pengakuan atas hak asal usul. Artinya keberadaan desa/nagari dan segala adat dan hukum adat yang dimiliki masyarakat setempat diakui oleh negara. Prinsip subsidiaritas adalah menentukan kekuasaan dan pengambilan keputusan lokal lingkup lokal untuk kepentingan Nagari. Kekuasaan nagari meliputi kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan nagari, pembinaan masyarakat nagari, dan pemberdayaan masyarakat nagari. Kewenangan yang besar ini diharapkan dapat mempercepat kemandirian nagari.

Pengembangan basis Ekonomi di Nagari sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang diinginkan bersama. Ada banyak faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya program-program tersebut. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar, akibatnya menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat nagari dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di nagari. Sistem dan mekanisme kelembagangannya ekonomi dinagari tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Salah satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulasi dan menggerakkan perekonomian di nagari adalah melalui pendirian kelembagangannya ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat nagari. Lembaga ekonomi ini tidak lagi diinstruksikan oleh pemerintah. Tetapi harus didasarkan oleh keinginan masyarakat yang berangkat dari potensi yang apabila dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan dipasar. Kepemilikan lembaga ini oleh nagari dikontrol bersama untuk mencapai tujuan utamanya yaitu meningkatkan standar ekonomi masyarakat nagari.

Sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), Pemerintah melakukan komitmen untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang nagari secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan nagari yang maju, kuat, mandiri dan demokratis dari segi ekonomi, politik dan pemberdayaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat Nagari adalah pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag merupakan salah satu badan usaha yang mana seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintahan Nagari. Dengan ikut serta secara langsung kekayaan Nagari, kekayaan Nagari dikelola secara terpisah dari aset, jasa dan usaha lainnya, guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. BUM Nagari didirikan untuk menampung seluruh kegiatan sektor ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerjasama antar Nagari. Pembentukan BUMNag penting dilakukan di setiap desa/nagari untuk memperkuat konsep tradisional nagari dan menempatkan nagari sebagai forum kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Menurut Anom Surya Putra (2015), inti gagasan tradisi Berdesa/nagari dalam mendirikan BUMNag adalah: 1) BUMNag membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dll) untuk pengembangan bisnis untuk mencapai jaringan sosial yang lebih inklusif dan lebih luas. 2) BUMNag, sebagai wadah tertinggi pengembangan usaha ekonomi nagari yang diusung oleh BUM Nagari, berkembang dalam politik inklusif melalui praktik musyawarah nagari. 3) BUMNag merupakan usaha ekonomi nagari kolektif antara pemerintah nagari dengan masyarakat nagari. Upaya ekonomi nagari kolektif yang dilakukan BUMNag meliputi unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi. 4) BUMNag adalah badan usaha yang disahkan oleh UU Desa/Nagari, yang bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan sektor ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh Nagari dan/atau kerjasama antar Nagari. 5) BUMNag menjadi wadah pembelajaran bagi warga Nagari dalam membangun keterampilan manajemen, jiwa kewirausahaan, tata kelola nagari yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan tindakan kolektif 6) BUMNag mentransformasikan proyek yang disponsori pemerintah (government-driven, yaitu proyek pemerintah) menjadi milik Nagari.

Berdasarkan gagasan inti tradisi bernagari terkait BUMNag, dapat disimpulkan bahwa BUMNag dibentuk untuk menggunakan seluruh potensi ekonomi, sistem ekonomi, dan potensi sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat masyarakat Nagari. Dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Nagari, BUMNag dapat menghimpun tabungan

skala lokal bagi masyarakat Nagari dengan mengelola dana bergulir dan simpan pinjam. Oleh karena itu, keberadaan BUMNag menjadi angin segar bagi masyarakat Nagari untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung juga merupakan salah satu Nagari yang mendirikan BUMNag untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih memahami keberadaan BUMNag dalam perekonomian masyarakat Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, diperlukan beberapa landasan teori. Penulis menggunakan penelitian teoritis sebagai berikut.

Pengertian BUMNag

Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, ditegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa/Nagari adalah salah satu diantaranya yaitu badan usaha yang modal dan kegiatannya dikelola dan diawasi oleh pemerintah nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari sumber kekayaan Nagari dan dipisahkan untuk mengelola lalu memproses aset, jasa dan usaha yang dikembangkan guna mencapai kelebihan yang besar bagi masyarakat Nagari dalam segi ekonomi. Senada dengan itu Maryunani juga mengemukakan bahwa BUMNag adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Nagari dalam upaya memperkuat perekonomian Nagari dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Jadi BUMNag adalah organisasi komersial, artinya mempunyai fungsi menjalankan usaha untuk memperoleh laba atau keuntungan dan hasil lainnya.

Maksud dan Tujuan Pendirian BUMNag

Maksud dan tujuan pendirian BUM Nagari termuat dalam Perda Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 Pendirian BUM Nagari dimaksudkan Untuk menampung seluruh kegiatan sektor ekonomi dan/atau pelayanan publik yang dikelola oleh Nagari dan salah satunya kerjasama antar Nagari guna meningkatkan perekonomian masyarakat nagari Pendirian BUM Nagari bertujuan.

- a. Meningkatkan perekonomian Nagari.
- b. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.

- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

Peran BUMNag Terhadap Masyarakat

Menurut Seyadi (2003) peranan BUMNag adalah sebagai berikut:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat Nagari, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMNag sebagai pondasinya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat Nagari.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana penelitian ini mendeskripsikan objek penelitian dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan keadaan terkini dari objek penelitian, dan mendeskripsikan objek penelitian menurut fakta-fakta yang tampak atau benar-benar ada (Nawawi, 1998:63). Sesuai dengan fokus penelitian ini, penelitian ini menggambarkan keberadaan BUMNag Tanamo Pasie Laweh dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Lokasi penelitian terletak di Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Berbagai teknik digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu wawancara informal pernyataan tidak terstruktur, observasi yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati keberadaan BUMNag dan dokumentasi tempat peneliti memperoleh data dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah ini.

C. Pembahasan

1. Profil BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung

Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman. Ada beberapa alasan munculnya ide pendirian BUMNag

di Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. Pertama, Pembentukan BUMNag mengikuti prioritas Kementerian Desa, dan rencana pembangunan daerah miskin mendorong masyarakat desa/nagari untuk mengelola perekonomiannya secara mandiri. Salah satunya dilakukan dengan mendirikan BUMNag. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam mendirikan BUMNag adalah jenis usaha yang dipilih BUMNag tidak boleh mengancam kegiatan ekonomi masyarakat Nagari. Keberadaan BUMNag harus menjadi wadah kegiatan ekonomi nagari.

BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung hadir untuk menjawab kebutuhan rencana nagari dan mendorong upaya peningkatan pendapatan masyarakat nagari sesuai kebutuhan dan potensi nagari. Kedua, BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung didirikan atas kesepakatan bersama yang muncul dari keprihatinan bersama akan kesulitan yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga karena jarak dari pusat perbelanjaan kota. Jarak dari Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung ke jalan adalah 14 kilometer, dan membutuhkan waktu sekitar 20-30 menit untuk tiba dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak dari nagari Pasie Laweh Lubuk Alung ke pusat kecamatan adalah 14 kilometer. Keadaan ini sangat menyulitkan masyarakat nagari, karena mereka harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, pemerintah nagari Pasie Laweh Lubuk Alung dan masyarakat nagari membentuk BUMNag untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. BUMNag ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari. Dengan ikut serta langsung dalam kekayaan Nagari, Nagari mengelola aset, jasa dan usaha lainnya secara terpisah untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bagi masyarakat Nagari. BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung secara resmi didirikan sesuai dengan Peraturan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung No.04/201 Tanggal 30 September 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan kesepakatan bersama yang dicapai dengan Badan Musyawarah Nagari dan wali nagari. BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung beralamat di Kampung Kalawi, Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung. BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung menggunakan Management dan Sumber Daya Manusia yang baik sebagai contoh manajemen yang sering digunakan yaitu melakukan pelatihan masyarakat yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam hal pengelolaan padi dan pinang dan seperti Struktur Organisasi pengurus BUMNag TANAMO terdiri dari:

Pengurus BUMNag :

Penasehat/Komisari : Wali Nagari Pasie Laweh (PERI ADINUR)

Dewan Pengawas:

Ketua : AFRIZAL

Sekretaris : RONI Tk. BAGINDO

Dewan Direksi:

Ketua : SUARTI

Sekretaris : UMAR GANTI

Bendahara : NELDAWATI

Pada awal pembentukan, Tujuan BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung yaitu pertama, mendorong dan menampung hasil pertanian nagari Pasie Laweh Lubuk Alung dan menjadikan suatu produksi yang mempunyai nilai jual yang lebih baik. Kedua dengan adanya kadai nagari dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Pasie Laweh Lubuk Alung supaya tidak jauh belanja keluar nagari. pemerintah Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung memberikan Penyertaan Modal untuk pengembangan usaha Jual Beli Padi, Pinang dan buah coklat dan melakukan Simpan Pinjam bagi masyarakat Nagari. Modal awal yang diberikan pemerintah Nagari sebesar Rp.77.000.000 yang dikembangkan sampai saat ini. Selanjutnya BUMNag Pasie Laweh Lubuk Alung berkesempatan mengajukan Proposal ke Pemerintah Nagari agar mendapatkan tambahan suntikan dana dana nagri. Proposal yang diajukan BUMNag TANAMO tahun 2019 di terima oleh pemerintah nagari dengan Penyertaan modal tambahan Rp.200.000.000 untuk mendirikan Unit Usaha bernama KADAI NAGARI dengan sumber pendanaan dari Bantuan Permodalan APBD Nagari Pasie Laweh tahun 2019. Selanjutnya sejauh ini BUMNag TANAMO Pasie Laweh belum melakukan permohonan permodalan untuk tahun ini. Artinya bahwa dengan permodalan yang masih tersedia dan dengan pengelolaan usaha yang dapat bersaing, dirasa masih mampu untuk menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.

2. Visi dan Misi BUMNag Pasie Laweh Lubuk Alung

Sejak didirikan, BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung memiliki visi dan misi tertentu. Visi BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung adalah Bersatu dalam

membangun ekonomi dan menggali potensi Ekonomi Rakyat dan Menjadikan Suatu produk yang Berkwalitas mempunyai Nilai Jual yang tinggi.

Misi BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung.

1. Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Home Industri Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.
2. Menggali dan Memanfaatkan Potensi Alam Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.
3. Mempertahankan Produk dan Kualitas yang menjadi aset Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung.
4. Mengembangkan Usaha yang Berskala Nasional.

Kegiatan yang akan dikembangkan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung sesuai dengan visi misi yang dikembangkan BUMNag Tanamo berencana akan menambahkan Dua Unit usaha di bidang perdagangan yaitu jual beli beras hasil pertanian sawah yang ada di nagari pasie laweh lubuk alung dan jual beli pinang yang akan antinya akan bekerjasama dengan BUMDes KUMBAYU yang berada di Sawahlunto.

3. Konsep dan Kegiatan BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung

Pendirian BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung sesuai dengan Peraturan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung Nomor 14 Tahun 2017 mengusung konsep pemberdayaan. Artinya BUMNag TANAMO Pasie Laweh merupakan rencana badan usaha milik Nagari yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya dan mewujudkan potensi nagari yang ada. BUMNag ini dikelola dan dilayani oleh masyarakat. Pada awal berdirinya, BUMNag TANAMO Pasie Laweh lebih memperhatikan usaha sosial sederhana, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok. Namun, seiring berjalannya waktu, BUMNag juga mulai mengoperasikan ekonomi kreatif. Artinya masyarakat Nagari Pasie Laweh juga berkesempatan untuk menjual hasil kerajinannya di BUMNag Pasie Laweh. Artinya keberadaan BUMNag TANAMO Pasie Laweh berdampak ganda bagi masyarakat Nagari Pasie Laweh. Di satu sisi, masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang relatif terjangkau. Di sisi lain, masyarakat juga bisa secara kreatif menghasilkan berbagai kerajinan tangan dan hasil alam. Selain itu BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung juga menampung atau membeli dan menjual hasil pertanian, perkebunan dan peternakan masyarakat untuk dipasarkan di BUMNag tersebut.

Kegiatan usaha yang dilakukan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung seperti jual beli Padi dan Pinang tentunya melalui mekanisme produksi yang tepat meliputi:

- Pemilihan Jenis Barang yang berkualitas tinggi seperti pemilihan jenis Padi dan Pinang dengan komposisi yang baik.
- Hasil bumi yang diperdagangkan di BUMNag Tanamo Pasie Laweh seperti Padi dan Pinang tidak boleh terkena hujan atau sampai mengalami produk basah.
- Melakukan pengeringan produk secara tradisonal yaitu dengan memanfaatkan panas matahari dengan cara penjemuran di Panasa yang baik sampai benar-benar kering.
- Produk padi setelah dikeringkan ditempat yang panas sebelum digiling didinginkan terlebih dahulu agar bentuk beras tidak pecah yang akan mengurangi kualitas beras nantinya. Hal tersebut benar benar diperhatikan dan diawasi secara konsisten.
- Melakukan penggilingan produk padi secara berulang agar mendapatkan hasil yang terbaik.
- Hasil beras menjadi bersih putih tidak mudah patah tahan lama tidak cepat dihinggapi kutu beras atau ulat.

Kegiatan produksi yang dilakukan tentunya memperhatikan kualitas produk yang akan diperdagangkan. Hal tersebut dilakukan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung agar mendapatkan peminat dari masyarakat dan tentunya untuk mempermudah kegiatan konsumsi masyarakat nagari. Kapasitas produk yang dihasilkan disesuaikan dengan kelompok tani yang menghasilkan produksi padi 2 x dalam setahun. Sedangkan untuk Produk Pinang dilakukan ketika masyarakat mengalami panen pinang yang baik dan dilakukan sepanjang tahun. Pemilihan lokasi terdapat lahan yang dipergunakan untuk produksi padi adalah lahan terbuka, tidak tergenang air sedangkan untuk produk pinang menggunakan lahan masyarakat lalu masyarakat menjual hasilnya kepada BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung lalu dipasarkan keberbagai kota di provinsi Sumatera Barat bahkan sampai ke Nasional.

4. Manfaat BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung

Hasil penelitian yang ada BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung menyatakan bahwa karena Pada awal berdirinya pada tahun 2017, BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung menerima bantuan langsung Pemerintah desa mengalokasikan dana melalui nagari Rp. 77.000.000 manajemen Dikelola oleh BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung. Manajer

BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung terdiri dari 3 (tiga) orang terpilih Lewati proses seleksi. Bantuan masuk Modal ini merupakan modal dasar BUMNag Tanamo harus diakui bahwa modal yang bisa menjawab Sembako (Sembako) dan Kebutuhan lain dari semua warga nagari. Dilihat dari kependudukan, Jumlah penduduk Nagari Pasie Laweh cukup banyak yang terdiri dari berbagai korong dibawahnya. Tentu saja dana yang ada tidak cukup. Namun, untuk memaksimalkan Dana yang ada, kegiatan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung fokus pada pasar Pasokan jenis bahan dasar Saya pikir itu sangat penting, yaitu jual beli beras.

Model manajemen 2019 BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung sebesar Rp.200.000.000 mulai berkembang, tidak hanya di Penuhi kebutuhan dasar, tetapi mulailah Fokus pada ekonomi kreatif Berbagai profesi yang ada Masyarakat nagari Pasie Laweh Lubuk Alung dan sebagainya, Prosedur BUMNag Tanamo juga berlaku untuk Potensi masyarakat sekitar. Bagian Masyarakat menggunakan wadah BUMNag Jual kerajinan tangan mereka Seperti gorengan, keripik kentang, kacang-kacangan dan masih banyak lagi. Hasil penjualan ini cukup berpengaruh Baik untuk ekonomi. Kehadiran BUMNag di tengah Nagari Meningkatkan nilai bunga Belanja masyarakat. Ini juga menegaskan rencana BUMNag Tanamo Perkembangan yang baik Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penambahan modal yang diajukan pengurus BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung pada tahun 2019 diharapkan mampu untuk mengelola dengan sebaik-baiknya untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat nagari. Kegiatan jual beli kebutuhan pokok seperti beras, gula, sabun dan kebutuhan dasar lainnya juga membantu masyarakat lebih mudah menjangkau dan tidak perlu menggunakan transportasi yang dapat menguras waktu dan biaya. Pemerintah nagari Pasie Laweh Lubuk Alung pun mengharapkan usaha mikro yang dijalankan sebagian besar masyarakat dengan pinjaman dan dari BUMNag Tanamo Pasie Laweh diharpkan mampu untuk menjalankan usaha dengan sebaiknya agar dapat mengubah kehidupan untuk lebih baik kedepannya. Lebih dari 50 an mayarakat menggunkan dana usaha BUMNag Tanamo untuk mengelola usahnya dan dengan bunga yng tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan rentenir yang dapat menyengsarakan masyarakat nagari. Selanjutnya pemerintah nagari Pasie Laweh Lubuk Alung juga menantikan laporan penanggungjawaban kegiatan BUMNag Tanamo Pada tahun 2019 sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi masyarakat guna transparansi pengelolaan Badan Usaha yang dimiliki oleh Pemerintahan Nagari.

Berikut adalah beberapa manfaat yang diperoleh masyarakat nagari Pasie Laweh terhadap keberadaan BUMNag ini.

- a. Efektivitas dan efisiensi harga dan waktu dalam pemenuhan kebutuhan pokok merupakan Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat Nagari Pasie Laweh yaitu minimnya toko atau kios yang menjual sembako lengkap. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, dan transportasi, masyarakat nagari harus mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih banyak. Meskipun daya beli masyarakat untuk makanan, sandang, perumahan dan transportasi yang kecil. Hanya dengan 5 kg beras, masyarakat nagari harus mengeluarkan biaya transportasi yang cukup besar. Selain itu, waktu yang dibutuhkan untuk membeli sembako cukup lama. Keberadaan BUMNag TANAMO Pasie Laweh sangat membantu masyarakat Nagari Pasie Laweh terutama dari segi harga dan waktu efektifitas serta efisiensi pemenuhan kebutuhan pokok. Masyarakat tidak perlu membuang waktu dan biaya transportasi, karena Nagari Pasie Laweh sudah menyediakan kebutuhan pokok yang cukup unruk masyarakatnya.
- b. Kadai Nagari adalah tempat jual beli bagi masyarakat untuk menjual produk BUMNag TANAMO Pasie Laweh tidak hanya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga membeli semua produk dari masyarakat. Lokasi tempat usaha sangat strategis untuk perdagangan karena terletak dipusat Nagari. Hasil pertaniannya adalah Jual Beli Padi dan Pinang. Selama ini kendala lain yang dihadapi masyarakat Nagari Pasie Laweh adalah pasar atau lokasi penjualan produknya jauh. Padi, Pinang dan Coklat dan hasil bumi lainnya memiliki potensi yang besar. Masyarakat nagari Pasie Laweh biasanya menjual produknya ke toke yang berada disekitar Lubuk Alung. Namun, tidak ada jaminan bahwa itu akan terjual dengan baik. Keberadaan BUMNag TANAMO Pasie Laweh memberikan keuntungan yang sangat besar karena masyarakat tidak lagi memikirkan pasar, karena BUMNag membeli semua hasil panennya dengan harga yang wajar kemudian menjualnya kepada masyarakat yang membutuhkan.
- c. Memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat Kebutuhan mendesak yang dibahas adalah kebutuhan terkait kebutuhan Sembako sehari hari. BUMNag TANAMO Pasie Laweh mendirikan KADAI NAGARI yang merupakan tempat Jual beli bahan Harian dimana didalamnya menjual suatu produk unggulan berupa beras hasil pertanian yang diolah sebaik-baiknya dan dikemas dengan cantik sehingga menjadi produk yang berkualitas dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Masyarakat terbantu karena dapat memperoleh

barang-barang seperti beras, kopi, gula, tepung, ATK, dan alat dapur dengan harga yang lebih murah. Artinya BUMNag TANAMO Pasie Laweh menjamin harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produksi yang dihasilkan dan sangat bersaing dengan harga pasar. Harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya pengantaran langsung.

- d. Tersedianya layanan simpan pinjam Simpan pinjam juga dilakukan oleh BUMNag TANAMO Pasie Laweh. Meski belum dijalankan secara maksimal, masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Masyarakat bisa menyetor dan meminjam uang di BUMNag TANAMO Pasie Laweh. Batas atas pinjaman adalah Rp. 1.000.000 dalam 10 kali angsuran, bunga 10%. Hal ini sangat membantu, karena selama ini banyak beredar pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi.
- e. Segmentasi Pasar Kadai Nagari

Target Pasar yang dibidik adalah pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Nagari Pasie Laweh dan Kadai atau Rumah makan yang ada di Nagari Pasie Laweh dan akan mengembangkan pasaran ke daerah yang ada di kabupaten Padang Pariaman bahkan sampai ke daerah daerah yang ada di Sumatera Barat. Suplieyer yang diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat juga menjadi mitra Rumah Makan dan swalayan swalayan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya untuk saluran distribusi dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya manusia pengurus BUMNag TANAMO dan Potensi sumber daya alam lain yang ada di Nagari senderi dengan prinsip menghasilkan produk olahan yang rasa dan kualitasnya yang terbaik.

5. Tantangan yang Dihadapi Oleh BUMNag Pasie Laweh Lubuk Alung

Keberadaan BUMNag telah membawa perubahan besar di bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan BUMNag TANAMO Pasie Laweh harus tetap dipertahankan. Meskipun demikian terdapat tantangan yang perlu dihadapi antara lain:

a. Transparansi Pengelolaan BUMNag

BUMNag merupakan badan usaha yang berasal dari dan melayani masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BUMNag perlu dilakukan secara transparan, agar semua orang mengetahui mekanisme pengelolaan BUMNag. Transparansi ini terkait dengan keterbukaan informasi dan transparansi pelaporan pengelolaan keuangan BUMNag. Salah satu kendala yang dihadapi BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung adalah minimnya penyertaan modal oleh Pemerintah Nagari. Hal ini dikarenakan manajemen BUMNag Pasie Laweh tidak

memberikan laporan pertanggungjawaban 2019 kepada pemangku kepentingan yaitu wali nagari dan lembaga konsultan nagari. Situasi ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut, karena akan menjadi sumber hambatan pengelolaan BUMNag.

b. Sarana dan Prasarana BUMNag

Menurut undang-undang, BUMNag tidak boleh muncul di rumah-rumah penduduk. Artinya BUMNag harus memiliki ruangan atau kantor sendiri, baik yang dikontrak maupun dimiliki. Hal ini untuk memberikan keleluasaan bagi BUMNag dalam mengelola kegiatan usahanya. Namun, hingga saat ini belum memiliki kantor sendiri. Lokasi BUMNag Pasie Laweh berada di rumah penduduk. Keadaan ini tentunya akan membuat pelayanan menjadi kurang optimal. Hal tersebut juga menjadi dasar pengelolaan manajemen yang baik bagi Badan Usaha supaya dapat bertahan ditengah tengah gejolak ekonomi digital yang telah memasuki indonesia sampai kepedesaan atau nagari.

c. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting keberhasilan pengelolaan BUMNag adalah pengelolaan sumber daya manusia BUMNag. Tanpa dukungan manajemen yang baik dari manajemen BUMNag, dana dalam jumlah besar akan sia-sia. Salah satu kendala yang dihadapi BUMNag TANAMO Pasie Laweh adalah pengurusnya memiliki pekerjaan tetap, sehingga BUMNag menjadi tambahan atau bahkan sampingan. Oleh karena itu, BUMNag tidak dikelola secara optimal. Selain itu pelatihan juga perlu dilakukan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam mengelola dan menjalankan usaha sesuai dengan yang diharapkan.

d. Dampak Lingkungan dan Resiko Usaha BUMNag Tanamo

Kegiatan Usaha yang dilakukan suatu badan usaha tentunya memiliki berbagai dampak lingkungan dan resiko usaha yang akan timbul. BUMNag Tanamo tentunya tidak akan mengesampingkan persoalan ini. Kegiatan usaha yang dilakukan BUMNag Tanamo Pasie Laweh Lubuk Alung seperti Pendirian Kadai Nagari dan jual beli Padi dan Pinang tidak memiliki dampak lingkungan yang cukup berarti dalam proses produksinya. Adapun limbah produksi bisa kita manfaatkan seperti dedak bisa dijual untuk pakan ternak dan sekam bisa juga kita jual ke kandang kandang ayam masyarakat. Selanjutnya ancaman usaha tidak ada karena beras adalah makanan pokok masyarakat.

D. Kesimpulan

BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung merupakan salah satu BUMNag yang didirikan atas prakarsa masyarakat untuk merespon skala prioritas nagari dan menjawab kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat nagari dan pasar. BUMNag ini merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari. Dengan ikut serta langsung dalam kekayaan Nagari, Nagari mengelola aset, jasa dan usaha lainnya secara terpisah untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bagi masyarakat Nagari. BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung secara resmi didirikan sesuai dengan Peraturan Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung No.04/201 Tanggal 30 September 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan kesepakatan bersama yang dicapai dengan Badan Musyawarah Nagari dan wali nagari. BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung beralamat di Kampung Kalawi, Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung. Sejak didirikan, BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung memiliki visi dan misi tertentu. Visi BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung adalah Bersatu dalam membangun ekonomi dan menggali potensi Ekonomi Rakyat dan Menjadikan Suatu produk yang Berkwalitas mempunyai Nilai Jual yang tinggi. Misi BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung. Menciptakan Lapangan Pekerjaan dan Home Industri Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. Menggali dan Memanfaatkan Potensi Alam Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. Mempertahankan Produk dan Kualitas yang menjadi aset Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung. Mengembangkan Usaha yang Berskala Nasional.

Sejak didirikan pada tahun 2017, sejumlah kegiatan usaha telah dilakukan diantaranya perdagangan yaitu jual beli beras hasil pertanian sawah yang ada di nagari Pasie Laweh dan jual beli pinang selanjutnya pendirian KADAI NAGARI berupa penyediaan kebutuhan sembako, Simpan Pinjam. Jenis kegiatan ini memenuhi segala kebutuhan dan potensi masyarakat nagari. Keberadaan BUMNag TANAMO memiliki beberapa manfaat yaitu efektifitas dan efisiensi menciptakan harga dan waktu dalam pemenuhan kebutuhan pokok, menyediakan pasar bagi masyarakat untuk menjual hasil pertanian, memenuhi kebutuhan darurat dan tersedianya pinjaman bagi masyarakat pasie laweh nagari. Tujuan BUMNag TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung yaitu pertama, mendorong dan menampung hasil pertanian nagari Pasie Laweh Lubuk Alung dan menjadikan suatu produksi yang mempunyai nilai jual yang lebih baik. Kedua dengan adanya kadai nagari dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat Pasie Laweh Lubuk Alung supaya tidak jauh belanja keluar nagari. pemerintah Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung memberikan Penyertaan Modal untuk

pengembangan usaha Jual Beli Padi, Pinang dan buah coklat dan melakukan Simpan Pinjam bagi masyarakat Nagari.

Modal awal yang diberikan pemerintah Nagari sebesar Rp.77.000.000 yang dikembangkan sampai saat ini. Selanjutnya BUMNag Pasie Laweh Lubuk Alung berkesempatan mengajukan Proposal ke Pemerintah Nagari agar mendapatkan tambahan suntikan dana dana nagri. Proposal yang diajukan BUMNag TANAMO tahun 2019 di terima oleh pemerintah nagari dengan Penyertaan modal tambahan Rp.200.000.000 untuk mendirikan Unit Usaha bernama KADAI NAGARI dengan sumber pendanaan dari Bantuan Permodalan APBD Nagari Pasie Laweh tahun 2019. Selain manfaat tersebut, BUMNag TANAMO juga menghadapi beberapa tantangan, yaitu: transparansi pengelolaan BUMNag, kurangnya sarana dan prasarana BUMNag, dan sumber daya manusia yang tidak memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Maria Rosa. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDES Di Gunung Kidul. MODUS Vol.28 (2): 155-167.2016. ISSN 0852-1875 hlm. 135-167.
- Arfianto, A.E.W. & Balahmar, A.R.U. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 2 No. 1, Maret 2014. ISSN 2338- 445X hlm. 53-65
- Eko, Sutoro 2014. *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Hlm. 249-255
- Maryunani. 2008. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 35-40
- Nawawi, H. Hadari. 2017. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press. Hlm. 63
- Palupi, Sri, dkk. 2016. Buku Panduan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Berbasis Hak. Jakarta Selatan: Lakpesdam PBNU. Hlm. 79-86
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari

Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Putra, Surya Anom. 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Hlm. 10-13

Seyadi. 2003. *Bumdes Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Desa*. Yogyakarta: UPP STM YKPN hlm. 16-18

Wawancara

Neldawati. *Wawancara Pribadi*. Badan Usaha Milik Nagari TANAMO Pasie Laweh Lubuk Alung. Senin 19 Juli 2021.



09

LEYLY GUSMIA

*Trand Menanam Kelapa Sawit
Untuk Menambah Pemasukan
Masyarakat Dusun Pasar Baru*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



TRAND MENANAM KELAPA SAWIT UNTUK MENAMBAH PEMASUKAN MASYARAKAT DUSUN PASAR BARU

Leyly Gusmia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Artikel ini membahas terkait dengan trand menanam kelapa sawit untuk meningkatkan pemasukan yang sedang terjadi pada wilayah Dusun Pasar Baru. Awal mula trand ini dari bibit gratis tanaman kelapa yang diberikan kepada salah satu kelompok tani oleh pemerintah. Tujuan utama dari menanam kelapa sawit yang diharapkan adalah mengisis lahan kosong yang sudah dipenuhi oleh rumput liar. Tanaman kelapa sawit dipilih karena untuk hidupnya tidak terlalu susah dan tidak jauh dari desa terdapat sebuah abrik yang mengolah kelapa sawit menjadi minyak mentah. Hasilnya masyarakat dapat langsung menjual hasil panen.

Kata kunci: *Kelapa Sawit, Pemasukan, Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari timur Aceh sampai ke barat yaitu Papua, terdapat banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tinggal diberbagai daerah. Tanah yang subur merupakan salah satu pesona Indonesia. Keadaan iklim yang hanya memiliki dua musim membuat tanah Indonesia cocok untuk dijadikan tempat tumbuh berbagai tanaman (Salvatore, 1997)

Melihat keunggulan Indonesia pada kekayaan zat hara tanah menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan sebagai petani. Mulai dari bertaani bahan-bahan pokok seperti padi dan jagung, bertani buah-buahan dan bertani sayuran. Hasil pertanian Indonesia dibidang pertanian juga mulai merambah kacamata internasional, seperti ekspor kelapa sawit.

Kelapa sawit merupakan jenis tumbuhan yang termasuk kedalam ras genus *Elaeis* dan ordo Arecaceae, yang digunakan untuk memproduksi minyak sawit pada usaha pertanian komersial. Tanaman ini merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak yang menggantikan eksistensi kelapa yang dulunya juga merupakan bahan baku minyak masak. Karena

minyak kelapa sawit mengandung lebih banyak lemak jenuh daripada minyak yang terbuat dari kanola, jagung, biji rami, kacang kedelai, safflower dan bunga matahari minyak kelapa sawit dapat tahan terhadap panas yang ekstrim dan tahan terhadap oksidasi (Anang, 1996, hal. 25).

Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar didunia, banyak kota-kota yang tersebar diseluruh Indonesia telah menanam kelapa sawit dan terus meningkat setiap tahunnya. Secara keseluruhan kelapa sawit terdiri atas akar, batang, daun, bunga dan buah, sedangkan bagian yang akan diolah menjadi minyak adalah buahnya.

Pada masyarakat Lubuk Basung tepatnya yang berada di Dusun Pasar Baru aktifitas menanam kelapa sawit baru dimulai pada tahun 2015 secara abjektif. Awal yang memprakarsai masyarakat Dusun Pasar Baru adalah program pelatihan petani yang diadakan kelompok tani setempat. Bermula dari coba-coba atas pemberian bibit gratis oleh pemerintah, menanam kelapa sawit bahkan dapat menjadi sumber penghasilan utama beberapa orang, membuka lapangan kerja baru yaitu sebagai buruh yang memanen kelapa sawit yang kemudian akan dijual ke perusahaan yang mengolah kelapa sawit, dan bahkan saat ini ada beberapa masyarakat yang membeli tanah khusus untuk tempat menanam kelapa sawit.

Masyarakat yang awalnya hanya bekerja sebagai petani baik itu buruh tani yang dibayar per hari kerja, petani penggarap yang akan mendapat upah saat panen atau memiliki sawah sendiri merasa tertolong dari segi finansial setelah mencoba menanam kelapa sawit. Pekerjaan yang awalnya dilakukan pada musim-musim tertentu memaksa masyarakat untuk bekerja secara serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan yang tidak pasti dari sawah juga memberikan beban baru bagi pengelola sawah. Karena itu tambahan pemasukan dari hasil panen kelapa sawit sangat menolong mesejahterakan masyarakat salah satunya dalam hal keuangan.

Kelapa sawit dipilih sebagai tanaman yang di tanam masyarakat Dusun Pasar Baru untuk mengisi lahan kosong yang tidak dimanfaatkan masyarakat karena, kelapa sawit tidak terlalu sulit untuk dirawat dan dapat tumbuh dilingkungan tanah yang berawa atau tanah yang kering. Dan juga masa panen kelapa sawit yang relative singkat yaitu sekitar 20 hari semakin menarik masyarakat untuk membudidaayakan kelapa sawit tersebut.

Untuk perawatan kelapa sawit sendiri, bagi masyarakat yang memiliki lahan yang luas kelapa sawit yang ditanam dirawat dengan baik. Seperti dipupuk dan dibersihkan baik batangnya dan juga lingkungan tempat sawit ditanam. Namun bagi yang hanya memiliki sawit dengan jumlah yang sedikit yaitu kurang dari 50 batang, maka pupuk akan diberikan jika pupuk subsidi yang

dipakai untuk sawah masih tersisa, namun tetap dijaga kebersihannya. Walaupun tidak menjadi pengasilan utama namun cukup membantu untuk membiayai kehidupan masyarakatnya.

Pada panen bulan Mei lalu harga sawit adalah sebesar Rp 1000,-per kilo, jika berat kelapa sawit masyarakat sekitar 250 kg maka kelapa sawit telah meningkatkan pendapatan masyarakat sebanyak Rp 250.000,- setiap panen, meskipun harga kelapa sawit bersifat fluktuatif bagi masyarakat itu sangat membantu kehidupan mereka. Jika dilihat pada masyarakat yang memiliki 1 hektar tanah maka hasil panen yang diperoleh lebih banyak dan pemasukan juga akan menjadi lebih banyak.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Data-data sekunder yang terkait dengan tingkat pendapatan masyarakat Dusun Pasar Baru dengan adanya tran menanam kelapa sawit diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa narasumber terakait yaitu terdiri dari dua pekerjaan; pengelola kelapa sawit dan buruh panen kelapa sawit yang berada didalam lingkup penelitian dan secara langsung merasakan manfaat menanam kelapa sawit secara finansial terhadap pendapatan mereka, disamping itu juga dilakukan observasi serta analisis terhadap data yang telah didapatkan untuk memperoleh hasil yang lebih signifikan dari beberapa sampel wawancara yang telah dilakukan untuk kemudian dideskripsikan kembali dalam kalimat penjelasan berbentuk kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran dan penjelasan secara optimal dan memuaskan.

C. PEMBAHASAN

1. Mata Pencaharian Utama Masyarakat Dusun Pasar Baru

Pertanian merupakan suatu pekerjaan manusia dalam hal bercocok tanam dan memeliharanya. Masyarakat memiliki pengaruh yang besar dalam hal pertanian, terutama bagi masyarakat pedesaan. Hal ini dikernakan sebagian besar masyarakat pedesaan memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat juga sangat bergantung kepada hasil panen para petani (Supatmiatun, 2019, hal 205).

Dusun Pasar Baru merupakan perkampungan kecil yang berada di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai daerah yang diberkahi dengan lahan yang subur dan air yang melimpah menjadi tempat yang sangat cocok untuk dijadikan lahan pertanian khususnya bertani padi. Sebagian besar masyarakat Dusun Pasar Baru bekerja sebagai petani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Petani padi di Dusun Pasar Baru merupakan petani padi yang mengelola sawah yang tandah hujan dan tidak ada pengairan irigasi. Maksud dari lahan tadah hujan adalah, lahan

pertanian yang menggantungkan pengairan sawahnya berdasarkan curah hujan yang turun di daerah tersebut. Namun sistem pengairan alami yaitu dari aliran air hulu juga membantu meningkatkan taraf produksi padi masyarakat.

Petanipun terbagi kedalam beberapa kategori, pertama buruh tani. Buruh tani adalah seseorang yang diminta untuk bekerja pada sawah/lading milik orang lain yang mana nantinya akan diberikan upah sesuai dengan pekerjaannya. Buruh tani juga bisa diartikan sebagai seseorang yang menggarap sawah milik orang lain. Biasanya sistem upah dilakukan per hari atau dengan borongan. Besaran upah beraneka ragam, tergantung dari berapa sulit pekerjaan itu atau seberapa luas lahan (Susiati, 2013, vol. 1).

Yang kedua adalah pemilik lahan, pemilik lahan adalah orang yang memiliki lahan pertanian namun tidak menggarapnya sendiri melainkan meminta kepada orang lain untuk menggarapnya. Biasanya sistem upah dilakukan setelah panen dilakukan dan pemilik lahan mendapat sepertiga dari total pendapatan bersih yang diperoleh dari hasil panen. Pemilik lahan menyerahkan pengelolaan lahannya secara utuh kepada pengelola, dalam hal ini buruh tani.

Yang ketiga adalah pengelola lahan sendiri, dalam hal ini maksudnya adalah mereka memiliki lahan dan mengelolanya secara langsung. Biasanya mereka hanya meminta bantuan buruh tani untuk beberapa hal yang tidak bisa dilakukan sendiri seperti menanam padi, memanen atau hal lainnya.

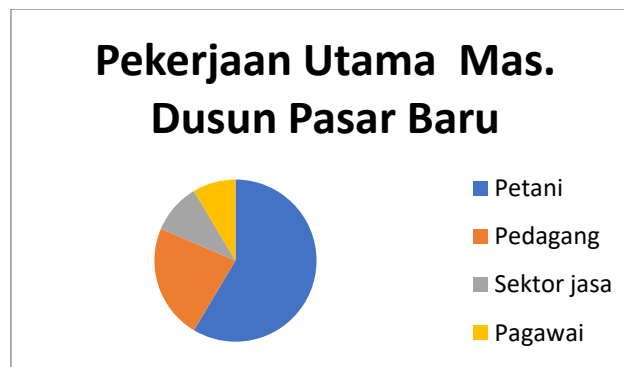
Yang terakhir adalah sebagai penadah hasil pertanian, maksudnya pekerjaan ini adalah mereka yang akan membeli hasil pertanian masyarakat seperti padi, jagung atau hasil perkebunan untuk kemudian dijual kembali keluar daerah. Dan biasanya mereka juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan para petani misalnya menyediakan mesin penggiling dan lain sebagainya.

Minimnya masyarakat yang menyelesaikan sekolahnya hingga tingkat sekolah menengah atas yang menjadi alasan dasar masyarakat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lain. Alasan lainnya adalah adanya lahan yang sudah ada sejak dari dulu, yang sebelumnya sudah digarap oleh orang tua terdahulu.

Meskipun pencaharian utama masyarakat adalah bertani baik bertani padi, jagung, atau sayur-sayuran, masih ada beberapa pekerjaan lain yang dilakoni oleh masyarakat. Misalnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai swasta, pedagang, buruh bangunan atau bekerja dalam sektor jasa seperti salon/pangkas rambut, supir, bidan, teknisi dan lain-lain.

Namun meskipun demikian banyak yang juga bertindak sebagai pemilik lahan dari pekerjaan lainnya itu. Seperti halnya pedagang, beberapa diantaranya juga memiliki lahan yang dikelola oleh orang lain.

Masyarakat Dusun Pasar Baru memang lebih dominan menjadi pekerja kasar dari pada pegawai. Disebabkan karena sebagian besar warga sudah memiliki kendaraan sendiri, bekerja sebagai tukang ojek sudah banyak ditinggalkan dan lebih memilih bekerja sebagai buruh tani. Teknologi pertanian yang masih belum maju, membuat sebagian besar pekerjaan masih dijalankan oleh tenaga kerja manusia secara manual. Para istri juga akan bekerja membantu suami untuk bekerja seperti menjadi buruh tani, penjaga warung, berladang sayur atau cabai serta menjual makanan masak ke kedai-kedai tetangga.



Secara garis besar pekerjaan utama masyarakat Dusun Pasar Baru seperti yang digambarkan oleh diagram di atas. Lebih dari setengah penduduk usia kerja yang bekerja memilih bekerja sebagai petani. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang sebagian besar memasarkan hasil pertanian yang dijual oleh petani setempat. Sektor jasa adalah sektor usaha jasa-jasa yang berada diluar cakupan pemerintah. Seperti transportasi, salon, service motor atau alat-alat elektronik, penjahit dan lain sebagainya. Dan pegawai adalah pekerja yang bekerja dibawah pemerintahan seperti pegawai negeri sipil atau yang lainnya. Petani disini dimaksudkan dengan segala bentuk kegiatan/pekerjaan yang berhubungan dengan sawah/ladang.

Tingginya jumlah tenaga kerja yang terdapat pada sektor pertanian dikarenakan mudahnya para tenaga kerja untuk masuk kedalam sektor tersebut. Sektor pertanian juga tidak terlalu menuntut pendidikan ataupun keterampilan yang tinggi. Karena hal inilah kebanyakan dari para masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan menengah kebawah memilih untuk menjadi petani sementara, sampai mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kesempatan kerja yang berada diluar sektor pertanian untuk masyarakat pedesaan lebih

banyak dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah (Priyonggo, 1997, Vol. 2). Maksudnya yaitu bekerja pada instansi yang berada dibawah naungan pemerintahan dan dibayar dengan menggunakan APBN.

2. Sejarah Memilih Tananaman Kelapa Sawit

Perkebunan kelapa sawit sudah banyak dikembangkan diberbagai daerah, yaitu sekitar Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan (Alatas, 2015, Vol. 1). Berdasarkan data yang terdapat di Badan Pusat Statistik(BPS), Sumatera adalah penghasil kelapa sawit terbanyak. Sehingga pembukaan lahan untuk berkebun setiap tahunnya selalu bertambah. Masyarakat yang awalnya enggan, mulai menunjukkan ketertarikan untuk berkebun kelapa sawit karena keuntungan yang didapatkan, termasuk salah satu daerah di wilayah Lubuk Basung, yaitu Dusun Pasar Baru.

Kehidupan masyarakat yang didominasi oleh kelas menengah kebawah mengharuskan masyarakat memikirkan sumber pebdapatan lain yang dapat menambah pemasukan setiap harinya. Kebutuhan yang terus bertambah setiap harinya mengharuskan masyarakat lebih kreatif dan inovatif untuk memanfaatkan apapun yang dimilikinya untuk kemudian dijadikan bahan memperoleh penghasilan. Salah satunya adalah memanfaatkan lahan yang terluang. Meskipun bertani atau berkebun adalah pekerjaan utama masyarakat Dusun Pasar Baru, namun menanam kelapa sawit baru dimulai pada tahun 2015 dan baru mulai menjadi trand pada tahun 2017 lalu. Karena mulai banyak masyarakat yang tertarik dengan usaha kebun kelapa sawit.

Awal mula yang membuat masyarakat Dusun Pasar Baru mulai menanam kelapa sawit adalah pada saat adanya penyuluhan untuk pertanian. Saat itu para petani sedang menghadapi kesulitan dengan serangan hama, yang mengakibatkan hasil panen berkurang secara drastis. Masyarakat mulai mengeluh akibat pendapatannya berkurang dengan drastis, bahkan dalam beberapa kasus ada beberapa lahan yang mengalami gagal panen. Untuk mengatasi masalah itu kelompok Pasar Baru Jaya didatangi oleh pihak pengawas pertanian untuk memberikan saran dan arahan dalam menghadapi serangan hama untuk membantu petani memperoleh hasil panen yang lebih baik.

Melihat banyaknya tanah-tanah yang dibiarkan begitu saja srhingga ditumbuhi rumput liar sangat disayangkan oleh mentor penyuluhan itu, sehingga mereka menyarankan untuk memanfaatkan lahan terebut agar ditanami oleh hal-hal yang berguna. Dilihat dari keadaan tanah yang lumayan kering, maka tidak cocok untuk dijanikan lahan pertanian padi,

karena itu disarankan untuk dijadikan ladang. Namun karena faktor ulat, burung, tupai dan semacamnya masyarakat banyak yang tidak setuju. Karena pada akhirnya tanaman yang ditanam nantinya akan dimakan oleh hewan-hewan tersebut.

Sebagai orang yang telah lama tinggal masyarakat mengalami masalah untuk melakukan kegiatan berkebun di sekitar rumah, jika buah-buahan akan dipenuhi ulat didalamnya, jika sayur-sayuran daunnya akan berlubang karena dimakan ulat. Karena itu tanaman yang banyak ditanam masyarakat hanyalah ubi kayu, selain karena mudah tumbuh juga karena tidak terlalu diminati hewan lain. Namun nilai pasar ubi kayu cukup rendah, sehingga masyarakat tidak menjulanya.

Untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat tim penyuluhan itu membuat proposal agar masyarakat mendapat bantuan bibit gratis dari pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan semangat kepada masyarakat untuk memulai pertanian. Mengingat keluhan masyarakat terhadap faktor gangguan alami dalam perkebunan, maka disarankan untuk menanam kelapa sawit.

Kelapa sawit bukan tumbuhan yang sulit hidup selama batangnya dibersihkan dari dahan-dahan maka kelapa sawit bisa hidup. Selain itu dikatakan faktor lain yang mendorong pihak penyuluhan untuk menanam kelapa sawit adalah karena adanya sebuah perusahaan yang mampu mengolah kelapa sawit menjadi minyak yang setengah jadi. Maka dari itu dapat dipastikan kelapa sawit yang sudah dipanen dapat langsung dijual kepada produsen sehingga tidak ada biji kelapa sawit yang terbuang sia-sia. Mengingat adanya pabrik tersebut, kelapa sawit yang ditanam oleh masyarakat pasti akan laku terjual, karena setiap harinya pastilah pabrik tersebut memproduksi kelapa sawit.

Dengan diberikannya modal awal yaitu bibit, masyarakat kemudian merawat bibit yang diberikan tersebut. Pada awalnya hanya membersihkan tempat kelapa sawit ditanam dan tidak pernah memberikan pupuk untuk kelapa sawit. Saat penyuluhan dilakukan kembali, tim penyuluh mulai memberikan pengarahan mengenai budidaya dan perawatan kelapa sawit, harga jual kelapa sawit dan masa panen dari kelapa sawit yang subur.

Melihat masa panen yang singkat dan keuntungan yang diperoleh, banyak masyarakat yang mulai tertarik. Alasan utamanya dapat memperoleh pendapatan tambahan selain dari bertani. Berkat peluang lebar ini, beberapa masyarakat bahkan membeli tanah di daerah lain yang diperuntukan untuk ladang kelapa sawit. Hingga saat ini kebun kelapa sawit tidak kehilangan eksistensinya, bahkan terdapat satu pabrik lagi yang mengolah kelapa sawit

di daerah sekitar, semakin memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa usaha kebun kelapa sawit cukup menjanjikan.

3. Manfaat Finansial Menanam Kelapa Sawit Bagi Masyarakat Dusun Pasar Baru

Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang menghasilkan minyak nabati paling banyak, sehingga tanaman kelapa sawit memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain itu juga tanaman kelapa sawit mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengarah kepada kesejahteraan masyarakat, kelapa sawit juga sumber devisa negara dan Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak kelapa sawit (Ningsih, 2019, Vol. 20). Ekspor komoditi kelapa sawit dari Indonesia ke beberapa negara lain merupakan sumber pemasukan devisa negara.

Secara garis besar masyarakat Dusun Pasar Baru mempunyai dua struktur sebagai upaya pemenuhan kebutuhannya, yaitu penerimaan yang berasal dari sektor pertanian dan sektor non pertanian. Sebelum adanya proses konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit sumber utama penghasilan masyarakat adalah dari hasil produksi sawah, ladang, serta aktivitas-aktivitas lainnya seperti menjadi buruh tani dan tukang bangunan. Setelah adanya konversi lahan tunjangan pendapat masyarakat jadi bertambah dengan dimanfaatkannya lahan-lahan kosong.

Penyebab kemiskinan pada petani padi disebabkan tidak lain karena faktor pekerjaan. Di Indonesia kemiskinan selalu berkaitan dengan pekerjaan yang terhubung dalam bidang pertanian untuk daerah pedesaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan wawancara dengan masyarakat sekitar, terdapat beberapa petani yang menerima mentuan berupa Raskin (beras yang diperuntukan untuk keluarga miskin (Angkasawati, 2015, Vol. 8). Jadi meskipun mereka bekerja sebagai petani, mereka tetap menerima bantuan beras dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang rendah dan tidak mampu mencukupi kehidupan mereka setiap kali panen. Masa panen yang cukup lama, faktor gangguan baik dari binatang maupun persaingan antar petani dan banyaknya pekerjaan yang dilakukan secara manual yang terkadang tidak tertutupi oleh hasil panen menyebabkan para petani masih berkubang dalam lubang kemiskinan.

Sebagian besar masyarakat Dusun Pasar Baru memiliki sumber pendapatan ganda untuk menunjang kehidupan. Baik dari sektor pertanian ataupun sektor non pertanian. Seperti menjadi buruh tani dan kuli bangunan saat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan apa

yang dikatakan oleh (Nurmanaf 2008) bahwa pada keadaan masyarakat yang hidup didaerah pedesaan strategi pola pekerjaan ganda merupakan strategi usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan (Andriani, 2017, Vol. 2). Usaha ganda diharapkan dapat mencukupi kebutuhan. Selagi memiliki waktu dan tenaga masyarakat menyibukan dirinya dengan mengambil beberapa pekerjaan.

Usaha ganda atau beragam sumber pendapatan berarti sebuah kombinasi dari banyak pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas ekonomi pokok dibidang pertanian dan non-pertanian. Dan untuk saat ini kebanyakan masyarakat dusun pasar baru memiliki usaha sampingan sebagai pengelola kebun kelapa sawit. meskipun tidak dapat dikatakan memiliki lahan yang sangat luas.

Beberapa kegiatan usaha ganda yang dilakukan masyarakat Dusun Pasar Baru seperti diperlihatkanberikut:

1. Kegiatan usaha sawah dengan usaha ladang sayur
2. Kegiatan usaha sawah dengan usaha membuka warung
3. Kegiatan usaha sawah dengan usaha kuli bangunan
4. Kegiatan usaha sawah dengan usaha kebun kelapa sawit

Namun saat ini banyak masyarakat yang telah menjadikan kegiatan berkebun kelapa sawit sebagai usaha sampingan. Ditambah dengan keadaan sawah yang sedang diserang hama saat ini, pekerjaan sampingan sebagai pengelola kelapa sawit sangat membantu perekonomian. Dari segi pendapatan, manfaat yang dirasakan oleh masyarakat Dusun Pasar Baru adalah berupa:

1. Lahan

Pencabarian lahan untuk memulai usaha menanam kelapa sawit tidak terlalu sulit. Mengingat kelapa sawit yang tidak terlalu sulit untuk hidup dan dapat hidup diberbagai keadaan lahan, menjadi keuntungan bagi masyarakat Dusun Pasar Baru. Bahkan kelapa sawit dapat tumbuh di daerah yang berawa.

Beberapa keuntungan dari lahan yaitu, lahan yang terbengkalai bisa terpakai dan tidak dipenuhi oleh rumput liar yang biasanya menjadi tempat tinggal ular yang akan memakan ternak. Jika kelapa sawit ditanam didaerah yang berawa maka, dangan daya serap yang dimiliki kelapa sawit daerah tersebut dapat menjadi kering.

Pola lahan masyarakat yang masih mengikuti adat dan budaya dapat dimanfaatkan. Harta pusako tinggi tanah misalnya, dahulu hanya ditanami oleh kelapa sawit yang dipanen sesuai dengan jadwal dari masing-masing keluarga besar, sekarang sudah mulai ditanami dengan kelapa sawit. yang berarti terdapat pemasukan tambahan dan pendapatan tambahan untuk hasil panen kelapa sawit.

2. Panen

Proses panen kelapa sawit biasanya dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu mengambil hasil sendiri atau dengan menggunakan jasa buruh. Namun demikian masa panen yang relative singkat dari pada sawah memberikan keuntungan kepada masyarakat.

Panen atau bisa disebut produksi kelapa sawit pada masyarakat Dusun Pasar Baru dari wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa responden terjadi secara fluktuatif, alasan utama dari naik-turunnya pendapatan pasca panen dikarenakan kurangnya perawatan kelapa sawit. seperti pupuk yang terlalu sedikit atau juga terdapat serangan dari gulma.

Harga kelapa sawit yang berkisar antara Rp. 1.300-1.650 setiap tahunnya, masa panen yang berkisar 2-3 minggu dan massa kelapa sawit setiap panennya 200 kg, maka sekali panen akan mendapatkan hasil kotor sebanyak \pm Rp. 260.000,00. Yang sudah dapat membantu ekonomi masyarakat.

Meskipun bukan merupakan sumber pendapatan masyarakat, jika mengelola kelapa sawit dengan baik dan benar maka hasil yang didapatkan juga tidak akan mengecewakan, meskipun kebun kelapa sawit hanya memiliki luas yang tidak terlalu besar.

3. Tenaga kerja

Karena adanya kebun kelapa sawit yang memerlukan jasa bantuan untuk memanen buahnya, maka terbukalah lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat. Yaitu menjadi buruh panen dan juga jasa angkutan untuk mengantar kelapa sawit kepenadahnya. Ini juga manfaat signifikan yang terasa bagi masyarakat setelah banyaknya masyarakat yang mulai berkebun kelapa sawit.

Beberapa masyarakat jadi memiliki lahan pekerjaan baru, upah yang diberikan dapat setiap kali melakukan panen atau memberikan perawatan kelapa sawit, cukup memuaskan. Pekerjaan ini bisa dijadikan sebagai pekerjaan ganda sehingga masyarakat mendapatkan pemasukan lain.

4. Pemasaran

Untuk memasarkan hasil panen kelapa sawit masyarakat menjualnya kepada pengumpul kelapa sawit, sebarangpun hasil yang didapatkan bisa langsung dijual. Oleh pengumpul, kelapa sawit akan dikumpulkan hingga jumlah tertentu (beberapa ton) kemudian langsung dijual ke pabrik yang langsung mengolah kelapa sawit menjadi minyak mentah. Hal ini berarti tidak ada hasil kelapa sawit akan terbuang dan masyarakat tidak akan mengalami kerugian karena hasil panen yang tidak diambil penandah.

Manfaat lain dengan adanya kebun kelapa sawit yaitu dapat dijadikan agunan disaat memerlukan uang dalam jumlah yang besar. Masyarakat desa pada umumnya tidak menyimpan uang banyak dirumah masing-masing, mereka lebih memilih meginvestasikan uangnya disawah atau lading, sehingga disaat-saat tertentu mereka dapat mencairkannya kembali.

Kelapa sawit juga dikatakan sebagai komoditas ekspor utama negara Indonesia, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak kelapa sawit yang diimpor ke berbagai negara, semakin banyak pula pendapatan Indonesia yang dapat digunakan untuk proses pembangunan Indonesia menjadi negara yang sejahtera.

5. Membudidayakan Kelapa Sawit yang Baik dan Benar.

Tanam dan biarkan, filosofi yang banyak dipakai oleh beberapa orang. Namun kemudian mereka masih tetap mengharapkan hasil yang melimpah dan besar. Saat mengharapkan hasil yang maksimal seharusnya mereka juga mengerti bahwa sebelum itu harus ada pekerjaan yang maksimal terlebih dahulu. Kelapa sawit memang tanaman yang tidak sulit untuk hidup, meski begitu masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit dalam mengelola kebunnya. Misalnya saja masalah hama, pupuk dan lain sebagainya. Karena itulah saat menghendaki hasil yang baik maka masyarakat juga harus memberikan perawatan yang baik terhadap kebun mereka.

Permasalahan yang paling umum dalam perkebunan kelapa sawit adalah produktifitasnya dan kualitas mutu. Tinggi atau rendahnya biaya produksi yang digunakan tergantung pada sistem manajemennya, yaitu cara memberikan efisiensi yang ada pada seluruh biaya produksi. Biaya poduksi yang rendah merupakan salah satu dari indikator

untuk menciptakan efisiensi pengelolaan tanaman kelapa sawit. (pardamean, 2008). Efisiensi dapat terjadi saat masyarakat sudah mengerti akan cara budidaya dan perawatannya.

Sekalipun masyarakat terbantu dengan adanya kebun kelapa sawit, namun pengelolannya masih belum dilakukan dengan baik. Sehingga keuntungan yang didapatkan tidak maksimal. Karena masyarakat masih menjadikan sawah sebagai lahan pekerjaan utama, jadi fokus utama masyarakat masih kepada tanaman padi, alih-alih membagi fokus dengan tanaman lain.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat menjanjikan dengan syarat dikelola dengan baik sesuai dengan teknik budidaya yang benar. Namun pada kenyataannya di lapangan masyarakat Dusun Pasar Baru lahan-lahan yang sudah ditanami dengan kelapa sawit tidak merasakan keuntungan yang optimal. Keuntungan tetap didapatkan namun tidak secara maksimal. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan teknik budidaya kelapa sawit yang benar, khususnya bagi masyarakat yang tidak melanjutkan perawatan kelapa sawit setelah ditanam (Aryanti dkk, 2017, Vol. 1).

Dilihat dari beberapa manfaat yang telah dijabarkan diatas, prospek perkebunan kelapa sawit dapat memberikan kepuasan secara finansial jika dirawat dan dijaga dengan baik, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk merawat kebun kelapa sawit (Soetrisno dan Winahyu, 1991, hal. 105) untuk menunjang produktifitas yang efisien dari kelapa sawit:

1. Penyiangan

Maksudnya adalah pengendalian gulma dalam pertanaman sawit mencakup area sekitar piringan dan gawangan (antar barisan tanaman). Tujuan dari kegiatan penyiangan ini adalah untuk mengurangi persaingan antara tanaman pokok dengan tanaman lain yang merugikan, memudahkan dalam hal pemeliharaan dan untuk mencegah berkembangnya hama penyakit tertentu.

Banyak panen yang menjadi gagal karena seharangan gulma ini, tidak terkecuali pada tanaman kelapa sawit. ada 3 cara pengendalian gulma, sebagai berikut:

a. Mekanis

Penendalian gulma secara mekanis adalah dengan menggunakan alat yang dapat berupa sabit, cangkul dan garpu.

b. Kimiawi

Kimiawi merupakan jenis pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida.

c. Biologi

Pengendalian secara biologi merupakan pengendalian gulma yang menggunakan organisme tertentu.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dapat dilakukan pengendalian gulma dengan ketiga cara yang telah dijelaskan secara bersamaan.

2. Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan dua sistem yaitu dengan sistem tebar dan sistem benam (pocket).

a. Sistem tebar

Pada sistem tebar, pupuk ditebarkan dipiringan pada jarak 0.5 meter hingga pinggir piringan pada tanaman muda, dan pada jarak 1-2.4 meter pada tanaman dewasa.

b. Sistem benam (pocket)

Pada sistem pocket, pupuk diberikan pada 4-6 lubang pada piringan disekeliling pohon, kemudian lubang ditutup kembali. Sistem pocket disarankan pada area rendahan, area yang lereng atau pada area yang berpasir atau yang mudah tererosi.

Idealnya pupuk memang harus dilakukan saat bibit baru ditanam ketanah dan pada saat kelapa sawit akan berbuah. Dengan takaran dan jenis-jenis pupuk yang dibutuhkan tanaman.

3. Pemangkasan/penunasan

Maksud dari pemangkasan/penunasan ini adalah membuang pelepah daun yang sudah tua, dan sudah tidak produktif lagi pada kelapa sawit. Menurut (Syakir, 2010) tujuan pemangkasan adalah:

- a. Memperbaiki sirkulasi udara disekitar tanaman sehingga dapat membantu proses penyerbukan secara alami.
- b. Mengurangi penghalangan pembesaran buah dan kehilangan brondolan buah terjepit pada pelepah daun.
- c. Membantu dan memudahkan pada waktu panen
- d. Mengurangi perkembangan epifit daun

- e. Memperlancar proses metabolisme tanaman, terutama proses fotosintesis dan respirasi.
- f. Pemangkasan dilakukan 6 bulan sekali untuk tanaman yang belum menghasilkan dan 8 bulan terakhir untuk tanaman yang telah menghasilkan.

Jarak tanam merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman kelapa sawit, karena penyerapan energi matahari oleh permukaan daun sangat menentukan pertumbuhan tanaman. Semakin rapat populasi tanaman kelapa sawit dalam satu hektar maka akan sedikit jumlah intensitas cahaya matahari yang diperoleh oleh tanaman dan semakin tinggi tingkat kompetisi antar tanaman dalam mendapatkan sinar matahari. Pada populasi yang lebih tinggi, kontak antar tanaman lebih cepat terjadi sehingga kompetisi dalam mendapatkan air dan unsur hara akan meningkat pada musim kemarau. Peningkatan jarak tanam pada tingkat tertentu, dapat meningkatkan hasil per satuan luas sedangkan hasil tiap tanaman kelapa sawit akan menurun (Budi Asturi) (Nursanti dan Kriswibowo, 2020, Vol 5).

Jika kelapa sawit dibudidayakan dengan baik dan terdapat perluasan lahan, maka keuntungan kelapa sawit yang didapatkan akan jauh lebih besar. Namun luas lahan juga merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Semakin luas lahan perkebunan semakin banyak pula hasil yang diperoleh.

6. Alasan Masyarakat Menjadikan Kegiatan Berkebun Kelapa Sawit Hanya Sebagai Pekerjaan Sampingan

Dengan maraknya trend menanam kelapa sawit masyarakat tetap memilih bertani sebagai pekerjaan utama masyarakat. Alasan dasar dari memilih pekerjaan utama sebagai petani adalah masyarakat tidak perlu lagi membeli beras dan dapat menyimpan sebagian dari padi hasil panen untuk kemudian dijadikan nasi untuk makan sehari-hari. Karena itu masyarakat masih berat untuk mengkonversi lahan pertanian mereka sebagai lahan berkebun kelapa sawit.

Kelapa sawit memang komoditi ekspor terbanyak yang berasal dari Sumatera Barat, banyak daerah-daerah yang sudah menjadikan berkebun kelapa sawit sebagai pekerjaan utama mereka (Masykur, 2013, Vol. 3). Namun bagi masyarakat Dusun Pasar Baru yang sebagian besar masyarakatnya hanya memiliki sedikit lahan, hal itu tidak memungkinkan mereka membuka lahan kebun kelapa sawit secara besar-besaran.

Beras adalah makanan pokok masyarakat agak tidak bisa diterima jika kita sebagai petani tapi juga ikut membeli beras. Harga beras juga cukup mahal Rp. 10.000- 12.000,00 per kilo. Entitas beras dinilai masih lebih menguntungkan daripada kelapa sawit. Keuntungan yang diberikan dari sawah lebih menggiurkan daripada keuntungan yang didapatkan dari berkebun kelapa sawit. Kelapa sawit hanya ditanam pada lahan-lahan yang beberapa waktu lalu kosong dan lahan pertanian tidak pernah dijadikan sebagai lahan perkebunan.

Masyarakat Dusun Pasar Baru menilai, selagi makanan pokok dapat ditanam maka lakukan. Masyarakat tidak terlalu percaya dengan beras yang telah dijual di warung, karena dahulu pernah ditemukan beras yang tercampur dengan plastik karena itu masyarakat lebih percaya dengan beras hasil penen sendiri. Kelapa sawit hanya sebagai kesibukan tambahan untuk memperoleh pendapatan tambahan. Kebun kelapa sawit akan dirawat setelah masyarakat selesai dengan urusan sawahnya masing-masing. Hanya masyarakat yang secara ekonomi memiliki kelebihan yang menjadikan kebun kelapa sawit sebagai usaha utama.

Khususnya pada daerah pedesaan pembangunan perekonomian kelapasawit memberikan dimensi ekonomi yang sangat besar. Sumbangan yang diberikan atas kemampuan tersebut dapat tercermin dari penyerapan tenaga kerja serta jaminan pendapatan. Sebenarnya hakekat dari pembangunan perkebunan kelapa sawit adalah membangun ekonomi yang berorientasi pada pedesaan. Meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan merupakan sasaran utama dari pembangunan perkebunan kelapa sawit, yang kemudian dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin terutama di daerah pedesaan. (Bungaran Saragih, 2001).

Meskipun panen padi hanya dapat dilakukan 2 atau 3 kali setiap tahunnya, namun masyarakat sudah mengerti kegiatan menanam padi di sawah sedari dahulu. Masyarakat mengaku lebih mahir memelihara padi daripada kelapa sawit. Metode dan cara merawat tanaman padi sudah seperti rutinitas bagi masyarakat, karena itu jika disuruh untuk menukar kebiasaan akan terkesan sulit. Mengelola sawah sebagian besar dilakukan oleh para istri, seperti melihat keadaan sawah setiap harinya, mengelilingi sawah untuk memperhatikan padi dari serangan hama yang merugikan serta mengawasi keadaan padi sebelum dipanen. Sedangkan untuk mengurus kelapa sawit, terlalu sulit untuk dilakukan para istri.

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian merupakan ancaman nyata terhadap ketahanan pangan terutama bagi daerah penghasil pangan. Pada umumnya konversi

lahan terjadi karena adanya *land rent* sektor pertanian rendah secara relative dibanding dengan sektor lain seperti industri maupun perumahan. Banyak lahan pertanian yang sudah diadkan sebagai rumah milik pribadi (Istiqomah, 2019, Vol. 2).

Masalah lain yang membuat masyarakat enggan untuk beralih dari sawah ke kebun adalah keterbatasan pupuk. Pupuk yang diperlukan untuk sawah sudah sangat sulit didapatkan ditambah lagi dengan untuk kebun kelapa sawit. jika mengikuti langkah-langkah budidaya kelapa sawit yang baik, pupuk yang diperlukan untuk tanaman kelapa sawit sangat banyak dan ini juga merupakan kesulitan yang harus dihadapi petani.

D. KESIMPULAN

Masyarakat Dusun Pasar Baru memiliki pekerjaan utama sebagai petani pada sebagian besar penduduknya. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah membuat masyarakat memilih bekerja sebagai petani karena sebagai petani tidak membutuhkan tingkat pendidikan yang tinggi.

Trand menanam kelapa sawit terjadi karena masyarakat merasa tertolong ekonominya dengan adanya tanaman kelapa sawit. kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang sangat cocok untuk ditanam sebagai pengisi waktu luang setelah masyarakat sibuk mengurus tanaman padi di sawah.

Namun tanaman kelapa sawit tidak dirawat dan dijaga dengan benar sehingga masyarakat tidak mendapatkan keuntungan secara maksimal. Karena hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan tanaman kelapa sawit tidak diperhatikan secara menyeluruh yang akhirnya mengakibatkan hasil buah tidak maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Alatas, Andi. “Trand Produksi dan EKspor Minyak Sawit (CPO) Indonesia”, *Jurnal Agraris*, Vol. 1 No. 2 Juli 2015.

Anang, et al. 1996. *Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia*. IPB Press. Bandung.

Andriani, Evi “Analisis Sumber Pendapatan Petani Kelapa Sawit, *Jurnal Agresep*, Vol. 16 No. 2 September 2017 hal 145-154

Angkasawati, “Masyarakat Desa”, *jurnal Publiciana*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2015

- Aryanti, Mira Dkk. “Sosialisasi Teknik Budidaya Kelapa Sawit Berbasis Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 6, Desember 2017.
- istiqomah, Asti. “Analisis Land Rent dan Daya Saing Pertanian Padi Organik di Kabupaten Tasikmalaya, *Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan*, Vol. 2, Tahun 2019.
- Masykur, “Pengembangan Industri Kelapa Sawit Sebagai Penghasil Energi Bahan Bakar Alternatif dan Mengurangi Pemanasan Global, *Jurnal Reformasi*, Volume 3, Nomor 2, Juli-Desember 2013
- Nursanti, Ida dan Kriswibowo, Pandu. “Pengaruh Jarak Tanam yang Berbeda Terhadap Pertumbuhan dan Produksi Kelapa Sawit”, *Jurnal Media Pertanian*, 5 (1) April 2020.
- Salvatore, D. 1997. *Ekonomi Internasional*. Edisi 1. Erlangga. Jakarta.
- Soetrisno, L. dan Winahyu, Retno. 1991. *Kajian Sosial Ekonomi Kelapa Sawit*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Supatmiatun, “Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Petani Padi di Desa Kresnowidodo Tahun 2018), FKIP 2019.
- Suseno, Priyonggo. “Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Terhadap Pekerjaan Sampingan Masyarakat Pedesaan”, *JEP* Vol. 2, No. 1, 1997.
- Susiati, “Penyerapan Tenaga Kerja Bagi Masyarakat Desa Perangkat Selatan Pada PT. Kutai Sawit Plantation Kecamatan Marang Kayu”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 4, 2013.
- Yardha Ningsih, Very Dkk, “Keunggulan Kompetitif dan Keunggulan Komperatif Usaha Tani Kelapa Sawit Pada Lahan Suboptimal di Kabupaten Musi Rawas”, *Jurnal Agribisnis*, Vol.-20, No. 2 Desember 2019.



10

MAWADDAH SRI KHARISMA

*Peran Media Sosial Dalam Menggerakkan
Usaha Rumah Tangga di Komplek Villa
Anggrek Air Dingin Dalam Menghadapi
Pandemi*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENGGERAKKAN USAHA RUMAH TANGGA DI KOMPLEK VILLA ANGGREK AIR DINGIN DALAM MENGHADAPI PANDEMI

Mawaddah Sri Kharisma

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Di era modern sekarang menuntut manusia bijak dalam menjalankan usaha, apalagi dengan keadaan pandemi covid-19 yang sedang melanda dunia. Banyak dari masyarakat yang memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan prodak-prodaknya. Pembahasan yang ada pada artikel ini yaitu mengenai peran media sosial dalam membantu mempromosikan usaha yang dijalankan oleh ibu-ibu rumah tangga di komplek Villa Anggrek Air Dingin. Hal ini bermula karena pandemi covid-19 yang berdampak kepada keadaan ekonomi yang menurun. Ibu-ibu rumah tangga yang berada di komplek Villa Anggrek Air Dingin menggunakan media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Gofood dan media sosial lainnya.

Kata Kunci: *Media Sosial, Usaha Rumah Tangga, Pandemi*

A. PENDAHULUAN

Pandemi Covid19 ini menyebabkan dampak negatif kepada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan sosial. Dalam kegiatan ekonomi, pandemi Covid19 ini memberikan pengaruh yang besar terhadap mikro ekonomi dan makro ekonomi. Contoh permasalahan yang disebabkan pandemi Covid19 ini dalam mikro ekonomi adalah orang yang melakukan kegiatan industri atau penyedia barang dan jasa mengalami penurunan permintaan (demand) sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang mengharuskan untuk adanya pembatasan sosial. Karena penurunan permintaan tersebut maka hal yang dilakukan oleh pelaku industri yaitu dengan mengurangi jumlah produksi bahkan ada yang menghentikan kegiatan operasional.

Penurunan permintaan mengakibatkan terjadinya pengurangan tenaga kerja dilingkungan industri tersebut. Sehingga para pekerja banyak yang menjadi pengangguran. Hal tersebut juga

terjadi di Komplek Villa Anggrek Air Dingin. Warga yang biasanya bekerja dikantor, perusahaan-perusahaan, semenjak dirumahkan mereka menjadi kehilangan pekerjaan dan pengangguran. Keadaan tersebut membuat warga kewalahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Namun tidak ingin larut dalam kesedihan dengan kehilangan pekerjaan, karena sang kepala rumah tangga yang biasanya mencari nafkah dan bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari kini tidak bekerja lagi. Para ibu rumah tangga ini berinisiatif untuk membuka usaha di rumahnya, seperti berjualan lontong, seblak, siomay, bakso dan makanan lainnya. Untuk menarik perhatian konsumen para ibu rumah tangga yang berjualan memberikan fasilitas dengan bisa diantar serta free ongkir untuk sekitaran komplek Villa Anggrek Air Dingin. Ibu rumah tangga selain dengan berjualan dirumah, Ibu-ibu ini juga memanfaatkan media sosial mereka untuk memasarkan makanan-makanan yang dijualnya, seperti di aplikasi gofood, facebook, whatsApp, serta instagram mereka.

Keuntungan dari media sosial adalah untuk memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli, Karena kondisi pandemi seperti sekarang ini, masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas diluar rumah dan tatap muka. Pembeli dapat mengetahui macam-macam menu yang dipromosikan sehingga bisa memilih sesuai dengan selera. Maka media sosial ini dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan makanan-makanan yang dijual ibu-ibu tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis, tujuan dari penggunaan jenis penelitian tersebut yaitu untuk memperoleh gambaran dan menjelaskannya mengenai bagaimana ibu-ibu di Komplek Villa Anggrek Air Dingin ini memanfaatkan media sosial untuk menggerakkan usahanya. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, pengamatan (observasi) serta dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Media Sosial

Media sosial terbentuk dari kata “media” dan “sosial” yang berjumlah dua kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media sosial memiliki definisi yaitu aplikasi atau situs yang memberikan kesempatan bagi penggunanya supaya dapat membagikan suatu hal ataupun terlibat dalam suatu koneksi di jaringan sosial.

Gohar F. Khan (Rosarita, 2018, hal.4) mengungkapkan pendapat sederhana mengenai media sosial yaitu suatu platform berbasis internet yang dapat dengan mudah diakses para penggunanya, sehingga mereka dapat saling menciptakan dan membagikan suatu momen ataupun konten baik berupa opini, informasi, dan minat. Hal ini dibagikan dalam konteks yang bermacam (edukatif, informatif, saran, kritik, dan sindiran) terhadap banyak orang.

Kartajaya (Machyudin A.H dan Susri Adeni,2020, hal.17) menyatakan mengenai media sosial merupakan perpaduan atau gabungan dari teknologi dan sosiologi yang dapat menjadikan monolog (*one to many*) menuju dialog (*many to many*), selain itu informasi yang juga bisa membuat para penggunanya dari pembuka konten menuju penerbit konten.

Media sosial adalah suatu layanan berbasis jaringan internet, sehingga memberi kesempatan bagi manusia untuk saling membagikan opini, cara pandang, pemikiran, dan pengalamannya. (Dellia Milia Vernia.2017, hal.106) selain itu ahli lain juga berpendapat seperti Yoo dan Gretzdel dalam jurnal (Dellia Milia Vernia.2017, hal.107) yang menjelaskan mengenai media sosial yang dapat menunjang kebutuhan penggunanya untuk mendapat informasi secara nyata (faktual), jelas, dan didasarkan pada pengalaman yang sifatnya non-komersial. Hal ini bisa didapatkan dan diakses melalui sumber informasi di luar batasan lingkaran sosialisasi pengguna itu.

Perkembangan yang dialami oleh media sosial cukup signifikan dari masa ke masa. Friendsdter merupakan salah satu media sosial yang cukup digemari di tahun 2002, media sosial ini paling mendominasi diantara media sosial lainnya di tahun tersebut, namun saat ini ada beragam media sosial yang telah lahir dengan keunikannya dan karakterstiknya yang beragam disetiap media sosial tersebut.

Pada era 70-an merupakan awal dari sejarah media sosial, pada era tersebut ditemukan suatu sistem papan buletin yang dapat memberi koneksi dengan manusia lainnya melalui surel (surat elektronik) ataupun mengunduh dan mengunggah *software*, pada waktu tersebut dilaksanakan menggunakan saluran telepon yang terkoneksi dengan modem.

Situs GeoCities mulai muncul pada tahun 1995. Situs ini menyediakan pelayanan web hosting (layanan sewa untuk menyimpan data website supaya website bisa diakses dimanapun). GeoCities adalah pelopor utama berdirinya website lainnya.

Pada tahun 1997 sampai tahun 1999 terbitlah media sosial pertama yaitu *classmates.com* dan *sixdegree.co*. Tidak hanya itu, di tahun itu pun ada juga situs untuk memiliki blog individu, yaitu Blogger. Blogger memberi kesempatan bagi pengguna agar dapat memiliki halaman situs milik sendiri. Sehingga para pengguna dapat menuliskan dan memuat hal yang ingin diunggah.

Pada tahun 2003 hingga sekarang telah muncul beragam media sosial dengan karakteristik dan keunggulannya, seperti Facebook, LinkedIn, Twitter, MySpace, Google, dan lain-lain. Media sosial saat ini juga menjadi wadah atau sarana untuk segala aktivitas *digital marketing*, seperti *Sosial Media Endorsement*, *Sosial Media Maintenance*, dan *Sosial Media Activation*. Maka dari itu, media sosial telah menjadi bagian dari servis yang ditawarkan oleh *Digital Agency*. (Agung Sugeng Cahyono, hal.143-144)

Peran dari media sosial sekarang, sudah menciptakan bagian penting dalam membentuk karakter, perilaku, dan beragam aspek lainnya di kehidupan. Hal ini menyebabkan peran media sosial sangat tinggi. Ada pula fungsi media sosial akan dijelaskan, antara lain:

1. Media sosial memiliki desain untuk menjangkau lebih luas interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh manusia melalui teknologi web dan internet.
2. Media sosial mampu mengubah praktik komunikasi satu arah media siaran menjadi satu institusi media di beragam *audience (one to many)* ke dalam praktik komunikasi dialogis yang berisi banyak *audience (many to many)*.
3. Media sosial menunjang demokrasi informasi dan pengetahuan. Mengubah manusia dari pengguna pesan menjadi pembuat dari pesan tersebut.

Puntoadi (Arum Wahyuni Purbohastuti, 2017, hal.215-216) menyatakan pendapat lainnya, fungsi dari media sosial adalah:

1. Kelebihan membentuk personal branding dengan sosial media tidak memandang popularitas semu atau trik semata, dikarenakan *audience*-lah menentukan. Beragam media sosial merupakan wadah untuk orang-orang yang berdiskusi, berinteraksi serta saling memberi kepopuleritasan di media sosial.
2. Media sosial telah memberi kemudahan untuk melakukan komunikasi lebih intens dengan para pengguna. Media sosial memberi penawaran konten interaksi yang sifatnya individual. Adanya media sosial, beragam pelaku usaha bisa mengetahui

kebiasaan dan kesukaan dari para konsumennya, selain itu juga dapat memiliki komunikasi personal dan bisa membangkitkan rasa tertarik yang lebih tinggi.

Berbagai fitur yang ada dalam media sosial juga memberi dampak atau efek dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, sampai setiap individu. Media sosial memiliki dampak terhadap perubahan signifikan di segala bidang, seperti ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ada beberapa keunggulan media sosial (Widyaiswara Madya, hal.3) adalah media sosial sebagai alat untuk bisa dimanfaatkan dalam kegiatan publikasi diri, opini individu, pekerjaan, dan kejadian lainnya. Keunggulan media sosial bagi perusahaan yaitu untuk meningkatkan relasi kepada calon pelanggan maupun pelanggan. Hal ini dikarenakan, suatu hubungan memiliki potensi dalam menjangkau konsumen sehingga hal ini bisa meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha. Perusahaan juga bisa mengetahui informasi berdasarkan demografis konsumen. Selain itu, media sosial memudahkan untuk membentuk komunitas ataupun membuat grup. Melalui media sosial, komunikasi virtual dapat tercipta dengan murah dan mudah, tanpa perlu saling bertemu muka. Komunikasi antarwilayah, antarbenua, dan kerja sama juga bisa tercipta melalui media sosial, hal ini berarti media sosial menghapuskan segala hambatan bagi manusia yang ingin berkomunikasi dengan yang lainnya, tanpa peduli jarak, biaya, waktu, sosial budaya, dan hambatan gender dan usia. Keunggulan lainnya dari media sosial ini adalah memudahkan dalam melakukan eksplor terhadap informasi mengenai objek atau subjek apapun dan dari manapun yang semua itu dapat menambah pengetahuan.

Kekurangan pada media sosial adalah sering disalahgunakan dalam melakukan tindak kriminal atau penipuan, sebagai contoh pemalsuan identitas. Dan efek negatif jika dilakukan secara berlebihan oleh pelajar maka akan dapat mengganggu kegiatan belajar.

Adanya media sosial memberi kesempatan bagi manusia agar terkoneksi tanpa batas ruang dan waktu. Menurut Kaplan dan Haenlein (Dedi Rianto Rahadi, 2017, hal.60) ada enam jenis media sosial:

1. Collaborative Projects,

Adalah media sosial yang mampu menciptakan konten dan dalam proses pembuatannya bisa dilihat oleh umum. Wikipedia adalah salah satu kategori yang ada pada *Collaborative Projects*, Wikipedia memiliki banyak peminat dari beragam negara. *Collaborative Projects* bisa

difungsikan dalam menunjang citra perusahaan, tanpa memikirkan pro dan kontra mengenai kebenaran dari konten materi yang ada pada situs itu.

2. Blogs dan Microblogs

Adalah aplikasi yang bisa memberi bantuan bagi pengguna dalam menuliskan secara detail tentang opini, berita, kegiatan sehari-hari, hingga pengalaman. Kedua aplikasi tersebut memiliki kegunaan untuk menyampaikan informasi dalam mempromosikan suatu produk. Kedua aplikasi ini juga bisa membuat penggunanya dengan leluasa menggiring pandangan masyarakat dengan tujuan agar lebih kenal dengan mereka tanpa perlu berusaha dengan keras untuk menyampaikan informasi secara langsung (tatap muka).

3. Content Communities

Merupakan aplikasi dengan tujuan agar saling membagikan kepada yang lainnya baik secara tidak langsung maupun langsung. Pengguna dalam aplikasi ini bisa saling membagikan foto atau video. Aplikasi ini juga berguna dalam proses publikasi aktivitas positif yang dijalankan oleh suatu perusahaan, sehingga aktivitas itu akan mendapat perhatian umum dan meningkatkan kesan positif bagi perusahaan.

4. Social Networking Sites

Situs jejaring sosial adalah suatu situs yang bisa memberi bantuan bagi pengguna internet untuk menciptakan profile dan mengkoneksikannya kepada pengguna lainnya. Situs jejaring sosial memberi kesempatan bagi pengguna untuk menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya individual atau pribadi, misalnya tulisan, foto, ataupun video, dan saling berinteraksi secara pribadi kepada pengguna lain dengan privasi yang terjaga. Peranan situs jejaring sosial dalam menciptakan *brand image*, karena sifat yang interaktif sehingga pengguna bisa dengan mudah mengirimkan dan menerima informasi, serta bisa dijalankan sebagai media komunikasi dan klarifikasi yang memiliki kenyamanan antara konsumen dengan pemilik produk.

5. Virtual Game Worlds

Ratusan pemain virtual dalam permainan multiplayer dapat didukung. Media sosial menunjang untuk menarik minat dan perhatian pengguna agar lebih tahu mengenai desain grafis yang mencolok dan permainan warna yang memiliki ketertarikan, sehingga dirasa lebih interaktif dan informatif.

6. *Virtual Social Worlds*

Aplikasi yang memberi stimulus terhadap kehidupan nyata dalam internet. Aplikasi ini memberi manfaat bagi pengguna untuk berkomunikasi di platform tiga dimensi dengan memasang foto profil yang serupa dengan kehidupan nyata. Aplikasi ini memberi kemudahan untuk mengimplementasikan strategi pemasaran dalam menyampaikan informasi yang komunikasi, interaktif, dan menarik.

Manfaat dari media sosial menurut Puntoadi (Yuni Fitriani, 2017, hal.150) sebagai berikut:

1. *Personal Branding is not only figure, it's for everyone.* Beragam media sosial misalnya twitter, facebook, youtube bisa membangun media untuk diskusi, komunikasi, sampai mendapat kepopuleran di sosial media.
2. *Fantastic marketing result throught social media. People don't watch TV's anymore, they watch their mobile phones.* Fenomena mengenai pandangan hidup masyarakat yang lebih menggunakan telepon seluler yang dikenal dengan istilah “*smartphone*”. melalui telepon seluler, seseorang dapat membagikan informasi.
3. Media sosial memungkinkan pengguna agar berkomunikasi lebih intens kepada konsumen. Media sosial memberi penawaran wujud interaksi yang lebih privasi, personal maupun dua arah. Para pelaku usaha di media sosial bisa tahu kebiasaan dan kesukaan konsumennya dengan melakukan komunikasi secara personal dan menciptakan rasa tertarik lebih tinggi.
4. Media sosial memiliki sifat viral. Puntoadi dalam (Yuni Fitriani, 2017, hal.150) berpendapat viral artinya seperti virus yang bisa menyebar secara cepat. Informasi yang ada pada suatu barang bisa menyebarluas dengan cepat dikarenakan pengguna media sosial sangat tinggi karakter berbaginya.

Penggunaan media sosial di kalangan masyarakat semakin luas, sehingga masyarakat dapat menggunakan media sosial dalam emnjalankan usaha daring. Kegiatan berbisnis bisa dijalankan melalui daring yng sifatnya mobile, sehingga bisa dilihat dan diakses dimanapun dan kapanpun, hal inilah yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga di komplek Villa Anggrek dalam menggerakkan usahanya dimasa pandemi. Ibu Rumah Tangga di komplek Villa Anggrek Air Dingin mempunyai ide bagaimana cara memanfaatkan kelebihan dari kecanggihan media sosial untuk mendapatkan penghasilan dimasa pandemi ini.

2. Pandemi

Laporan terdeteksinya kasus infeksi virus corona (SARS-CoV-2) pertama kali terdeteksi pada 17 November 2019. kasus pertama terjadi pada pasien yang berumur 55 tahun yang berasal dari provinsi Hubei menderita penyakit yang mirip dengan pneumonia, yang akhirnya sekarang yang dikenal dengan virus covid-19.

Penularan virus ini sangat cepat, menyebabkan jumlah pasien cepat berkembang menjadi 27 orang pada 15 Desember 2019. Dan tiga bulan kemudian China melaporkan jumlah kasus covid-19 yang mencapai 81.589 orang, dengan 3.318 orang meninggal dunia dan 76.408 orang yang sembuh setelah terdeteksi positif covid-19.

Berdasarkan penelusuran data, virus covid-19 ini tidak hanya di China saja namun sudah masuk ke negara-negara lain, pada tanggal 5 Maret 2020 jumlah yang terinfeksi virus covid-19 diseluruh dunia berjumlah 96.888, jumlah bertambah banyak karena telah menyebar ke 204 negara dan jumlahnya semakin bertambah banyak lagi yang terinfeksi covid-19 sebanyak 1.001.078 orang dan yang meninggal berjumlah 51.385. jumlah ini tercatat pada tanggal 2 April 2020. (Rohadatul Ais, 2020, hal 31)

Virus corona adalah virus yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Nama ini berasal dari kata lain “corona” yang artinya adalah mahkota. Belum ada yang mengetahui dari mana covid-19 ini berasal. SARS diyakini telah berkembang di China dari kelelawar hingga musang dan menginfeksi manusia, namun Wuhan diduga sebagai pembawa virus covid-19, akan tetapi para ilmuwan masih berusaha untuk memahami akar permasalahan persisnya.

Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang membuat penyakit pada manusia dan hewan, jika terinfeksi virus tersebut pada manusia dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom pernapasan akut berat atau yang dikenal Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini dapat menyebar melalui *droplet* dari batuk dan bersin. Pada 11 Maret 2020 Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (Rohadatul Ais, 2020, hal.33)

Di negara Indonesia, virus ini sudah menyebar dari tanggal 2 maret 2020, hal ini bermula dari salah seorang WNI yang berinteraksi langsung kepada WNA negara Jepang. Sejalan dengan

waktu, Covid-19 mengalami penyebaran yang meningkat secara pesat. Pemerintah telah mengimplementasikan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejalan dengan peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. PSBB memiliki pengertian yaitu kegiatan pembatasan aktivitas warga di suatu wilayah yang terinfeksi virus yang tujuannya untuk mencegah penyebaran secara luas. Kebijakan dari PSBB ini mengakibatkan berbagai sarana umum ditutup, termasuk didalamnya sekolah dan tempat ibadah (Muhammad Rasyid Ridho, 2020, hal.29)

Dampak dari covid-19 ini sangat banyak, yang berdampak kepada aktivitas warga, kebijakan atau peraturan yang berlaku memiliki dampak terhadap segala sisi kehidupan. Diantaranya sangat terdampak dalam aspek ekonomi, dunia usaha dan pendidikan. Dari dampak tersebut menyebabkan beberapa hal (Siti Ngainnur Rohmah, 2020, hal.66) :

1. Perekonomian masyarakat menurun

Akibat penyebaran virus covid-19 ini juga sudah dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari pedagang dipasar, para pedagang sayur, buah ataupun ikan, pedagang jajanan dipasar maupun pedagang keliling, yang biasanya mereka mendapatkan penghasilan dari hasil jualan, karena pandemi covid-19 ini banyak pedagang yang mengeluh akibat kekurangan bahkan kehilangan pendapatan karena sedikitnya pembeli.

2. Perekonomian Negara menurun drastis

Dilihat dari berbagai sisi, pada perbankan mengalami kerugian Bank Indonesia mencapai 40,165 triliyun yang disebabkan karena arus modal asing banyak yang kabur. APBN mengalami defisit sebesar 2,5% . Menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan proyeksi penurunan ekonomi pada tahun ini 5-5,4% yang sebelumnya 5,1-5,5%.

3. Sosial

Akibat pandemi covid-19 ini aktivitas sekolah yang biasanya berkumpul, kegiatan belajar dan mengajar dengan bapak atau ibu guru, bermain bersama teman-teman, namun karena keadaan pandemi pemerintah membuat kebijakan untuk sekolah dari rumah atau sekolah online, dan hal tersebut juga dirasaka oleh mahasiswa, mereka tidak dapat melakukan pelajaran secara tatap muka dan akhirnya dilakukan pembelajaran jarak jauh yang sehingga proses pembelajaran kurang efektif seperti yang dilakukan biasanya.

4. Sektor Industri dan Sektor Usaha

Dampak lain dari pandemi covid-19 ini adalah terdampak pada sektor industri dan sektor usaha. Wakil ketua umum bidang perdagangan, Promosi Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Tommy Kaihatu mengatakan banyak industri yang terganggu karena ketergantungan bahan baku dari China yang besar. Karena sektor industri terganggu banyak menyebabkan pengurangan para pekerja disetiap perusahaan atau di PHK, dan karyawan-karyawan kehilangan pekerjaan, dan mengakibatkan pengangguran bertambah. Dalam kasus ini, pemerintah punya peranan tinggi dan besar dalam menghadapi permasalahan pengangguran. Apabila permasalahan pengangguran tidak dapat diatasi dengan segera maka bisa menimbulkan bermacam tindak kriminal seperti perampokan, pencurian, hingga pembunuhan. Maka dari itu, pemerintah bekerjasama dengan warga untuk menciptakan lapangan kerja yang baru dan inovatif serta kreatif. Hal ini diupayakan supaya persentase pengangguran dapat teratasi dan setidaknya dapat mengurangi tingkat persentase pengangguran dan warga dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya.

3. Usaha Rumah Tangga

Kemajuan teknologi seiring dengan perkembangan zaman sesuai dengan melambungnya kebutuhan kehidupan bermasyarakat. Biaya hidup semakin tinggi, entah biaya hidup sehari-hari, kesehatan, sampai pendidikan, maka dari itu, untuk menghadapi biaya kehidupan yang semakin mahal maka seseorang harus mempunyai penghasilan yang tinggi pula supaya kebutuhannya dapat terpenuhi.

Ibu-ibu yang melakukan usaha di komplek Villa Anggrek Air Dingin pada saat masa pandemi sekarang ini memanfaatkan media sosialnya, karena selain dapat untuk menghubungkan dengan teman dan relasi yang jauh, media sosial ini juga dapat dimanfaatkan ibu-ibu ini sebagai media untuk mengembangkan bisnisnya.

Internet adalah media interaksi atau komunikasi yang bisa dibilang murah serta dijangkau dengan mudah melalui mobile. Untuk membentuk suatu relasi yang baik, maka seseorang harus aktif di sosial media. Melalui sosial media, para pelaku usaha juga bisa mendapat umpan balik dan interaksi bersama konsumen ataupun rekan bisnis lainnya. Maka dari itu perlu adanya cara untuk pengoptimalan sosial media dalam pengembangan bisnis dalam jurnal(Dellia Mila Vernia,2017, hal.116) yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Konsistensi

Waktu yang digunakan setiap hari agar bisa melaksanakan kegiatan bisnis secara terus menerus di sosial media. Media sosial harus bisa ditampilkan secara menarik dan bermanfaat, hal ini untuk menciptakan daya tarik konsumen mengenai bisnis yang diemban.

2. Fokus pada salah satu media

Terdapat beragam media sosial yang dapat dimanfaatkan dalam mengawali usaha. Namun, lebih baik apabila dimanfaatkan melalui satu sosial media. Pilihlah media sosial yang dirasa sesuai dan dapat dijalankan serta diakses oleh calon pembeli.

3. Beri sentuhan personal pada setiap konten media sosial

Setiap pengguna ada karakteristiknya masing-masing, begitu pula dengan ibu rumah tangga yang punya ciri khas sendiri. Hal ini penting diperhatikan dalam membentuk branding usaha. Karakteristik khusus yang dimuat dalam konten membuat pengguna media sosial paham dan kenal terhadap pemilik usaha, sehingga para konsumen merasa dekat dan percaya dengan pemilik bisnis.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan teori di atas telah dipraktekkan oleh ibu rumah tangga di komplek Villa Anggrek Air Dingin dalam menjalankan usahanya. Ibu-ibu ini mempunyai ciri khasnya masing-masing dalam berjualan.

1. Ibu Latifah adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai empat orang anak. Suaminya dulu bekerja sebagai sales. Penghasilan suaminya sejak pandemi berkurang sedangkan keempat anaknya sedang membutuhkan biaya untuk pendidikan. Ibu Latifah ingin membantu keuangan keluarga dengan keahlian yang dimilikinya. Dia hobby dalam bidang memasak, sehingga muncullah keinginannya untuk berjualan makanan seperti spesifik ayam geprek dengan sensasi tingkatan pedas yang bisa dipilih oleh pembeli dan pilihan menu lainnya.

Awalnya Ibu Latifah mempromosikan dagangannya dari mulut kemulut para tetangga. Karena merasa pembeli belum begitu ramai, Ibu Latifah memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan makanannya lewat story WhatsApp. Hanya beberapa minggu penjualannya sudah mulai meningkat, tapi pelanggannya masih sekitaran Komplek Villa Anggrek. Untuk menjangkau konsumen yang lebih jauh, Ibu Latifah menggunakan aplikasi Gofood dalam memasarkan produk makanan yang dijualnya. Setelah beberapa bulan berjualan melalui aplikasi Gofood dan mempromosikan lewat media sosialnya seperti Facebook dan WhatsApp

pelanggannya sudah mulai banyak dan tidak hanya warga komplek Villa Anggrek lagi tapi sudah dari pembeli diluar komplek Villa Anggrek.

2. Ibu Yeni adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai dua orang anak, suaminya berprofesi sebagai fotografer. Sejak pandemi melanda pemerintah melarang resepsi pernikahan dan acara wisuda dikampus, yang menyebabkan berkurangnya job pemotretan sang suami. Hal tersebut berdampak kepada berkurangnya penghasilan suami. Ibu yeni yang kreatif mencoba untuk berjualan yang berbeda dengan orang lain dan makanan yang dijualnya digemari oleh anak-anak. Ibu Yeni ingin makanan yang dijualnya semenarik mungkin dan murah sehingga cocok untuk jajanan anak-anak. Seperti, takris, piscok, sate telur, nugget, dan minuman. Menariknya makanan yang dijual adalah semua jenis makanan dibuat sendiri (Homemade) oleh Ibu Yeni. Awalnya pembeli hanya anak-anak, karena makanan yang dijual Ibu Yeni enak dan bergizi pembelinya tidak hanya anak-anak lagi namun juga orang dewasa. Selain bisa berbelanja langsung kerumah Ibu Yeni, Ibu Yeni juga memanfaatkan media sosial dalam memasarkan produknya yaitu aplikasi WhatsApp. Pembeli bisa memesan melalui chat kepada Ibu Yeni, nanti anak Ibu Yeni yang akan mengantarkan pesanan ke alamat rumah pembeli.

3. Ibu Erna adalah seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tiga orang anak. Ibu Erna membuka usaha dari rumah yaitu dengan berjualan mie ayam, batagor, mieso, pecel lele, pecel ayam dan makanan lainnya serta juga menyediakan menu es tebak yang sangat cocok diminum saat panas melanda. Cara Ibu Erna dalam memasarkan produknya adalah dengan memanfaatkan media sosial miliknya. Ibu Erna setiap hari mempromosikan makanan-makanan yang dijual nya melalui aplikasi whatsapp melalui status yang merupakan fitur dari whatsapp, dan jika ada yang order maka bisa diantar langsung kerumah pembeli yang disekitar komplek Villa Anggrek Air Dingin. Selain dari menu-menu yang dibuat oleh Ibu Erna, Ibu Erna juga menerima request dari pelanggan jika mau dibuatkan apa seperti kue bolu yang biasa dipesan pembeli disaat hari-hari tertentu seperti hari raya, ataupun untuk acara lainnya dan juga menerima pesanan sarabi untuk acara pernikahan.

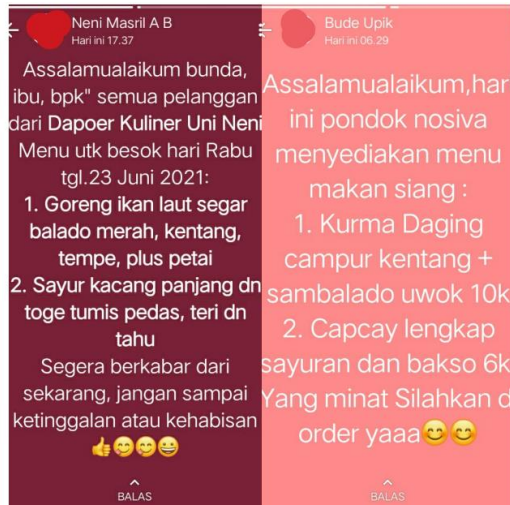
4. Ibu Neni adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak, Ibu neni jago dalam urusan masak-memasak, dan bu neni menjual berbagai macam lauk pauk dengan banyak pilihan yang berbeda disetiap harinya. Dan menu lainnya yang ditawarkan oleh Ibu Neni adalah menjual pizza dan bolen pisang dengan berbagai macam topping yang bisa dipilih sesuai selera konsumen. Ibu neni memanfaatkan media sosial Whatsapp untuk mempromosikan lauk pauk dan makanan lain yang dijualnya. Biasanya Ibu neni malamnya akan membuat status di

WhatsApp untuk memberi tahu menu apa saja yang tersedia untuk hari besok dan Ibu Neni juga memberi kemudahan untuk pembelinya dengan bisa langsung diantar kerumah dan tanpa ongkir untuk sekitar warga komplek Villa Anggrek Air Dingin.

5. Ibu Suarni adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang anak, suaminya berprofesi sebagai chef, Ibu Suarni menjual sarapan pagi seperti lontong, lotek, ketan goreng, nasi goreng dan menu sarapan lainnya dan tidak hanya menjual sarapan pagi, Ibu Suarni juga menjual berbagai macam lauk pauk yang berbeda disetiap harinya dan Ibu Suarni juga bisa menerima pesanan request dari pembeli hendak dibuatkan lauk pauk apa sesuai dengan keinginan pembeli. Para pembeli tinggal tunggu dirumah dan Ibu Suarni akan mengantarkan kerumah pembeli yang disekitar Komplek Villa Anggrek Air Dingin. Ibu Suarni menawarkan jualannya dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp miliknya dengan menggunakan fitur status yang disediakan WhatsApp dan juga membagikan info makanan yang dijualnya ke group-group whatsapp warga komplek Villa Anggrek Air Dingin.

6. Ibu Emi adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 3 orang anak. Ibu Emi menjual sarapan pagi dan sore menjual aneka jajanan seperti bakwan, gado-gado, tahu gejrot, dan makanan lainnya. Sang suami memasarkan makanan yang dibuat oleh Ibu Emi ke group WhatsApp warga Komplek Villa Anggrek Air Dingin, dan jika ada yang memesan maka akan diantar langsung oleh suami atau anaknya Bu Emi, suami bu Emi bernama Pak Anto dia di Komplek Villa Anggrek Air Dingin adalah sebagai Ketua RT 01, selain berjualan melalui media sosial Ibu Emi juga membuka warung di Komplek Villa Anggrek Air Dingin, jadi ada yang datang langsung kewarung untuk berbelanja, dan ada juga yang memesan hanya lewat WhatsApp, tinggal menunggu dirumah makanan akan diantar, hal ini memudahkan pembeli warga Villa Anggrek Air Dingin jika hendak berbelanja ditambah dengan keadaan yang sekarang untuk membatasi kegiatan diluar rumah.

Berikut beberapa contoh bentuk promosi di Media Sosial untuk menggerakkan usaha yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Komplek Villa Anggrek Air Dingin:



Walaupun dalam keadaan pandemi covid-19 ada kiat-kiat bisnis menurut (Siti Ngunnur Rohmah, 2020, hal.71) agar tetap survive diantaranya:

1. Memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang tinggi. Setiap yang mempunyai usaha bisnis harus memiliki kepercayaan yang tinggi. Setiap bisnis apapun yang dilakukan tentu memiliki faktor resiko. Jika tidak memiliki kepercayaan diri yang tinggi maka bisnis tidak dapat berjalan karena tidak berani untuk menanggung tantangan dan resiko kedepannya. Jika seorang pebisnis sudah memiliki kepercayaan yang tinggi ini adalah yang paling diperlukan dalam memulai karena walaupun hanya dari modal kecil jika percaya diri maka akan bisa memulai usahanya. Seorang pebisnis juga harus memiliki mental wirausaha dan kemandirian yang tinggi sehingga tidak malas-malasan dalam menjalankan usahanya. Pentingnya mental wirausaha yaitu jika mengalami masa masa sulit dalam membangun bisnis pasti ada masalah-masalah yang muncul jadi kalau seorang pebisnis tidak memiliki mental wirausaha maka bisa dipastikan pebisnis itu akan putus ada dan gulung tikar.

2. Berbisnis yang halal, mulai dari modal, proses hingga penjualan. Modal usaha sangat penting, meski begitu harus didapatkan dengan cara yang baik dan tidak curang. Proses dalam berbisnis pun juga dijalankan dengan cara-cara yang baik, jujur, dan tidak melakukan kecurangan. Selain itu yang tidak kalah penting adalah menjual barang-barang yang halal lagi baik dan tidak membahayakan bagi orang yang membelinya.

3. Menjaga kepercayaan relasi bisnis. Hal yang sangat penting bagi maju mundurnya usaha yang sedang dilakukan. Menjaga kepercayaan relasi bisnis dengan cara menjaga kualitas barang dan juga menepati pembayaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Cara yang dilakukan untuk menjaga kepercayaan pelanggan adalah dengan memberikan servis yang baik dan memuaskan. Dan juga menjual barang yang kualitasnya baik dan tidak ada cacat.

4. Melakukan promosi barang yang diperdagangkan, yaitu dengan membuat iklan baik di media elektronik maupun media cetak. Disaat zaman sekarang promosi dapat dilakukan dengan mudah, yaitu melalui media sosial yang memiliki follower sangat banyak dan luas, dapat menjangkau berbagai belahan dunia. Dengan promosi ini calon pembeli dapat mengetahui kualitas, bentuk, dan harga dari komoditas yang ditawarkan. Promosi dapat lebih menarik konsumen dengan memberikan tester dan diskon harga pada awal launching produk.

5. Berbisnis barang kebutuhan dasar. Bisnis yang sangat menjanjikan adalah bisnis barang kebutuhan dasar. Hal ini dikarenakan barang kebutuhan dasar yang memiliki dua sifat, yaitu *long lasting* dan *fast moving*. Dalam dunia bisnis *long lasting* diartikan mampu bertahan dalam waktu yang lama untuk dikelola sebagai sebuah usaha, karena usaha yang peluangnya tidak menentu, kemungkinan kecil bisa menghasilkan keuntungan yang signifikan. Barang kebutuhan dasar akan

selalu dicari dan diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena kebutuhan ini sifatnya primer. Barang kebutuhan dasar juga memiliki sifat *fast moving* yaitu terus dicari dan dibutuhkan oleh konsumen karena merupakan barang primer. Seluruh lapisan masyarakat memerlukan barang tersebut, maka akan selalu ada permintaan untuk membeli barang tersebut. Permintaan yang tinggi akan membuat barang kebutuhan primer tersebut cepat laku terjual. Barang kebutuhan dasar itu diantaranya adalah makanan, minuman, pakaian, alat kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jenis barang-barang ini merupakan komoditas yang prospektif untuk berbisnis.

6. Menggunakan teknologi informasi dalam berbisnis. Pada saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa dengan konsumsi digital, apalagi dengan adanya pandemi corona pemerintah membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sekarang kebijakan baru yaitu PPKM guna untuk memutus mata rantai covid-19 agar tidak terus terjadi kenaikan kasus positif yang menyebabkan masyarakat harus membatasi gerakannya diluar rumah. Dengan adanya pelayanan belanja online dan para pebisnis memanfaatkan media sosial sebagai tempat untuk mempromosikan barangnya maka penjual dan pembeli dapat terbantu dari media digital ini, dan juga ini merupakan kesempatan pebisnis dan pelaku usaha untuk melayani dan menarik konsumen dengan sebanyak-banyaknya walaupun hanya dari rumah.

Dengan kiat-kiat diatas jika diterapkan oleh orang-orang yang akan atau sedang menjalankan bisnis diharapkan bisnis yang dijalankan tetap survive walaupun keadaan pandemi covid-19 yang masih belum usai.

D. KESIMPULAN

Dalam situasi pandemi seperti saat sekarang ini media sosial memiliki peranan penting dalam melakukan pemasaran. Sekarang pemasaran tidak hanya dilakukan secara offline, namun sekarang pemasaran bisa dilakukan secara online dimanapun dan kapanpun dengan memanfaatkan media sosial. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Ibu-Ibu di Komplek Villa Anggrek Air Dingin untuk mendapatkan penghasilan tambahan disaat pandemi covid-19 melanda. Alasan menggunakan media sosial untuk memasarkan produknya adalah dengan melalui media sosial pemasaran akan efektif dan efisien karena mengingat bisa diakses oleh setiap orang sehingga menjadi alat promosi yang bisa dilakukan dimanapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ais, R. (2020). *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*. Tangerang Banten: Makmood Publishing.
- Cahyono, A. S. (n.d.). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia. 140-157.
- Fitriani, Y. (2017). Analisis Pemanfaatan Berbagai Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi Bagi Masyarakat. *Paradigma*, 148-152.
- Harahap, M. A. (2020). Tren Penggunaan Media Sosial Selama Pandemi di Indonesia. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 13-23.
- Purbohastuti, A. W. (2017). Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi. *Tirtayasa Ekonomika*, 212-231.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen&Kewirausahaan*, 58-70.
- Ridho, M. R. (2020). Wabah Penyakit Menular Dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI*, 24-33.
- Rohmah, S. N. (2020). Adakah Peluang Bisnis di Tengah Kelesuan Perekonomian Akibat Pandemi Coronavirus Covid-19? *ADALAH*, 63-74.
- Sindang, E. (n.d.). Manfaat Media Sosial dalam Ranah Pendidikan dan Pelatihan. *Pusdiklat KNKP*, 1-8.
- Vernia, D. M. (2017). Optimalisasi Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Bisnis Online Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Perekonomian Keluarga. *UTILITY*, 105-118.
- widiastuti, r. n. (2018). *memaksimalkan penggunaan media sosial dalam lembaga pemerintah*. jakarta pusat: Kementerian Komunikasi dan Informatika.



11



NANDA KEVIN ERLANGGA

*Animo Peran Pemuda Dalam
Penggerak UMKM Terhadap
Perekonomian Masyarakat
Kelurahan Genteng*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



ANIMO PERAN PEMUDA DALAM PENGGERAK UMKM TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KELURAHAN GENTENG

Nanda Kevin Erlangga

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Munculnya berbagai macam jenis usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) telah membawa semangat dan harapan baru bagi perekonomian di Indonesia. Dengan ketidakmampuan Pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian, diharapkan dengan adanya UMKM yang bermunculan tiap harinya mampu mendongkrak perekonomian masyarakat serta membantu meringankan sedikit beban pemerintah. Namun semua itu tidak akan berjalan dengan lancar jikalau peran UMKM tidak ada yang menjalankan dan menggerakkannya, karenanya UMKM akan maju dan berkembang jika yang menggerakkan tersebut mempunyai jiwa dan semangat juang yang tinggi serta pemikiran maju. Maka dengan demikian dibutuhkannya sosok animo peran pemuda yang memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi serta gagasan, semangat dan daya juang yang kuat guna menggerakkan UMKM sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat. Jika semua itu terwujudkan dengan melibatkan animo peran pemuda dalam menggerakkan UMKM maka bukan tidak mungkin sedikit demi sedikit masalah perekonomian yang dialami negara kita akan teratasi sedemikian rupa, karena secara tidak langsung jika banyak bermunculan usaha-usaha baru maka akan membuka lapangan kerja baru serta membuat roda perekonomian di tempat tersebut akan berputar sehingga akan mampu menambah pendapatan perekonomian masyarakat daerah setempat.

Kata Kunci : *Animo Peran Pemuda, UMKM, Perekonomian Masyarakat*

A. PENDAHULUAN

Ketidakmampuan Pemerintah dalam mengatasi perekonomian, tentu harus diimbangi dan ditutupi oleh masyarakat, dikarenakan perekonomian suatu Negara tidak akan bergerak jika pemerintah bergerak dan berusaha tanpa diimbangi dengan bantuan masyarakat. Dengan ketidakmampuan pemerintah tersebut maka muncul sebuah potensi yang mana Wirausaha muncul sebagai pembeda, baik dalam jumlah maupun dalam mutu wirausaha itu sendiri. Jika semua itu dilakukan dan ditekuni maka bukan tidak mungkin dengan munculnya banyak wirausaha-wirausaha baru bisa membuat perekonomian masyarakat bisa membaik seiring berjalannya waktu.

Semakin maju suatu Negara maka juga akan diimbangi dengan semakin banyak orang yang terdidik, sehingga tidak dapat dipungkiri juga maka makin banyak orang menganggur, dengan demikian semakin dirasakan dampak pentingnya dunia wirausaha bagi masyarakat. Negara akan menjadi lebih bagus dan berkembang jika dalam sistem perekonomiannya didukung oleh banyak pihak khususnya dalam bidang wirausaha, karena mengingat cukup banyak keterbatasan yang dialami pemerintah. Oleh sebab itu pemerintah tidak akan mampu memenuhi dan menyelesaikan semua aspek baik infrastruktur, pembangunan dan pemenuhan perekonomian masyarakat karena itu semua sangat banyak membutuhkan banyak anggaran yang mana pemerintah tidak sanggup memenuhinya.

UMKM merupakan suatu usaha kegiatan masyarakat yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat dan juga pembukaan lapangan pekerjaan baru, bahkan dimasa pada saat terjadi krisis ekonomi UMKM muncul dan menjadi penyelamat yang mana mampu mendorong pertumbuhan perekonomian. Mengingat peran strategis UMKM ini maka perlu adanya penggerak UMKM agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 271 juta jiwa dengan menempatkan provinsi Jawa Timur tepatnya dikota Surabaya kelurahan Genteng sebagai daerah terpadat kedua setelah ibu kota Jakarta tentu bukanlah sebuah hal yang mustahil jika peran pemuda dalam penduduk sebanyak itu ikut serta dalam peran pemerintah untuk mengelola perekonomian rakyat. Adanya peran pemuda akan sangat membantu pemerintah dalam hal penggerak Perekonomian masyarakat, belum lagi sekarang sudah mencapai pola Industri 4.0 yang mana mewajibkan setiap orang untuk berfikir kritis dan memiliki daya inovasi yang tinggi serta kemampuan melihat berbagai potensi yang ada.

Adanya gagasan, semangat, energi serta memiliki pola pikir maju bukan tidak mungkin yang mana nantinya keberadaan para generasi muda inilah yang akan menjadi pendongkrak perekonomian masyarakat khususnya di kelurahan Genteng yaitu dengan cara ikut berperan dalam penggerak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada daerah setempat. Jika peran pemuda diikutsertakan bukan tidak mungkin atau bahkan bisa saja akan bermunculan UMKM – UMKM baru yang mana nantinya akan menciptakan sebuah lapangan usaha yang baru juga sehingga secara tidak langsung akan membuka juga jendela perekonomian pada masyarakat setempat, belum lagi

adanya peran pemerintah dalam hal memberi bantuan biaya untuk modal serta untuk biaya pelatihan yang mana nantinya bisa berguna dalam hal membangun UMKM tersebut.

Melihat potensi yang sangat begitu besar yang ditunjukkan oleh para pemuda maka membuat orang berfikir ulang dan mulai beramai – ramai mendirikan Usaha Mikro Kecil Menengah. Tentu hal ini sangatlah wajar melihat potensi pasar yang begitu besar.. Peranan dan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terlihat sejak krisis ekonomi yang dulu dialami tepatnya pada tahun 1998-1999, mengingat dulu UMKM sebagai motor penggerak perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu diperlukan Peran pemuda dalam penggerak UMKM yang mana bertujuan untuk menggairahkan kembali pasar perekonomian sehingga mampu mendongkrak perekonomian Masyarakat khususnya di kelurahan Genteng kota Surabaya.

B. METODE YANG DIGUNAKAN

Dalam penelitian artikel ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat kuantitatif Deskriptif yang mana nantinya dalam penelitian ini akan menggunakan data – data yang valid menggunakan symbol angka dan kemudian dijelaskan secara mendetail dengan teori yang ada. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam penelitian artikel ini didapatkan melalui Riset Perpustakaan (*Library Research*) Yaitu penelitian yang digunakan memperoleh data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literature yang ada dan juga dengan memperoleh data dari beberapa survey dan pengajuan angket kuisioner kepada para pemuda untuk mengetahui minat dan bakat serta animo pemuda terhadap UMKM pada masyarakat kelurahan Genteng.

C. PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan sektor perekonomian yang paling strategis dan juga meyakinkan bagi masyarakat sehingga mampu menjadi bagian penting dalam sebuah perekonomian. Oleh karenanya baik itu perekonomian dan juga manusia merupakan dua variabel yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki peran serta menjadi faktor utama dalam hal penggerak perekonomian masyarakat. Dijelaskan dalam bukunya karangan (Medriyansah,2017, hal 3) yang mana menjelaskan bahwa kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dipegang oleh UMKM dan itu dibuktikan menjadi kunci pengaman perekonomian Nasional dalam masa krisis ekonomi moneter serta menjadi desiminotor pertumbuhan dalam masa paska krisis ekonomi.

Disamping dengan adanya UMKM yang sebagai kelompok ekonomi terbesar, maka dari itu juga tidak lepas kaitannya dengan siapa pelaku ekonomi atau penggerak UMKM tersebut dalam menjalankannya sehingga UMKM mampu bisa berkembang sedemikian rupa dan menjadi tolak ukur keberhasilan pada perekonomian masyarakat kelurahan Genteng kota Surabaya.

1. Dasar UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Dalam bukunya karangan (Tambunan.T, 2009, hal 17) menjelaskan bahwa di Indonesia UMKM diatur dalam UU RI No 20 tahun 2008 pasal 1 yang mana menyatakan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam mendefinisikan sebuah UMKM tentang nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang mana itu semua sudah terangkum jelas dalam undang-undang pasal 6. Menurut (Agustina T.S, 2015, hal 5) menjelaskan kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha mikro merupakan usaha yang memiliki aset paling banyak yaitu sebesar Rp.50 juta dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar sebanyak Rp.300 juta
- b. Usaha kecil dengan nominal aset antara Rp.50 juta sampai Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300 juta
- c. Usaha menengah merupakan perusahaan dengan nilai kekayaan antara lebih dari Rp.500 juta sampai Rp.1 Milyar.

Usaha mikro kecil dan menengah memegang peranan yang begitu penting dalam perekonomian di Indonesia. Masa depan pembangunan perekonomian Indonesia terletak pada kemampuan usaha mikro kecil dan menengah untuk berkembang sehingga setidaknya mampu mengatasi beban pemerintah. Jika dilihat dalam sudut pandang Produk Domestik Bruto (PDB) sektor usaha mikro kecil menengah setidaknya menyumbang 60% pada

perekonomian di Indonesia pada tahun 1999 yang mana dengan sebesar 42% kontribusi dari usaha kecil dan mikro sedangkan sekitar 18% berasal dari usaha menengah.

Pemberdayaan dan pergerakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Banyaknya krisis yang terjadi saat ini dalam hal pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian yang imbasnya berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin terpuruk dan banyak gulung tikar, sementara UMKM serta koperasi relatif masih dapat mempertahankan kegiatan usahanya.

Pada dasarnya, UMKM memiliki sasaran dan tujuan yang ingin dicapai kedepannya yaitu menjadikan UMKM yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya juang tinggi sehingga mampu berperan dalam distribusi dan produksi kebutuhan pokok masyarakat. UMKM merupakan sebuah usaha yang independen yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha pada sektor perekonomian. Jika dilihat dari prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar pada umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Menurut (Tambunan T, 2012, hal 11) mendefinisikan UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Oleh karena itu, agak sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

(Sartika T, dan Soedjono R 2004, hal 13) menjelaskan dalam bukunya yaitu Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab didalam perusahaan kecil
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang ada pada umumnya
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan

Seiring berkembangnya waktu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin banyak dan berkembang. Sehingga jenis usaha ini banyak diminati karena terbukti tetap

tahan meskipun terjadi berbagai macam krisis ekonomi. Oleh sebab itu sudah menjadi keharusan bagi pemerintah dan juga masyarakat untuk membantu dan mensupport penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam buku karangan (Resalawati.A, 2011, hal 31) menjelaskan beberapa klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*,

Merupakan sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, seperti pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*,

Merupakan sejenis usaha yang memiliki sifat pengrajin namun belum memiliki sifat wirausaha.

3. *Small Dynamic Enterprise*,

Merupakan sebuah usaha yang memiliki jiwa wirausaha dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. *Fast Moving Enterprise*,

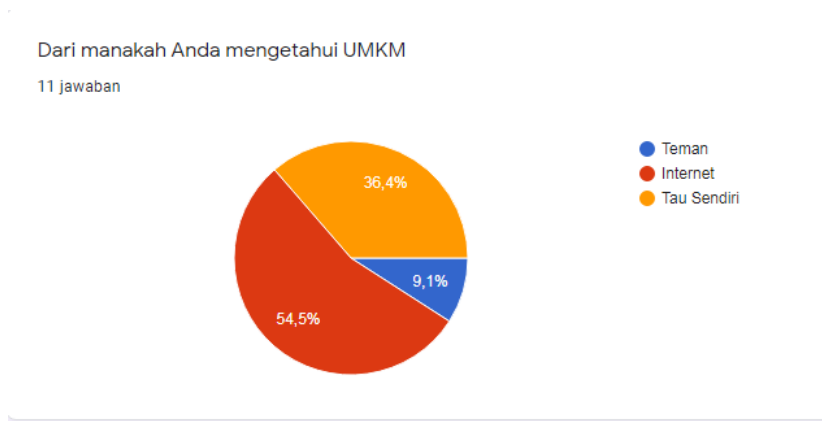
Merupakan sebuah usaha yang telah memiliki jiwa kewirausahaan tinggi sehingga ingin bertransformasi menjadi sebuah usaha yang besar.

2. **Animo pemuda dalam penggerak UMKM**

Telah kita singgung bersama di bagian pendahuluan bahwasanya Indonesia memiliki penduduk kurang lebih sekitar 271 juta jiwa dan menempatkan kelurahan Genteng kota Surabaya sebagai kota terpadat penduduk setelah ibu kota DKI Jakarta, dengan demikian maka bukan tidak mungkin jika penduduk sebanyak itu diikutsertakan dan membantu pemerintah dalam menangani masalah perekonomian yang ada. Belum lagi jikalau kita bisa memanfaatkan peran pemuda didalamnya.

Dengan semakin canggihnya zaman dan diikuti dengan banyaknya teknologi bermunculan dalam kegiatan manusia terutama dalam hal penggerak UMKM tentu hal itu akan menjadi penghambat jika golongan – golongan yang sudah tua ikut andil didalamnya, justru sebaliknya kita harus memaksimalkan potensi yang ada seperti ikut mengajak bahkan jikalau perlu semua yang menjalankan bisnis UMKM itu digerakkan oleh golongan pemuda. Karena adanya jiwa, semangat serta pola pikir yang baru yang mana nantinya akan sangat membantu para pemuda dalam menjalankan dan menggerakkan UMKM sehingga mampu mendongkrak sektor perekonomian masyarakat kelurahan Genteng dan disamping itu juga akan membuat pemuda selalu mengerjakan hal – hal yang positif kedepannya.

Berikut data yang diambil dari 11 responden dengan cara survey wawancara melalui Google Form yang mana menunjukkan pengetahuan para pemuda dari mana mengetahui UMKM.



Dapat dipahami dan diamati diatas menunjukkan bahwa bagaimana cara pemuda mengetahui seluk beluk tentang UMKM sehingga didapati sebesar 54.5 % pemuda mengetahuinya dari informasi yang berada diinternet, sebanyak 36.4% berasal dari diri sendiri dan sisanya sebesar 9.1% mengetahui UMKM berasal dari teman.

Data diatas tentu sudah menjadi hal yang sangat wajar mengingat sekarang perkembangan zaman sudah semakin canggih sehingga memungkinkan untuk generasi pemuda mendapatkan informasi apapun dengan mudah dan juga gampang. Begitu juga yang terjadi pada saat sekarang, kemudahan mengakses informasi terkait pengetahuan tentang UMKM seharusnya menjadi nilai lebih yang mana nantinya akan membantu pemuda dalam hal penggerak UMKM, karena disamping mendapat pengetahuan secara langsung dari orang yang lebih berpengalaman disamping itu juga pemuda harus menggali potensi yang ada dengan memanfaatkan adanya internet ini.

Melihat potensi wirausaha/UMKM yang begitu besar untuk dikembangkan lebih lanjut dipasaran bebas, karena dengan adanya sumber daya alam yang melimpah akan memudahkan para entrepreneur dalam mencari bahan baku serta didukung dengan sumber daya manusia yang sangat besar yang merupakan sebuah kelebihan dalam menjalankan usaha kecil. Oleh sebab itu perlu diamati beberapa hal terkait usaha kecil ini seperti sistem pengelolaan manajemen harus dilakukan dengan baik, dengan ada sistem manajemen yang baik akan mengurangi resiko kegagalan, dalam menjalankan sebuah usaha tentu kita harus terus mengupgrade diri dengan keilmuan yang matang sehingga bisa menunjang usaha

tersebut, mengefensiesikan sistem produksi dengan baik, serta terus melakukan inovasi dan terus menciptakan hal-hal baru dalam produknya sehingga usaha tersebut mampu tampil berbeda dengan usaha-usaha lainnya.

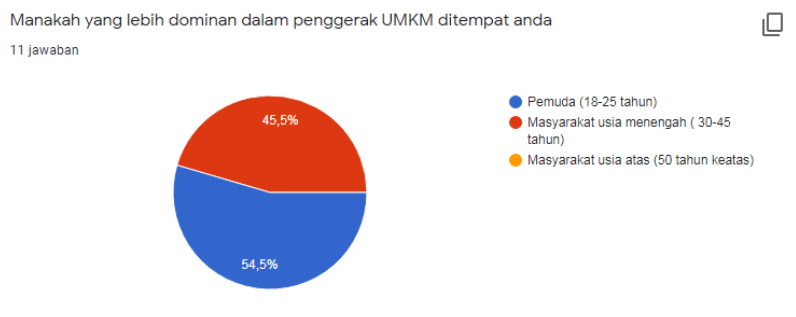
Dalam bukunya (Anoraga P, 2010, hal 32) dijelaskan bahwa sektor usaha mikro memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- a. Tidak terstrukturnya sebuah administrasi pembukuan dalam usaha tersebut sehingga menyebabkan sulit bagi kita untuk mengetahui kinerja usaha pada periode-periode tertentu
- b. Keuntungan atau laba yang didapat cenderung sedikit karena banyaknya pesaing usaha yang makin banyak
- c. Keterbatasan dalam mendapatkan modal untuk memulai awal usaha
- d. Minimnya pengalaman dalam hal mengelola perusahaan masih sangat terbatas sehingga mempengaruhi kinerja usaha
- e. Skala perekonomian yang didapat relatif kecil sehingga menyulitkan para entrepreneur mencapai titik efisiensi jangka panjang
- f. Minimnya kualitas dalam hal pemasaran tentu akan mempengaruhi sebuah usaha
- g. Tidak transparannya dalam sebuah administrasi yang dijalankan usaha tersebut sehingga menyebabkan ketidakmampuan dalam hal sumber dana dipasar modal.

Banyaknya karakteristik usaha mikro yang cenderung negatif tentu hal itu akan menyiratkan sebuah indikasi timbulnya permasalahan dalam jangka waktu kedepannya. Dengan demikian akan menyebabkan dan menimbulkan berbagai macam permasalahan internal terutama dalam bidang pendanaan yang mana akan susah ditemukan solusinya..

Dengan adanya beberapa karektiristik – karakteristik usaha mikro tadi yang cenderung dijelaskan negatif maka disinilah letak peran pemuda dibutuhkan keberadaannya. Bukan tidak mungkin karakteristik – karakteristik yang negatif tersebut diubahnya menjadi sebuah kekuatan dan nilai lebih untuk mendongkrak UMKM akan menjadi lebih baik lagi kedepannya sehingga mampu mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Data dibawah merupakan hasil survey dari 11 responden yang telah mengisi tentang seberapa jauh peran masyarakat dikelompok umur dalam penggerak UMKM

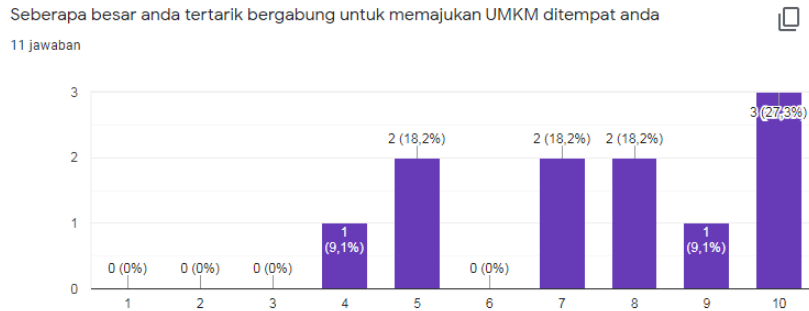


Data diatas menunjukkan bahwa sekitar 54.5% pemuda atau masyarakat dengan kisaran usia sekitar 18 sampai 25 menunjukkan minat yang sangat antusias dalam hal penggerak UMKM dan sisanya sekitar 45.5 % diisi dari golongan masyarakat kisaran usia 30 sampai 45 tahun.

Tentu hal ini akan menjadi hal yang sangat positif mengingat rata – rata umur masyarakat dalam penggerak UMKM ini diisi oleh kaum pemuda dengan kisaran umur 18 sampai 25 tahun. Memiliki peran yang begitu besar terhadap kemajuan UMKM tentu akan menjadi hal yang sangat positif kedepannya jika itu terus dikembangkan dan dimaksimalkan sebaik mungkin. Karenanya kaum pemuda dikelurahan Genteng sangat lah banyak dan bukan tidak menutup kemungkinan juga bakal nanti kedepannya akan muncul usaha – usaha baru yang mana nantinya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Dalam menjadi sebuah penggerak UMKM tidak lah harus semata – mata mengandalkan peran pemuda begitu saja, melainkan semua pihak yang terkait mulai dari masyarakat sekitarnya, ketua RT ataupun RW bahkan sampai peran pemerintah harus ikut andil dan turut membantu demi menjaga sebuah keharmonisan satu visi misi dan tujuan dalam rangka menggerakkan kembali peran UMKM. Semua komponen didalamnya harus saling bekerja sama yang mana dimulai dari masyarakat sekitarnya dengan cara ikut membantu dan ikut meramaikan dan membeli barang dagangan UMKM tersebut. Peran ketua RT maupun RW juga sangat bermanfaat yang mana ikut memberikan lahan khusus guna pemuda ini berjualan dan usaha sesuai dengan tempatnya dan tak turut ketinggalan peran pemerintah yang harus gencar memberikan bantuan baik itu dalam hal modal ataupun pelatihan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pemuda tersebut.

Data dibawah diperoleh dari 11 responden yang mana menunjukkan keminatan kaum pemuda terhadap UMKM.



Data diatas menunjukkan betapa minat yang sangat besar dari kaum pemuda dalam penggerak UMKM. Hal ini bisa ditunjukkan dengan rata – rata para pemuda mengisi skala 7 sampai 10 dalam ketertarikannya terhadap UMKM. Skala 10 diisi oleh sebanyak 3 responden dengan prosentase sebesar 27.3% , skala 9 diisi sebanyak 1 responden dengan prosentase 9.1 % , skala 8 diisi oleh 2 responden dengan prosentase sebesar 18.2% dan skala 7 diisi oleh 2 responden dengan prosentase yang sama besarnya yaitu sebesar 18.2% dan yang tidak tertarik dengan UMKM yaitu sebanyak 3 responden mengisi dengan skala 3 dan 5.

Tentu menjadi hal sangat positif mengingat animo pemuda kelurahan Genteng ini yang sangat begitu besar terhadap UMKM dan perlu sangat diapresiasi. Karena keberadaan para pemuda ini tentu akan sangat bermanfaat jika bisa dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga mampu menjadi penggerak UMKM yang mana nantinya akan mempengaruhi perekonomian masyarakat.

Disamping kita menggerakkan UMKM dengan lancar dan baik ada kalanya juga kita sebagai generasi muda menerapkan sebuah usaha tentu harus berlandaskan dan berkonsep islam yang mana kita sendiri sebagai umat islam tentu harus menegakkannya. Menurut (Jusmalina, 2008 hal 188) konsep berwirausaha dalam perspektif islam adalah untuk menjalankan sebuah usaha harus didasarkan dengan konsep halal dan yang baik yaitu halal baik dalam perolehan maupun dalam penggunaan yang mana meliputi perniagaan yang dilakukan dengan cara berlaku adil, menghindari keraguan serta harus diridhai Allah.

a. Sama-sama ridha dan tanpa keterpaksaan

Dalam menjalankan perniagaan tentu keduanya tidak boleh ada unsur keterpaksaan, karenanya kedua orang tersebut harus sama-sama ridha dan juga ikhlas.

b. 'Adil

Keadilan sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan perniagaan agar tidak merugikan satu pihak manapun atau bisa mengeksploitasi orang lain sehingga orang tersebut merasa dirugikan. 'Adil menurut islam didefinisikan dengan tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. Penerapan ekonomi dari nilai ini adalah yaitu pelaku ekonomi tidak sama sekali diperbolehkan untuk merugikan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi semata.

c. Menghindari unsur Gharar

Jika dilihat dari sudut pandang islam dalam perniagaan tentu tidak boleh melakukan penipuan, bahkan sekedar membawa kondisi kepada keraguan yang bisa menyesatkan (gharar). Hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan pada sistem mekanisme pasar atau bisa saja salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang jelas sehingga menyebabkan keraguan pada orang tersebut.

d. Menghindari resiko berlebihan

Didalam bumi dan isinya merupakan nikmat dan karunia yang diberikan oleh allah yang harus kita syukuri bersama. Dengan kata lain dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada di bumi ini harus dilakukan sebaik mungkin dan tidak boleh berlebihan sehingga tidak mengganggu keberadaaan suatu hari nanti. Dengan demikian kita sudah menghindari resiko dengan adanya pemanfaatan SDA dengan seefisien mungkin.

e. Prinsip Ta'awun

Dalam sudut pandang islam ta'awun berarti saling tolong menolong antar sesama manusia. Dengan demikian dalam menjalankan sebuah usaha tentu kita harus peka terhadap situasi yang terjadi bilamana ada seseorang yang kesusahan dalam berwirausaha maka tentu kita harus menolongnya.

f. Usaha dengan barang yang halal

Islam menjelaskan dengan jelas dan juga tegas bahwa mengharuskan setiap umat manusia haru terus berusaha dengan cara bekerja dan usaha. Dengan kata lain usaha atau kerja yang dilakukan manusia tersebut harus diperoleh dan dikerjakan tentu dengan cara yang baik seta juga halal, baik itu barang yang diperdagangkan ataupun lain sebagainya. (Natadiwiry M, 2007, hal 7)

3. Peran UMKM terhadap Perekonomian Masyarakat Kelurahan Genteng

Peranan UMKM terhadap Perekonomian tentu pastinya ada, baik itu UMKM yang berskala kecil maupun sudah menjadi skala besar sehingga mampu mempengaruhi perekonomian sebuah negara. Karenanya sebuah negara atau tempat dimanapun itu berada pasti akan sangat merasa terbantu oleh kehadiran UMKM ini, sebab Negara tidaklah akan mampu memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri. Keberadaan UMKM sangatlah berperan signifikan dalam perekonomian masyarakat terkhusus di kelurahan Genteng kota Surabaya.

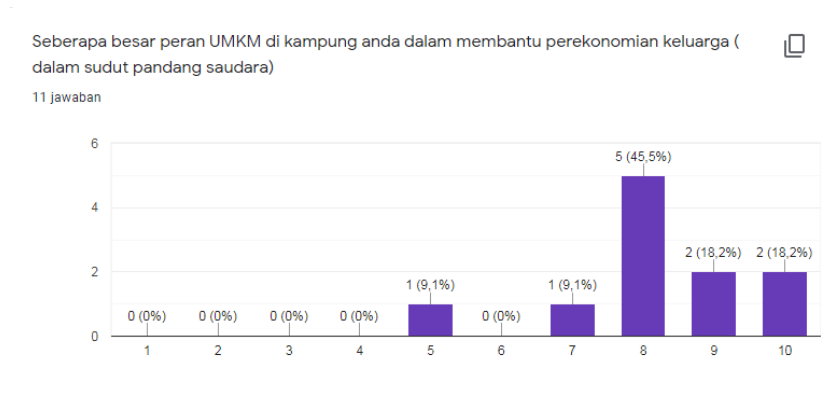
Dapat kita ketahui bersama bahwasannya peran industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan sebuah ujung tombak dan sangat berperan aktif dalam suatu pertumbuhan dan pembangunan suatu Negara baik itu Negara Maju ataupun Negara yang sedang berkembang. Karenanya keberadaan UMKM tentu sangat memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sebuah Negara ataupun daerah karena selain keberadaannya membuka dan menyerap tenaga kerja baru disamping itu juga keberadaan UMKM sangat berguna untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi penduduk dengan cara mendorong Produk Domestik Bruto dalam satu periode.

Menurut (Ma'ruf A. Dan Wihastuti L, 2008, hal 44-45) menyebutkan pengertian pertumbuhan ekonomi adalah suatu upaya meningkatkan kapasitas produksi dengan maksud mencapai penambahan output dan itu semua diukur dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu wilayah yang dihitung dalam satu periode tertentu. Dengan kata lain bisa didefinisikan bahwa suatu pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi dan bergantung pada sektor produksi yang dihitung menggunakan PDB dalam satu periode.

Letak dan situasi tempat di kelurahan Genteng bertempat di pusat kota Surabaya yang mana secara tidak langsung merupakan tempat yang sangat strategis buat berjualan atau usaha kecil – kecilan. Dengan kata lain banyak saya lihat masyarakat baik itu dari rentan usia 18 sampai 30 tahun memilih untuk berwirausaha dengan tujuan mencukupi kebutuhan atau pendapatan hidup. Jika pada mulanya setiap orang memiliki pendapatan bulanan yang sudah pasti maka dengan adanya mereka melakukan usaha wirausaha maka bukan tidak mungkin mereka akan mendapatkan pendapatan berlebih guna menambah biaya hidup mereka sehari-hari.

Kesempatan membuka lapangan usaha atau UMKM disamping bermanfaat bagi diri sendiri maka akan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi perekonomian masyarakat disekitarnya jika semua yang saling terkait ikut gotong royong untuk saling membantu dan melengkapi. Di kelurahan Genteng tersebut ketua RT memberikan fasilitas berupa lapangan untuk semata mata agar kegiatan usaha mereka berpusat pada lokasi tersebut, maka secara tidak langsung ini merupakan sebuah hal yang positif karena roda perekonomian bisa berputar secara terus menerus. Belum lagi jika ada event – event tertentu yang diadakan didepan jalan raya yang mana akan membuat situasi makin rame dan bersemarak sehingga banyak masyarakat dari daerah lain akan ikut berdatangan dan secara tidak langsung mereka akan melihat banyak jajanan – jajanan yang mengenakan. dengan begitu kampung kelurahan Genteng akan dikenal banyak masyarakat dan juga membuat dagangan mereka akan laris manis karena banyak yang membelinya. Data dibawah akan menunjukkan seberapa besar peran UMKM terhadap Masyarakat kelurahan Genteng.

Berikut data yang diambil dari 11 responden dengan cara survey wawancara melalui Google Form yang mana menunjukkan peran UMKM dalam Perekonomian Masyarakat kelurahan Genteng kota Surabaya.



Data diatas merupakan data yang diambil dari 11 responden yang mengisi pertanyaan melalui Google Form yang mana menunjukkan seberapa besar peran UMKM terhadap perekonomian keluarga dengan rentan skala 1 sampai 10. Sehingga data yang tertera diatas bukanlah sebuah data yang mustahil karena bisa kita lihat secara bersama menunjukkan sebanyak 9 orang menjawab dengan skala nilai antara 8 sampai 10, dengan catatan nilai skala 8 menjadi yang paling tertinggi dengan nilai prosentase sebesar 45.5%, dan sisa 2

orang lagi menjawab dengan prosentase nilai skala 5 dan 7 yang masing masing dengan besar prosentase 9.1%.

Dengan melihat sebegitu banyak nya potensi yang terjadi di masyarakat kelurahan Genteng tersebut menunjukkan keberadaan UMKM sangat berpengaruh sekali terhadap masyarakat maka dengan demikian keberadaan UMKM haruslah dijaga dan dilestarikan keberadaannya agar masih bisa terus membantuk perekonomian masyarakat.

Menurut (Husada Putra A, 2016, hal 6) menjelaskan sebuah pendekatan untuk melaksanakan pembangunan koperasi dan UMKM di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Strategi Pengembangan Lingkungan Usaha yang kondusif

Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing KUMKM dengan menciptakan peluang usaha seluas-luasnya, menghilangkan biaya ekonomi tinggi, serta menjamin adanya mekanisme pasar yang sehat. Kebijakan pengembangan lingkungan usaha yang kondusif bagi KUMKM tidak berada pada suatu instansi tertentu, dan cenderung tersebar pada berbagai instansi. Untuk itu, koordinasi dan sinergi dengan instansi lain untuk menumbuhkan iklim berusaha yang kondusif bagi KUMKM. Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif memerlukan adanya landasan peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan pelaksanaannya yang memungkinkan KUMKM bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Pengembangan lingkungan usaha memiliki spektrum yang luas dan mencakup kebijakan politik, hukum, ekonomi makro, kerjasama internasional dan kebijakan pembangunan daerah, serta perijinan yang bersifat lintas sektoral. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong lahirnya kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang pro pengembangan KUMKM.

2. Strategi Peningkatan Akses KUMKM Ke Sumberdaya Produktif

Rendahnya produktivitas KUMKM salah satunya akibat keterbatasan aksesnya kepada sumberdaya produktif. Untuk itu, pemerintah dan dunia usaha perlu mengembangkan sistem insentif agar KUMKM dapat mengakses sumberdaya produktif untuk mengembangkan usaha dan daya saingnya. Peningkatan akses KUMKM ke sumberdaya produktif ini bersifat selektif yang berfungsi sebagai stimulan bagi KUMKM dan berperan mengoreksi ketidaksempurnaan pasar sumberdaya produktif yang dihadapi KUMKM. Kementerian Koperasi dan UKM akan mendorong upaya

peningkatan akses KUMKM kepada sumber-sumber permodalan dan pembiayaan, peningkatan akses pasar, akses teknologi, dan akses informasi. Mempertimbangkan jumlah KUMKM yang sangat besar, maka demi efektivitas pembangunan KUMKM ditempuh melalui pendekatan sentra disertai pengembangan pasar BDS (jasa pengembangan bisnis) di Indonesia.

3. Strategi Pengembangan Kewirausahaan Dan Daya Saing KUMKM

Kewirausahaan merupakan faktor produksi terpenting untuk meningkatkan daya saing KUMKM dan daya saing ekonomi nasional. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan tambahan 6 juta unit usaha baru yang berbasis pengetahuan dan teknologi selama 5 tahun mendatang. Untuk itu, Kementerian Koperasi dan UKM mengembangkan kebijakan untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem insentif untuk peningkatan kewirausahaan KUMKM yang ada, pengembangan KUMKM yang berkeunggulan kompetitif dan berbasis teknologi, serta pengembangan kebijakan produksi bersih.

4. Strategi Pemantapan Kelembagaan Koperasi Sesuai Dengan Jati Diri Koperasi

Pengembangan koperasi sejati merupakan salah satu wahana untuk mewujudkan adanya demokrasi ekonomi di Indonesia. Untuk itu, perlu upaya menyempurnakan Undang-undang Perkoperasian, meningkatkan administrasi dan pengawasan badan hukum koperasi, pemberian bimbingan dan kemudahan kepada koperasi, serta perlindungan kepada koperasi, dan perlindungan publik terhadap kegiatan usaha koperasi. Strategi pemantapan kelembagaan koperasi diharapkan dapat menumbuh-kembangkan 70.000 unit koperasi yang berkualitas dan mampu memberikan layanan yang baik kepada lebih dari 20 juta anggotanya.

5. Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro Usaha mikro

merupakan kelompok pelaku usaha terbesar (96%) di Indonesia dengan karakteristik berpenghasilan rendah, bergerak di sektor informal dan sebagian besar termasuk dalam kelompok keluarga miskin. Bahkan dalam sebagian besar kasus, kelompok usaha mikro masih belum dapat memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup, seperti: gizi, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Usaha mikro memiliki karakteristik yang unik dan belum tentu dapat diberdayakan secara optimal melalui mekanisme pasar yang bersaing. Untuk itu, pemberdayaan usaha mikro perlu ditetapkan sebagai suatu strategi yang tersendiri,

melalui pengembangan pranata kelembagaan usaha mikro, pengembangan lembaga keuangan mikro dan mendorong pengembangan industri pedesaan.

6. Strategi Peningkatan Sinergi Dan Partisipasi Masyarakat

Sinergi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan perwujudan dari demokrasi ekonomi. Strategi peningkatan sinergi dan partisipasi masyarakat dilakukan dengan pendekatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan KUMKM; peningkatan kapasitas institusi pembina dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan KUMKM; dan pengembangan kelembagaan UMKM.

Dengan mengetahui adanya penjelasan diatas diharapkan UMKM bisa semakin maju dan berkembang dan bisa bersaing dengan para kompetitor – kompetitor besar lainnya yang mana jika keberadaan UMKM terus terjaga maka secara tidak langsung juga akan mempengaruhi perekonomian Masyarakat kelurahan Genteng kota Surabaya.

D. KESIMPULAN

Suatu sistem Pemerintahan dan jalannya perekonomian tidak hanya serta merta diurus oleh pemerintah saja, melainkan variabel – variabel yang saling terkait didalamnya juga harus kerap ikut membantu. Karenanya Pemerintah tidak akan bisa memenuhi segala sesuatu kebutuhan yang akan dibutuhkan, sehingga harus ada andil masyarakat dalam sistem pemerintahan tersebut. Oleh pada saat itu peran serta kontribusi UMKM terlihat jelas dalam melakukan stabilitas ekonomi serta pembukaan lapangan usaha. Peran serta kontribusi UMKM dirasa cukup efektif dan signifikan dalam menggerakkan kembali roda perekonomian.

Dengan menempatkan kota Surabaya khususnya di daerah kelurahan Genteng sebagai kota terpadat penduduk kedua setelah ibu kota DKI Jakarta maka bukan tidak mungkin peran masyarakat khususnya peran pemuda ikut andil dalam penggerak UMKM. Peran pemuda dirasa sangat efektif keberadaannya dalam penggerak UMKM karena dengan adanya semangat, daya juang serta pola pemikiran yang tidak gaptek teknologi akan sangat membantu dalam membuat Usaha – usaha baru bermunculan kedepannya. Keberadaan UMKM khususnya di kelurahan Genteng kota Surabaya sangat berkontribusi sangat signifikan yang mana setidaknya dengan adanya UMKM bisa membantu perekonomian masyarakat daerah setempat sehingga menggerakkan roda perekonomian.

Tentu usaha untuk menggerakkan UMKM tidak serta merta harus dari peran pemuda saja, melainkan tentu harus ada suport pihak – pihak terkait khususnya pemerintah. Jika pemerintah ikut andil didalamnya seperti dalam hal memberikan penanaman modal serta memberikan fasilitas khusus seperti pelatihan, maka bukan tidak mungkin akan muncul sebuah usaha – usaha baru yang mana nantinya akan mendongkrak sebuah perekonomian. Karenanya masalah utama dalam mendirikan suatu usaha selalu terbentur dalam hal modal. Oleh sebab itu pemerintah haruslah peka dan juga harus melihat situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, sebab jika semua yang saling terkait baik itu peran pemuda, masyarakat dan juga pemerintah saling bekerja sama maka bukan tidak mungkin dalam peran UMKM kedepannya akan lebih efektif didaerah kelurahan Genteng tersebut sehingga bisa membantu perekonomian masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

Agustina. T.S, (2015), *Kewirausahaan Teori Dan Penerapan Pada Wirausahaan Dan UKM Di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media,

Anoraga.P, (2010), *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, Yogyakarta: PT. Dwi Chandra Wacana

Jusmaliani, (2008), *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara

Natadiwiryra. M, (2007), *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Granada Press

Sartika.T & Soejoedono.R, (2004), *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Tambunan. T, (2012), *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta : LP3ES

Tambunan.T, (2009), *UMKM di Indonesia*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Jurnal Ilmiah

Husada Putra. A, (2016), Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 5(2)

Ma'ruf A. Dan Wihastuti L, (2008), Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 9, Nomor 1,

Medriyansah, (2017), Peran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ekonomi*

Disertasi, Tesis, Skripsi

Resalawati. A, (2011), *Pengaruh perkembangan usaha kecil menengah terhadap pertumbuhan ekonomi pada sektor UKM Indonesia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta

Wawancara

Ridlo Arabbani, *Wawancara dan Survey Pribadi*, Pendapatan Perekonomian Masyarakat serta peran Pemuda dalam Penggerak UMKM, 29 Juni 2021

Pemuda setempat, *Survey dan pengisian Kuisioner Google Form*, Peran dan produktivitas pemuda dalam penggerak UMKM, 28 Juni – 3 Juli 2021



12

NIKO HENDRAWAN

*Urgensi Akses Jalan Dalam
Peningkatan Pendapatan Petani
Karet Di Jorong Rurapatontang
Nagari Parik*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



URGENSI AKSES JALAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI KARET DI JORONG RURAPATONTANG NAGARI PARIK

Niko Hendrawan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya akses infrastruktur jalan dalam peningkatan pendapatan petani di kejurongan Rurapatontang Nagari Parik. Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi infrastruktur jalan dapat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu daerah, infrastruktur jalan yang baik dan memadai akan mengurangi biaya transaksi serta distribusi barang dan jasa, lama waktu dan bahan bakar yang digunakan dengan alat transportasi akan semakin hemat sehingga pengeluaran dibidang transportasi akan semakin sedikit. Apabila akses jalan bagus maka biaya transportasi akan semakin hemat sehingga pengeluaran serta penjualan barang-barang pertanian di suatu daerah akan lebih efisien. Seperti halnya di Jorong Rurapatontang, Nagari Parik yang kondisi jalannya dalam keadaan memprihatinkan dimana jalan menuju kejurongan ini sebagian besar masih jalan tanah liat dan sebagian lagi rabat beton (semen cor). Beda halnya dengan daerah lain yang lebih dekat dengan daerah perkotaan yang jalannya bagus. Jalan menuju Jorong Rurapatontang Nagari Parik belum dapat dilalui kendaraan berroda empat, transportasi yang bisa masuk ke kejurongan ini hanya kendaraan roda dua, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam penjualan barang hasil pertanian. Dengan keadaan jalan yang kurang memadai, penjualan barang pertanian masyarakat sulit menjual langsung ke daerah perkotaan. Sehingga dalam hal penjualan harus dengan perantara agen ke agen, yang mengakibatkan harga barang pertanian semakin murah apabila di bandingkan dengan daerah yang dekat dengan perkotaan. Hal tersebut diakibatkan oleh akses jalan yang sangat buruk yang mengakibatkan waktu dan baya bahan bakar transportasi semakin besar. Permasalahan tersebut memicu harga barang pertanian di Jorong Rurapatontang, Nagari Parik sangat rendah apabila di bandingkan dengan daerah perkotaan.

Kata kunci: *Urgensi Akses Jalan, Pendapatan Petani Karet, Jorong Rurapatontang.*

A. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi

mencapai yang serba lebih baik. pembangunan infrastruktur terutama jalan akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lain. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial. Perkembangan daerah perkotaan tentunya lebih pesat apabila dibandingkan dengan daerah pedesaan. Pasaman Barat telah mengalami perkembangan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman.

Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Potensi terbesar Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, karet, salak, dan kopi. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Sebagai kabupaten hasil pemekaran, tentunya Kabupaten Pasaman Barat masih ada beberapa hal yang masih tertinggal apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang sudah lama berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang ekonomi dan infrastruktur.

Membahas mengenai ekonomi Sumber Daya Alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan di bagian timur Kabupaten Pasaman Barat, dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai sepanjang lebih kurang 152 km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, mengandung potensi yang sangat menjanjikan seperti potensi ekonomi bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan serta pariwisata dan potensi lainnya.

Selain hal tersebut, pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi peoses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. proses pembangunan memiliki tiga tujuan yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktut sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain

untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lain. Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggandaan dampak ekonomi maupun sosial.

Membahas mengenai infrastruktur di Kabupaten Pasaman Barat, tentunya masih ada beberapa daerah yang masih dalam kategori daerah tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa daerah (kejorongan) yang akses jalannya masih memperlihatkan. Salah satu diantaranya adalah Jorong Rurapatontang.

Jorong Rurapatontang merupakan daerah yang terletak di Kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Potensi yang terdapat dikejorongan tersebut berupa perkebunan, diantaranya adalah kebun karet, kayu manis, nilam, kacang goreng, cabai, sawit dan padi ladang. Diantara beberapa macam perkebunan yang ada di Jorong Rura Patonntang, kebun karet merupakan perkebunan yang paling besar kapasitasnya apabila dibandingkan dengan perkebunan yang lain.

Kebun karet umumnya dimiliki oleh setiap rumah tangga yang barada di kejorongan tersebut. Jadi, tidak heran apabila mata pencaharian utama masyarakat di kejorongan tersebut umumnya berasal dari hasil kebun karet. Walaupun ada beberapa keluarga yang tidak mempunyai kebun karet, keluarga tersebut tidak akan kehilangan atau kurang akan mata pencaharian walau hanya sebatas mencukupi biaya kehidupan sehari-harinya. Karena, penduduk yang mempunyai kebun kater yang luas akan memberikan kebunya kepada orang yang tidak mempunyai kebun karet dengan sistim bagi hasil. Dari hasil menyadap karet yang dijual dalam jangka sekali seminggu, akan dibagi hasil, sebagian untuk penyadap karet dan sebagian untuk pemilik kebun karet.

Mengenai infrastruktur, kejorongan ini merupakan salah satu daerah yang cukup memprihatinkan. Karena, jalan menuju kejorongan ini tidak sama halnya dengan daerah-daerah yang dekat dengan pusat kota. Jalan menuju kejorongan ini sebagian besar masih tanah liat dan sebagian lagi rabat beton (semen cor). Hal tersebut mengakibatkan harga barang hasil perkebunan sangat murah apabila dibanding dengan daerah yang dekat dengan pusat kota. Selain itu, harga bahan pangan juga cukup mahal apabila dibanding dengan daerah yang dekat dengan pusat kota. Hal tersebut diakibatkan oleh infrastruktur yang sangat memprihatinkan.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif analisis yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap bagaimana bentuk keadaan suatu daerah yaitu Jorong Rurapatontang, Nagari Parik dengan kondisi infrastruktur *jalan kurang memadai* yang sangat berpengaruh negatif terhadap pendapatan petani di daerah tersebut. Data yang dikumpulkan melalui penelitian serta wawancara langsung oleh penulis yang terjun langsung ke lapangan sehingga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana kondisi infrastruktur jalan serta keadaan perekonomian di kejurongan tersebut.

C. Pembahasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelegkap dan perlengkapannya yang ada di bagian lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau udara, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perkembangan antar wilayah yang pemerataan hasil pembangunan, serta pemertapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional (Mulyadi, 2016, 15).

Jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang memiliki layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan diwilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah (Mulyadi, 2016, 15).

1. Pentingnya Infrastruktur Jalan

Infrastruktur jalan merupakan sarana untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tapi juga di daerah pedesaan. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat diciptakan lapangan kerja yang menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari zona pasar ke zona pasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa di beli oleh sebagian besar rakyat Indonesia

yang penghasilannya masih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar-pasar, dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralkan harga-harga barang dan jasa antar daerah (*antar kota dan kampung-kampung*).

Ada empat alasan pokok yang dapat dikemukakan tentang pentingnya pembangunan infrastruktur jalan. *Pertama*, pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah kearah terciptanya rakyat dan Negara adil dan makmur. *Kedua*, pembangunan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi iklim investasi. Pertumbuhan capital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kapet, kawasan industry, pelabuhan, pasar-pasar, dan perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru dibidang sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar. *Ketiga*, infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-ekonomi rakyat suatu daerah dengan daerah lainnya. *Keempat*, pembangunan infrastruktur akan membuka isolasi fisik dan non fisik disekeliling wilayah (Taryono dan Ekwarso, 2013:106).

Dalam rangka politik integrasi bangsa dibidang sosial dan ekonomi tantangan bagi pemerintah ialah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik daerah di Indonesia. Sebab isolasi fisik akan membawa dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Karena isolasi wilayah sehingga hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan sulit dipasarkan ke kota terdekat sehingga praktis hanya di konsumsi anggota keluarga. Akibatnya, tingkat pendapatan tetap rendah kemudian mereka di klaim sebagai masyarakat miskin.

Pengertian Jalan

Menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Proyek Pembangunan Jalan

Proyek pembangunan jalan di berbagai daerah terus dikembangkan. Dalam pelaksanaannya harus melewati perencanaan yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan transportasi jalan raya pada daerah tersebut, terutama keserasian antara beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan dengan kemampuan daya dukung jalan, jaringan jalan di pusat pertumbuhan, pusat produksi dan yang menghubungkan pusat produksi dengan daerah pemasaran.

Konstruksi Jalan

Konstruksi jalan raya adalah merupakan suatu konstruksi yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memikul beban lalu lintas (kendaraan) yang melintas di atasnya tanpa mengalami perubahan struktur pada permukaan jalan tersebut. Dengan berkembangnya angkutan darat, terutama kendaraan bermotor yang meliputi jenis ukuran dan jumlah maka masalah kelancaran arus lalu lintas, keamanan, kenyamanan dan daya dukung dari perkerasan jalan harus menjadi perhatian.

Jalan merupakan prasarana penghubung darat yang menghubungkan antara dua lokasi atau lebih. Jalan terdiri dari beberapa bagian dengan tujuan dan fungsi tertentu yang terbentuk dalam suatu konstruksi. Konstruksi jalan pada umumnya terdiri dari lapis bahan yang berbeda-beda, menurut sifat yang digunakan. Secara garis besar ada tiga macam konstruksi perkerasan yaitu perkerasan lentur, kaku dan komposit (Mulyadi, 2016, 15).

Pembangunan Jalan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan secara umum bertujuan untuk menunjang kelancaran mobilisasi manusia, barang dan jasa. Pembangunan sektor transportasi di suatu daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi guna menjangkau daerah pedesaan/terpencil, khususnya yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan daerah pemasaran, dan diarahkan ke seluruh wilayah.

Keberadaan prasarana jalan ditengah – tengah kehidupan masyarakat mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ditinjau dari hubungan antar wilayah administrasi, fungsi jalan dapat dibedakan menjadi:

1. Jalan yang mengubungkan antar Provinsi dan wilayah-wilayah strategis di klasifikasikan dalam Jalan Negara.

2. Jalan yang menghubungkan antar Kabupaten dan Jalan strategis di tingkat Provinsi diklasifikasikan kedalam Jalan Provinsi.
3. Jalan yang menghubungkan antar Kecamatan dan jalan strategis di tingkat Kabupaten diklasifikasikan kedalam Jalan Kabupaten.
4. Jalan yang menghubungkan antar desa.
5. Jalan Desa dan Jalan lingkungan.

Penanganan jalan kabupaten, jalan poros desa, jalan desa dan jalan lingkungan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan penduduk desa secara swadaya. Jalan yang ditangani oleh pemerintah Kabupaten adalah jalan yang sudah ditingkatkan menjadi jalan aspal, dan jalan yang sudah ditingkatkan menjadi jalan batu dan jalan krikil pemeliharaannya dilakukan oleh masyarakat di masing-masing desa yang di lalui. Sedangkan untuk jalan tanah sepenuhnya menjadi tugas masyarakat untuk menanganinya, kecuali dalam hal tertentu yang memang masyarakat tidak mampu menanganinya, misalnya penanganan jalan yang putus akibat bencana alam, pembangunan pengaman badan jalan dan lainnya.

Secara teknis pembangunan prasarana jalan dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Pembangunan jalan baru
2. Peningkatan jalan
3. Pemeliharaan jalan

Klasifikasi ini dilakukan berdasarkan kondisi awal jalan yang akan dibangun. Peningkatan jalan dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan memperbaiki kondisi jalan. Peningkatan jalan dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas yang tajam, yang diperoleh dari hasil survey yang sungguh-sungguh. Pemeliharaan dilaksanakan untuk mempertahankan fungsi dan kondisi jalan yang telah dicapai dalam pembangunan sebelumnya, sehingga masyarakat dapat tetap memanfaatkan hasil pembangunan secara maksimal. Pemeliharaan jalan dapat dibedakan menjadi dua kelompok berdasarkan tingkat kerusakan yaitu: pemeliharaan berkala untuk kerusakan diatas 15% dan pemeliharaan rutin untuk kerusakan dibawah 15% (0-15%).

Program pembangua jalan disusun berdasarkan sumber dana yang ada dan setiap sumber dana mempunyai spesifikasi tujuan yang berbeda, secara garis besar program-

program pembangunan yang didalamnya mengandung sektor pembangunan jalan di suatu daerah dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Program pembangunan Jalan dan Jembatan (dana daerah lain)
2. Program Perhubungan dan Penanganan Jalan Daerah (DAU)
3. Program Perhubungan dan Penanganan Jalan Kabupaten (dana khusus)
4. Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT)
5. Program Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT)
6. Program Pengembangan Daerah Terpadu (PPWT)
7. Program-program lain sebagainya.

Pembangunan infrastruktur jalan desa dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, karena infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan vital yang harus dipenuhi. Jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang memadai tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Pendapatan Dalam Ekonomi

Pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan merupakan suatu unsur yang harus dilakukan dalam melakukan suatu usaha karena dalam melakukan suatu usaha ingin mengetahui nilai atau jumlah pendapatan yang diperoleh selama melakukan usaha.

Berdasarkan ilmu ekonomi, pendapatan adalah hasil dari kegiatan penjualan barang atau jasa disebuah perusahaan dalam dalam suatu periode tertentu. Selain hasil dari penjualan, pendapatan suatu perusahaan bisa juga berasal dari bunga dari aktiva perusahaan yang digunakan oleh pihak lain, dividen, dan royalti. Semuanya dijumlahkan dan dicatat dalam pembukuan perusahaan.

Selain itu, pendapatan juga bisa didefinisikan sebagai biaya yang dibebankan kepada pelanggan atau konsumen atas harga barang atau jasa. Pendapatan merupakan faktor penting dalam perusahaan karena merupakan tolak ukur maju atau mundurnya suatu perusahaan. Semakin besar pendapatan, perusahaan tersebut dinilai semakin maju, begitu pula sebaliknya. Apabila pendapatan semakin kecil, maka suatu perusahaan dinilai semakin menurun.

Pendapatan merupakan jumlah barang dan jasa yang memenuhi tingkat hidup masyarakat, dimana dengan adanya pendapatan yang dimiliki oleh setiap jiwa disebut dengan pendapatan perkapita menjadi tolak ukur kemajuan atau perkembangan ekonomi. Pendapatan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan suatu usaha untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kondisi seseorang dapat diukur dengan menggunakan konsep pendapatan yang menunjukkan jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (Purwanti dan Rohayati, 2014:116).

3. Urgensi Akses Jalan Dalam Peningkatan Pendapatan

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan.

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah. Dengan meningkatnya kebutuhan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi telah mengantar pemerintah Indonesia untuk menyediakan kerangka kerja yang lebih baik untuk menarik investasi dan partisipasi swasta di skala yang terukur dalam proyek infrastruktur.

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran yang nyata.

Pembangunan infrastruktur jalan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur jalan sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang serta sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lainnya.

Sifat dan jenis infrastruktur yang diperlukan suatu daerah dipengaruhi oleh karakteristik alam dan pola persebaran penduduk yang khas pada daerah tersebut. Infrastruktur bukan hanya diperlukan untuk meningkatkan daya saing demi mendorong lebih banyak investasi, produksi dan perdagangan, tetapi juga untuk mempercepat pemerataan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat diturunkan.

Selain itu, keberadaan infrastruktur juga sangat diperlukan agar proses pembangunan sumber daya manusia disuatu daerah dapat berjalan secara baik. proses pembangunan yang disertai dengan perkembangan teknologi yang cepat mengharuskan adanya pendekatan yang benar-benar tepat dalalam program pengembangan sumber daya manusia. Kondisi infrastruktur jalan dapat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu tempat, infrastruktur yang baik dan memadai akan mengurangi biaya transaksi dan distribusi barang dan jasa, lama waktu dan bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat, sehingga kegiatan transaksi dan distribusi terlaksana dengan se efisien mungkin (Maqin, 2011: 16).

Pemberdayaan sumber daya untuk membangun infrastruktur akan memicu proses ekonomi sehingga menimbulkan penggantian dampak ekonomi maupun sosial. Mengingat pentingnya infrastruktur di satu sisi dan ketertinggalan infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan Negara-negara lain di sisi yang lain, maka di era Presiden Joko Widodo program pembangunan infrastruktur di genjot secara besar-besaran. Namun, pada kenyataannya di Kabupaten Pasaman Barat masih ada beberapa daerah yang kondisi infrastrukturnya masih dalam keadaan memprihatinkan, terutama di bidang infrastruktur jalan.

Pasaman barat merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pasaman Barat sendiri hasil pemekaran dari Kabupaten Pasaman. membahas mengenai infrastruktur terutama di bidang jalan. Pasaman Barat sebagai Kabupaten hasil pemekaran, tentunya ada beberapa daerah yang terkategori daerah tertinggal. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa daerah atau kejurongan masih dalam kondisi infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Menyangkut bidang infrastruktur, tentunya akan berpengaruh penting dengan kondisi perekonomian.

Membahas soal perekonomian, potensi terbesar di Pasaman Barat terletak pada sektor perkebunan kelapa sawit, jeruk, karet, salak, kopi. Selain itu pasaman barat juga mempunyai perairan yang cukup luas sebagai asset untuk mata pencaharian serta dibidang industri lainnya.

Kabupaten Psaman Barat merupakan salah satu dari 3 (tiga) kabupaten pemekaran di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan dan Pasaman Barat. Sebagai Kabupaten hasil pemekaran, tentunya Pasaman Barat masih ada beberapa hal yang dalam taraf tertinggal apabila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang sudah lama berdiri di Provinsi Sumatera Barat. Diantaranya adalah dalam bisang infrastruktur dan ekonomi.

Membahas mengenai ekonomi sumber daya alam di daerah dataran tinggi dengan gunung-gunung dan perbukitan dibagian timur Kabupaten Pasaman Barat, dataran rendah dengan daerah pertanian serta kawasan pantai dan laut dengan garis pantai lebih kurang 152 km merupakan modal dan kekuatan untuk meningkatkan ekonomi daerah, mengandung potensi yang sangat menjanjikan seperti potensi ekonomi di bidang pertambangan, kehutanan, perkebunan, tanaman pangan, peternakan, perikanan, serta pariwisata dan potensi lainnya.

Selain hal tersebut, pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. pembangunan infrastruktur tentunya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur merupakan prasyarat bagi pertumbuhan perekonomian terutama infrastruktur di bidang jalan. Terkait infrastruktur jalan, pasaman

barat sebagai salah satu kabupaten hasil pemekaran tentunya masih ada beberapa daerah yang kondisi jalannya masih sangat memprihatinkan. Salah satunya adalah Jorong Rurapatontang Nagari Parik.

Jorong rura patontang merupakan kejurongan yang terletak di kenagarian Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, Indonesia. Rurapatontang adalah salah satu kejurongan yang keberadaannya dipenghujung Kabupaten Pasaman Barat. Potensi yang terdapat di kejurongan tersebut berupa perkebunan, diantaranya adalah kebun karet, kayu manis, nilam, kacang goring, cabai, sawit serta padi ladang. Diantara beberapa macam perkebunan yang ada di kejurongan tersebut kebun karet merupakan perkebunan yang paling besar potensinya apabila dibandingkan dengan perkebunan yang lain.

Kebun karet umumnya dimiliki oleh setiap rumah tangga yang berada di kejurongan tersebut. Jadi tidak heran apabila mata pencaharian yang paling dominan di kejurongan tersebut hasil dari kebun karet. Sesuai dengan keterangan salah seorang warga, walaupun ada beberapa keluarga yang tidak memiliki kebun karet, keluarga tersebut tidak akan kehilangan atau kurang mata pencaharian walau hanya sebatas mencukupi biaya kehidupan sehari-hari keluarganya. Karena penduduk yang mempunyai kebun karet yang luas akan memberikan kebunnya kepada orang yang tidak mempunyai kebun karet dengan sistem bagi hasil. Dari hasil menyadap karet yang dijual dalam jangka rata-rata satu kali dalam satu minggu akan dibagi hasil sesuai akad dan kesepakatan antara pemilik kebun dengan pekerja.

Terkait infrastruktur, kejurongan ini merupakan salah satu daerah yang sangat memprihatinkan, terutama di bidang jalan. Karena setelah di teliti langsung kelapangan, jalan menuju kejuronga ini tidak sama halnya dengan daerah-daerah yang dekat dengan perkotaan. Jalan menuju kejuronga ini sebagian besar masih dalam kondisi tanah liat dan sebagian lagi rabat beton. Hal tersebut mengakibatkan harga jual barang hasil perkebunan sangat murah apabila dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan perkotaan. Selain itu, harga bahan pangan juga lumayan mahal apabila dibanding dengan daerah yang dekat dengan pusat kota.

Sesuai hasil wawancara langsung, salah seorang warga mengatakan hal tersebut dikarenakan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai. Setelah di teliti langsung

kelapangan, ternyata alat transportasi roda empat tidak bisa masuk. Transportasi yang bisa masuk ke kejurongan tersebut hanya transportasi roda dua. Hal tersebut mengakibatkan biaya transportasi semakin besar untuk mengangkut barang hasil perkebunan masyarakat terlebih-lebih apabila dalam kondisi musim hujan. Sesuai penerangan salah seorang penduduk, hasil penjualan barang perkebunan ternyata melalui agen ke agen. Akibat akses jalan yang sangat buruk, agen besar dari perkotaan tidak bisa masuk langsung ke kejurongan tersebut untuk membeli barang hasil perkebunan masyarakat (Ilman 2021).

Kondisi infrastruktur jalan yang sangat buruk mengakibatkan harga barang menjadi murah apabila dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan perkotaan. Setelah ditanya langsung kepada salah seorang agen pembeli karet dan dahil perkebunan lainnya, dia mengatakan bahwa biaya angkut untuk menjual barang keluar harus diperhitungkan agar tidak mengalami kerugian. Selain biaya angkut yang mahal, ternyata waktu angkut juga memakan waktu yang lebih lama karena hanya mengandalkan transportasi roda dua. Hal tersebut mengakibatkan menyusutnya karet dan barang perkebunan yang dibeli sehingga agen harus menurunkan harga agar tidak mengalami kerugian (Amri, 2021).

4. Upaya Masyarakat dalam Mendapatkan Akses Jalan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu akses penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional, terutama infrastruktur di bidang jalan. Infrastruktur jalan memegang peranan penting dan strategis dalam mengerakkan roda perekonomian. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu Negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, transportasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini pembangunan sektor infrastruktur menjadi salah satu pondasi dari pembanguana ekonomi kedepan. Beberapa studi menyebutkan bahwa keberadaan infrastruktur memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat pembangunan suatu wilayah, yang dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan prasarana jalan merupakan harapan masyarakat Jorong Rurapatontang sejak lama. Hal tersebut memicu masyarakat untuk melakukan berbagai upaya mendapatkan keinginan tersebut. Diantaranya masyarakat mengajukan berbagai proposal melau kepala Jorong dan pemerintahan setempat kepada pemerintahan tingkat Kecamatan. Selain itu tidak sedikit ditemuka postingan di media sosial yang bertujuan untuk menyinggung agar

pembangunan sesegera mungkin dilakukan. Setelah di baca di berbagai berita seputar Pasaman Barat dan berbagai kutipan mengenai daerah Pasaman Barat, ada beberapa tulisan mengenai kondisi jalan di Kejorongan Rurapatontang yang sangat memprihatinkan. Diantaranya adalah pada Harian Pagi Posmetro Padang “Sebagai daerah terisolir di Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, sejak Indonesia merdeka Rurapatontang Nagari Parik belum pernah tersentuh aspal. Wajar saja apabila hujan turun, jalan ke permukiman warga menjadi licin dan berlumpur” (Posmetro Padang, 2019).

Dalam kutipan tersebut membahas mengenai kedatangan Bupati Pasaman Barat yaitu Yulianto bersama jajarannya ke Jorong Rurapatontang. Ia di damping Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Adhiyaksyah dan Kepala bagian Humas, Yosmar Difia dan beberapa rombongan lainnya. Kedatangan Bupati ke Kejorongan Rurapatontang mengejutkan warga yang di kampung tersebut. Warga tidak pernah mengira, kampung mereka yang selama ini tersembunyi dibalik dua lembah yang saling bertatapan, ternyata di datangi seorang Bupati.

Respon masyarakatpun sangat luar biasa. Baik dari masyarakat setempat juga dari masyarakat Rurapatontang yang berada di perantauan. Sejak kehadiran Bupati Pasaman Barat di Kejorongan Rurapatontang diposting di berbagai media sosial dan sempat menjadi viral, banyak respon positif yang bermunculan. Apresiasi, ucapan terima kasih serta sanjungan pun disampaikan untuk sang Bupati.

Bahkan, ada yang menulis surat terbuka untuk Bupati Pasaman Barat seperti yang di tuliskan oleh Martondi Lubis sebagai putra asli Jorong Rurapatontang yang tinggal di perantauan, melalui surat terbuka dia menyampaikan terimakasih kepada Bupati Yulianto yang telah berkunjung ke Jorong Rurapatontang. Kedatangan Bupati Pasaman Barat, ia menjanjikan untuk sesegera mungkin membangun jalan menuju Kejorongan tersebut (Posmetro Sumbar, 2019).

“Setelah kedatangan Bupati Yulianto, setahun setelahnya tepat pada tahun 2020 pembanguna jalan beton dilaksanakan di Kejorongan tersebut, panjang jalan beton sekitar 2 km dengan lebar 3 m. Jalan yang tersisa tanah liat sekitar 2,5 km lagi” ujar salah seorang warga (Ilman, 2021).

Dalam kutipan lain pada 20 Mei 2021 lagi-lagi membahas kedatangan Bupati terpilih periode 2021-2024. “Kondisi jalan menuju Jorong Rurapatontang Kecamatan Koto Balingka, Pasaman Barat, Sumatera Barat sangat memprihatinkan. Hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah. Terbukti tampak dilakukannya peninjauan jalan oleh Bupati Pasaman Barat Hamsuardi, pada Kamis 20 Mei 2021. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamsuardi menjelaskan, masih banyak daerah terisolir Pasaman Barat yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah daerah. Karena keterbatasan dana pembangunan sempat terbengkal dan belum terlaksana. Ia mengatakan anggaran yang ada akan dimaksimalkan untuk perencanaan pembangunan infrastruktur beberapa jalan yang sudah di survey. Untuk itu, nantinya agar Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa tepat sasaran. Kedatangan Bupati Hamsuardi tersebut menjanjikan akan sesegera mungkin untuk melakukan pelebaran dan sebagian jalan dibeton dengan panjang kurang lebih 4,5 km (Exposetv, 2021).

Kedatangan Bupati Hamsuardi kembali diberikan surat terbuka oleh salah seorang warga Rurapatontang yang berada di perantauan yang menyatakan berterimakasih “Pertama saya mengucapkan terimakasih atas kunjungan pak Hamsuardi beserta rombongan ke kampung kami Rurapatontang. Saya sangat mengapresiasi kunjungan ini, saya kira tidak banyak bupati yang mau berkunjung ke kejurongan kecil, terpencil dan terisolir seperti kampung kami.” (Lubis, 2021).

Setelah diteliti langsung ke lapangan ternyata kondisi jalan menuju kejurongan tersebut masih sangat memprihatinkan. Jalan menuju Rurapatontang yang panjangnya sekitar 4,5 km nyatanya masih belum terlihat memadai. Kendaraan roda empat belum bisa masuk ke Kejurongan tersebut. Jalan kekejurongan tersebut sekitar 2 km sudah di beton dengan lebar sekitar 3 m dan sekitar 2,5 km lagi masih tanah liat serta jembatan-jembatan yang dibangun masyarakat setempat dengan menggunakan kayu.

Dari penerangan Ilman yakni seorang warga setempat “sejak sekian lama kami menunggu pembangunan prasarana jalan yang sudah sering kali dijanjikan oleh pihak pemerintahan, nyatanya sampai saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana. Nyatanya janji hanya tinggal janji, jalan menuju kampung tetap masih memprihatinkan.”

Hal tersebut memicu masyarakat setempat untuk membangun jalan walaupun hanya bisa dilewati transportasi roda dua, dengan jalan beton selebar 1 m. beberapa upaya masyarakat untuk mendapatkan prasarana jalan yang layak sudah dilakukan dengan berbagai hal. Nyatanya sampai saat ini belum juga mereka dapatkan.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Jalan

Masyarakat atau *community* dalam bahasa Inggris, atau juga komunitas. Sedangkan menurut istilah masyarakat adalah sekumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat tertentu yang menunjukkan adanya pemilikan norma-norma hidup bersama walaupun didalamnya terdapat berbagai lapisan sosial. Sedangkan partisipasi berasal dari kata *participation* artinya peran serta, ikut mengambil bagian. Secara populer dapat diartikan peran atau ikut serta untuk mengambil bagian dalam kegiatan tertentu. Dari kedua pengertian tersebut, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun di luar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab (Diatna, 2012, 11).

Harapan masyarakat terhadap tersedianya prasarana jalan cukup besar, hal ini dapat digambarkan dari perbandingan usulan yang disampaikan oleh masyarakat melalui perantara pemerintahan setempat yang dilakukan di tingkat kecamatan dengan relasi proyek, bahkan upaya masyarakat dengan menyinggung pihak pemerintahan kabupaten setempat untuk sesegera mungkin membangun jalan lintas menuju kekorongan tersebut.

Data lain yang menunjukkan besarnya harapan masyarakat aka prasarana jalan adalah usaha yang pernah dilakukan oleh Kepala Jorong Rurapatontang Nagari Parik dalam mewujudkan harapan-harapan tersebut, salah satu usaha tersebut adalah memantau perkembangan usulan-usulan yang pernah diajukannya disertai dengan melakukan pendekatan-pendekatan terhadap pejabat yang berwenang menyusun skala prioritas pembangunan.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk mempunyai prasarana jalan yang lebih baik sangat besar dan keinginan tersebut disertai dengan usaha-

usaha yang mungkin dapat mereka lakukan. Penjelasan tersebut juga dibenarkan oleh petugas survey yang saat itu turun kelapangan yang di pantau langsung oleh Bupati Pasan Barat beserta rombongan dari pemerintah Kabupaten yang turun secara langsung. Dalam survey langsung oleh Bupati Pasaman Barat beserta rombongan, Bupati Pasaman Barat yakni H. Hamsuardi S.Pd dengan mudahnya melontarkan janji kepada masyarakat untuk sesegara mungkin membangun prasarana Jalan di kejurongan tersebut. Beliau mengatakan Jorong Rurapatontang menjadi perhatian utama pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat di bidang pembangunan infrastruktur. Nyatanya masyarakat sudah lama menunggu janji tersebut yang mana kenyataannya belum juga terwujud seperti kata-kata janji manis yang disebutkan oleh Bupati Pasaman Barat tersebut (exposetv, 2021).

Besarnya harapan masyarakat terhadap sesuatu yang kemungkinan terpenuhi sangat kecil akan berakibat pada munculnya keengganan berpartisipasi pada proses-proses berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Conyers (1991), pada umumnya masyarakat enggan berpartisipasi dalam perencanaan bila mereka merasa bahwa partisipasi mereka hanya sedikit mempengaruhi atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali pada apa yang sedang terjadi.

Hal yang terjadi di Jorong Rurapatontang Nagari Parik belum sampai kepada tingkat enggan untuk berpartisipasi, tetapi sudah pada tingkat tidak percaya terhadap lembaga perencana pembangunan, karena dari sejak lama janji-janji yang sedemikian rupa sudah sering dilontarkan oleh pejabat-pejabat sebelumnya yang berwenang di bidang tersebut. Namun pada akhirnya janji hanya tinggal janji tanpa ada pembuktian yang nyata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut mereka hampir setiap tahun mereka membuat usulan peningkatan jalan tersebut, namun ingatan mereka usulan tersebut tidak pernah lepas selama belasan tahun.

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perencana pembangunan mengakibatkan mereka melakukan sesuatu yang dianggapnya akan mempercepat proses pemenuhan harapan mereka, diantaranya dengan mencari tahu dimana titik kelemahannya sehingga usulan mereka belum dipenuhi dan siapa aktor perencana secara individu yang mempengaruhi. Oleh karena itu setelah mereka membuat usulan yang telah berulang sampai

pada titik batas kesabaran, mereka melakukan tindakan-tindakan yang menurut mereka adalah benar.

Perasaan tidak diperhatikannya usulan yang mereka buat, sebenarnya didasari oleh tidak pahamnya mereka terhadap proses pengambilan keputusan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut, salah satu diantaranya adalah adanya keterbatasan dana, sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana peranan usulan-usulan yang mereka buat.

Apabila dihubungkan dengan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan prasarana jalan dalam suatu jangka tertentu, sebenarnya keterlambatan pemenuhan usulan tersebut sangat menjadi pertanyaan besar. Seperti penerangan salah seorang tokoh masyarakat Jorong Rurapatontang bahwasanya usulan-usulan serupa sudah diajukan sejak belasan tahun sebelumnya, namun sampai saat ini harapan tersebut belum ada sudah sekian lama diusulkan (harapan, 2021). Jadi karena waktu pengusulan sudah sejak lama sangat perlu dipertimbangkan apakah usulan-usulan yang diajukan masyarakat tidak sesuai prosedur jalannya pemerintahan sehingga tidak direspon oleh pihak yang berwenang atau malah pihak yang berwenang tidak begitu memperhatikan keadaan masyarakatnya yang terletak di daerah-daerah terpencil seperti Jorong rurapatontang.

D. Kesimpulan

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, terutama infrastruktur di bidang jalan. Infrastruktur jalan merupakan salah satu sarana transportasi yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi infrastruktur jalan dapat menentukan kelancaran kegiatan ekonomi di suatu tempat, infrastruktur jalan yang baik dan memadai akan mengurangi biaya transaksi dan distribusi barang dan jasa, lama waktu dan bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat, sehingga kegiatan transaksi dan distribusi perekonomian di Jorong Rurapatontang Nagari Parik akan lebih efisien apabila infrastruktur atau akses jalannya sudah memadai.

Akses jalan merupakan hal yang sangat penting dalam bidang perekonomian, dengan akses jalan yang buruk seperti salah satu kejurongan yang terletak di kabupaten Pasaman Barat yaitu Jorong Rurapatontang berakibat kepada pendapatan masyarakat yang sangat rendah apabila

dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan perkotaan. Sebaliknya apabila akses jalannya bagus, maka pendapatan dalam perekonomian masyarakat akan lebih baik.

Prasarana jalan yang tidak memadai di Kejorongan Rurapatontang sangat berdampak negative terhadap pendapatan petani karet di kampung tersebut. Jalan yang belum bisa dilalui kendaraan roda empat belum pernah masuk sehingga waktu dan tenaga untuk menjual barang hasil perkebunan menjadi besar dan lama. Karena hal tersebut pengeluaran untuk tenaga dan bahan bakar alat transportasi semakin besar, yang mengakibatkan pendapatan tidak sesuai dengan yang seharusnya didapatkan.

Dari berbagai upaya dan partisipasi masyarakat Jorong Rurapatontang Nagari Parik, mereka sangat berharap untuk mendapatkan akses prasarana yang baik sama halnya dengan daerah-daerah lain. Agar pekerjaan yang mereka lakukan seimbang dengan pendapatan atau gaji yang mereka peroleh. Mudah-mudahan pembangunan prasarana jalan segera terlaksana di Kejorongan Rurapatontang Nagari Parik, agar kondisi masyarakat dan kampung tersebut semakin baik dan semakin maju serta bebas dari daerah terisolir.

Daftar Pustaka

Jurnal Ilmiah

Mulyadi Lalu, Putranto Edi, Yekti M., (2016), Analisa Mutu Prasarana Jalan Perumahan di Kabupaten Malang, *Jurnal Info Manpro*, 7 (2).

Brilyawan Kristian., Budi Purbayu, (2021), Pengaruh Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2015-2019, *Diponegoro Journal Of Economics*, 10 (1).

Sukwika Tatan, (2018), Peranan Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia, *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6 (2).

Taryono., Ekwarso Hendro, (2013), Analisis Ketersediaan Infrastruktur di Pulau Sumatera, *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan*, IV (10).

Purwanti Endang, Rohayati Erna, (2014), Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Kerja Wanita Pada Industri Kerupuk Kedelai di Tuntang, Kab Semarang, *Among Makarti*, 7 (13).

- Judiono Fadjar, (2009), Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan, Wacana, 12(3).
- Lumingkewas Valen, (2013), Pengakuan Pendapatan Dan Beban Atas Laporan Keuangan Pada PT. Bank Sulut, Jurnal Emba,1 (3).
- Maqin Abdul, (2011), Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat, Trikonomika, 10(1).
- Warsilan, Noor Akhmad, (2015), Peranan Ifrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasi Pada Kebijakan Pembangunan di Kota Samarinda, Mimbar 31(2).
- Rahman Amni., Novitasari Diyah, (2018), Kebijakan Pembangunan Desa Melalui Pembangunan Infrastruktur Transportasi dalam Upaya Pemerataan Pembangunan, Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik, 3 (2).
- Rijadi R., dan Hartono Timotius, (2009) Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Prasarana Jalan, Wacana, 12 (3).

Disertasi, Tesis, Skripsi

- Hapsari Tunjung, (2011). Pengaruh Insfrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Diatna Fitria, (2012). Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Hasil Pembangunan Prasarana Jalan Lingkungan di Kabupaten Sukoharjo 2010, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berita, Surat Kabar

- Metro Sumbar. Rabu, 20 November 2019, Melewati Jalan Berlumpur Menuju Daerah Terisolir Rurapatontang Warga Kaget Bupati Basah dan Berkeringat.
- Exposetv.id. Kamis, 20 Mei 2021, Bupati Hamsuardi Tinjau Jalan Rurapatontang yang Menjadi Perhatian Khusus Pemda Pasbar.
- Proteksi.com. Jum'at, 21 Mei 2021, Apresiasi yang Tinggi atas Kunjungan Bupati Hamsuardi ke Kejorongan Rurapatontang.

Wawancara

Harapan. *Wawancara Pribadi*. Ninik Mamak Jorong Rurapatontang. Jum'at 9 Juli 2021.

Amri. *Wawancara Pribadi*. Agen Barang Pertanian. Sabtu 10 Juli 2021.

Ilman. *Wawancara Pribadi*. Masyarakat Jorong Rurapatontang. Rabu 7 Juli 2021.



13

NUR SUHAIMI

*Dendeng Daun Singkong Ikon
Ekonomi Kelompok UPPKA di
Jorong Koto Bakti*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



**DENDENG DAUN SINGKONG IKON EKONOMI KELOMPOK UPPKA
DI JORONG KOTO BAKTI**

Nur Suhaimi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan dengan menambahkan campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain. Seiring berkembangnya waktu, dendeng tidak hanya berasal dari daging namun ada juga yang berasal dari daun singkong. Dendeng Daun Singkong merupakan makanan yang terbuat dari daun singkong. Dendeng Daun Singkong ini diproduksi dan diolah oleh Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia yang ada di Jorong Koto Bakti. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bahwa Dendeng Daun Singkong merupakan makanan khas yang hanya ada di Jorong Koto Bakti dan dijadikan sebagai ikon ekonomi karena daya tariknya masyarakat yang cukup tinggi sehingga pemasarannya cukup tinggi dan dapat membantu perekonomian bagi anggota Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penjualan Dendeng Daun Singkong, para wanita subur yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga dapat membantu perekonomian keluarga mereka.

Kata kunci: *Dendeng, Dendeng Daun Singkong, Kelompok UPPKA*

A. Pendahuluan

Di Indonesia, singkong atau ubi kayu mempunyai arti ekonomi yang penting dibandingkan dengan umbi-umbian lainnya. Singkong atau ubi kayu memiliki banyak karbohidrat dan merupakan makanan pokok di daerah tandus di Indonesia. Selain umbinya, daun dari ubi mengandung banyak protein yang dipergunakan untuk berbagai macam sayur, dan daun yang telah dikayukan digunakan sebagai pakan ternak. Batangnya digunakan sebagai kayu bakar dan seringkali dijadikan pagar hidup (Rohman, 2020, hal. 1-2).

Jorong Koto Bakti terletak di Kecamatan Sungai Rumbai, Nagari Kurnia Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Di jorong ini ada beberapa warung yang menjual berbagai macam sayuran termasuk daun singkong. Banyak daun singkong yang ada di warung tersebut, namun tidak banyak daun singkong yang laku bahkan kadang sampai layu-layu karena peminatnya yang kurang. Karena itu perlu adanya inovasi olahan pangan yang berasal dari daun singkong. Salah satunya ialah pengolahan daun singkong menjadi dendeng. Dengan inovasi pengolahan daun

singkong ini diharapkan masyarakat dapat memiliki minat untuk mengkonsumsinya karena banyak manfaat yang ada pada daun singkong tersebut. Dan juga tentunya untuk memakmurkan para petani daun singkong agar pemasarannya lebih banyak.

Daun singkong (*Manihot utilissima*) mengandung vitamin A dan C, serta kalsium yang dosisnya rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan sayuran daun lainnya. Daun singkong mempunyai khasiat sebagai antioksidan yang dapat mencegah proses penuaan, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit dan mencegah penyakit tulang seperti asam urat dan rematik. Selain itu, daun singkong juga berkhasiat sebagai antikanker, mencegah konstipasi dan anemia, serta meningkatkan daya tahan tubuh (Tresno, 2007, hal. 120).

Daun ubi kayu atau singkong selain dimanfaatkan sebagai sayuran, dapat pula diolah menjadi pangan olahan yang dapat meningkatkan nilai jual, diantaranya untuk pembuatan dendeng (Firdausni dan Anova, 2015, hal. 62). Dendeng daun singkong adalah makanan yang terbuat dari daun singkong. Dendeng daun singkong adalah makanan cepat saji yang berada di Jorong Koto Bakti. Dendeng Daun Singkong dikenal dengan nama DDS. Pemasaran/penjualan dari DDS ini dilakukan secara online (melalui Whatsapp, Facebook ataupun Instagram) dan menggunakan sistem PO karena waktu untuk membuatnya tidak bisa dilakukan sehari saja tetapi dilakukan selama 2 hari.

Dendeng dari daun singkong tidak kalah enak dan bergizi dibandingkan dengan dendeng dari daging sapi, ikan maupun ayam. Kandungan protein, mineral, vitamin serta serat yang berasal dari daun singkong baik bagi tumbuh kembang anak, terutama bagi anak-anak yang tidak suka mengonsumsi sayuran. Berbagai macam variasi dalam penyajian sayuran dapat merangsang minat anak untuk mengonsumsi sayuran. Kekurangan serat juga terjadi pada orang dewasa saat ini mengingat pola konsumsi makanan yang rendah serat dan tinggi lemak, sehingga olahan dendeng daun singkong ini dapat menjadi alternatif cara baru dalam konsumsi serat dari sayuran (Suprihatin, 2020, hal. 28).

Pengolahan daun singkong menjadi dendeng dapat menghasilkan dendeng dengan tekstur lebih renyah dan rasanya menyerupai dendeng daging. Pembuatan dendeng daun singkong dengan substitusi tepung tapioka dilakukan untuk peningkatan mutu sehingga didapatkan dendeng kaya akan sumber protein. Selain protein dendeng daun singkong juga mengandung serat pangan sehingga dapat berperan sebagai pangan fungsional (Suprihatin, 2020, hal. 28-29).

Di Jorong Koto Bakti memiliki sebuah kelompok yang bernama kelompok UPPKA, yang mana seluruh anggota didalam kelompok tersebut merupakan para wanita subur yang ber-KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang). Jadi para bapak-bapak, anak-anak maupun remaja tidak

bisa mengikutinya. Kelompok UPPKA ini merupakan suatu Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor yang menekuni bidang makanan. Nah kelompok UPPKA inilah yang mengolah daun singkong menjadi dendeng atau yang dikenal dengan Dendeng Daun Singkong (DDS) yang ada di Jorong Koto Bakti.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap fakta-fakta yang ada dilapangan. Untuk mendapatkan data-data terkait dengan Dendeng Daun Singkong yang diproduksi oleh Kelompok UPPKA, telah dilakukam wawancara dengan anggota kelompok UPPKA yang ada di Jorong Koto Bakti. Dimana maksud dari metode wawancara ini adalah proses dalam memperoleh keterangan atau penjelasan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang/responden yang akan diwawancarai. Disamping itu juga dilakukan observasi dan dokumentasi.

C. Pembahasan

1. Pengertian Daun Singkong

Daun singkong atau disebut ubi kayu berasal dari tanaman singkong. Tanaman singkong masuk kedalam *family Euphorbiaceae*. Ada dua jenis daun singkong yang berfungsi sebagai sayuran yaitu daun singkong biasa dan daun singkong semaian. Daun singkong biasa bertangkai merah tua dengan daun berwarna hijau tua, sedangkan daun singkong semaian bertangkai merah muda keputihan dengan warna daun hijau muda. Daun singkong yang biasa berasal dari tanaman singkong yang ditanam untuk diambil umbi nya, sedangkan daun singkong semaian merupakan hasil dari tanaman singkong yang sudah dipanen (Rita Ramayulis, 2015, hal. 23).

Daun singkong merupakan jenis sayuran yang berasal dari tanaman singkong atau ketela pohon dan merupakan salah satu sayuran hijau sumber gizi yang baik dikonsumsi dan mudah didapat. Selain itu pula pengolahan daun singkong juga masih sangat minim dan belum bervariasi karena sejauh ini hanya sebatas direbus, disayur atau bahkan dijadikan pakan ternak (Laksita, 2019, hal. 5).

Kandungan klorofil pada setiap 100 g daun singkong cukup tinggi yaitu berkisar 274,5 - 396,8 mg. Begitu juga dengan kandungan gizinya, daun singkong merupakan sumber kalsium, zat besi dan vitamin C. Kandungan kalsium pada daun singkong 165 mg atau setara dengan 15% dari kecukupan sehari. Kandungan zat besi yang ada pada daun singkong sebesar 2,8 mg atau setara dengan 11% dari kecukupan sehari. Sedangkan vitamin C pada 100 gram daun singkong

telah dapat memenuhi kebutuhan vitamin C sehari yaitu sebesar 82 mg atau setara dengan 109% kebutuhan sehari. Kandungan kalsium pada daun singkong berfungsi meningkatkan kepadatan mineral tulang, zat besi mencegah anemia dan vitamin C sebagai antioksidan. Dengan demikian konsumsi daun singkong dapat mencegah penuaan dini (Ramayulis, 2015, hal. 23).

Hal yang perlu diperhatikan ketika mengolah daun singkong adalah adanya kandungan asam hidroksianat yang bersifat racun. Asam hidroksianat dapat rusak dan hilang saat sesudah direbus selama 3-5 menit dan air perebusnya harus dibuang. Oleh karena itu, daun singkong tidak boleh dimakan dalam keadaan mentah atau diolah jadi jus dalam keadaan mentah. Penelitian menjelaskan pemanasan akan merusak klorofil, namun perebusan 3-5 menit tidak bermakna terjadinya kerusakan klorofil (Ramayulis, 2015, hal. 23).

Singkong bukan berasal dari Indonesia, singkong dapat tumbuh dan dibudidayakan dimana saja sehingga banyak petani berminat mengusahakan tanaman ini. Selain manfaat umbi yang diperoleh dari singkong, ada juga manfaat lain yaitu daun singkong. Daun singkong adalah salah satu jenis sayuran hijau yang mudah dijumpai di sekitar kita, memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat dijadikan sayuran alternatif. Daun singkong dapat dijadikan sayuran pada masakan Sunda dan masakan Padang serta dapat dibuat berbagai olahan varian (Busthanul, dkk, 2018, hal. 414).

Berdasarkan penelusuran para pakar pertanian dan botani, tanaman singkong berasal dari Amerika tepatnya di kawasan yang memiliki iklim tropis. Singkong adalah salah satu jenis tanaman yang tersebar luas di Indonesia selain itu juga singkong sudah banyak dibudidayakan diberbagai belahan dunia seperti, di Benua Asia diantaranya Negara Vietnam, Thailand, RRC, India dan di Benua Afrika diantaranya tersebar di Negara Angola, Kongo, Nigeria, Mozambik, Ghana, dan Uganda serta produksi terbesarnya ada di Brazil. Ada dua kelompok tanaman singkong yaitu singkong yang berumbi pahit berasal dari Amerika Selatan bagian utara dan singkong yang berumbi manis berasal dari Amerika Tengah (Laksita, 2019, hal. 9).

Setelah padi, singkong merupakan produk hasil pertanian pangan kedua terbesar di Indonesia, sentral penanaman tanaman singkong terbesar terdapat di Provinsi Lampung. Hampir 10-40% dari tanaman singkong terdiri atas daun sehingga ketersediaan daunnya bisa dikatakan sangat berlimpah, jadi sudah seharusnya kita memanfaatkan limbah tumbuhan ciptaan Allah SWT untuk kelangsungan hidup khususnya ekonomi pangan (Laksita, 2019, hal. 5).

Daun singkong mengandung kadar protein yang cukup tinggi yaitu sebesar 27,28%. Selain itu daun singkong juga mengandung mineral, serat, beta karoten serta klorofil (Laksita,

2019, hal. 5). Daun singkong juga mengandung antioksidan, serat makanan, sumber makanan mineral, dan lemak esensial. Senyawa bioaktif yang ada dalam daun singkong berperan dalam meningkatkan fungsi kekebalan tubuh, mengurangi kerusakan akibat radikal bebas, risiko penyakit kardiovaskuler dan menekan pertumbuhan sel kanker. Singkong merupakan salah satu jenis makanan yang memiliki prospek cerah ke depan karena dapat dimanfaatkan sebagai bahan penghasil karbohidrat dan sebagai bahan industri. Selain itu merupakan sumber karbohidrat ke tiga setelah beras dan jagung. Kekhasan singkong menghasilkan umbi dan daun singkong dapat diyakini bahwa umbi dan daun singkong dapat dijadikan bahan dasar penganekaragaman pangan (Busthanul, dkk, 2018, hal. 414).

Daun singkong yang dapat dijadikan bahan penganekaragaman pangan, cukup diminati masyarakat, terutama pada dunia kuliner. Saat ini dunia kuliner semakin meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu usaha kuliner yang banyak dilirik oleh masyarakat saat ini adalah usaha kue yaitu roti. Pada umumnya roti itu berasal dari gandum dengan harga yang relatif mahal dan masih mengandalkan gandum yang di impor, sehingga membutuhkan bahan pembuatan roti dengan harga yang terjangkau (alternatif) untuk memproduksi roti seperti tepung daun singkong. Melihat kondisi sekarang banyak produsen roti yang hanya fokus pada rasa dan tahan lamanya tanpa memperhatikan kandungan gizi dan keamanan produk pangan roti tersebut (Busthanul, dkk, 2018, hal. 414).

2. Pengertian Dendeng Daun Singkong

a. Dendeng

Dendeng adalah lembaran daging yang dikeringkan dengan menambahkan campuran gula, garam, dan bumbu-bumbu lain. Pembuatan dendeng bisa dari berbagai macam jenis daging ternak. Namun, istilah dendeng di pasaran dikenal sebagai dendeng sapi. Akhir-akhir ini mulai dikenal jenis dendeng lainnya seperti: dendeng ayam, dendeng ikan, dendeng udang, dendeng bekicot dan bahkan dendeng keong emas. Untuk jenis ikan yang biasa diolah menjadi dendeng yaitu dendeng berasal dari ikan air tawar (seperti: belut, mujair, dan nila) dan ikan air laut (japuh, kuning, tembang, kakap dan layaran) (Kusantati, dkk, 2008, hal. 140). Dendeng adalah salah satu makanan dari olahan daging yang sangat digemari oleh banyak masyarakat yang ada di Indonesia (Kurniawan, 2021, hal. 318).

Dendeng merupakan salah satu bentuk makanan hasil olahan pengawetan dari daging secara tradisional, yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak dulu (Purnomo, 2012, hal. 65). Pembuatan dendeng bisa melalui dua cara, yaitu dendeng sayat

dan dendeng giling. Dendeng sayat menggunakan bahan utama daging yang disayat atau ditiris tipis, sedangkan dendeng giling menggunakan bahan utama daging yang digiling terlebih dahulu. Selain kesegaran pada daging dan mutu suatu daging, bumbu merupakan faktor kunci yang menentukan kualitas dan daya terima dendeng. Pembuatan dendeng yang ada di Indonesia pada umumnya menggunakan bumbu garam, gula, lengkuas, ketumbar dan bawang merah. Bahkan kadang ada juga yang menambahkan bawang putih dan lada. Untuk penambahan gula biasanya dapat berupa gula pasir ataupun gula merah. Campuran bumbu dapat berguna untuk menambah aroma, cita rasa dan dapat memperpanjang daya awet. Beberapa jenis rempah telah diketahui mempunyai daya antimikroba (Kusantati, dkk, 2008, hal. 140). Bahan utama yang digunakan untuk membuat dendeng dapat berasal dari daging sapi, kambing, babi, kerbau, domba dan ayam. Sedangkan yang lazim terdapat di pasaran adalah dendeng daging sapi (Purnomo, 2012, hal. 65).

Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI), dendeng merupakan suatu produk makanan berbentuk lempengan yang terbuat dari daging sapi dengan cara diiris atau digiling daging sapi yang segar tersebut berasal dari sapi yang sehat yang telah diberi bumbu dan kemudian dikeringkan. Dendeng sapi adalah produk olahan daging yang dibuat secara tradisional di Indonesia, dengan cara *dikuring*. Kuring adalah suatu proses pemberian garam dan perendaman daging dalam larutan garam. Garam dapat digunakan sebagai bahan pengawet karena membantu mengurangi kadar air yang ada dalam daging dan menghambat pertumbuhan bakteri. Selain garam, ditambahkan juga gula untuk memberi rasa dan aroma serta mengurangi rasa asin yang berlebihan. Selain itu juga masih ditambahkan bumbu untuk memberikan cita rasa yang lebih disukai. Akibat proses pengolahan tersebut, maka nilai kalori dendeng menjadi lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan daging merah. Selain itu juga dapat terjadi peningkatan kadar karbohidrat dan protein (per berat basah) sejalan dengan menurunnya kandungan air. Disamping itu juga terjadi peningkatan kadar kalsium, fosfor, serta zat besi sedangkan vitamin A menjadi rusak total (Kurniawan, 2021, hal. 318).

Di Indonesia ditemukan beberapa jenis dendeng yang disesuaikan namanya dengan asal daerah yang memproduksinya seperti dendeng Madura atau berdasarkan cara pembuatannya seperti dendeng ragi (Jawa Timur), dendeng batokok (Sumatera Barat). Dendeng Madura dibuat dari sayatan tipis daging sapi yang dipukul atau dipress dengan tujuan membuat sayatan dari daging ini dapat menjadi lebih tipis sebelum direndam didalam

gula, garam dan bumbu-bumbu. Dendeng Madura ini mempunyai kadar air sekitar 10% dan ciri khasnya adalah teksturnya renyah (*crispy*). Sedangkan dendeng batokok yang berasal dari Sumatera Barat terbuat dari sayuran daging sapi berukuran 8 x 8 x 0,5 cm yang direndam dalam larutan yang dibuat dari bawang putih, ketumbar, jahe, asam jawa dan garam dapur selama 2 jam pada suhu kamar, kemudian dilakukan pengasapan selama 9 jam. Setelah 2 jam pengasapan pertama sayatan daging tersebut dipukul-pukul dengan alu atau dipress untuk membuatnya lebih tipis dan kemudian pengasapan dilanjutkan sampai 9 jam. Dendeng mempunyai cita rasa manis karena kadar gula yang ada pada dendeng cukup tinggi, serta mempunyai warna coklat gelap yang disebabkan oleh reaksi pencoklatan dan warna gelap gula kelapa yang digunakan. Gula kelapa dan garam yang ditambahkan pada bahan hanya berperan sebagai *bumektan*, yang dapat menurunkan kadar air dan aktivitas air produk dan memberi rasa pada dendeng bersama-sama bumbu-bumbu yang lain. Kombinasi gula, garam dan bumbu-bumbu yang lain menimbulkan bau khas pada produk akhir (Purnomo, 2012, hal. 65).

Prinsip utama pengolahan dendeng ialah proses penjemuran. Peralatan penjemuran dendeng disiapkan berupa anjang papan penjemur setinggi sekitar 75 cm dan nampan penjemur berbagai bentuk dan ukuran. Anjang papan penjemur didirikan di lapangan terbuka jauh dari naungan pepohonan agar mendapatkan akses cukup sinar matahari dan aliran udara (angin) untuk memperlancar proses pengeringan. Setelah nampan penjemur diisi lapisan irisan daging, nampan-nampan diletakkan di atas anjang papan penjemur. Proses penjemuran berlangsung disiang hari dengan akses penyinaran matahari dan hembusan angin yang kuat dan diharapkan proses pengeringan berlangsung cepat. Agar dapat mempercepat proses pengeringan, pada saat tengah hari potongan dendeng setengah kering dapat dibalik di atas nampan, kemudian proses penjemuran dilanjutkan sampai betul-betul kering (Soekarto, 2020, hal. 113).

Dendeng dapat digolongkan juga sebagai bahan pangan setengah basah (*intermediate moisture food*), karena kadar air beberapa dendeng yang ditemukan berada dalam kisaran kadar air dalam bahan pangan setengah basah, yaitu 14%-17% dan nilai A_w berada pada kisaran 0,64-0,65. Bahan pangan setengah basah berkadar air antara 15-30 % serta nilai A_w 0,50-0,70 sehingga tidak memerlukan penyimpanan dingin, serta stabil dalam suhu kamar dan perkembang-biakan mikroorganisme dapat terhambat (Purnomo, 2012, hal. 65-66).

Dalam pembuatan dendeng perlu diperhatikan faktor-faktor berikut: suhu tempat penyimpanan, kelembaban sekitar, dan bahan kemasan. Pengemasan merupakan faktor penting dalam proses oksidasi lemak dendeng. Dendeng yang dikemas dalam kantong plastik polivenil khlorida masih dapat dimasuki oksigen secara tetap, karena jenis bahan kemas ini mempunyai tingkat transmisi oksigen cukup tinggi. Oleh karena itu, dendeng yang dikemas dalam kantong plastik tersebut menunjukkan nilai ketengikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan dendeng yang dikemas dalam kaleng walaupun sama-sama disimpan pada suhu 37°C (Purnomo, 2012, hal. 70).

b. Dendeng Daun Singkong

Dendeng daun singkong adalah makanan yang terbuat dari daun singkong. Dendeng daun singkong diolah dari bahan dasar daun singkong yang diberi inovasi baru dari versi dendeng yang biasanya dari daging sapi menjadi dendeng yang berbahan pokok daun singkong, sehingga dapat diproduksi menjadi dendeng daun singkong (Paramita, dkk, 2018, hal. 24).

Dendeng daun singkong adalah makanan cepat saji yang diproduksi dan berada di Jorong Koto Bakti dengan cita rasa renyah dan gurih. Dendeng daun singkong bisa dinikmati langsung sebagai teman ngemil saat bersantai dan bisa juga diolah menjadi sambal untuk lauk istimewa yang dimakan bersama keluarga tercinta. Dendeng daun singkong sangat cocok dijadikan sebagai produk dendeng yang halal, ekonomis dan menyehatkan, bahkan bisa dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Daun ubi kayu selain dapat dimanfaatkan sebagai sayuran, juga dapat diolah menjadi pangan olahan yang dapat meningkatkan nilai jual, diantaranya untuk pembuatan dendeng. Dendeng adalah suatu makanan yang berbentuk lempengan, biasanya terbuat dari daging yang diberi bumbu dan kemudian dikeringkan. Kandungan air dendeng antara 3-40 % bersifat plastis dan tidak terasa kering. Dendeng yang dapat dijadikan sebagai sumber protein hewani biasanya dendeng yang terbuat dari daging sapi. Tekstur dari dendeng daging sapi yang disukai masyarakat biasanya dendeng yang empuk, namun meskipun demikian kadang ditemui dendeng yang keras dan sering menyangkut disela-sela gigi bila kita konsumsi, sedangkan dendeng daun ubi diharapkan menyerupai dendeng daging tapi lebih gampang dikonsumsi bagi yang mempunyai masalah pada gigi. Dendeng daun singkong dapat dijadikan sebagai sumber protein karena sudah melalui beberapa tahap dan merupakan sumber protein yang mudah dicerna tubuh. Melalui pengolahan dari daun singkong menjadi

dendeng diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang disukai dengan nilai gizi yang baik sebagai sumber protein yang bersifat fungsional dengan kandungan seratnya yang cukup tinggi (Firdausni dan Anova, 2015, hal. 62).



Gambar 1. Desain Logo kemasan Dendeng Daun Singkong

Dendeng Daun Singkong dikenal dengan nama DDS. Pemasaran/penjualan dari DDS ini dilakukan secara online (melalui Whatsapp, Facebook ataupun Instagram), pemesanan dilakukan menggunakan sistem PO (Pre Order) karena waktu untuk membuatnya tidak bisa dilakukan sehari saja tetapi dilakukan selama 2 hari dan jika sudah memesan nanti akan diantar langsung ke alamat dengan sistem delivery.

Biasanya pembuatan DDS dilakukan selama 2x seminggu namun jika pemesanan lebih banyak bisa lebih dari 2x selama seminggu. Harga dari DDS ini per bungkusnya Rp10.000,00 yang berisi 1 ons. Namun jika ingin membeli per kilogram juga bisa yaitu per kilogramnya dijual dengan harga Rp90.000,00. Dalam pembuatan DDS biasanya tidak hanya untuk dijual saja tetapi untuk dikonsumsi sendiri oleh para anggota di Kelompok UPPKA.

DDS merupakan makanan cepat saji satu-satunya yang hanya ada di Jorong Koto Bakti, Kecamatan Sungai Rumbai, Nagari Kurnia Selatan Kabupaten Dharmasraya. DDS ini merupakan makanan khas dari Jorong Koto Bakti. DDS biasanya dijadikan oleh-oleh karena kebanyakan dari masyarakat baru tau akan makanan ini dan mereka antusias untuk mencicipinya. Banyak masyarakat yang berada diluar wilayah Jorong Bakti yang memesan dan membeli DDS ini, jika stok masih ada bisa memesan dan membeli langsung namun jika stok sudah habis harus bersabar dan menunggu dengan sistem PO.

Bahan-bahan pembuatan DDS yaitu:

1. Daun singkong
2. Tepung beras

3. Telur
4. Rempah-rempah (bawang putih, ketumbar, kemiri, dan garam/ajinomoto/masako)
5. Minyak goreng

Cara pembuatan DDS yaitu:

1. Rebus daun singkong yang sudah dicuci/dibersihkan
2. Kemudian setelah 15 menit tiriskan
3. Kemudian dipotong keci-kecil
4. Siapkan bumbu yaitu telur, tepung beras, daun singkong yang sudah dipotong-potong dan rempah-rempah (bawang putih, ketumbar, kemiri, dan garam/ajinomoto)
5. Kemudian masukkan ke wadah lalu dikukus
6. Kemudian dinginkan sekitar +- 20 menit
7. Setelah dingin kemudian potong-potong dan pipihkan
8. Kemudian digoreng menggunakan minyak goreng yang sudah panas
9. Setelah selesai menggoreng, DDS siap disajikan.

Pada saat pembuatan Dendeng Daun Singkong, limbah yang tersisa agar nantinya tidak mencemari lingkungan maka para anggota Kelompok UPPKA berinisiatif untuk menjadikan limbah tersebut sebagai pakan ternak dan dijadikan pupuk kompos. Hal tersebut tentunya tidak akan merugikan masyarakat ataupun dapat mengganggu kenyamanan masyarakat karena limbah/batang sisa-sisa dari daun singkong tidak dibuang secara sembarangan.

3. Kelompok UPPKA

Kelompok UPPKA atau yang dikenal dengan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Seluruh program dikelompok UPPKA dikembangkan menjadi lebih luas melalui pendekatan kelompok, dengan anggota yang mayoritasnya adalah ibu-ibu akseptor KB. Tahun 1990, UPPKA diubah menjadi UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) untuk mencakup sasaran yang lebih luas yaitu dengan melibatkan PUS (Pasangan Usia Subur) yang belum KB, KPS (Keluarga Pra Sejahtera), KS I (Keluarga Sejahtera I) dan Keluarga lain yang berminat menjadi anggota Kelompok UPPKS. UPPKS diharapkan adanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan, baik dari keluarga peserta KB yang bersangkutan maupun dari seluruh anggota kelompoknya. Dengan peningkatan kesejahteraan tersebut, diharapkan kesertaan dan kesinambungan ber-KB secara tidak langsung dapat ditingkatkan (Nurdiansyah, dkk, 2018, hal. 57).

Secara umum tujuan dari kelompok UPPKS yaitu untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi yang lebih mampu/produktif dan dengan memiliki keterampilan terutama untuk keluarga akseptor keluarga berencana yang tergabung dalam kegiatan kelompok UPPKS. Sedangkan secara spesifik tujuan dibentuknya kelompok UPPKS ini yaitu:

1. Meningkatnya jumlah modal usaha dalam pengembangan usaha kegiatan kelompok UPPKS
2. Meningkatnya jumlah kelompok UPPKS yang memperoleh modal usaha
3. Meningkatnya jumlah anggota kelompok UPPKS yang berusaha
4. Meningkatnya kualitas usaha kegiatan kelompok UPPKS
5. Meningkatnya kesejahteraan keluarga khususnya keluarga prasejahtera atau keluarga miskin (Nurdiansyah, dkk, 2018, hal. 58).

Kelompok UPPKA yang ada di Jorong Koto Bakti dikenal dengan nama Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia. Di dalam kelompok ini, seluruh anggota yang ada dari kelompok tersebut merupakan para wanita subur yang ber-KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang). Jadi para bapak-bapak, anak-anak maupun remaja tidak bisa mengikutinya. Kelompok UPPKA ini berjumlah 13 orang, dimana 3 anggota diantaranya bertugas untuk menanam daun singkong dan 10 anggota lainnya bertugas mengolah pembuatan DDS. Para anggota kelompok ini merupakan seluruh masyarakat yang khusus hanya berasal dari Jorong Koto Bakti, masyarakat diluar Jorong Koto Bakti tidak bisa mengikutinya. Kegiatan dalam Kelompok UPPKA ini mengarah kepada koperasi karena dilakukan dari, oleh, untuk anggota kelompok dan hasilnya untuk para anggota kelompok tersebut yaitu 50% untuk anggota dan 50% lagi di masukkan ke dalam kas anggota. Kelompok UPPKA memiliki motto sukses bersama bangkitkan ekonomi keluarga. Jadi para wanita subur yang berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga dan tidak memiliki pekerjaan bisa menghasilkan uang sendiri dan tentunya itu sangat berguna untuk membantu perekonomian keluarga. Dikelompok UPPKA ini, bidang makanan yang ditekuni tidak hanya DDS saja, saat ini juga sudah ada bumbu pical dan pembuatan tumpeng mini untuk acara perayaan tertentu seperti ulangtahun, syukuran dll. Tumpeng mini bisa direquest sesuai selera, bisa request menggunakan nasi putih, nasi kuning ataupun nasi goreng. Dan tidak hanya bidang makanan Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia juga memproduksi besek wadah kudapan yang terbuat dari anyaman bambu.

Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia berdiri pada awal bulan Maret 2021. Awalnya ada salah satu anggota yang mengikuti pelatihan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) di Kantor Wali Nagari kemudian setelah pulang dari sana membuat SK (Surat Keputusan) dari Wali Nagari

Kurnia Selatan mengenai Penetapan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Bahagia Jorong Koto Bakti Nagari Kurnia Selatan, kemudian mulailah membentuk suatu kelompok dan berdirilah kelompok UPPKA ini. Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia ini sudah berjalan sekitar 3 bulan terhitung dari bulan Maret-Juni 2021, namun meskipun masih tergolong baru kelompok ini sudah mendapat dukungan dari bapak Wali Nagari. Kelompok UPPKA ini masih sering juga mengikuti kegiatan UKM (Usaha Kecil dan Menengah) untuk menambah ilmu serta nantinya bisa memunculkan inovasi lain yang bisa diciptakan.

Berikut ini adalah nama anggota kelompok UPPKA Keluarga Bahagia Jorong Koto Bakti, yaitu:

No	Nama	Jabatan	Pekerjaan
1	Roliah	Ketua	Ibu Rumah Tangga
2	Yulianti	Sekretaris	Ibu Rumah Tangga
3	Yuci Lestari	Bendahara	Ibu Rumah Tangga
4	Istiah	Anggota	Ibu Rumah Tangga
5	Rina Wati	Anggota	Ibu Rumah Tangga
6	Karni	Anggota	Ibu Rumah Tangga
7	Siti Soleha	Anggota	Ibu Rumah Tangga
8	Watini	Anggota	Ibu Rumah Tangga
9	Heni	Anggota	Ibu Rumah Tangga
10	Asnam	Anggota	Ibu Rumah Tangga
11	Haryanti	Anggota	Ibu Rumah Tangga
12	Prihatin	Anggota	Ibu Rumah Tangga
13	Kasih Fatimah	Anggota	Ibu Rumah Tangga

Diantara para ketua, sekretaris, bendahara dan seluruh anggota mereka bekerja sama, saling membantu, bahu-membahu untuk terus mewujudkan bagaimana agar Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia ini bisa memproduksi sesuatu yang unik lainnya, bisa bertambah maju, berkembang dan agar bisa terus membantu perekonomian masyarakat yang ada di Jorong Koto Bakti khususnya seluruh anggota kelompok UPPKA.

Di dalam Kelompok UPPKA, tugas ketua (Ibu Roliah) yaitu memimpin dan mengendalikan kegiatan para anggota pengurus dalam melaksanakan tugasnya dan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pimpinan organisasi. Tugas sekretaris (Ibu Yulianti) yaitu

bekerja pada bidang administratif dan membantu ketua untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan administrasi. Tugas bendahara (Ibu Yuci Lestari) yaitu mengendalikan keuangan, hal-hal yang berkaitan dengan uang baik yang mengatur tentang uang masuk yang diterima bagi Kelompok UPPKA atau pada saat ada uang keluar bagi keperluan Kelompok UPPKA itu sendiri. Dan untuk tugas seluruh anggota (seperti Ibu Istiah, Ibu Rina Wati, Ibu Karni, Ibu Siti Soleha, Ibu Watini, Ibu Heni, Ibu Asnam, Ibu Haryanti, Ibu Prihatin dan Kasih Atimah) yaitu aktif melaksanakan dan mengembangkan seluruh program atau kegiatan yang ada di dalam Kelompok UPPKA.

Tujuan berdirinya Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia di Jorong Koto Bakti, yaitu:

1. Sebagai proses belajar untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan para wanita subur yang ber-KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang).
2. Dibentuk dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan wanita dalam memperoleh uang secara mandiri.
3. Untuk menambah pemasukan agar dapat meningkatkan kondisi ekonomi keluarga dari seluruh anggota.
4. Dapat mengembangkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).
5. Memberikan tambahan pengetahuan serta pengalaman dalam berorganisasi.

Bentuk modal Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia sebagai berikut:

1. Kemampuan

Dalam melakukan usaha/kegiatan yang ada dalam Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia, para anggota menggunakan bahan-bahan yang ada atau tersedia di lingkungan sekitar.

2. Tekad

Kemauan serta dukungan yang diberikan dari Wali Nagari membuat seluruh anggota Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia dalam menjalankan usaha dengan penuh tanggungjawab.

3. Jasa atau tenaga

Dengan adanya keahlian dan keterampilan dari para seluruh anggota Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia untuk saling membantu satu sama lain serta berperan aktif dalam mensukseskan kegiatan kelompok.

Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia ini dibimbing dan dibina langsung oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Sumatera Barat dengan tujuan dapat

meningkatkan perekonomian keluarga melalui ibu-ibu milenial yang aktif bidang UKM. Bimbingan yang dilakukan pun memiliki jadwal. Berikut jadwal nya:

1. Bimbingan dari Kecamatan dilakukan setiap 1 bulan sekali.
2. Bimbingan dari Kabupaten dan Provinsi dilakukan selama 3 bulan sekali.

Dari setiap bimbingan yang dilakukan bersama BKKBN Sumatera Barat ada beberapa apresiasi yang sudah berhasil di raih oleh Kelompok UPPKA “Keluarga Bahagia” yaitu apresiasi dari BKKBN Provinsi berupa bantuan ATTG (Alat Teknologi Tepat Guna). Bantuan ini terdiri dari kompor turbo 1 tungku, blender, mixer dan alat press.



Gambar 2. Pelatihan bersama BKKBN Sumatera Barat



Gambar 3. Pelatihan bersama BKKBN Sumatera Barat

Gambar 2 dan gambar 3 adalah potret beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia bersama BKKBN Sumatera Barat. Pelatihan dan kegiatan yang sudah diikuti sifatnya membimbing dan melakukan evaluasi tentang rasa, kualitas dan

kebersihan dalam memproduksi makanan sehingga DDS mempunyai kemajuan dalam setiap langkah nya.

Pada saat pelatihan bersama BKKBN Sumatera Barat, peserta diberi pengetahuan cara mengelola usaha dan pendapatan. Para peserta pun penuh dengan semangat serta antusias mengikuti dan mendengarkannya. Umumnya para peserta belum banyak memahami cara mengelola usaha dan menambah pendapatan, sehingga penghasilan yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja. Namun setelah mengikuti pelatihan bagaimana cara mengelola usaha dan administrasi usaha secara sederhana maka masyarakat mampu menambah pengetahuan dan wawasannya serta mempraktekan pelatihan tersebut sehingga nilai bahan makanan tersebut menjadi berbeda, memiliki harga jual yang tinggi dan tentunya bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat tersebut. Dengan demikian para peserta pelatihan dapat menganalisis usahanya, memperoleh ilmu dan kemudian akan bisa dipraktekan sendiri.

4. Dendeng Daun Singkong Adalah Ikon Ekonomi Kelompok UPPKA di Jorong Koto Bakti

Ada beragam alasan yang muncul saat pertama kali Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia membuat DDS, yaitu:

1. Setiap Jorong yang ada di Nagari Kurnia Selatan diharuskan membentuk KWT (Kelompok Wanita Tani). Maka masyarakat di Jorong Koto Bakti khususnya kelompok UPPKA mencari ide tentang sesuatu makanan yang enak tetapi jarang diproduksi oleh orang lain dan dapat diperjual belikan di sekitar Nagari Kurnia Selatan. Maka munculah ide/inovasi untuk membuat makanan cepat saji yang berasal dari daun singkong ini.
2. Karena daun singkong merupakan suatu sayur yang dianggap biasa saja dan penjualannya pun tidak begitu diminati maka diolah daun singkong ini oleh para anggota kelompok UPPKA. Tujuan dari pengolahan ini tentunya juga untuk memakmurkan para petani daun singkong agar pemasarannya lebih banyak.

Setelah adanya alasan diatas, akhirnya diolah lah daun singkong ini menjadi makanan yang cepat saji, gurih dan enak. Kemudian karena sisa dari daun singkong yang diolah tersebut tidak semua bagiannya terpakai dan menyisakan limbah maka limbah dari daun singkong tersebut dijadikan pupuk. Pupuk ini nantinya pun akan sangat berguna untuk penyuburan proses penanaman daun singkong.

Jadi, dapat disimpulkan kenapa DDS menjadi ikon ekonomi di Jorong Koto Bakti karena pada umumnya masyarakat yang ada di Jorong Koto Bakti bekerja sebagai petani karet. Dari

bertani karet ini penghasilan yang diperoleh pun bisa dikatakan cukup. Penghasilan mereka pun tidak tentu tergantung juga bagaimana harga karet per kilogram nya. Nah dengan adanya pembuatan dan penjualan DDS ini yang dilakukan oleh para wanita subur yang merupakan anggota di kelompok UPPKA tentu nantinya akan menambah uang masuk bagi para IRT dan bisa membantu perekonomian bagi keluarga mereka.

Apabila masyarakat mengelola hasil sumber daya alam lokal dengan baik disertai dengan promosi yang efektif maka peminat DDS ini dari daerah yang berada di luar Jorong Koto Bakti akan lebih banyak. Dan apabila produk-produk hasil pertanian diolah dengan baik akan memiliki nilai jual yang tinggi, dengan begitu taraf ekonomi masyarakat akan meningkat (Paramita, dkk, 2018, hal. 21).

D. Kesimpulan

Dendeng Daun Singkong (DDS) adalah olahan makanan yang terbuat dari daun singkong. Olahan daun singkong pun harus melalui beberapa tahapan untuk dijadikan sebagai dendeng, antara lain dicuci dulu, direbus, kemudian dipipihkan dan sampai pada tahap akhir yaitu penggorengan. DDS merupakan makanan cepat saji satu-satunya yang hanya ada di Jorong Koto Bakti, sehingga DDS ini dijadikan sebagai makanan khas dari Jorong Koto Bakti. DDS memiliki cita rasa gurih dan renyah. DDS dapat dijadikan sebagai cemilan saat sedang bersantai dengan keluarga, kerabat, teman ataupun sahabat, bisa dijadikan cemilan saat menonton drakor/film dan hidangan saat menerima tamu di rumah. Tidak hanya itu DDS pun bisa diolah kembali untuk dijadikan menu makan pagi, siang, sore dan malam, caranya yaitu dengan cara dijadikan sambal dendeng. Saat memasak sambal dendeng pun bisa dicampur dengan makanan lain sesuai dengan selera masing-masing, misalnya dicampur petai, jengkol, dll.

DDS diolah dan diproduksi oleh Kelompok UPPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor) yang ada di Jorong Koto Bakti. Kelompok UPPKA Jorong Koto Bakti dikenal dengan nama Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia. Yang mana didalam kelompok UPPKA memiliki 3 pengurus inti dan 10 anggota. Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia memiliki motto sukses bersama bangkitkan ekonomi keluarga. Dalam pembelian DDS yang di produksi Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia, kita bisa memesannya dengan sistem PO (Pre Order) karena waktu untuk membuatnya tidak bisa dilakukan sehari saja tetapi dilakukan selama 2 hari dan jika sudah memesan nanti akan diantar langsung oleh salah satu anggota ke alamat dengan sistem delivery ataupun jika DDS sudah tersedia kita bisa langsung membelinya. Harga dari DDS cukup terjangkau yaitu 1 bungkus Rp10.000 saja. Dengan harga segitu tentunya dapat

dikatakan bahwa harganya sangat terjangkau karena tidak terlalu murah dan juga tidak terlalu mahal.

DDS dapat dijadikan ikon ekonomi Kelompok UPPKA karena pemasarannya berhasil laris dipasaran, penjualannya pun cukup diminati oleh masyarakat sekitar. Karena menurut masyarakat, DDS ini jarang/langka ditemui apalagi harganya pun sangat terjangkau jadi mereka memiliki antusias yang tinggi untuk mencicipinya. Tidak hanya dari masyarakat sekitar saja namun daerah luar Jorong Koto Bakti pun juga sudah banyak yang membeli. Biasanya DDS ini juga sering dijadikan menu didalam acara/pesta, seperti acara nikahan, khitanan. Dengan adanya hal tersebut tentunya peminat DDS akan lebih banyak lagi karena nantinya banyak masyarakat yang akan datang ke pesta dan mencicipinya dan diharapkan pemasaran DDS dapat lebih banyak dan berkembang lagi. Jika pemasaran DDS lebih banyak lagi tentunya akan banyak pemasukan bagi seluruh anggota Kelompok UPPKA Keluarga Bahagia (setelah dipotong untuk uang kas).

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Adi L.T. (2007). *Terapi Herbal Berdasarkan Golongan Darah*. Tangerang: PT AgroMedia Pustaka.
- Kurniawan A. (2021). *Prakarya dan Kewirausahaan Untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kusantati H., Pipin P.T. Winwin W. Ana. Aminudin. & Yudi I. (2008). *Keterampilan*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Purnomo H. (2012). *Teknologi Pengolahan dan Pengawetan Daging*. Malang: UB Press.
- Ramayulis R. (2015). *Green Smoothie*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rohman A. (2020). *Ensiklopedi Singkong*. Yogyakarta: Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Soekarto S.T. (2020). *Teknologi Hasil Ternak*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.

Jurnal Ilmiah

- Firdausni & Annova I.T. (2015). Pemanfaatan Daun Ubi Kayu Menjadi Dendeng Sebagai Makanan Alternatif Vegetarian Pengganti Protein. *Jurnal Litbang Industri*, 5(1), 62.
- Nurbaya B., Tamzil I., Nirwan., Nur P., Juztika A.F. & Suloi A.N.F. (2018). Roti Natural (Produk Roti Daun Singkong Varian Rasa). *Jurnal Prosiding PKM-CSR*, 1, 414.
- Nurdiansyah D.H. & Manda G.S. (2018). Peranan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (Uppks) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. *E-Qien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 57.

Suprihatin. (2020). Pelatihan Pembuatan Dendeng Daun Singkong Di Desa Cangkarman, Kecamatan Konang, Bangkalan, Madura. *Jatekk: Jurnal Abdimas Teknik Kimia*, 1(1), 28.

Disertasi, tesis, skripsi

Laksita M.D. (2019). *Pengaruh Penambahan Daun Singkong (Manihot Utilissima) Terhadap Kadar Protein Dari Tempe*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung.

Wawancara

Yulianti. *Wawancara Pribadi*. Dendeng Daun Singkong dan Kelompok UPPKA. Sabtu 19 Juni 2021.



14

RIRIN SAFITRI

*Analisis Dampak Pendistribusian Beras Miskin
(RASKIN) Terhadap Pengentasan Kemiskinan
Pada Nagari Ujunggading Kecamatan
Lembanh Melintang Kabupaten Pasaman*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



**ANALISIS DAMPAK PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN) TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN PADA NAGARI UJUNGGADING KECAMATAN
LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Ririn Safitri

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Program Raskin (Beras Miskin) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin sebagai bentuk dukungan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan ketahanan pangan kepada rumah-rumah tangga yang miskin melalui distribusi beras murah Jumlahnya 10 kg per karung. Program tersebut menargetkan 16 Jorong di Nagari Ujunggading Pasaman Barat, namun kondisi miskin di Nagari Ujunggading terdapat pada Jorong Koto Sawah. Situasi ini membutuhkan intervensi pemerintah melalui program kerja. Kemiskinan memiliki dampak yang kuat terhadap pembangunan manusia, karena masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang muncul dari daya beli masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, namun semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka akan semakin banyak pula penduduk yang tumbuh di wilayah tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai pemerataan dalam pendistribusian kekayaan baik dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Pemerataan dan kesejahteraan sosial tergantung pada sistem ekonomi yang berkembang dengan baik. Adil dan jujur karena karakter pemerannya, sekecil apapun dalam Islam, kita semua akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Penerapan Deployment bertujuan untuk saling memberi dan menguntungkan.

Kata Kunci: *Raskin, Pendistribusian, Kemiskinan*

A. Pendahuluan

Nagari Ujunggading merupakan salah satu wilayah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Nagari ini lebih besar dan berpenduduk lebih banyak dari Nagari

Simpang Ampek ibu kota Kabupaten Pasaman Barat. Nagari Ujunggading ini adalah salah satu daerah yang memiliki dataran rendah, bertanah liat dan keras dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dengan luas wilayahnya 263,77 km², perumahan sosial telah dibangun di sebagian besar wilayah dengan kawasan perkebunan seperti kelapa sawit, jagung, dan karet. Nagari Ujunggading Kecamatan Lembah melintang di kabupaten Pasaman Barat adalah rumah bagi berbagai kelompok etnis seperti Melayu, Mandailing dan Jawa. Namun, sebagian besar suku Nagari Ujunggading adalah suku Melayu. Suku Melayu adalah salah satu suku Bangsa yang identik dengan Islam.

Oleh karena itu, Islam adalah agama atau kepercayaan mayoritas di Nagari ini. Dilihat dari sektor ekonomi, masyarakat di Nagari Ujunggading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat bekerja sebagai buruh, petani, dan pedagang, dan tidak sedikit diantaranya bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di instansi-instansi pemerintahan. Namun, dari sekian banyak jenis pekerjaan yang digeluti masyarakat, sebagian besar ternyata adalah pertanian. Berdasarkan data kependudukan Nagari Ujunggading Kecamatan Lembah melintang Kabupaten Pasaman Barat, menunjukkan bahwa Nagari merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut data yang diperoleh, ±40% (persen) penduduk Jorong ini masih berada di bawah garis kemiskinan.

Tingginya angka kemiskinan menjadikan masyarakat mendukung dan antusias dengan program yang dijalankan pemerintah untuk memberikan bantuan beras miskin (Raskin) kepada masyarakat miskin sehingga mereka membantu sekali dan dapat menjalankan kehidupan sebagaimana masyarakat lainnya. Kebijakan pemerintah Daerah untuk mendukung beras murah (beras miskin) kepada mereka yang tidak mampu didistribusikan oleh bulog Lubuk Basung ke Kecamatan, lalu disalurkan kerumah jorong oleh tim Kecamatan. Setelah Raskin tiba di Jorong, Jorong bertanggung jawab untuk membagikan beras miskin kepada orang-orang dalam daftar untuk menerima Raskin (beras untuk orang miskin) sebanyak 1 karung beras sebesar 10 kg. Peningkatan SDM (sumber daya manusia) yang berkelanjutan berarti suatu daerah yang terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat, Nagari Ujunggading yang memiliki 16 Jorong. Aliran ini sudah memiliki basis sumber daya manusia yang kuat dan dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman.

Situasi buruk Nagari Ujunggading terlihat di Jorong Koto sawah. Situasi ini membutuhkan intervensi pemerintah melalui program kerja. Kemiskinan dapat berdampak signifikan terhadap

pembangunan manusia, karena masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks akibat daya beli masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan. Pertumbuhan ekonomi penting bagi pembangunan manusia, tetapi semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka semakin baik pula pembangunan manusianya.

Dalam Islam pun, kemiskinan merupakan salah satu masalah kehidupan dan bahkan bencana dianggap dapat diselesaikan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab dengan kata lain, dalam bahasa ini fuqru berarti ihtiyaj (membutuhkan), dan siapa yang membutuhkan disebut dengan faqir. Sebaliknya, dalam istilah Syara' faqir berarti orang yang miskin, lemah dan tidak bias dimintai apa-apa. Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu hal yang dapat merusak akhlak, logika dan keluarga, dan seluruh umat Islam menyikapinya sebagai bencana, yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang disembunyikan di dalamnya jika, kemiskinan ini merajalela maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupakan Allah SWT. Masalahnya adalah jika dia menjadi seperti raja maka kekayaannya menjadi seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah SWT maupun manusia lainnya, ada beberapa bentuk ke zaliman seperti zalim kepada Allah SWT, manusia, dan zalim kepada diri sendiri. (Wildana, 2011, hal. 14).

Menurut saya, keterkaitan antara beras miskin (Raskin) dan perspektif ekonomi Islam terkait karena Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam distribusi kekayaan baik dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Pemerataan dan kesejahteraan sosial tergantung pada sistem ekonomi yang telah dicapai. Dari karakteristik pendistribusiannya, itu adil dan jujur. Karena dalam Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kita semua akan bertanggung jawab di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi dimaksudkan untuk saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat satu sama lain. Secara umum Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak merugikan salah satu pihak. (Kunarjo, 2003, hal. 81). Ketika terjadi ketidakseimbangan dalam distribusi kekayaan, hal itu menyebabkan konflik pribadi dan sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kemiskinan global ini adalah dengan melakukan keadilan ekonomi.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif. *Field Research* (peneliti lapangan) dilakukan langsung di lokasi tujuan, sedangkan penelitian pustaka hanya sebagai tambahan teoritis terhadap masalah yang diteliti. Data yang dikumpulkan dalam survei ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data tambahan yang diberikan oleh dari berbagai instansi seperti Jorong Ujunggading Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, jurnal, dokumen dan internet. Ini dilakukan untuk melihat bagaimana mengumpulkan dan mendistribusikan beras miskin. Untuk mendapatkan data yang akurat tentang penulis mengunjungi setiap individu, dan sering berpartisipasi dalam mengamati aktivitas mereka. Sedangkan data skunder. Data ini berfungsi sebagai data tambahan untuk dokumen, foto, wawancara, dll. sudah ada sebelumnya.

C. Pembahasan

Analisis Raskin Terhadap Pengentasan Kemiskinan

1. Pengertian Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan yang meliputi serangkaian kegiatan seperti menganalisis, membedakan, mengurutkan sesuatu untuk diklasifikasikan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, mencari hubungan dan menafsirkan makna dari objek-objek tersebut. (*Wirandi*). Menurut definisi lain, analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan hati-hati dan penuh teliti, atau proses memahami atau menafsirkannya dengan menggunakan data dan metode statistic untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut.

Menurut Sugiono (2015:335), analisis adalah kegiatan yang berusaha menemukan pola dan gagasan yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian, dan hubungan dengan keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya).

2. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah kemampuan finansial untuk mencapai taraf hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kurangnya kemampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan, sandang dan papan. Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana masyarakat tidak

mampu menghidupi dirinya sendiri sesuai dengan taraf hidup kelompoknya bahkan menggunakan tenaga mental dan fisiknya di dalam kelompok. (Nugroho, 1995)

Menurut Gillin, kemiskinan memberikan efisiensi fisik dan mental yang memungkinkan individu dan keluarga mereka berfungsi secara normal menurut standar sosial, misalnya karena pendapatan yang tidak memadai atau kecerobohan, tangga kehidupan yang cukup tinggi biaya. (Suryawati, 2004) Menurut Bappenas, kemiskinan adalah keadaan kekurangan total, karena seseorang memiliki kekuatan untuk menghindari situasi buruk.

Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)

1. Program Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN)

Raskin adalah beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga di bawah harga pasar. Beras miskin mulai muncul pada tahun 1998 saat krisis keuangan untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin (RTM). Raskin adalah subsidi pangan beras untuk rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada keluarga yang terkena dampak. Keberhasilan program Raskin diukur dari tingkat pencapaian indikator 6T. Artinya, tujuan yang tepat 6 29, jumlah yang tepat, harga yang tepat, waktu yang tepat, kualitas yang tepat, dan tujuan yang tepat adalah program. Program ini. Mengurangi beban pengeluaran keluarga sasaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan memenuhi kebutuhan pangan tertentu. Selain itu, Raskin juga bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga dengan cara menjual beras dalam jumlah tertentu untuk kepentingan keluarga. Program Raskin merupakan program nasional vertikal (pemerintah pusat hingga pemerintah daerah) dan horizontal (antar kementerian), dengan semua pemangku kepentingan bertanggung jawab atas tanggung jawabnya masing-masing Tujuan dari program Raskin.

2. Sasaran Program Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin)

Program Raskin 2016 bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran RTS 15.530.897 untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan membagikan 15 kg beras bersubsidi setiap bulan kepada setiap keluarga miskin.

Indikator keberhasilan program raskin:

- a. Tepat sasaran penerima manfaat, raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat (DPM-I), dan di beri identitas (kartu raskin atau bentuk lain)
- b. Tepat jumlah jumlah beras, raskin yang merupakan hak penerima manfaat adalah sebanyak 10 sampai dengan 15 Kilogram RTM, perbulan sesuai dengan hasil musyawarah.
- c. Tepat harga, harga beras raskin adalah sebesar Rp. 1.600 per Kilogram netto di titik distribusi.
- d. Tepat waktu, waktu pelaksanaan distribusi beras kepada rumah tangga miskin penerima manfaat raskin sesuai dengan rencana distribusi.
- e. Tepat kualitas, kualitas beras yang dibagikan kepada rumah tangga miskin harus layak untuk dikonsumsi.
- f. Tepat administrasi, terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

Pengertian dan Dasar Hukum Distribusi

Distribusi adalah pendistribusian barang yang dikirimkan ke banyak orang dan tempat. (Dessy, 2001, hal. 125). Distribusi adalah kumpulan organisasi yang menerapkan proses yang memungkinkan konsumen (pembeli) untuk menggunakan atau mengonsumsi barang dan jasa. (Emba, 2018, hal. 1750). Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi dan harus ditanggapi dengan serius. Namun, dari sudut pandang ekonomi kapitalis, pemahaman ini berbeda karena faktor distribusi adalah faktor produksi, dan bukan yang menyebabkan masalah ekonomi di masyarakat. "Produksi adalah jantung dari masalah ekonomi. Dengan demikian, para ekonomi kapitalis berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidak cukupan) adalah kurangnya atau tidak adanya atau terbatasnya penggunaan barang dan jasa untuk dipenuhi. Ini tentu sebuah kemungkinan. Untuk mengatasinya. Masalahnya, orang harus bekerja keras untuk memproduksi alat sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk menutup celah ini, kita harus memaksimalkan produksi."

Dari pendapat di atas, hal ini yang menjadikan hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestic Product*) dan GNP (*Gross National Product*) adalah persoalan penting bagi mereka, tanpa melihat orang per orang, apakah mereka sejahtera atau tidak. Karena yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara. Di sisi lain, dari sudut pandang ekonomi Islam, pendapat di atas sangat salah.

Menurut sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, tetapi masalah distribusi. Almalik berkata: “Masalah ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam yang tersedia. (Rahmawaty, 2010)

Melainkan pada distribusi sumber daya tersebut karena sumber daya ini sepenuhnya disediakan oleh Allah SWT (Sura Hud [11]: 6). Manusia. Tidak peduli berapa banyak produk atau layanan yang Anda miliki, tanpa pembatasan distribusi dan konsumsi yang tepat, yang lain selalu kekurangan pasokan.

Oleh karena itu, efek distribusi dalam ekonomi Islam sangat luas, termasuk pengaturan kepemilikan faktor-faktor produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di sini, Islam menetapkan aturan untuk pembelian dan penggunaan properti umum dan khusus, serta aturan warisan, wakaf, dan wasiat. Ekonomi Islam juga memiliki kebijakan mengenai distribusi pendapatan antara faktor-faktor produksi dan antara komunitas individu dan kelompok mereka, dan pengembalian distribusi ke sistem jaminan sosial sebagaimana yang disampaikan dalam ajaran Islam.

Adapun dasar hukum distribusi menurut ekonomi Islam adalah:

وَمِنْهُمْ مَّن يَّمْرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ٥٨
[سورة التوبة, ٥٨]

Artinya: “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah” [At Tawbah: 58].

Allah SWT juga berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِللرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

[سورة الحشر, ٧]

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwal kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.
[Al Hashr: 7]

Karena memperhatikan bahayanya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar ini, maka Islam mengutamakan tema distribusi dengan perhatian besar yang terlihat dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya nash al-qu'an dan hadits Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang baik serta memperingatkan penyimpangan dari sistem yang besar.
2. Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas serta tugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
3. Banyak komprehensif siste dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik itu dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah).
4. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, serta mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.
5. Dala fiqih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, “Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal kebaikan yang akan selalu kalian berkomitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum dan adil dalam pendistribusian”.

Kriteria Masyarakat Miskin

Program Raskin (Program Pembagian Beras untuk Keluarga Miskin) merupakan program pemerintah. Program ini merupakan tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri dan Presiden Perum Bulog No.25 dan PKK 12/07/2003. Pada tahun 2003, organisasi yang berkepentingan, pemerintah daerah dan masyarakat telah dilibatkan. Saat melaksanakan program orang-orang dari program Ruskin perlu menetapkan kriteria tertentu. Kamus bahasa Indonesia menjelaskan bahwa kriteria adalah seperti kriteria, tingkatan, ukuran dll. mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu.

Adapun menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 14 kriteria dari masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai Rumah Tangga Miskin (RTM), (Harni M. Wahyuning dkk ,2015) antara lain sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lanti tempat tinggal terbuat dari tanah / bambu / kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumahtangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai / air hujan.
7. Baha bakar untuk memaak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dala setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poli klinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah / tidak taat SD / hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sebuah keluarga diklasifikasikan sebagai miskin jika setidaknya sembilan variabel terpenuhi. Selanjutnya, ketika mengukur kemiskinan masyarakat, Indonesia (dalam hal ini BPS) menghitung pengeluaran minimum untuk mengkonsumsi 2.100 kalori per orang per hari. BPS juga menghitung biaya minimum untuk perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Jumlah ini ditinjau setiap tahun dan disesuaikan dengan kenaikan harga. Pendekatan ini telah dilakukan oleh BPS sejak tahun 1970-an. Dengan pendekatan ini, BPS akan menciptakan 26, 2 juta orang miskin pada Maret 2020.

Namun, organisasi internasional seperti Bank Dunia harus memiliki standar yang digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan di semua negara di dunia. Bank Dunia tidak dapat membandingkan negara. Pada tahun 1990, Bank Dunia memperkenalkan standar bahwa setiap orang yang membelanjakan kurang dari 1 dolar AS dianggap miskin. Angka dolar AS disebut garis kemiskinan internasional.

Angka ini diperoleh dengan mensurvei garis kemiskinan di banyak negara, dan Bank Dunia memperkirakan bahwa USD1 dapat mewakili garis kemiskinan yang digunakan di banyak negara. Ketika harga naik, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional. Sementara itu, mereka menggunakan skala USD2 untuk garis kemiskinan internasional. Angka ini melebihi garis kemiskinan Indonesia. Itu sekitar USD1,50 per orang per hari. Berdasarkan kriteria tersebut, Bank Dunia menemukan bahwa ada 100 juta orang miskin di Indonesia. Berdasarkan penjelasan di atas, mengukur kemiskinan masyarakat dari perspektif BULOG, BPS (Pemerintah) dan Bank Dunia, berdasarkan asumsi dari data yang dihitung di tingkat nasional dengan kriteria tertentu yang ditentukan. Saya mengerti. Ketika perhitungan dilakukan berdasarkan kriteria dan asumsi, beberapa dari mereka yang memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai miskin (RTM).

Hal ini berbeda dengan standar kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, dengan menetapkan standar atau standar kemiskinan, individu di negara itu mengenalinya. Suatu populasi dapat dikatakan sejahtera jika individu tersebut kompeten dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan utama yang relevan adalah kebutuhan rata-rata, makanan dan kepuasan tempat tinggal.

Menurut Abu A'al Al-Mauddi, masyarakat tidak dikategorikan kepada miskin, ketika memenuhi lima kriteria yang ditetapkan, yaitu:

- a. Terpenuhi kebutuhan sedang.

- b. Terpenuhi kebutuhan pangan.
- c. Terpenuhi papan.
- d. Terpenuhi pendidikan.
- e. Terpenuhi kesehatan.

Selanjutnya, bila mereka mampu memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier dengan cara yang di ridhai oleh Allah SWT, maka mereka tergolong masyarakat yang makmur.

Urgensi dan Tujuan Distribusi

Ekonomi Islam dilengkapi dengan sistem distribusi yang mencapai tujuan berbeda yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Secara keseluruhan, sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam, bersama dengan sistem syariah dan politik lainnya, telah berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan umum hukum Islam. (Drs.Moh, 2008, hal.93)

Dimana, tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada beberapa tujuan, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Islam itu sendiri. Misalnya, bagian muallaf di dalam zakat, dimana mereka ada yang berasal dari orang kafir yang diharapkan ke Islam-nya atau dicegah keburukannya atau orang Islam yang di harapkan kuat ke-Islamannya. Sebagaimana sistem distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain, pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah SWT berfirman:

إِنَّ يَمَسُّكُمْ فَرَحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرَحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ
 نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ١٤٠
 [سورة آل عمران, ١٤٠]

Artinya: “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka

mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim". [Al 'Imran: 140]

Di dalam tafsir *Fathu al-Qadir* Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa orang-orang yang menyerakan sebagian harta mereka karena Allah SWT itu berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah yang lain sebagai pelatihan.

2. Tujuan Pendidikan

Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti firman Allah di bawah ini:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [سورة التوبة, ١٠٣]

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. [At Tawbah: 103]

Dari dalil di atas, menurut As-Sa’adi dalam *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Manan* diterangkan bahwa zakat merupakan yang cara pengambilan ditribusi dapat memberikan para pemberinya diri dosa dan akhlak tercela, menambahkan akhlak baik dan amal shaleh, mengembangkan harta dan menambahkan pahala di dunia dan di akhirat.

Di samping itu, secara umum dalam perspektif ekonomi Islam tujuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain.
- b. Mensucikan diri dari akhlak tercela, seperti kikir dan mementingkan diri sendiri (egois).

3. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting dalam distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada firman Allah SWT di bawah ini:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي

الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٢٧٣
[سورة البقرة, ٢٧٣]

Artinya: “(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”. [Al Baqarah: 273]

- b. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang diantara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
- c. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, dimana akan berdampak pada teralisasi keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan kekayaan akan berdampak kepada kelompok di daerah miskin, serta bertambahnya tingkat kemiskinan yang berdampak pada ketidak tentraman.

Keadilan dalam distribusi mencakup tentang:

- 1) Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
- 2) Pendistribusian pemasukan diantara unsur-unsur produksi.
- 3) Pendistribusian diantara masyarakat yang ada, keadilan dalam pendistribusian diantara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

4. Tujuan Ekonomi

Distribusi ekonomi islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomi yang penting, dimana yang terpenting diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain baik infak wajib maupun infak sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
- b. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya

dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distribusi dalam ekonomi islam dapat menghilangkan faktor-faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi, seperti utang yang membebani pundak orang-orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terkait untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutan dan bagian bagi hamba sahaya.

- c. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, tetapi juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat. Oleh sebab itu, kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT di bawah ini:

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَنْبِيئًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ
 أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ
 [سورة البقرة, ٢٦٥]

Artinya: “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat [Al Baqarah: 265]

Dari dalil di atas, dapat dipahami bahwa orang-orang yang membelanjakan hartanya karena keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka kepada iman dan ibadah-ibadah yang lain, sebagai bentuk pelatihan kepadanya, sehingga setiap manusia terus tetap bertakwa kepada Allah SWT.

Pendistribusian Pendapatan

Konsep dasar kapitalisme dalam hal distribusi adalah kepemilikan pribadi. Akibatnya, masalah muncul karena perbedaan yang signifikan dalam kepemilikan, pendapatan dan harta. Milton H. Spence menyatakan: “Kapitalisme adalah sistem organisasi

ekonomi yang dicirikan oleh hak kepemilikan private (individu) atas alat-alat produksi dan distribusi serta penggunaannya untuk keuntungan dalam situasi persaingan yang sangat tinggi. (Muh, 2008, hal. 74). Di sisi lain, sosialisasi menganggap pekerjaan paruh waktu sebagai dasar distribusi pendapatan. Perbedaan kepemilikan bukan karena kepemilikan individu, tetapi perbedaan keterampilan dan bakat individu, karena semua barang hanya dapat dihasilkan dari hasil kerja individu. Menurut warga Inggris, "sosialisme dapat dipahami sebagai bentuk ekonomi di mana pemerintah bertindak dalam sebuah partai yang setidaknya dipercaya oleh semua orang dan menciptakan industri strategis besar yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dalam Islam, kebutuhan sebenarnya adalah alasannya. Untuk mencapai pendapatan minimum. Jika kecukupan standar hidup yang baik (nisab) adalah yang paling mendasar dalam sistem redistribusi kekayaan, itu adalah pekerjaan. Dan hanya terkait dengan hak milik pribadi. Pendapatan setiap orang sebagai tujuan utama dan akhir dari sistem distribusi dan pembangunan ekonomi. Namun, ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan apa yang mendasari ketimpangan pendapatan individu.

Ada beberapa aspek dan merupakan pembagian pendistribusian pendapatan, yaitu:

1. Distribusi Pendapatan Dalam Rumah Tangga

Karena nilai-nilai Islam melekat dalam keluarga Islam, bahwa seluruh proses kegiatan ekonomi harus dimulai dengan produktivitas, hak milik, konsumsi, perdagangan dan investasi dan didasarkan pada legitimasi hralharam. Kegiatan yang berkaitan dengan aspek hukum memberikan pintu gerbang bagaimana umat Islam membagi pendapatannya. Distribusi pendapatan dalam konteks keluarga dikatakan erat kaitannya dengan terminologi shodaqoh. Pengertian zakat di sini bukan berarti sedekah dalam pengertian Indonesia, melainkan sedekah dalam pengertian Al-Qur'an. Dalam kamus bahasa Indonesia, sedekah adalah sedekah kepada fakir miskin dan oleh karena itu dilandasi oleh rasa cinta terhadap sesama. Di sisi lain, sedekah dalam konteks terminologi Al-Qur'an dapat dipahami dalam dua cara. Yaitu, shadaqah wajib seperti nafaqah, zakat, udziyyah, sukseki, musa'adah, jiwari, diyafah (wajib dan terutama berlaku untuk Islam). Dan nafilah (sunnah, terutama berlaku bagi umat Islam) sedekah, infaq, aqiqah, wakaf, dll. Di sisi lain, isu penting dalam distribusi pendapatan keluarga adalah terminologi dokumen hukum (had/hudud) seperti kafarat,

/diyat dan nudzur. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa konsep pembagian pendapatan keluarga dengan sedekah merupakan konsep yang membuat perbedaan besar antara ekonomi Islam dan ekonomi lainnya. Ekonomi Islam mengasumsikan sedikit preferensi dalam distribusi pendapatan keluarga. Selain itu, mengenai kewajiban Zakat, ekonomi Islam memiliki beberapa persyaratan wajib (karakteristik khusus) untuk barang Zakat. Kebutuhan keluarga yang pertama-tama harus dibagikan (dilepaskan) dari total kekayaan dari kepemilikan harta yang mereka miliki, dan lebih baik melunasi hutangnya.

Dengan demikian, setiap instrumen yang ditawarkan Islam dalam memecahkan permasalahan ketidaksetaraan pendapatan (*inequityincome*) antar rumah tangga pada dasarnya dapat disesuaikan dengan cara seseorang dalam mencari kekayaan, yaitu:

a. Fase Akumulasi (*accumulation phase*)

Fase akumulasi yaitu tahap awal sampai pertengahan karier. Pada fase ini individu mencoba meningkatkan asetnya (kekayaan) untuk dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek. Secara umum, pendapatan bersih dari individu dalam fase ini adalah besar. Untuk itu, ekonomi rumah tangga dapat menfokuskan pengeluarannya khusus untuk meningkatkan produktivitas dana dalam memenuhi kebutuhannya.

b. Fase Konsolidasi (*consolidation phase*)

Fase konsolidasi adalah individu yang berada dalam fase ini biasanya telah melalui pertengahan perjalanan karirnya. Dalam fase ini biasanya pendapatan melebihi pengeluaran. Mereka yang ada di fase ini dapat menginvestasikan dananya untuk tujuan jangka panjang. Karena itu, pada setiap kelebihan asetnya, individu dapat melakukan kewajiban zakat dan instrumen-instrumen lainnya yang lebih terkait kepada perayaan rasa syukur.

c. Fase Pengeluaran (*spending phase*)

Fase ini secara umum dimulai pada saat individu memasuki masa pensiun. Kebutuhan akan biaya hidup harian mereka peroleh dari investasi yang mereka lakukan pada dua fase sebelumnya. Pada fase ini, kewajiban untuk memberikan nafkah keluarga akan berkurang seiring dengan semakin dewasanya anak yang menjadi tanggungan.

2. Distribusi Pendapatan Dalam Negeri

Prinsip-prinsip ekonomi yang dibangun di atas nilai-nilai moral Islam melestarikan manfaat dari distribusi pendapatan yang adil. Cendekiawan Islam banyak berbicara tentang objektivitas ekonomi Islam tingkat negara bagian. Beberapa di antaranya berkaitan dengan memastikan standar hidup nasional terendah bagi mereka yang berpenghasilan di bawah kemampuan mereka. Negara berkewajiban untuk bekerja meningkatkan lingkungan sosial dan kesejahteraan material individu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik-baiknya. Jadi negara wajib mengumumkan kebijakan stabilitas ekonomi, pemerataan, lapangan kerja, pembangunan sosial ekonomi, dll. Selain itu, distribusi pendapatan negara memberikan model ekonomi dan politik untuk pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung dan tidak langsung terhadap distribusi pendapatan, seperti pendapatan dan belanja pemerintah, kebijakan fiskal dan moneter. Dasar hipotesis ketidaksempurnaan pasar. Hal ini terkait dengan bahaya moral dan pilihan yang merugikan.

Ada beberapa bentuk dari politik ekonomi dalam Islam yang mengatur tentang pendistribusian pendapatan negara, antara lain sebagai berikut:

a. Pengelolaan Sumber Daya

Dalam mengelola sumber daya yang ada, pemerintah (negara) harus mampu mengalokasikan lahan/penggunaan lahan dan industri dengan baik. Ajaran Islam menentukan kebijakan penggunaan tanah sebagai salah satu milik rakyat untuk kepentingan negara dan rakyat, pembagian tanah kepada swasta, pemungutan pajak, subsidi dan pembayaran lainnya. Barang selain uang. Sebuah hak istimewa yang legitimasinya telah dikembalikan ke aturan hukum syariat. Keistimewaan ini perlu untuk melayani kepentingan umum dan membebaskan kemiskinan dari ekonomi masyarakat. Selain itu, di negara-negara Islam, kebijakan fiskal adalah salah satu alat untuk mencapai tujuan Syariah. Termasuk juga perspektif meningkatkan kebahagiaan dengan menjaga keimanan, kehidupan, kebijaksanaan, kekayaan dan harta benda, sebagaimana dijelaskan Imam al-Ghazari. Secara historis, selama periode kenabian dan setelah kekhalifahan, umat Islam sangat terampil dalam menerapkan beberapa alat, seperti kebijakan fiskal, sesuai dengan sistem kuda makan. Beberapa dari berbagai cara negara bagian mengenakan pajak pada individu, pajak cukai pada pedagang Muslim

untuk menghindari beban keuangan pada masyarakat, pajak properti dan cukai atas barang yang diimpor dari negara dan pendidikan.

Kewajiban ini dialihkan kepada umat Islam karena ekonomi dipertaruhkan dan keuangan negara terpengaruh oleh penurunan pendapatan, terutama pajak, karena aktivitas ekonomi menurun. Misalnya, krisis ekonomi secara otomatis menempatkan orang dalam kemiskinan. Mereka tidak mendukung pajak Jizyah dan pajak Muslim. Mereka harus didukung oleh negara dengan pajak yang dipungut oleh Muslim kaya ini.

Dalam ekonomi islam juga dikenal adanya konsep zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan lain-lain (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat dalam syari'ah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syari'ah Islam, sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾
[سورة التوبة, ٦٠]

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. [At Tawbah: 60]

Dari ayat di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat delapan mustahiq yang berhak mendapatkan pembagian zakat. Adapun infaq, sadaqah, wakaf merupakan bentuk pengeluaran dengan 'sukarela' yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sadaqah, infaq dan wakaf.

Pembagian dalam kegiatan 'wajib' dan 'sukarela' ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada 'sektor sukarela'.

b. Peran Negara Dalam Mengantaskan Kemiskinan Melalui Program Raskin

Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dilakukan harus berdasarkan kepada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam kaitan dengan kewajiban Negara memenuhi kebutuhan warga, sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 34 yang berbunyi: “*fakir miskin, anak yatim dan orang-orang terlantar dipelihara oleh Negara*”.

Indonesia masih menghadapi masalah kemiskinan dan kerawanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008. Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM membuat masyarakat gelisah dalam memenuhi kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari. Dampak dari kebijakan tersebut dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan.

Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang kebijakan Perberasan mengintruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati / Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri.

Pemerintah berupaya mengedepankan peran partisipasi masyarakat dengan mengacu pada teori *Bottom-Up*. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya, sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dirancangkannya Program Raskin.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaringa Pengaman Sosial (JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain eliputi

perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.

Pada tahun 2002, pemerintah mengganti nama OPK (Operasi Pasar Khusus) menjadi Program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang ada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg menjadi 20 kg, dan pada tahun 2009 menjadi 15 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada tahun 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan pada tahun 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sejak 2006 berubah menggunakan data RTM hasil pendataan BPS (Badan Pusat Statistik).

Model Ekonomi Politik

Para sarjana ekonomi Islam telah mengungkapkan bahwa ajaran Islam memiliki arah dan model kebijakan ekonominya sendiri. Model kebijakan politik dan ekonomi Islam (al-Iqtishodiyah) bersifat statis dan berkembang. Selanjutnya, kebijakan ekonomi dan politik Islam menanggapi kebutuhan material dan spiritual. Kebijakan ini sangat menekankan pada kegiatan ekonomi individu atau kolektif selama itu dalam rencana dan arahan Allah SWT sendiri. (Sayangnya) Selain itu, aktivitas dihargai untuk penggunaan komunitas secara umum. Dalam Islam, tidak ada pertentangan antara materi dan jiwa, dan tidak ada pemisahan antara ekonomi dan bangsa. Dalam sejarah Islam, aspek ekonomi politik yang dipraktikkan oleh Khalifah adalah dalam konteks pemerintahan dan pelayanan kepada rakyat, sehingga tujuan penyelesaian masalah ekonomi adalah bagaimana menciptakan distribusi ekonomi yang adil.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen dalam kebijakan fiskal yang diselenggarakan pada Baitul Maal (kas negara). Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj*, dan *usyr* (cukai) atas barang impor dari Negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum muslimin,

sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. (Adiwarman, 2006, hal. 25)

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani; di Baitul Maal terdiri dari dua bagian, yaitu antara lain:

1. Bagian Pemasukan

Bagian ini meliputi tiga bagian, yaitu Pos *Fa'i* dan Kharaj, terdiri dari *ghanimah*, *kharaj*, *tanah-tanah*, *jizyah*, *fa'i* dan pajak; Pos Kepemilikan Umum, terdiri dari minyak bumi, gas listrik, barang tabang, laut, sungai, selat, mata air, hutang, padang dembalaan, hima dan sebagainya. Pos Zakat, meliputi zakat uang, komoditas perdagangan, pertanian dan buah-buahan, unta, sapi, dan domba.

2. Bagian Pembelanjaan

Pada bagian ini meliputi delapan bagian, yaitu pos dar al-Khalifah, pos kemaslahatan negara, pos subsidi, pos jihad, pos pengelolaan zakat, pos pengelolaan kepemilikan umum, pos keperluan darurat, pos anggaran, pengontrolan dan pengawasan umum.

D. Kesimpulan

Subsidi pangan kepada masyarakat miskin (Raskin) dalam bentuk beras untuk keluarga berpenghasilan rendah sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada keluarga yang terkena dampak. Lada. Keberhasilan program Raskin diukur dari pencapaian indeks 6T. Yaitu 6 29 gol, tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat wewenang. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran (RTS) dengan memenuhi kebutuhan pangan pokok beras dan mencegah pengurangan konsumsi energi dan protein. Selanjutnya Raskin bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan keluarga dengan menjual beras dalam jumlah tertentu kepada keluarga penerima manfaat. Dapat kita simpulkan bahwa kemiskinan Nagari Ujungading ada di Joron Koto Sawa. Situasi ini membutuhkan intervensi pemerintah melalui program kerja. Kemiskinan berdampak besar pada pembangunan manusia, karena masalah kemiskinan merupakan masalah nyata dan kompleks yang muncul dari daya beli masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar, dan kebutuhan lain seperti pendidikan dan kesehatan yang terbaik. Pertumbuhan ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan manusia, namun semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maka akan semakin banyak pula penduduk yang tumbuh di

wilayah tersebut. Sistem pengiriman mencapai tujuan yang berbeda yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti kebijakan terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Secara keseluruhan, sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam, bersama dengan sistem dan kebijakan Syariah lainnya, telah berkontribusi pada pencapaian beberapa tujuan umum Syariah Islam. Dalam Islam pun, kemiskinan merupakan salah satu masalah kehidupan dan bahkan bencana dianggap dapat diselesaikan. Kemiskinan diterjemahkan dari bahasa Arab dengan kata lain, dalam bahasa ini fuqru berarti ihtiyaj (membutuhkan), dan siapa yang membutuhkan disebut dengan faqir. Sebaliknya, dalam istilah Syara' faqir berarti orang yang miskin, lemah dan tidak bias dimintai apa-apa. Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu hal yang dapat merusak akhlak, logika dan keluarga, dan seluruh umat Islam menyikapinya sebagai bencana, yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang disembunyikan di dalamnya jika, kemiskinan ini merajalela maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya lupa Allah SWT. Masalahnya adalah jika dia menjadi seperti raja maka kekayaannya menjadi seperti seseorang yang zalim, baik kepada Allah SWT maupun manusia lainnya, ada beberapa bentuk ke zaliman seperti zalim kepada Allah SWT, manusia, dan zalim kepada diri sendiri. Menurut saya, keterkaitan antara beras miskin (Raskin) dan perspektif ekonomi Islam terkait karena Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dalam distribusi kekayaan baik dalam kehidupan sosial maupun pribadi. Pemerataan dan kesejahteraan sosial tergantung pada sistem ekonomi yang telah dicapai. Dari karakteristik pendistribusiannya, itu adil dan jujur. Karena dalam Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, kita semua akan bertanggung jawab di akhirat kelak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Harni Mukti Wahyuning dkk (2015). Sistem pendukung keputusan mutasi anggota kepolisian polresta Palembang dengan Menggunakan metode graphic rating scale. *Jurnal Sistem Informasi*, 10 (2),

Skripsi

Awar, Dessy. (2001). *Kamus lengkap Indonesia*. Surabaya: karya Abditama

Drs. Moh.Said. (2008). *Pengantar ekonomi islam*. Pekanbaru: Suska Press.

Rahmawaty, A. (2010). *Membangun sistem distribusi perspektif ekonomi islam*.

Said, Muhammad. (2008). *pengantar ekonomi islam (dasar-dasar pengembangan)*. Pekanbaru: Uin Suska Press.

Wargadinata, W. (2011). *Islam dan pengentasan kemiskinan*. Malang: UIN Malang Press.

Buku Teks

Adiwarman A, Karim. (2006) *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2006.



15

RONA MARATUS SALIMAH

*Peran Kelompok Tani Boncah Saiyo
Dalam Meningkatkan Perekonomian
Anggotanya Di Jorong Pulutan*

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : MERETAS ASA MENGGAPAI MIMPI



PERAN KELOMPOK TANI BONCAH SAIYO DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ANGGOTANYA DI JORONG PULUTAN

Rona Maratus Salimah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Islam

Abstrak

Kelompok Tani Boncah Saiyo merupakan sebuah kelompok tani yang berada di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kelompok tani dibentuk untuk mencapai keselarasan tujuan, motif dan juga minat. Kegiatan kelompok tani dilakukan setiap minggunya. Kelompok tani ini memiliki peran yang luas di tengah-tengah masyarakat terutama bagi anggota kelompok tani. Peran yang dimiliki kelompok tani ini sangat mempengaruhi perekonomian para anggotanya yaitu dalam peningkatan perekonomian. Diantara peran yang didapatkan oleh kelompok tani Boncah Saiyo adalah membuat para anggota memiliki jalan yang mudah untuk mendapatkan berbagai macam program bantuan, diantaranya berupa bantuan teknologi mesin, pupuk dengan harga yang lebih murah, perolehan bibit yang berkualitas, dan sebagainya yang akan memudahkan kelompok tani dalam pengolahan lahan. Kelompok tani juga berperan mempermudah pekerjaan kelompok, membuka peluang memperoleh pekerjaan yang lebih banyak dan membentuk kepriadian yang mandiri dalam tiap anggota kelompok. Terbentuknya kelompok tani Boncah Saiyo di Jorong Pulutan membuat modal dapat diminimumkan dan keuntungan dapat ditingkatkan, serta pekerjaan dari masyarakat juga sering didapatkan oleh kelompok tani sehingga dapat meningkatkan perekonomian anggotanya.

Kata Kunci: *Kelompok tani boncah saiyo, kegiatan kelompok tani, peran kelompok tani*

A. Pendahuluan

Negara atau wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah adalah Indonesia. Sehingga menjadikan Indonesia dikenal sebagai Negara agraris, faktanya adalah bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk Indonesia berasal dari sektor pertanian sebagai salah satu pilar besar perekonomian Indonesia, itulah mengapa Negara kita disebut sebagai Negara agraris. Karena memang memiliki wilayah yang sangat potensial untuk mengembangkan usaha di sektor pertanian (Kiswanto S.P, 2018, hal. 7). Pertanian merupakan prospek kerja yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Sebagai Negara berkembang, Indonesia dengan jumlah penduduk sebagian besar tinggal di daerah pedesaan yaitu kurang lebih 70% dan hampir 50% dari total

angkatan kerja nasional, rakyat Indonesia menopangkan nasib mereka di sektor pertanian, dimana pada umumnya masyarakat bermata pencaharian dalam bidang pertanian yaitu sebagai petani.

Perkataan pertanian oleh Prof. A. Adiwilaga (Su'ud, 2007, hal. 4) disebutkan adalah kegiatan manusia menggunakan tanah dengan maksud untuk memperoleh hasil tanaman ataupun hewan, tanpa mengakibatkan berkurangnya kemampuan tanah yang bersangkutan untuk mendatangkan hasil lainnya. Selain itu, menurut pendapat dari W.J Timmer (Su'ud, 2007,hal. 4) pertanian adalah suatu ketentuan sosial yang merupakan rangka dimana produksi bumi berlaku sebagai petunjuk arah bagi pengembangan dan struktur (susunan) dari masyarakat bersangkutan, tetapi dalam hal ini manusialah yang senantiasa tetap mengendalikan petunjuk arah itu. Peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional secara empiris terbukti cukup nyata baik dalam kondisi perekonomian yang normal maupun pada saat perekonomian menghadapi krisis-krisis. Hal ini dapat dilihat dari dua indikator penting, yaitu: kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia dan penyerapan tenaga kerja (Haryanto, dkk, 2009, hal. 10).

Luasnya area persawahan yang ada di Indonesia, membuat banyak masyarakat yang memilih berprofesi sebagai petani. Oleh karena itu, hasil pertanian yang dihasilkan oleh Indonesia pun juga bermacam ragam dari masing-masing daerah, ada yang berupa padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Kegiatan ini sudah menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu daerah yang masyarakatnya secara umum berprofesi sebagai petani adalah terletak di Jorong Pulutan, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Jorong Pulutan ini adalah suatu jorong yang terluas dan terpadat penduduknya dibanding dengan jorong yang lainnya yang ada di Nagari Koto Tuo. Kegiatan bertani merupakan pekerjaan yang umum dilakukan di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo. Oleh karena banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo menyebabkan terbentuknya suatu kelompok-kelompok tani. Kelompok tani yang ada di Jorong Pulutan ini dinamai dengan "Kelompok Tani Boncah Saiyo". Dengan terbentuknya kelompok tani ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menumbuhkan dan membangun kemandirian juga sebagai wadah untuk memudahkan pemerintah dalam menyosialisasikan bantuan dan berbagai macam penyuluhan yang mungkin untuk dilakukan. Kelompok tani inilah yang mengupayakan lapangan kerja bagi anggotanya dan mengupayakan berbagai macam kebutuhan yang akan diperlukan dalam proses

kegiatan pertanian yang dilakukan. Tujuan dibentuknya kelompok tani adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subjek pendekatan kelompok, agar lebih berperan dalam kesejahteraan dan pembangunan. Aktifitas usahatani yang lebih baik dapat dilihat dari adanya peningkatan dalam produktivitas usahatani yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan petani sehingga akan mendukung terciptanya kesejahteraan yang lebih baik bagi petani dan keluarganya (Ikbal, 2014, hal. 506).

Dalam meningkatkan hasil panen tentu memiliki hubungan yang erat dengan sarana prasarana dan lahan yang dimiliki oleh petani. Melalui kelompok tani inilah diharapkan adanya berbagai macam kemudahan yang akan dapat membantu dan mendukung masyarakat dalam mengolah lahan pertanian yang ada serta dapat membantu para petani untuk berubah ke arah yang jauh lebih baik. Kelompok tani Boncah Saiyo di Jorong Pulutan ini memiliki peran yang cukup signifikan dalam membantu anggotanya dalam meningkatkan perekonomian mereka, dengan adanya kelompok tani ini dapat dilihat berbagai peran yang akan sangat membantu kelompok tani dalam mengolah lahan mereka yang diantaranya adalah adanya berbagai bantuan yang tersedia dan mudah diterima atau didapatkan untuk melengkapi alat yang dibutuhkan dalam pengolahan ataupun dalam proses kerja, serta modal yang dikeluarkan pun dapat sedikit dikurangi karena ada banyak kerja sama yang terjalin antara pihak kelompok tani dan juga pihak penyedia pupuk, bibit dan sebagainya sehingga dapat membantu untuk meningkatkan perekonomian anggota kelompok tani Boncah Saiyo.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan fakta-fakta yang ada di lapangan. Upaya yang dilakukan dalam memperoleh data-data mengenai peran Kelompok Tani Boncah Saiyo dalam meningkatkan perekonomian para anggotanya yang ada di Jorong Pulutan, telah dilakukan wawancara dengan anggota-anggota kelompok tani yang berada di Jorong Pulutan. Dimana maksud dari metode wawancara ini adalah proses yang dilakukan dalam memperoleh penjelasan atau keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka dengan orang/responden yang akan di wawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara ataupun tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada anggota kelompok tani Boncah Saiyo di Jorong Pulutan.

C. Pembahasan

1. Defenisi Kelompok Tani

Kelompok Tani didefenisikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa, pria dan wanita, tua dan muda, yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kelompok tani. Kelompok tani diartikan sebagai lembaga tani yang langsung mengorganisir para petani dalam menumbuhkembangkan usahatani. Kelompok tani adalah suatu organisasi yang dapat berfungsi dan ada secara nyata, disamping berfungsi sebagai wahana penyuluhan dan penggerak kegiatan anggotanya (Nuryanti dan Swastika, 2011, hal. 116-117).

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No.273./Kpts/OT.160/4/2007 (Kiswanto S.P, 2018, hal. 13), kelompok tani merupakan kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk berdasarkan atas kesamaan kepentingan, kesamaan dalam keadaan, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk memajukan dan mengembangkan usaha anggota. Menurut Purwanto (Kiswanto S.P, 2018, hal. 13) kelompok tani merupakan kumpulan petani-nelayan yang didasarkan atas kesamaan, keserasian dalam satu lingkungan sosial budaya untuk mencapai tujuan yang serasi, dengan demikian kelompok tani mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Beranggotakan petani- nelayan
2. Hubungan antara anggota erat
3. Mempunyai pandangan, kepentingan yang sama dalam mengelola usahatani
4. Mempunyai kesamaan jenis komoditas usaha
5. Usahatani yang diusahakan merupakan sebuah ikatan fungsional/bisnis
6. Mempunyai tujuan yang sama

Kelompok tani merupakan organisasi masyarakat yang didirikan untuk memaksimalkan produksi pertanian. Dengan keberadaan kelompok tani maka permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan lebih mudah diselesaikan. Kelompok tani secara tidak langsung dipergunakan sebagai usaha untuk meningkatkan produktifitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil (Mawarni, 2017, hal. 67). Kelompok tani adalah kumpulan petani yang terikat secara non formal dan dibentuk atas dasar kesamaan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial,

ekonomi, sumber daya), kepentingan, keakraban dan keserasian, serta mempunyai pimpinan untuk mencapai tujuan bersama (Maulana, 2019, hal. 68).

Adapun unsur pengikat kelompok tani adalah sebagai berikut (Kiswanto S.P, 2018, hal. 14-15):

1. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya.
2. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya.
3. Terdapat kader tani yang berdedikasi untuk kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya dan menggerakkan para petani.
4. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya.
5. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat untuk menunjang program yang telah terbentuk.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota kelompok tani Boncah Saiyo diketahui bahwa kelompok tani Boncah Saiyo merupakan kelompok tani yang ada di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo. Kelompok tani Boncah Saiyo sudah terbentuk sejak tahun 2010 dan sudah mendapat persetujuan dari Wali Nagari Koto Tuo serta sudah terdaftar secara sah dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang dikeluarkan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2010 dan kembali dilakukan pembaharuan pada tahun 2017. Kelompok tani ini pada awalnya beranggotakan 18 orang, namun dikarenakan setelah sekian lama ada beberapa anggota yang keluar dari kelompok tani karena disebabkan oleh berbagai hal seperti meninggal dunia dan juga karena faktor usia, sehingga pada saat ini anggota yang aktif di kelompok tani ini berjumlah 13 orang (laki-laki). Meskipun demikian, saat ini kelompok tani sedang dalam tahap mengupayakan pengurusan penambahan anggota mereka kembali menjadi 18 orang, karena memang syarat untuk membentuk suatu kelompok tani berdasarkan peraturan daerah setempat adalah sekitar 18 orang. Kelompok Tani Boncah Saiyo ini diketuai oleh Bapak Usri, bendaharannya adalah Bapak Rifzaldi dan sekretarisnya adalah Bapak Syahrianto.

Kelompok Tani Boncah Saiyo ini telah dicetuskan oleh dinas setempat untuk terfokus pada penanaman jagung. Jagung merupakan salah satu komoditi pangan pokok yang sangat dibutuhkan saat ini, jagung memegang peranan penting dalam berbagai lapisan masyarakat, contohnya dalam industri pangan, jagung bermanfaat sebagai pengganti beras dengan cara diolah menjadi nasi jagung, bubur jagung, dan berbagai kuliner jagung lainnya. Jika diperhatikan tidak kurang dari 50% dari komposisi pakan ternak yang ada di pasaran menggunakan bahan dasar terbuat dari jagung. Inilah yang membuat usaha menanam jagung bisa sangat menguntungkan karena jagung memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di mata masyarakat, jadi potensi pasar jagung sangat besar. Tingginya permintaan pasar terhadap komoditi jagung akan meningkatkan potensi pasar dan harga yang baik untuk jagung. Sehingga peluang usaha bercocok tanam jagung juga semakin terbuka lebar (Kiswanto S.P, 2018, hal. 1-2).

Saat ini pembentukan kelompok tani lebih diarahkan kepada kemudahan pelaksanaan tugas pemerintah menyalurkan sarana produksi (saprodi) kepada petani sehingga lebih terkoordinasi. Pada awalnya kelompok tani dilakukan melalui pendekatan domisili namun kemudian dimodifikasi mengikuti hamparan lahan pertanian. Dua pendekatan dan kelemahan masing-masing pengelompokan petani menurut hamparan lahan pertanian dapat memudahkan penyaluran saprodi. Kelemahannya adalah usaha untuk membuat kelompok tani menjadi dinamis menjadi bersifat krusial dan saling mengganggu kelancaran sarana produksi. Situasi ini terjadi karena petani yang dikelompokkan menurut hamparan lahan tidak selalu saling mengenal satu dengan yang lain (Mawarni, 2017, hal. 67).

2. Kegiatan Kelompok Tani Boncah Saiyo

Secara tidak langsung kelompok tani dapat digunakan sebagai salah satu usaha dalam meningkatkan produktivitas usahatani melalui pengelolaan usahatani secara bersamaan. Dengan membentuk kelompok tani akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan dibandingkan dengan bekerja sendiri atau perorangan. Hal ini dikarenakan kegiatan berkelompok, petani bisa saling bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, dan kemampuan berinovasi untuk menjadikan sistem pertanian menjadi lebih maju. Sebagai sarana dan unit produksi bagi petani, kelompok tani dibentuk untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam bidang pertanian, berbagai pengalaman untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di lapangan baik melalui agen penyuluh pendamping pertanian maupun antar kelompok tani. Selain itu, kelompok tani

juga mengembangkan penguatan baik dari segi permodalan, penyediaan pupuk, penyediaan pakan, dan pengembangan kemitraan (Maulana, 2019, hal. 70).

Kelompok tani dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan mengkoordinasikan kegiatan gotong royong untuk pengolahan lahan anggota kelompok tani secara bergantian, melakukan hubungan dengan pihak penyuluh maupun dinas pertanian dan mengkoordinasikan penjualan hasil produksi. Keberadaan kelompok tani membuat para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Melihat potensi tersebut, maka kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal (Mawarni, 2017, hal. 67).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota kelompok tani Boncah Saiyo, jam kerja kelompok Tani Boncah Saiyo ini dimulai dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB. Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani pada saat ini hanya diadakan pada saat ada keperluan saja. Kegiatan kelompok tani ini dulunya diadakan hampir beberapa kali dalam seminggu, dikarenakan lahan yang dimiliki pada saat itu terdiri dari dua atau tiga bidang lahan pertanian. Namun, pada saat ini lahan yang dimiliki oleh kelompok tani ini hanya tinggal sebidang lahan saja. Hal ini disebabkan kepemilikan lahan merupakan milik orang lain, dan kelompok tanilah yang mengolah lahan tersebut. Namun, meskipun dalam 3 atau 4 tahun terakhir ini kelompok tani Boncah Saiyo hanya mengolah sebidang lahan saja, tetapi hasil panen mereka selalu meningkat setiap tahunnya. Hasil panen jagung kelompok tani pada tahun ini adalah sebanyak 3 ton sekali panen, berbeda dari tahun sebelumnya dimana hasil panen jagung dalam satu kali panen kurang dari 3 ton. Dan dalam setahun umumnya kelompok tani Boncah Saiyo dapat melakukan empat atau tiga kali panen dalam setahun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani Boncah Saiyo, selain melakukan kegiatan pengolahan lahan dalam menanam jagung, kelompok tani Boncah Saiyo juga saling membantu dalam mengolah lahan yang dimiliki oleh para anggotanya dan juga tidak menutup kemungkinan untuk menerima pekerjaan yang datang dari masyarakat setempat, dikarenakan anggota dalam kelompok tani Boncah Saiyo ini juga membentuk suatu kelompok yang dinamakan Kongsu Lauk yang khusus menerima permintaan dari masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan, masyarakat setempat banyak yang mengandalkan kelompok tani ini untuk membantu mereka dalam mengolah lahan yang mereka miliki, karena tidak semua pekerjaan yang ada di lahan dapat mereka kerjakan sendiri. Kegiatan ini akan dilakukan oleh kelompok tani

pada saat tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam pengolahan lahan jagung, dan mereka memanfaatkan permintaan dari masyarakat tersebut untuk menambah penghasilan mereka. Dari kegiatan inilah anggota kelompok tani mendapatkan tambahan pendapatan diluar dari pengolahan lahan dalam menanam jagung. Sementara itu, hasil keuntungan yang diperoleh dari kegiatan diluar pengolahan lahan jagung akan dimasukkan kedalam keuntungan kelompok tani Boncah Saiyo yang kemudian akan digabungkan dengan keuntungan dari panen jagung. Kegiatan ini biasanya mereka terima dalam seminggu hanya sebanyak 2 atau 3 kali saja, karena mengingat beberapa anggota juga memiliki lahan pribadi yang akan mereka olah selain kegiatan dalam kelompok tani ini.

Proses kegiatan kerja kelompok tani Boncah Saiyo ini juga memiliki sistem absen yang harus ditandatangani pada saat jam kerja, dan daftar hadir inilah yang akan dijadikan bukti dalam pembagian hasil yang akan dilakukan setiap tahunnya. Ada yang unik dari pembagian hasil keuntungan yang mereka peroleh, dikarenakan mereka membagikan hasil keuntungan tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri yang akan sangat membantu anggota dalam mencukupi dan menambah pendapatan mereka di Hari Raya karena mengingat banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat itu. Namun, disamping itu upah mereka dalam sehari kerja, tetap dibagikan pada saat pekerjaan selesai dilakukan. Dan pada saat ini umumnya upah mereka perhari adalah sebanyak Rp 90.000,00. Berikut merupakan contoh struktur daftar hadir dari kelompok tani Boncah Saiyo:

Tabel 1 Contoh Daftar Hadir Kelompok Tani Boncah Saiyo

No	Nama	Jabatan	No. NIK	Tanda Tangan
1	Usri	Ketua	1307050000000	1.
2	Syahrianto	Sekretaris	1307050000000	2.
3	Rifzaldi	Bendahara	1307050000000	3.
4	Agusmar	Anggota	1307050000000	4.
5	Nurefendi	Anggota	1307050000000	5.

6	Dst			
---	-----	--	--	--

Sumber: Arsip laporan daftar hadir kelompok tani Boncah Saiyo

Dengan adanya sistem absen ini membuat para anggota kelompok tani menjadi lebih disiplin dalam bekerja, serta dalam pembagian keuntungan pun akan jelas dan mudah untuk dihitung. Jadi dari kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani “Boncah Saiyo” ini dapat kita lihat peran bahwa dengan adanya kelompok tani ini para anggota dapat dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan tanpa mencari terlebih dahulu. Melalui kelompok tani ini, anggota seperti mendapatkan suatu pekerjaan tetap yang bisa mereka lakukan setiap minggunya.

Dinamika kelompok dapat mempengaruhi kinerja kelompok karena dinamika kelompok merupakan suatu proses yang memiliki hubungan psikologis secara jelas antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Kekuatan-kekuatan yang terdapat dalam situasi kelompok dapat diuraikan oleh dinamika kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya. Dinamika kelompok adalah proses dalam meningkatkan nilai kerjasama kelompok. Metoda atau proses menumbuhkan dan membangun kelompok yang semula terdiri dari kumpulan individu yang belum saling mengenal satu sama lain menjadi satu kesatuan kelompok dengan tujuan yang sama. Penurunan dinamika kelompok mempengaruhi kinerja suatu kelompok (Faqih, 2014, hal. 45).

3. Peran Kelompok Tani Boncah Saiyo Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota

Menurut Mardikanto (Mawarni, 2017, hal. 67), peran suatu kelompok tani adalah suatu kelompok yang melakukan kinerja dengan beranggotakan para petani yang ada di setiap desa, yang ikut serta dalam kegiatan penanaman bersama antar kelompok tani, namun tidak semua anggota kelompok tani ikut serta dalam kegiatan tersebut. Seperti melakukan penanaman bersama antar kelompok, pembersihan irigasi, serta pemberantasan hama dan lain sebagainya. Sebagai wadah organisasi dan bekerja sama antar anggota, kelompok tani memiliki peranan yang begitu penting dalam kehidupan masyarakat tani, karena setiap permasalahan dan kegiatan dalam berusaha tani dilaksanakan oleh kelompok secara bersamaan. Salah seorang petani akan dipilih sebagai ketua yang dianggap memiliki pengetahuan dan wawasan luas.

Kelompok tani adalah media belajar mengajar bagi anggotanya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap (PKS) serta tumbuh kembangnya kemandirian dalam berusaha tani sehingga produktivitas akan meningkat, pendapatannya bertambah, dan kehidupan

menjadi lebih sejahtera. Kelompok tani merupakan tempat untuk mempererat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lainnya. Melalui kerja sama ini diharapkan usaha lainnya akan lebih efisien serta lebih mampu menghadapi tantangan, ancaman, gangguan dan hambatan. Usaha tani yang dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas (Kiswanto S.P, 2018, hal. 17-19). Secara filosofis, kelompok tani dibentuk untuk memecahkan permasalahan sehingga dapat berproduksi secara optimal dan efisien. Sebab dengan pertanian terkonsolidasi dalam kelompok tani, pengadaan sarana produksi dan penjualan hasil bisa dilakukan secara bersama (Nuryanti dan Swastika, 2011, hal. 115-116)

Peran kelompok tani kepada suatu gambaran mengenai kegiatan-kegiatan dalam kelompok tani yang dikelola oleh kesepakatan dari setiap anggota kelompok tani. Kegiatan yang berada didalam kelompok tani berdasarkan jenis usaha, atau unsur-unsur subsistem agribisnis, seperti didalam suatu pengadaan sarana produksi, pemasaran, pengolahan dan sebagainya. Pemilihan suatu usaha didalam suatu kelompok tani ini tergantung kepada suatu kesamaan kepentingan, saling percaya, dan keserasian didalam hubungan antar petani, sehingga bisa menjadi pengikat untuk lebih kuat dalam kelestarian kehidupan berkelompok, dimana tiap anggotanya menjadi lebih merasa memiliki kelompok dan menikmati suatu manfaat didalam kelompok petani. Meningkatnya suatu partisipasi kelompok akan memunculkan peningkatan kedinamisan kelompok. Kedinamisan kelompok inilah yang akan membuat peluang sebesar-besarnya kepada anggota kelompok untuk bekerjasama dan berpartisipasi dalam memajukan suatu kelompok yang membuat tujuan yang dibuat terlaksana. Kelompok tani yang dinamis ditandai dengan adanya interaksi didalam kelompok baik itu keluar maupun kedalam guna mencapai tujuan kelompok (Ramdhani, dkk, hal. 424-425).

Berdasarkan wawancara dengan anggota kelompok tani Boncah Saiyo salah satu peran yang dapat terlihat dengan adanya kelompok tani Boncah Saiyo di Jorong Pulutan adalah membuat para anggota memiliki jalan yang mudah untuk mendapatkan bantuan, diantaranya berupa bantuan teknologi mesin, pupuk dengan harga yang lebih murah, bibit yang berkualitas, dan sebagainya yang akan memudahkan kelompok tani dalam mengolah lahan. Bantuan-bantuan ini mereka ajukan dengan mengirimkan surat permohonan bantuan kepada aparat pemerintah setempat ataupun kepada para anggota dewan yang ada di Jorong Pulutan Nagari Koto Tuo.

Berikut adalah daftar penetapan aset dan kekayaan yang dimiliki oleh kelompok tani Boncah Saiyo yang ditetapkan Wali Nagari Koto Tuo pada tahun 2015.

Tabel 2 Daftar Penetapan Aset dan Kekayaan kelompok tani Boncah Saiyo

No	Nama Barang	Tahun Pembelian	Nilai Pembelian (Rp)	Keterangan
1	Lumbo Padi	2010	Rp. 1.000.000,-	Milik Kelompok
2	Thresher (Mesin Perontok Padi)	2014	Rp. 10.000.000,-	Bantuan
3	Mesin Bajak	2014	Rp. 23.000.000,-	Bantuan
4	Thresher (Mesin Perontok Padi)	2014	Rp. 10.000.000,-	Bantuan
5	Gerobak	2014	Rp. 350.000,-	Milik Kelompok

Sumber: Laporan hasil keputusan wali nagari koto tuo tentang penetapan aset dan kekayaan kelompok tani Boncah Saiyo tahun 2015

Selain dari data diatas, baru-baru ini kelompok tani Boncah Saiyo juga mengajukan bantuan dan mendapatkan diantaranya:

1. 1 buah bentor (becak motor) (Rp. 26.000.000.-)
2. 1 buah mesin perontok jagung (Rp 15.000.000,-)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan anggota-anggota kelompok tani Boncah Saiyo, bantuan-bantuan yang didapatkan oleh kelompok tani ini dapat digunakan untuk keperluan pekerjaan bagi anggota kelompok tani. Semisal mesin perontok padi yang diterima oleh kelompok tani, dapat dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani jika ada yang memerlukannya. Selain itu mesin perontok padi ini juga boleh dipakai oleh masyarakat yang tidak tergabung ke dalam kelompok tani Boncah Saiyo dengan syarat ada biaya yang harus dikeluarkan, dengan kata lain disewakan, dan tarif sewa disesuaikan dengan kebiasaan yang ada pada masyarakat setempat. Dari penyewaan mesin rontok padi ini, anggota kelompok memasukkannya ke dalam hasil keuntungan. Selain itu bentor (becak motor) digunakan untuk keperluan transportasi bagi anggota

dan untuk mengangkut hasil panen dari lahan, tanpa membutuhkan jasa angkut lainnya, sehingga meminimumkan biaya yang dikeluarkan oleh anggota kelompok tani. Selain itu, mesin perontok jagung dapat digunakan oleh kelompok tani untuk dapat memipil jagung dengan mudah, tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk membeli mesin ataupun menyewa dan dapat meminimalisir waktu dalam proses kerja serta memudahkan pekerjaan anggota kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelompok tani Boncah Saiyo, disamping bantuan-bantuan yang telah didapatkan, dalam keperluan pupuk kelompok tani Boncah Saiyo dapat memperoleh pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Hal ini dikarenakan kelompok tani Boncah Saiyo sudah menjalin kerja sama dengan pihak pengepul pupuk yang ada di daerah tersebut. Prosedur pengajuan pupuk bersubsidi ini dilakukan kelompok dengan membuat Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Pupuk Bersubsidi yang kemudian diajukan kepada pihak pengepul, yang kemudian pihak pengepul inilah yang akan mengurus permintaan dari kelompok tani kepada pihak gudang penyedia pupuk. Pupuk yang ingin dibeli tersebut terbagi kedalam beberapa komoditas sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota. Diantara komoditas pupuk bersubsidi yang biasa diajukan adalah untuk komoditas padi sawah, cabe, dan jagung. Selain digunakan oleh kelompok tani, masyarakat yang berada diluar kelompok tani juga dapat membeli pupuk dari kelompok tani tersebut, namun jika pembeli datang dari pihak diluar anggota kelompok tani, maka harga yang ditawarkan pun akan berbeda. Dari pembelian pupuk oleh pihak luar ini maka kelompok tani juga akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan pupuk yang dilakukan, sehingga pendapatan para anggota kelompok tani juga akan ikut bertambah karena banyaknya pemasukan di luar pekerjaan yang dilaksanakan.

Lalu dari manakah kelompok tani ini dapat membayar pupuk yang mereka pesan tersebut? Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan kelompok tani Boncah Saiyo, pembayaran pupuk dibayarkan melalui uang kas yang disediakan oleh anggota kelompok tani. Uang kas ini berasal dari hasil keuntungan yang disisihkan pada saat uang akan dibagikan setiap tahunnya. Pembagian hasil keuntungan dalam kelompok tani Boncah Saiyo ini berdasarkan kepada absen yang ditandatangani setiap adanya kegiatan. Jadi, penerimaan bagi hasil keuntungan ini berbeda-beda antara yang satu dan yang lainnya, tergantung pada penuh atau tidaknya mereka bekerja selama kegiatan diadakan. Pembagian uang hasil keuntungan ini hanya dibagikan sekitar 50%

kepada anggota, dan 50% nya lagi disimpan sebagai kas, yang dapat digunakan seperti dalam hal penebusan pupuk seperti ini, serta untuk hal lainnya.

Selain pupuk, perolehan bibit berkualitas juga mudah didapatkan oleh kelompok tani Boncah Saiyo, sehingga hasil panen mereka lebih berkualitas dan meningkat setiap panen dilakukan. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah pemilihan bibit unggul. Untuk menemukan bibit unggul tersebut sudah dilakukan berbagai penelitian. Keunggulan suatu bibit akan menghasilkan produksi tinggi dan tahan terhadap penyakit yang menyerangnya. Seiring dengan perkembangan zaman, petani tidak hanya membutuhkan bibit yang unggul terhadap dua faktor tersebut, tetapi juga unggul di dalam rasanya, misalnya nasi yang berasa pulen (Rahayu, 2019, hal. 12).

Dengan adanya kelompok tani ini, berbagaimacam penyuluhan dan pengarahan dari pihak pertanian setempat atau agen penyuluh pendamping pertanian juga sering dilakukan, bahkan hampir setiap mereka ada kegiatan, pihak pengawas lapangan pertanian akan meninjau mereka ke lokasi. Dengan berbagai penyuluhan dan pengarahan ini, anggota kelompok tani dapat meningkatkan kinerja mereka serta dapat mengetahui tips dan juga trik yang bisa digunakan tentang pemilihan pupuk, bibit ataupun cara-cara dalam bertani yang tepat, sehingga hasil panen mereka semakin meningkat setiap kali panen. Selain itu, para anggota yang tergabung dalam kelompok tani dapat meningkatkan pengetahuan yang lebih luas serta dapat memanfaatkan dan menyosialisasikannya kepada masyarakat yang ada di daerah setempat.

Penyuluhan pertanian dapat dilakukan melalui pendekatan kelompok, membina terjalinnya kerjasama individu petani dalam proses belajar-mengajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, proses produksi untuk mencapai skala ekonomi, serta proses kerjasama melalui pembinaan hubungan melembaga dengan Koperasi Unit Desa (KUD) dan kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya (swasta dan BUMN) untuk pengelolaan usahatani mulai dari pengadaan sarana, kegiatan budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil, dan selanjutnya kelompok dapat meningkatkan kerjasama sebagai kelompok usaha sehingga akan meningkatkan kemampuan petani untuk meningkatkan produktivitas pendapatan dan kesejahteraannya (Kiswanto S.P, 2018, hal, 23-24).

Penguatan peran serta dan kinerja petani sebagai pelaku pembangunan harus didorong seluas-luasnya melalui program-program penyuluhan atau program pendamping menuju suatu kemandirian mereka. disamping itu juga perlu dilakukan pengembangan organisasi, ekonomi jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan usaha pemberdayaan masyarakat tani tersebut diharapkan dapat membebaskan petani dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju kehidupan yang lebih sejahtera (Faqih, 2014, hal. 45).

Penyuluh pertanian mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan untuk mencapai kinerja yang baik. Penyuluh yang berkinerja baik dapat memposisikan dirinya sebagai motivator, educator, fasilitator dan dinamisator yang berdampak pada perubahan perilaku petani dalam berusahatani. Manfaat yang diperoleh dengan diketahuinya kinerja penyuluhan pertanian, antara lain: (1) tersusunnya program penyuluhan pertanian sesuai dengan kebutuhan petani, (2) tersusunnya rencana kerja penyuluhan pertanian di wilayah kerja masing-masing, (3) terdiseminasinya informasi teknologi pertanian secara merata sesuai dengan kebutuhan petani, (4) terwujudnya kemitraan usaha antara petani dan pengusaha yang saling menguntungkan dan (5) meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani di masing-masing wilayah (Bahua, 2016, hal. 3-4).

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota kelompok tani Boncah Saiyo, penghasilan yang didapatkan dari penyewaan barang atau mesin yang dimiliki oleh kelompok tani ini dan pendapatan dari hasil penjualan pupuk semuanya dimasukkan kedalam hasil keuntungan kelompok tani Boncah Saiyo. Banyaknya kemudahan yang didapatkan atau diperoleh oleh anggota kelompok tani Boncah Saiyo membuat modal yang mereka keluarkan semakin sedikit dari modal pada umumnya dan pendapatan yang mereka terima tentu saja akan semakin meningkat, yang akan berdampak pada meningkatnya perekonomian mereka. Pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2019, uang hasil keuntungan yang dibagi adalah kurang dari Rp 10.000.000,-. Namun pada tahun 2020 dan 2021 ini uang hasil keuntungan yang dibagikan setiap tahunnya melebihi nominal Rp 10.000.000,-. Berdasarkan hal ini dapat dilihat, dari tahun ke tahun perekonomian kelompok tani Boncah Saiyo semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga dengan adanya kelompok tani Boncah Saiyo ini dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya. Peran kelompok tani Boncah Saiyo ini sangat membawa dampak yang positif bagi anggota-anggota yang tergabung di dalamnya.

Petani atau pelaku ekonomi lain pasti bekerja berdasarkan ekspektasi untuk memperoleh tambahan pendapatan yang lebih tinggi. Apabila ekspektasi positif ini tidak dapat terpenuhi, sulit bagi siapapun untuk berharap bahwa petani akan termotivasi untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pada tataran empiris, operasionalisasi dari kriteria peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat beragam. Mulai dari perbaikan tingkat pendapatan rumah tangga, peningkatan produktivitas tenaga kerja, sampai pada indikator makro seperti pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pertanian dikatakan berhasil apabila telah mampu menjadi pengganda pendapatan dan pengganda lapangan kerja bagi sektor perekonomian secara umum (Arifin, 2013, hal. 1-2). Pembangunan dalam sektor pertanian diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara memberdayakan masyarakat tani, sehingga petani mampu mandiri menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani adalah dengan membentuk kelompok-kelompok tani di pedesaan (Handayani, dkk, 2019, hal. 81).

Keberadaan kelompok tani ini telah memberikan hasil yang sangat signifikan di dalam membantu suatu pencapaian program pembangunan pertanian dan meningkatkan perekonomian. Dengan demikian adanya kelompok tani Boncah Saiyo di Jorong Pulutan membuat kehidupan dan kesejahteraan anggota kelompok tani dalam lingkup ekonomi sangat memiliki peran yang signifikan bagi anggota kelompok tani Boncah Saiyo. Selain itu tingkat kemandirian dan solidaritas para anggota saat bekerjasama dalam mengolah lahan menjadi lebih efektif dan juga efisien, serta dapat mengembangkan kemampuan para anggota kelompok tani dalam sektor pertanian.

D. Kesimpulan

Kelompok tani adalah sekumpulan orang atau beberapa orang petani ataupun itu peternak baik itu laki-laki ataupun perempuan yang tergabung kedalam suatu kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Kelompok tani yang terdapat di Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo adalah kelompok tani Boncah Saiyo yang merupakan kelompok tani yang anggotanya terdiri dari masyarakat yang ada di Jorong Pulutan dan anggotanya hanya terdiri dari laki-laki sebanyak 13 orang. Kelompok tani ini juga sudah terbentuk dan terdaftar sejak tahun 2010 yang telah disahkan oleh Wali Nagari Koto Tuo dan memiliki SKT (Surat Keterangan Terdaftar) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kelompok tani Boncah Saiyo berfokus pada tanaman jagung dalam pengolahan lahan mereka.

Kelompok tani Boncah Saiyo memiliki berbagai macam kegiatan selain hanya dalam pengolahan lahan jagung. Anggota kelompok tani ini juga bekerja di lahan milik masyarakat setempat yang meminta bantuan mereka. Semenjak terbentuknya kelompok tani ini, banyak pekerjaan yang datang dari masyarakat, tidak hanya dari masyarakat Jorong Pulutan, namun juga ada Jorong lain yang mengandalkan kelompok tani Boncah Saiyo ini untuk mengolah lahan mereka. Khusus untuk menerima permintaan pekerjaan dari masyarakat ini, kelompok tani membentuk satu kelompok lagi dalam kelompok tani ini yang dinamakan dengan Kongsu Lauk. Dan permintaan ini hanya dilakukan atau diterima oleh anggota kelompok tani jika tidak ada kegiatan dalam pengolahan lahan jagung. Dengan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan seperti ini membuat anggota kelompok tani dapat memiliki pendapatan yang bisa dibbilang tetap setiap minggunya.

Kelompok tani Boncah Saiyo dapat dikatakan memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian anggotanya di Jorong Pulutan karena dapat memudahkan anggota dalam memperoleh program bantuan seperti dalam perolehan alat yang dapat memudahkan pekerjaan mereka seperti mesin bajak, mesin perontok jagung dan sebagainya bahkan juga kendaraan untuk memudahkan pengangkutan hasil panen mereka. Mesin-mesin dan kendaraan tersebut selain dimanfaatkan oleh kelompok juga dapat disewakan kepada masyarakat yang memerlukan mesin tersebut. Selain itu, kemudahan dalam memperoleh pupuk yang lebih murah dan juga bibit yang berkualitas membuat hasil panen menjadi meningkat setiap tahunnya. Pupuk dan bibit ini juga dapat mereka jual kepada masyarakat dengan harga yang berbeda. Sehingga dapat menambah kas dan pendapatan dari anggota kelompok tani Boncah Saiyo. Dengan berbagai kemudahan yang diperoleh oleh anggota kelompok tani, membuat kelompok tani dapat meminimalkan modal yang mereka gunakan dan memaksimalkan hasil panen setiap kali panen dilakukan. Juga dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan dan banyak lagi kemudahan lainnya seperti yang telah dijelaskan diatas, membuat pendapatan yang diterima anggota kelompok tani menjadi semakin meningkat setiap tahunnya, yang berimbas pada kesejahteraan yang didapatkan dan juga meningkatnya perekonomian para anggota kelompok tani Boncah Saiyo di Jorong Pulutan.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Arifin B. (2013). *Ekonomi Pembangunan Pertanian*. Bogor: IPB Press.
- Bahua M.I. (2016). *Kinerja Penyuluhan Pertanian*. Yogyakarta: Deepublish.
- Haryanto T., Hidayati N.A. & Djoewito W. (2009). *Ekonomi Pertanian*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahayu T.P. (2019). *Ensiklopedia Profesi: Seri Petani*. Semarang: Alprin Finishing.
- S.P Kiswanto. (2018). *Bercocok Tanam Jagung*. Yogyakarta: Penerbit Rubrik.
- S.P Kiswanto. (2018). *Menggerakkan Kelompok Tani Mandiri*. Yogyakarta: Penerbit Rubrik.
- Su'ud M.H. (2007). *Pengantar Ilmu Pertanian*. Banda Aceh: Yayasan PeNA Banda Aceh.

Jurnal Ilmiah

- Faqih A. (2014). Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Terhadap Kinerja Kelompok Tani. *Jurnal Agrijati*, 26(1), 45.
- Ramdhani H., Nulhaqim S.A. & Fedryansah M. Peningkatan Kesejahteraan Petani Dengan Penguatan Kelompok Tani. *Prosiding KS: Riset & PKM*, 2(3), 424-425.
- Nuryanti, S., & Swastika D.K.S. (2011). Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(2), 115-116.
- Mawarni E., Baruwadi M. & Bempah I. (2017). Peran Kelompok Tani Dalam Peningkatan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Iloheluma Kecamatan Tilogkabila Kabupaten Bone Bolango. *Agrinesia*, 2(1), 67.
- Handayani W.A., Tedjaningsih T. & Rofatin B. (2019). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Tani Padi. *Jurnal Agristan*, 1(2), 81.
- Maulana K. (2019). Peran Kelompok Tani Terhadap Kondisi Perekonomian Petani. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, 5(2), 70.

Ikbal M. (2014). Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Sawah Di Desa Margamulya Kecamatan Bungku Barat Kabupaten Morowali. *e-J Agrotekbis*, 2(5), 506.

Wawancara

Syahrianto. *Wawancara Pribadi*. Struktur, Kegiatan dan Peran Kelompok Tani Boncah Saiyo. Minggu 20 Juni 2021.

Agusmar. *Wawancara Pribadi*. Peran Kelompok Tani Boncah Saiyo. Minggu 20 Juni 2021.

BIODATA PENULIS



Firza Ramadhani, anak perempuan dari Parman dan Anis biasa dipanggil Firza atau Ica, Lahir di Lubuk Sikaping, Pada Tanggal 22 Desember 1999. Beliau mengawali pendidikannya di TK Harapan Bunda selama satu tahun, kemudian melanjutkan sekolah dasar ke SDN 13 Tanjung Beringin selama enam tahun lamanya. Setelah itu, beliau menuntut ilmu di MTsN 1 Pasaman selama Tiga tahun. Setelah menyelesaikan studinya di madrasah, beliau memilih melanjutkan ke sekolah umum yaitu SMAN 1 Lubuk Sikaping. Dan sekarang beliau adalah Mahasiswi Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.



Nur Suhaimi. Lahir di Sawahlunto Sijunjung, pada tanggal 12 Juli 1999. Ia biasa di sapa dengan panggilan Nur. Ia merupakan anak dari pasangan Bapak Superman dan Ibu Yuliah. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Pada usia 6 tahun ia memulai pendidikannya di salah satu TK Islam yang ada di Jorong Koto Bakti, Kec. Sungai Rumbai, Kab. Dharmasraya yaitu TK Islam Bakti 60 selama 1 tahun, lalu setelah itu ia melanjutkan sekolahnya Sekolah Dasar (SD) di SDN 02 Sungai Rumbai. Setelah berlangsung selama 6 tahun, kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke SMPN 1 Sungai Rumbai selama 3 tahun. Dan untuk jenjang sekolah menengah ia melanjutkan ke SMAN 1 Sungai Rumbai selama 3 tahun. Dan sekarang ia merupakan seorang Mahasiswi di IAIN Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Ekonomi Islam.



Annisa Tul Hasanah, anak perempuan dari bapak Eli Andri dan ibu Zarni biasa dipanggil Chaca atau Chatul, Lahir di Lubuk Basung, 22 November 2000. Beliau mengawali pendidikannya di TK Al-Ikhsan selama satu tahun, kemudian melanjutkan sekolah dasar ke SDN 12 Anak Air Dadok selama enam tahun lamanya. Setelah itu, beliau menuntut ilmu di MTsN Tiku yang sekarang dikenal dengan MTsN 5 Agam selama Tiga tahun. Setelah menyelesaikan studinya di madrasah, beliau memilih melanjutkan ke sekolah umum yaitu SMAN 1 Tanjung Mutiara. Dan sekarang beliau adalah Mahasiswi Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.



Rona Maratus Salimah. Lahir di Pulutan, 06 Oktober 1999. Ia biasa disapa dengan panggilan Rona. Ia merupakan anak dari pasangan Bapak Abu Syahrin (Alm) dan Ibu Mesrawati. Ia merupakan anak ke-3 dari 3 besaudara. Pada usia 5 tahun ia memulai pendidikannya di salah satu TK yang ada di Tanjung Pati, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota yaitu TK Bhayangkari 10 selama 2 tahun, lalu setelah itu ia melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SDN 03 Koto Tuo. Setelah berlangsung selama 6 tahun, kemudian ia melanjutkan sekolahnya ke MTsN 1 Kota Payakumbuh selama 3 tahun. Dan untuk jenjang pendidikan selanjutnya ia melanjutkan sekolahnya di MAN 2 Kota Payakumbuh selama 3 tahun. Dan sekarang ia merupakan seorang Mahasiswi di IAIN Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam.



Iqbal Tawakal. Lahir di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 08 Desember 2000. Anak Kedua dari Tiga bersaudara yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Zainal dan Ibu Arteta. Dengan Riwayat Pendidikan di SD Negeri 29 Lubuk Alung pada tahun 2012, SMP Negeri 3 Lubuk Alung pada tahun 2015 lalu ia mencoba merubah haluan pendidikan dari Umum ke Madrasah hingga berhasil Lulus di MA Negeri 1 Padang Pariaman pada tahun 2018. Sekarang ia sedang melanjutkan Pendidikan Tingginya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan Program Studi Ekonomi Islam. Yang tengah menjalani Program Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) pada saat Pandemi Covid-19 melanda Indonesia pada pertengahan tahun 2021. Insyaallah dalam waktu dekat ia akan memasuki tahun terakhir dengan harapan semoga cepat di wisuda dan dapat membahagiakan kedua orang tua dan keluarga.



Mawaddah Sri Kharisma, Lahir di Batusangkar, pada tanggal 12 Mei 2000. Anak Ketiga dari Tiga Bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Khaidir dan Ibu Aidarnis. Dengan Riwayat Pendidikan pertama yaitu di SD 10 Sungai Sapih namun pindah dan menamatkan sekolah dasar pada tahun 2012 di SD 30 Air Dingin, lalu melanjutkan sekolah kejenjang berikutnya di SMP Negeri 16 Padang dan tamat pada tahun 2015. selanjutnya melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang dan lulus pada tahun 2018. Sekarang ia adalah salah satu mahasiswi dari IAIN Bukittinggi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ekonomi Islam.



Hanifa Humaira. Dilahirkan di Baso, 05 Mei 1999, merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Jetrimal dan Nurmi. Penulis merupakan kebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis tinggal di Jorong 100 Janjang, Kenagarian Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penulis adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 02 V Suku Bawah Tamat Tahun 2012, Madrasah

Tsanawiyah Negeri (MTsN) IV Angkat Candung Tamat Tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Ampek Angkek Tamat Tahun 2018, dan saat ini merupakan mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Islam yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Masuk tahun 2018. Di IAIN Bukittinggi ini penulis mengambil prodi Ekonomi Islam yang mana merupakan salah satu prodi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



DEVITA SARI SIREGAR. Lahir di Telaga Suka, 13 Agustus 1999, Anak pertama dari dua bersaudara. Anak dari pasangan Ikhwan Arsyad Siregar dan Erlyana Rambe. Penulis tinggal di Padang Sidimpuan, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kelurahan Tano Bato, Provinsi Sumatera Utara. Memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2007 di SDN 115461 Telaga Suka, pada tahun 2012 menyelesaikan sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP

Negeri 04 Kota Padang Sidimpuan. Pada tahun 2015 menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAN 1 Kota Padang Sidimpuan, Pada tahun 2018 menyelesaikan pendidikan di MAN1 Kota Padang Sidimpuan. Melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat. Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Program Study Ekonomi Islam.



Niko Hendrawan. Lahir di Pasaman Barat, 15 Juni 1999. Niko merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Harapan dan Hubbi. Pendidikan yang telah diselesaikan adalah SD Negeri 17 Koto Balingka tamat tahun 2012, SMP Negeri 01 Ranah Batahan tamat pada tahun 2015, SMA Negeri 01 Ranah Batahan tamat pada tahun 2018, dan saat ini merupakan mahasiswa di salah satu Perguruan Tinggi Negeri yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program studi Ekonomi Islam. Pada pertengahan tahun 2021 ia diamanahkan sebagai Ketua Kelompok 53 Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) dan berhasil mengarahkan anggota kelompok untuk dapat menyusun buku ini.



Leyly Gusmia. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang akrab dipanggil dengan sebutan Mia. Dilahirkan di Lubuk Basung tanggal 24 Agustus tahun 2000 atas pasangan Bapak Martius dan Ibu Mardianis. Memulai pendidikan taman kanak-kanak di TK Muhammadiyah Aisyah yang terdapat di Kampung Tengah, dilanjut dengan pendidikan sekolah dasar di SDN 04 Sikabu. Menyambung tingkat pertama di SMP N 3 Lubuk Basung dan tingkat menengah atas di SMK N 1 Lubuk Basung. Saat ini melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.



Idul Saputra, Pria kelahiran Sorik, 23 Januari 2000 merupakan anak nagari Panti yang kini sedang menempuh pendidikan di IAIN Bukittinggi pada program studi Ekonomi Islam. Ia sebelumnya telah menyelesaikan pendidikan di SD 13 Bahagia Panti, MTsN Panti dan MAN 1 Pasaman. Pria berkacamata ini lahir dari pasangan Arpan Saleh dan Nurlian. Ia menjadi anak ke-2 dari 8 bersaudara. Mahasiswa frendly ini dapat dihubungi melalui kontak Wa 083182013902 atau lewat akun media sosialnya Ig:

@Idoelsapoetra dan Fb: Idul Saputra.



Fakhri Zakiy Aurakhmah Witra, Lahir di Nagari Cupak, 29 Mei 2000. Biasanya ia disapa Fakhri atau Fariz. Pada umur 5 tahun ia menempuh pendidikannya di TK Islam Bima Insan Kamil. Lalu setelah itu melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 12 Cupak. Setelah 6 tahun lamanya, ia melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Gunung Talang selama 3 tahun, yang kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1

Gunung Talang dengan jurusan Ilmu Pendidikan Sosial (IPS) hingga lanjut pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dengan Prodi/Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



Abdul Rahim Fikri, anak laki-laki dari bapak Deswan dan ibu Jasmaniar biasa dipanggil Abdul, Lahir di Malalak, 01 Juni 1999. Beliau mengawal pendidikannya di sekolah dasar ke SDN 07 Sigiran selama enam tahun lamanya. Setelah itu, beliau menuntut ilmu di PonPes Madinatul Munawwarah selama 6 tahun. Dan sekarang beliau adalah Mahasiswa Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.



Nanda Kevin Erlangga, yang biasa dipanggil dengan sapaan Kevin lahir di kota Surabaya pada tanggal 22 Maret kelahiran tahun 2000. Merupakan anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Supriadi dan Lenny Herawati. Dalam perjalanan pendidikannya ia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Kaliasin 3 Surabaya selama 6 tahun kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 8 Surabaya selama 3 tahun dan diteruskan melanjutkan pendidikan ke SMA Negeri 19

Surabaya yang lulus pada tahun 2018 yang mana pada saat ini ia masih melanjutkan pendidikannya pada program studi Ekonomi Islam dengan tingkat semester 6 yang ditempuhnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi. Dalam perjalanannya pada saat menempuh pendidikan S1, ia banyak mengikuti pelatihan dan organisasi baik dalam dan luar kampus yang bergerak dalam bidang relawan dan kemanusiaan.



Ririn Safitri, lahir di Pasaman Barat Ujunggading, pada tanggal 02 November 1999. Dan biasanya beliau disapa dengan panggilan Ririn. Ia merupakan anak dari pasangan Firdaus dan Irmanelly, ia merupakan anak ke 3 dari 7 orang bersaudara. Pada usia 5 tahun ia memulai Pendidikan nya di TK Pertiwi, lalu ia melanjutkan sekolah dasar (SD) hingga kelas 5 di SDN 01 Lembah Melintang dan melanjutkannya di kelas 6 SDN yang

berbeda yaitu SDN 11 Lembah Melintang, setelah beliau tamat, pada umur 6 tahun ia melanjutkan sekolah di Mts Ittihadulmubaglhin selama 3 tahun, setelah itu melanjutkan sekolah ke SMA Negeri 1 Lembah Melintang, dan sekarang ia merupakan Mahasiswa IAIN Bukittinggi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Program studi Ekonomi Islam.



Upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah. Namun dalam realitanya tanggung jawab tersebut membutuhkan dukungan dan peran serta anak bangsa untuk menggairahkan dan menggerakkan aktivitas perekonomian dalam Negeri guna tercapainya taraf perekonomian masyarakat yang baik dan stabil. Di sinilah signifikansi buku ini hadir di tangan pembaca memaparkan fenomena anak bangsa yang berjuang menggerakkan roda perekonomian agar tetap menggeliat dan tidak stagnan.

Buku ini merupakan sebuah kumpulan karya tulis ilmiah atau bunga rampai berupa artikel yang bertemakan Perekonomian Masyarakat dan berbagai persoalannya, baik dalam skala pandemi atau kondisi ekonomi secara umum. Bunga rampai ini dihasilkan dalam proses pengabdian yang dilaksanakan oleh mahasiswa program studi Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

GELIAT EKONOMI ANAK BANGSA : Meretas Asa Menggapai Mimpi

